Andi Asoka
Wannofri Samry
Zaiyardam Zubir
Zulqayyim

SAWAHLUNTO DULU, KINI, DAN ESOK

Menjadi Kota Wisata Tambang yang Berbudaya

SAWAHLUNTO
DULU, KINI, DAN ESOK
(Menjadi Kota Wisata Tambang yang Berbudaya)

Andi Asoka
Wannofri Samry
Zaiyardam Zubir
Zulqayyim

Lembaga Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi
Universitas Andalas

Sawahlunto Dulu, Kini, dan Esok
Menjadi Kota Wisata Tambang yang Berbudaya

Penulis : Andi Asoka
Wannofri Samry
Zaiyardam Zubir
Zulqayyim

Tata Letak : Multimedia LPTIK
Sampul : Multimedia LPTIK

ISBN : 978-602-5539-10-7

Diterbitkan oleh

Lembaga Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (LPTIK) Universitas Andalas Lantai Dasar Gedung Perpustakaan Pusat Kampus Universitas Andalas Jl. Dr. Mohammad Hatta Limau Manis, Padang, Sumatera Barat, Indonesia
Web: www. lptik.unand.ac.id
Telp. 0751-775827 - 777049
Email: sekretariat_lptik@unand.ac.id

Hak cipta dilindungi Undang-Undang.
Dilarang memperbanyak sebagian maupun seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari penerbit kecuali demi tujuan resensi atau kajian ilmiah yang bersifat nonkomersial.

KATA SAMBUTAN
WALIKOTA SAWAHLUNTO

Kehadiran buku Sawahlunto Dulu, Kini, dan Esok Menjadi Kota Wisata Tambang yang Berbudaya edisi revisi ini telah lama kita nantikan. Harapan itu kiranya tidaklah berlebihan mengingat buku ini berkisah tentang proses sejarah yang telah dilalui oleh masyarakat dan kota Sawahlunto sejak masa penjajahan hingga masa sekarang. Sehingga dengan itu dapat pula dikenali bagaimana identitas kota Sawahlunto.

Bagi para orang tua, yang hidup dalam tiga zaman dan ikut terlibat dalam proses sejarahnya, akan selalu dapat mengingat dan menceritakan mengenai pengalaman mereka akan Sawahlunto. Akan tetapi, bagi generasi muda sudah tentu tidak banyak yang dapat mereka ketahui. Sementara generasi muda tersebutlah yang diharapkan dapat mewujudkan visi kota Sawahlunto tahun 2020 sebagai Kota Wisata Tambang yang Berbudaya.

Bukan hanya itu saja, untuk mewujudkan visi tersebut pada saat ini Sawahlunto juga telah berada dalam wacana Warisan Budaya Dunia sebagai *World (Herritage*) UNESCO. Pemerintah kota Sawahlunto beserta masyarakatnya saat ini berusaha untuk memenuhi tujuan dan impian tersebut.

Oleh karena itu buku Sawahlunto Dulu, Kini, dan Esok Menjadi Kota Wisata Tambang yang Berbudaya edisi revisi, kiranya dapat menjadi bahan bacaan bagi kalangan pelajar di kota Sawahlunto dan menjadi bahan rujukan pembelajaran bagi guru-guru sejarah yang ada di kota Sawahlunto. Bukan hanya itu saja, buku ini juga diharapkan akan menjadi salah satu bahan reverensi bagi pemerintah kota Sawahlunto untuk mewujudkan kota Sawahlunto menjadi *World Herritage.*

Lebih dari itu, bagi pemerintah kota sendiri kehadiran buku ini menjadi penting karena dengan mempelajari sejarah kota Sawahlunto, dapat dipetik hikmah yang dapat bermanfaat dalam merumuskan berbagai kebijakan yang berpihak untuk kepentingan masyarakat. Selanjutnya, hal tersebut diharapakan memberi inspirasi bagi kita untuk memajukan kota Sawahlunto yang berbasis kepada ekonomi kerakyatan.

Terakhir kami mengucapkan terimakasih kepada penulis dan berbagai pihak yang terlibat dalam penelitian dan penulisan buku ini.

Sawahlunto, 25 November 2016

Ali Yusuf S.Pt

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, senantiasa terucap atas berkat dan rahmat-Nya jualah kami dapat menyelesaikan revisi dari buku **Sawahlunto Dulu, Kini, dan Esok Menjadi Kota Wisata Tambang yang Berbudaya**. Revisi ini wujud berkat bantuan berbagai pihak, untuk itu pantaslah kiranya ucapan terimakasih kami ucapkan kepada: Bapak Ali Yusuf S.Pt selaku Walikota Sawahlunto dan pucuk pimpinan Kota Tambang yang Berbudaya, Ibu Yendra Fitri ST., MT selaku Kepala Kantor Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman Kota Sawahlunto, Bung Edy Utama yang telah banyak memberikan masukan dalam diskusi dan berbagai bahan yang terkait dan menunjang dalam revisi buku ini.

Teman-teman di Kantor Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman, Udlil Iman Zul, ST., Amitri Yulia S.S., Yuristya Mega S.S., Dedi Yolson S.S., Rahmat Gino Sea Games ST., Rosita Cahyani S.Sos., Nola Lestari., Drs. Taswan yang secara maraton dan tanpa kenal lelah telah membantu kami.Selanjutnya, ucapan terimakasih tidak lupa kami ucapkan kepada semua pihak yang telah membantu kami dalam melakukan penelitian, penyusunan draft dan teman diskusi selama penelitian, diskusi terbatas, yang secara terperinci tidak mungkin kami tuliskan satu per satu.

Adapun susunan revisi buku ini sama dengan susunan pada buku pertama. Pada sub bab edisi revisi ini terdapat penambahan-penambahan data berguna sebagai penambahan informasi bagi pembaca. Data tambahan yang terdapat pada edisi revisi merupakan penambahan terkait dengan kondisi dan perkembangan Kota Sawahlunto pada saat ini. Selain itu pada edisi revisi ini penambahan data berupa foto yang terdapat didalam konteks teks bermaksud untuk memberikan gambaran penunjang bagi teks yang terdapat didalam buku, selain itu juga dimaksudkan untuk menjadikan tampilan isi buku lebih menarik bagi pembaca.

Akhirnya, kami sangat yakin bahwa kebenaran yang sesungguhnya datangnya hanya dari Tuhan YME dan semua kesalahan kami murni dari kekhilafan kami. Pada kesempatan ini kami juga mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak demi sempurnanya penulisan laporan ini.

Salam

Tim Penulis

DAFTAR ISI

Kata Sambutan .....
Prakata.....
Daftar Isi.....
BAB I PENDAHULUAN 1

A. Pengantar 1
B. Geografis dan Topografis Kota Sawahlunto..... 6
C. Nilai- nilai Hari Jadi Kota Sawahlunto..... 20

BAB II PERTUMBUHAN WILAYAH DAN PERKEMBANGAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN 31

A. Pengantar 31
B. Pembangunan Infrastruktur Kota..... 35

BAB III CIKAL BAKAL KOTA SAWAHLUNTO..... 45

A. PemahamanKonseptual Tentang Kota..... 45
B. Asal Muasal Kota..... 50
C. Pembebasan Tanah Tambang Batu Bara Ombilin 59
D. Pembangunan Jalur Kereta Api..... 77
E. Penambangan Batubara..... 89

F. Masalah Upah Buruh dan Kondisi Ketergantungan 97
G. Masalah Hak Azazi Buruh 113
H. Gejolak Politik Tahun 1920-an 119
I. Keterlibatan Buruh dalam Peristiwa Silungkang 129

BAB IV SAWAHLUNTO MASA REVOLUSI DAN ORDE LAMA 157
A. Sawahlunto Masa Pendudukan Jepang .. 157
B. Proklamasi dan Mempertahankan Kemerdekaan 175
C. Sawahlunto Pasca PRRI 186

BAB V SAWAHLUNTO 1965-1998 191
A. Transisi Politik dan Perkembangan Pemerintahan 191
B. Pluralisme Budaya Masyarakat 204
C. Dinamika Ekonomi Penduduk 209

BAB VI SAWAHLUTO ERA REFORMASI 1998-2004 217
A. Otonomi Daerah dan Wisata Kota Tambang Berbudaya 217
B. Tambang Rakyat Sebagai Dinamika Kota Tambang Sawahlunto 232

BAB VII NUANSA KOTA BUDAYA SAWAHLUNTO 259
A. Sawahlunto Paska Tambang Batubara 263
B. Sawahlunto Kota Kreatif 274
C. SawahluntoKota Festival..... 279

BAB VIII SAWAHLUNTO: KOTA TAMBANG MENJADI KOTA WISATA TAMBANG BERBUDAYA..... 285
A. Pengantar..... 285
B. Jejak Kepariwisataan Sawahlunto 287
C. Kota Tambang sampai Kota Wisata Tambang Berbudaya 290
D. Menjadi Kota Wisata Tambang Berbudaya 292
E. Pariwisata Tekan Angka Kemiskinan di Sawahlunto 321
F. Wisata Kota Tua, Kota Warisan..... 328

BAB IX EPILOG: DARI BATANG LUNTO KE HILIR : MENUJU KOTA WISATA 2020 ... 339

Daftar Pustaka..... 351
Glosarium 369
Lampiran 379

BAB I
PENDAHULUAN

A. Pengantar

Siapa pun yang berkunjung ke Sawahlunto untuk pertama kali dan kemudian menginap di sana, maka pada pagi hari, tepat pada pukul 07:30 WIB atau pada sore hari, tepat pada pukul 15.30 WIB, tentu terkejut karena tiba-tiba mendengar raungan bunyi serine yang membahana ke seantero kota "lama" yang dikelilingi oleh bukit itu. Bunyi serine itu bukanlah berasal dari mobil patroli Polisi Dalmas (pengendalian massa) yang tengah menghentikan demonstrasi buruh dan bukan pula berasal dari mobil pemadam kebakaran yang memadamkan kebakaran di lokasi pertambangan liar batu bara. Akan tetapi, bunyi serine itu berasal dari puncak salah satu dari tiga silo tambang batu bara. Bunyi serine itu pertanda waktu dimulai atau berakhirnya aktivitas buruh dan pegawai Perusahaan Tambang-batu bara Bukit Asam - Unit Pertambangan Ombilin (PTBA UPO) Sawahlunto. Bagi warga kota tambang, itu sudah tentu sudah menjadi hal yang biasa, karena sudah berlangsung sejak pertengahan tahun 1930. Bahkan, mungkin sudah menjadi pertanda waktu bagi mereka dan menyatu dalam keseharian mereka. Bunyi serine itu menjadi salah satu karakteristik Sawahlunto, sebagai satu-satunya kota tambang yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat.

Kota Sawahlunto dapat dikategorikan sebagai kota dataran tinggi, karena terletak di daerah pegunungan yang merupakan rangkaian dari pergunungan Bukit Barisan, yang membujur sepanjang Pulau Sumatera. Berdasarkan sejarah perkembangannya, maka wilayah kota itu dapat dibagi atas dua: yaitu kota "lama" dan kota "baru". Kota "lama" yang luasnya 577,7 ha terletak di sebuah lembah yang dikelilingi oleh bukit-bukit, sehingga berbentuk bagaikan sebuah "kuali" besar. Oleh karena itu kondisi geografisnya yang demikian, maka warganya dan juga masyarakat Sumatera Barat/Minangkabau sering juga menyebutnya dengan "Kota Kuali". Sementara kota "baru" merupakan kota "lama" yang dimekarkan pada tahun 1990 dan memiliki luas 27.347,70 ha. Oleh karena itu kondisi georafisnya pun sudah berubah. Tidak lagi berbentuk "kuali", tetapi sudah terdiri dari banyak bukit dan lembah, sehingga nama "Kota Kuali" itu pun tidak lagi cocok disebutkan kepadanya. Sungguhpun demikian aktivitas perkotaan masih tetap dominan dilakukan warganya di kota "lama", seperti perkantoran PTBA-UPO, perperbankan, pasar, pendidikan, fasilitas umum, dan sebagian perkantoran pemerintah. Pada sisi lain, pemekaran itu pun pada akhirnya telah menampilkan wajah desa/nagari dalam kota Sawahlunto, karena sebagian besar wilayah yang dirangkul itu merupakan nagari-nagari yang berada di sekitarnya yang masih kuat dengan susana kedesaannya. Melihat realitas yang demikian itu, maka pemerintah kota Sawahlunto memodifikasi pembagian wilayah administrasinya, yaitu pemerintahannya yang terendah terdiri dari kelurahan dan nagari.

Kota Sawahlunto terletak sekitar 95 km sebelah Timur kota Padang, ibukota Privinsi Sumatera Barat dan dapat dicapai melalui perjalanan darat (jalan raya) dalam waktu sekitar 2-2,5 jam. Relatif lamanya waktu tempuh itu disebabkan karena daerah yang dilalui terdiri dari perbukitan sehingga jalannya memiliki banyak tanjakan dan tikungan. Selain itu, kedua kota itu juga dihubungkan dengan jalur kereta api. Berbeda dengan jalan raya, jalur kereta api itu dibangun melingkar ke arah Utara untuk menghindari kawasan pegunungan "Sitinjau Laut" yang terjal. Jalur kereta api itu melalui kota Padangpanjang terlebih dahulu, lalu diteruskan ke Solok, tidak seperti jalan raya yang dibangun langsung dari Padang ke Solok melalui Sitinjau Laut. Kemudian, dari Solok terus ke Muarakalaban dan dari sana berbelok ke kiri untuk selanjutnya sampai ke Sawahlunto. Sehingga, jalur kereta api itu jauh lebih panjang dari pada jalan raya, yaitu sekitar 155,5 km dengan waktu tempuh sekitar 5,5 jam.

Sungguhpun demikian pembangunan jalur kereta api itu merupakan alternatif terbaik untuk membawa hasil tambang batu bara dari Sawahlunto ke Pelabuhan Telukbayur (Emmahaven) di Padang. Kedua pembangunan prasarana transportasi itu, jalur kereta api dan Pelabuhan Teluk Bayur, yang dilakukan secara bersamaan pada penghujung abad ke-19 itu, berkaitan erat dengan pertambangan batu bara di Sawahlunto. Keduanya, pelabuhan Teluk Bayur dan jalur kereta api dapat dikatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pertambangan batu bara di Sawahlunto, sehingga dapat pula disebut sebagai tiga serangkai.

Untuk mengekspor hasil tambang batu bara di Sawahlunto diperlukan sebuah pelabuhan laut. Oleh karena tambang itu terletak di daerah pedalaman, maka untuk membawanya diperlukan prasarana transportasi. Pembangunan pelabuhan laut "Emma Haven" di pantai Barat Sumatera dan jalur kereta api dari Sawahlunto ke sana, yang sekarang lebih dikenal dengan nama Pelabuhan Teluk Bayur, Padang, merupakan alternatif yang terbaik pada waktu itu. Selanjutnya kedua prasarana transportasi itulah yang telah membuka keterisolasian daerah pertambangan di Sawahlunto. Jadi, semua itu tidak mungkin diadakan jika tidak ditemukannya deposit batu bara di bumi Sawahlunto.

Pada sisi lain, adanya batu bara itu pun menjadi penyebab kota Sawahlunto muncul, tumbuh, dan berkembang hingga sekarang. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa keberadaan kota Sawahlunto sepanjang sejarahnya tidak dapat dipisahkan dari usaha pertambangan batu bara. Sehingga, tidaklah mengherankan jika orang juga lebih mengenalnya sebagai "Kota Tambang" karena berkaitan dengan aktivitas sebagian besar warganya dalam dunia pertambangan, yaitu tambang batu bara. Atau, pertambangan batu bara itulah yang menghidupkan, baik secara langsung atau tidak langsung, semua warganya. Selain itu, kota itu juga diberi gelar dengan "Kota Arang" karena warna hitam batu bara yang bagaikan arang. Istilah lain menyebutkan pula bahwa batu bara sebagai "emas hitam" karena nilai ekonomisnya yang begitu tinggi karena sangat dibutuhkan pada masanya.

Sekarang, setelah batu bara tidak dapat dijadikan primadona dalam dunia industri karena sumber bahan bakar sebagaian besar sudah digantikan oleh minyak bumi, gas, nuklir, dan sebagainya. Bagaimanapun juga, hal itu serta merta memberi pengaruh yang signifikan bagai keberadaan kota Sawahlunto. Untuk itulah pada tahun 2001 dicanangkan visi baru kota Sawahlunto, yaitu *Kota Wisata Tambang yang Berbudaya*. Diharapkan visi itu dapat terwujud pada tahun 2020 nanti. Dapat dikatakan bahwa perumusan visi itu sangat didasarkan atas kesadaran sejarah masa lalu, kondisi sekarang, dan peluang untuk masa depan. Meskipun batu bara tidak dapat diharapkan sebagai penyumbang devisa utama, tetapi alternatif lain sudah didapatkan untuk menghidupkan kota dan warganya. Alternatif itu kiranya tidak berlebihan karena potensi yang dimiliki kota Sawahlunto cukup memadai untuk itu. Bukan saja karena banyaknya peninggalan yang berhubungan dengan tambang batu bara, tetapi hal itu juga didukung oleh potensi alam dan budayanya yang khas. Dalam konteks inilah, agaknya tepat sekali diberi judul buku ini yaitu **"Sawahlunto Dulu, Kini, dan Esok Menjadi Kota Wisata Tambang yang Berbudaya".**

Buku ini memaparkan tentang perjalanan sejarah yang telah dilalui oleh kota Sawahlunto dan warganya sejak dari mulai dibukanya tambang batu bara sampai sekarang. Selanjutnya juga diungkapkan potensinya, baik potensi sejarah, sosial-budaya, dan maupun potensi alamnya yang dapat dijadikan andalan objek wisata kota Sawahlunto. Selain itu, tidaklah pula berlebihan jika dipaparkan pula beberapa kendala yang tengah dan

mungkin akan dihadapi oleh para pengambil kebijakan khususnya dan masyarakat kota Sawahlunto umumnya dalam rangka menyongsong terwujudnya visi kota itu pada tahun 2020 nanti.

B. Geografis dan Topografis Kota Sawahlunto

Kota Sawahlunto terletak sekitar 95 km dari Padang, ibukota Provinsi Sumatera Barat dan secara astronomis berada pada 0'.34 - 0'.46 Lintang Selatan dan 100'.41 - 100'.49 Bujur Timur. Hal itu menunjukkan bahwa Sawahlunto terletak di daerah dataran tinggi pada bagian tengah Bukit Barisan, pegunungan yang membujur sepanjang Pulau Sumatera. Letaknya berada pada ketinggian antara 250-650 meter di atas permukaan laut. Sebagai kota yang terletak di daerah tropis, Sawahlunto memiliki suhu minimum 22,5' C dan maksimum 27,5' C dengan curah hujan rata-rata pertahun 1.072 mm.[1]

Kota Sawahlunto dapat dibagi atas dua bagian, yaitu "kota lama" dan "kota baru", yang merupakan pemekaran dari "kota lama". "Kota lama" yang memiliki luas 779,6 Ha mulai terbentuk seiring dengan pembukaan areal tambang batu bara di kawasan itu.[2] Oleh karena itu

[1] Pemerintah Kota Sawahlunto, *Sawahlunto dalam Angka Tahun 1997, Bab I Geografis*. (Sawahlunto: Pemko Sawahlunto, 1998), hal. 2.

[2] Luas daerah Kotamadya Sawahlunto berdasarkan kepada Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat No. 145/GSB/1970 tanggal 18 September 1970, yang merujuk kepada Undang-undang No. 8/156 yang termaktub dalam Lembaran Negara no. 19 tahun 1959. Sebelumnya luas yang sama juga sudah ditetapkan oleh pemerintah kolonial Belanda yang terdapat dalam Staatsblad van Nederlandsch Indie No. 400 tahun 1929.

seyogianya "kota lama" tumbuh dan berkembang menjadi pusat pemerintahan, perekonomian, pendidikan dan sebagainya, selain sebagai pusat administrasi pertambangan batu bara. "Kota lama" Sawahlunto itu berada dalam sebuah lembah yang dikelilingi oleh bukit-bukit. Secara administrasi pemerintahan "kota lama" itu berada dalam wilayah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung dengan batas sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatas dengan Nagari Kolok dan Sijantang (Kacamatan Talawi).
2. Sebelah Timur dan Barat berbatas dengan Nagari Kubang (Kecamatan Sawahlunto).
3. Sebelah Selatan berbatas dengan Nagari Kubang dan Nagari Silungkang (Kecamatan Sawahlunto).[3]

Sementara itu, "kota baru" merupakan "kota lama" yang dimekarkan pada tahun 1990 dengan luas mencapai 27.347,7 Ha. Pemekaran itu dilakukan dengan merangkul nagari-nagari yang berada di sekitarnya.[4] Sekarang kota Sawahlunto memiliki batas:

1. Sebelah Utara dengan Kabupaten Tanah Datar.
2. Sebelah Selatan dan Barat dengan Kabupaten Solok.
3. Sebelah Timur dengan Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung.

---

[3] Firman Djalal dan kawan-kawan, S*ejarah Ringkas Pertumbuhan Kotamadya Sawahlunto, Sumatera Barat* (Sawahlunto: Panitia HUT ke-54 Kotamadya Sawahlunto, 1972), hal. 28.

[4] Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 dan tercatat dalam Lembaran Negara Nomor 99 Tahun 1990 dan Tambahan Nomor 3423.

Wilayah kota Sawahlunto yang luas itu terbentang dari Utara ke Selatan. Bagian Timur dan Selatan relatif curam dengan kemiringan lebih dari 40%, sedangkan bagian Utara bergelombang dan relatif datar. Kondisi geografisnya yang demikian menyebabkan banyaknya daerah tertutup, sehingga hanya wilayah yang dapat dikembangkan menjadi kawasan perkotaan relatif terbatas. Topografis Sawahlunto yang berbukit dan berlembah itu dan juga memiliki banyak patahan-patahan tanah sudah barang tentu tidak kondusif untuk dijadikan areal pembangunan. Oleh karena sedikitnya daerah dataran yang dapat dijadikan areal perkantoran dan perumahan serta fasilitas umumnya, maka banyak kantor dan rumah penduduk yang dibangun di lereng-lereng bukit.

Bahkan, kawasan perkantoran terpencar mengikuti alur jalan raya yang membentang dan melintasi perbukitan dari "kota lama" di sebelah Selatan sampai ke daerah Sungai Durian di sebelah Utara. Bagaimanapun juga kota "lama" tetap saja menjadi pusat berbagai kegiatan pemerintahan, perkonomian, sosial, dan budaya masyarakat Sawahlunto karena di sekitar itulah terdapat pendataran dan perbukitan landai. Sedangkan daerah Talawi juga mempunyai potensi yang baik untuk pengembangan kota karena memiliki pendataran yang relative. Sungguhpun demikian sebagian besar daerah Sawahlunto terdiri dari perbukitan terjal.[5]

[5] Lembaga Pengabdian pada Masyarakat ITB, *Rencana Kota Wisata Tambang Sawahlunto*, *Buku 1* Bandung: LPM ITB, 2001, hal. 17.

Wilayah kota Sawahlunto dialiri oleh 5 (lima) buah anak sungai yaitu Batang Ombilin, Batang Malakutan, Batang Lunto, Batang Lasi, dan Batang Sumpahan. Di antara kelima anak sungai itu, maka Batang Ombilin merupakan yang terbesar dan keempat anak sungai lainnya itu bermuara ke sungai itu.[6] Batang Ombilin berhulu di Danau Singkarak mengalir dan memotong wilayah Sawahlunto bagian Utara, mulai dari Desa Talawi Mudiak sampai ke Desa Rantih di sebelah Tenggara.

Batang Malakutan yang berada di sebelah Utara wilayah Sawahlunto mengalir dari arah Barat melalui Desa Talago Gunuang, Desa Kolok Mudiak, Desa Kolok Tuo terus ke arah Utara kemudian bertemu dengan Batang Ombilin. Batang Malakutan itu berhulu di Desa Siberambang Kecamatan X Koto Diateh Kabupaten Solok.

Pada bagian Selatan wilayah Sawahlunto mengalir Batang Sumpahan, Batang Lunto, dan Batang Lasi. Batang Sumpahan berhulu di Kelurahan Sapan kemudian mengalir ke arah Timur dan bertemu dengan Batang Lunto sebelum bermuara ke Batang Ombilin. Sebelum bertemu dengan Batang Sumpahan, Batang Lunto yang berhulu di Desa Lumindai di sebelah Barat terlebih dahulu mengairi Nagari Lunto dan kemudian mengalir membelah "kota lama" Sawahlunto. Sementara Batang Lasi yang berhulu di Desa Sungai Lasi IX Koto Kabupaten Solok menelusuri lembah yang juga ditelusuri oleh jalan raya dari arah Solok (sebelah Barat) terus ke Sijunjung (sebelah Timur) untuk kemudian

[6]Lihat Peta **A**

bertemu dengan Batang Ombilin di daerah Kabupaten Sijunjung.

Kelima sungai itu memiliki pola aliran sungai yang berbentuk dentrik atau bulu burung. Maksudnya, anak-anak sungai mengalir pada lembah perbukitan menuju sungai utama, yaitu Batang Ombilin. Selanjutnya Batang Ombilin menjadi Batang Kuantan yang merupakan anak sungai besar Indragiri yang bermuara di Pantai Timur Sumatera Bagian Tengah.

Kelima anak sungai itu yang mengalir melalui kota Sawahlunto itu dimanfaatkan untuk pengairan untuk areal pertanian, sumber air bersih yang diolah oleh PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum), dan juga dimanfaatkan oleh PTBA–UPO (Perusahaan Tambang Bukit Asam-Unit Produksi Ombilin, Persero) untuk mencuci batu bara.

Daerah kota "baru" Sawahlunto terletak dalam cekungan batuan pra-tersier Ombilin yang seolah berbentuk belah ketupat panjang yang ujungnya bulat. Daerahnya dengan 27.347,70 Ha itu memiliki lebar 22,5 Km dan panjang 47 Km. Cekungan batuan itu diperkirakan dalamnya sampai 2 Km dan diisi oleh lapisan batuan yang lebih muda dan dapat dibedakan atas formasi Brani, Sangkarewang, Sawahlunto, Sawahtambang, dan Ombilin. Formasi yang paling muda adalah formasi Ombilin yang berusia lebih dari 2 juta tahun yang lalu, sedangkan kota "lama" Sawahlunto berada pada fomasi Sawahlunto berusia sekitar 40-60 juta tahun yang lalu. Sementara pada ahli berpendapat bahwa sekitar kepulauan Nusantara terbentuk sekitar 4 juta tahun yang lalu, sehingga dapat dikatakan bahwa ketika formasi Sawahlunto terbentuk

belum ada Pulau Sumatera seperti yang kita kenal sekarang.[7] Adapun batu bara tersimpan pada cekungan Ombilin dan telah ditambang sebanyak sekitar 30 juta ton dan tersisa sekitar 132 juta ton lagi.[8] Oleh karena itu tidak berlebihan pula jika nama tambang batu bara itu dirujuk kepada Ombilin karena di cekungannya itulah tersimpan "emas hitam" batu bara.

Cekungan Ombilin meliputi daerah yang memiliki cadangan batu bara adalah Parambahan, Sikalang, Sungai Durian, Sigaluik, Padangsibusuak, Lurahgadang, Tanjungampalu. Ketujuh daerah itu terletak di sekitar Sawahlunto dengan jarak seperti yang terdapat dalam table di bawah ini.

Tabel 1
Nama daerah dan Jarak dengan Sawahlunto

No.	Nama Daerah	Jarak dengan Sawahlunto
1.	Parambahan	10 km
2.	Sikalang	5 km
3.	Sungai Durian	7 km
4.	Padang Sibusuak	20 km
5.	Lurah Gadang	6 km
6.	Tanjung Ampalu	25 km

Secara keseluruhan, daerah yang mengandung batu bara berada di sekitar Batang Ombilin dalam posisi mengitari kota "lama" Sawahlunto. Kondisi geografis yang

[7] Lembaga Pengabdian pada Masyarakat ITB, *Op. Cit., hal. 16.*

[8] *Ibid.*

demikian memperlihatkan bahwa pilihan pemerintah Hindia Belanda untuk menjadikan Sawahlunto sebagai pusat pertambangan batu bara bukanlah tanpa alasan yang jelas. Selain memiliki daerah yang relatif datar juga mudah menjangkau daerah produsen batu bara.[9]

Ditinjau dari sudut topografisnya, batu bara Ombilin terletak pada lapisan tanah yang berbeda-beda. Artinya, pada daerah tertentu, batu bara terdapat di permukaan tanah sehingga dapat terlihat oleh pandangan mata. Letak batu bara yang tampak dari permukaan tanah dapat dibaca dari laporan Beckhoven, seorang pendeta Belanda. Ia menceritakan tentang kunjungannya ke Sawahlunto dan menuliskan bahwa daerah itu memiliki kandungan batu bara yang banyak. Bahkan, di tempat-tempat tertentu batu bara dapat dilihat secara kasat mata.[10]

Akan tetapi, pada daerah lain batu bara berada jauh di perut bumi. Pada satu sisi batu bara yang seperti itu mempunyai kualitas yang baik. Pada sisi lain, hal itu menimbulkan kesulitan yang tinggi untuk menambangnya. Salah satu daerah yang memiliki lapisan batu bara yang terletak jauh di bawah permukaan tanah adalah di Sungai Durian. Pada daerah itu batu bara masih ditemukan pada kedalaman 217 meter.[11]

Masalah lapisan batu bara ini menjadi tipikal tersendiri pada tambang batu bara Ombilin. Dari areal

---

[9] Lihat lampiran 2, rencana pembukaan tambang batu bara Ombilin yang dirumuskan Greve.

[10] J. van Beckhoven *op. cit.* , hal. 65.

[11] R. D. M. Verbeek, *op. cit.* , hal. 87.

pertambangan yang tersebar diberbagai tempat, maka setiap wilayah penambangan batu bara memiliki tingkat kedalaman yang berbeda-beda. R.D.M. Verbeek, dalam laporannya tentang letak batu bara Ombilin melaporkan bahwa ; sebagai gambaran tentang letak batu bara Ombilin, maka batu bara terletak pada lapisan yang tidak teratur.Ketidakteraturan ini sesungguhnya tidak baik, terutama ditinjau dari proses penambangan. Batu bara berada pada lapisan yang bertingkat-tingkat, sehingga menimbulkan tata letak yang tidak beraturan.[12]

Persoalan letak batu bara menjadi masalah tersendiri dalam pengelolaannya. Persoalan pokok yang akan dihadapi adalah tingkat kesulitan yang tinggi dalam penambangannya. Sebagai gambaran tentang letak batu bara Ombilin, laporan dari Verbeek akan terlihat tata letak batu bara Ombilin. Verbeek dalam laporannya memperkirakan secara lebih rinci tentang letak batu bara Ombilin dari permukaan tanah yaitu batu bara di Lunto (muara sungai lunto) lebih kurang 64 meter, Sungai Durian lebih kurang 217 meter, Lurah Gadang lebih kurang 22 meter, Muara Sungai Gadang 20 meter dan parambahan lebih kurang 2 meter.[13] Gambaran seperti ini memperlihatkan keragaman dari kedalaman batu bara di berbagai tempat di Sawah Lunto.

Untuk dapat lebih memahami daerah-daerah yang mengandung batu bara Ombilin ini, maka akan dijelaskan melalui sebuah gambar yang berbentuk sebuah *Baskom*.

---

[12] *Ibid.* , hal. 85.

[13] *Ibid.* , hal. 87.

Sebagai sebuah baskom, maka disekeliling baskom itu dibatasi oleh dinding-dinding yang terjal. Sebagai dasr dari sebuah baskom adalah Sawah Lunto. Pada kota ini sekaligus dijadikan sebagai pusat penambangan batu bara. Dinding-dinding pembatas kota Sawah Lunto itu pada umumnya berbentuk bukit-bukit yang terjal, sehingga berada pada daerah yang curam atau di dasar lembah.[14]

Melihat letak kota Sawah Lunto secara keseluruhan, sesungguhnya kota itu berada pada sebuah lembah. Namun demikian, pada beberapa tempat terdapat wilayah yang agak landai, terutama yang dilalui oleh Sungai Lunto. Di pinggiran sungai itulah terbentuknya pemukiman buruh tambang batu bara itu.[15]

Kota Sawah Lunto sebagai pusat penambangan terletak pada dasar lembah. Di sekeliling kota itu dibatasi oleh bukit-bukit terjal dan landai. Sebelah utara dibatasi oleh tanggul atau gang dari *kwarsporpier.* Berkat bantuan ini diakhiri lapisan curam yang mempunyai tingkat kemiringan 60º ke arah selatan. Arah selatan tingkat kemiringannya 45º. Semakin selatan semakin landai

[14] Henry T. Damste, *op. cit.* , hal. 10-11.

[15] Penduduk setempat menamakan kota Sawah Lunto sebagai kota kuali. Hal ini disebabkan kota Sawah Lunto itu berbentuk kuali (Baskom). Pemukiman penduduk terletak pada dasar kuali itu. Sementara itu, kota dikelilingi oleh bukit-bukit yang umumnya mengandung batu bara. Dapat dengan mudah dipahami, kalau pada Sawah Lunto batu bara terlihat dipermukaan tanah, sedangkan pada daerah lainnya jauh dibawah permukaan tanah, disebabkan karena terletak diatas bukit-bukit yang mengelilingi Sawah Lunto itu. R. D. M. Verbeek, *Ibid.* , hal. 80-81.

terutama menuju sungai Ombilin dengan tingkat kemiringannya antara 15º-20º. Selanjutnya ke selatan berada lapisan yang harizontal letaknya. Masih kearah selatan dari areal ladang batu bara, terdapat lapisan-lapisan yang cenderung miring ke timur laut menuju areal pertambangan Sungai Durian dengan tingkat kemiringan sekitar 25º-30º. Pada bagian selatannya sampai pada *Groenstenen*. Pada tempat ini, lapisan batu bara terdapat pada tebing yang terjal.[16]

Perkiraan yang jelas tentang lapisan batu bara Ombilin baru diketahui secara lebih rinci pada tahun 1868. Pengenalan ini berkat cacatatan *Geognostische* yang dibuat oleh seorang geolog Belanda yang bernama W.H. de Greve. Berdasarkan laporan yang dibiat oleh Greve itu, Diest kemudian merumuskan tentang lapisan batu-batuan dan letak kedalaman batu bara yang terdapat di Ombilin Sawah Lunto. Adapun rumusan yang dibuat oleh Diest itu ialah sebagai berikut ini :[17]

1. Lebih kurang 50 meter berselang-seling dari batu pasir, *Koollei* dan bantuan tanah liat.
2. 0,77 meter Batu bara.
3. 5,37 meter koollei.
4. 1,06 meter batu bara.
5. 50 meter lapisan berselang-seling batu pasir dll.
6. 1,97 meter-15 meter selang-seling batu pasir.

---

[16] P. van Diest, *De Kolenrijkdom der Padangsche Bovenlanden en de Mogelijkheid van Voordeelige Ontginning*. Amsterdam : C.F. Stemler, 1871, hal. 12.

[17] *Ibid.* , hal. 13.

7. 2,38 meter batu bara.

Laporan yang ditulis diatas pada pokoknya berdasarkan atas studi awal yang dilakukan Greve. Pokok bahasan dari studi yang dilakukan Greve itu adalah masalah lapisan batu bara Ombilin Sawah Lunto. Dari hasil penelitian awal, memberikan gambaran tentang keanekaragaman batu-batuan yang terdapat pada tambang batu bara Ombilin Sawahlunto. Pada setiap lapisan akan terdapat batu-batuan yang satu dengan lainnya berbeda-beda. Pada lapisan tertentu terdapat batu bara, namun lapisan lainnya diselingi oleh tanah liat dan pasir.[18]

Hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa daerah yang mengandung batu bara juga memiliki batu-batuan lainnya.[19] Pada daerah yang relatif dipermukaan, batu bara akan langsung kelihatan dengan pandangan mata. Sebaliknya, batu bara yang terdapat di perut bumi, pada lapisan atasnya ditemukan aneka ragam batu-batuan.

Telah dikemukakan bahwa batu bara Ombilin mempunyai beberapa lapisan. Lapisan itu biasa dinamakan dengan lapisan A, B dan C. Lapisan A terletak paling atas dari permukaan tanah, lapisan B berada dibawah lapisan A, sedangkan lapisan C terletak paling dalam dari permukaan tanah. Setiap lapisan memiliki kualitas yang berbeda-beda. Pada lapisan A, kualitas batu baranya tidak begitu baik, sedangkan pada lapisan B memiliki kualitas

---

[18] *Ibid.* , hal. 14.

[19] R. D. M. Verbeek, "De Ombilin-Kolenvelden op Sumatra`s Westkust", dalam, *Tijdschrift voor Nijverheid in Nederlands Indie.* No. 34 Batavia : Groningen, 1887, hal. 445-455.

yang lebih baik dibangingkan dengan lapisan A. Adapun kualitas yang paling baik berada pada lapisan C.[20] Untuk menambang batu bara pada lapisan C ini, memiliki tingkat kesulitan yang tinggi. Kesulitan penambangan terutama karena letaknya jauh dari permukaan tanah. Batu bara yang terdapat di Sungai Durian dan Sawah Lunto memiliki bentuk seperti ini.

W. Holleman, seorang geolog Belanda dalam sebuah laporan yang ditulisnya memperkirakan mengenai kadalaman batu bara yang terdapat di sungai Durian. Holleman menuliskan secara lebih rinci bahwa di sungai Durian batu bara terdiri dari tiga lapisan, yaitu lapisan A, B dan C. Pengukuran terhadap lapisan-lapisan ini berdasarkan pada kedalaman dan kualitas batu bara. Adapun ketiga lapisan itu adalah: [21]

1. Batu bara lapisan A terletak di permukaan tanah atau dari permukaan tanah sampai mencapai kedalaman 0,80 meter.
2. Batu bara lapisan B terletak padqa kedalaman 0,80 meter sampai dengan kedalaman 8 meter dari permukaan tanah.
3. Batu bara yang terletak pada lapisan C berada pada kedalaman 8 meter dari permukaan sampai dengan tingkat dengan seterusnya.

Dari kutipan yang terdapat diatas terlihat bahwa pada batu bara yang terlihat di atas permukaan tanah

[20] Tentang kualitas batu bara, lihat laporan Greve, misalnya, *op. cit.* , hal. 15.

[21] W. Holleman, *op. cit.* , hal. 4-6.

berkualitas rendah. Batu bara yang memiliki kualitas terbaik terdapat pada lapisan C dengan kedalaman 8 meter. Untuk lebih kongkritnya,maka diambil contoh pada batu bara yang terdapat di Sungai Durian.

Setiap lapisan-lapisan batu bara memiliki cadangan yang berbeda-beda. Pada lapisan A, memiliki cadangan yang paling sedikit, sedangkan lapisan B memiliki cadangan lebih banyak dibandingkan dengan lapisan A. Lapisan paling banyak mengandung cadangan batu bara adalah pada lapisan C. Cadangan batu bara ini letaknya berada dalam perut bumi. Holleman dalam laporannya mengenai kandungan batu bara yang terdapat di Sungai Durian, memperkirakan secara lebih terperinci tentang kandungan batu bara yang terdapat dalam setiap lapisan. Untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel yang terdapat dibawah ini.

Tabel 2

Perkiraan Batu Bara di Kawasan Tambang Sungai Durian (1000 Ton)

Lapisan	Jumlah
A	260. 000
B	515. 000
C	6.315. 000

Sumber: W.Holleman, *Beschrijving van de Afbouwmethode Voor Ontginning der 8 Meter Dikke C- Laag der Ombilin-steenkolenmijnen*. Bandoeng: Maks & vander klits, 1931, hal. 10.

Ditinjau dari sudut kualitasnya, batu bara Ombilin memiliki kualutas yang baik. Dalam sebuah laporan penyelidikan yang dilakukan oleh P. van Diest tentang kualitas batu bara Ombilin dikatakannya bahwa tidak disangsikan lagi, batu bara Ombilin memiliki kualitas yang sangat tinggi. Oleh karena itu, kalau batu bara Ombilin sudah dapat ditambang, maka akan dapat ditawarkan dengan harga yang tinggi di pasar batu bara internasional di Singapura, Eropa ataupun tempat lainnya.[22]

Masalah kualitas batu bara akan berkaitan erat dengan masalah pemasaran batu bara di luar negeri. Bagi batu bara Ombilin hal seperti ini merupakan persoalan yang amar memungkinkan. Dengan kualitas yang dimilikinya, maka batu bara Ombilin tidak akan kalah bersaing dengan kualitas batu bara dari tempat lainnya. Berdasarkan laporan yang dibuat oleh Verbeek, dikatakan bahwa kualitas batu bara Ombilijn tergolong memiliki tingkat yang baik, sehingga diharapkan untuk dapat bersaing dalam pasar dalam pasar luar negeri. Verbeek membandingkan kualitas yang dimiliki batu bara Ombilin dengan batu bara yang ditemukan di Australia dan Borneo, maka kualitas batu bara yang terdapat di daerah Ombilin Sawah Lunto sedikit lebih baik.[23]

---

[22] P. van Diest, *op. cit.* , hal. 16.

[23] *Ibid.* , hal. 17. Lebih jauh lihat juga misalnya, R. D. M. Verbeek, *op. cit.* , hal. 140 – 141.

C. Nilai-nilai Hari Jadi Kota Sawahlunto

Kata Sawahlunto berasal dari dua suku kata, yaitu sawah dan lunto. Sawah itu terletak di sebuah lembah yang dialiri sebuah anak sungai yang bernama Batang Lunto, yang sekaligus juga berfungsi untuk mengairi areal persawahan itu. Anak sungai itu berhulu di lembah bukit-bukit Nagari Lumindai di sebelah Barat, lalu mengalir ke Nagari Lunto dan mengairi areal persawahan penduduk di sana. Dari kondisi yang demikianlah muncul nama Batang Lunto, yang sekarang membelah kota "lama" Sawahlunto.

Mengapa nama sungai itu mengacu kepada nama Nagari Lunto bukan kepada nama Nagari Lumindai, tempat berasalnya hulu dari sungai itu ? Jawaban atas pertanyaan ini tidak didapatkan, akan tetapi dapat diacu kepada sejarah berdirinya nagari-nagari itu. Didapat informasi bahwa ketiga nagari (Lumindai, Lunto, dan Kubang) berasal dari nenek moyang yang sama dan tempatan yang pertama adalah Nagari Lunto, kemudian berkembang ke Nagari Kubang dan Lumindai. Oleh karena itulah sepakat pula para nenek moyang itu dahulu menamakan sungai itu dengan Batang Lunto. Kapan nama Batang Lunto itu diciptakan, juga tidak didapatkan fakta sejarahnya.

Sementara nama "Sawah Lunto" itu sudah dikenal sejak daerah itu di-taruko" menjadi areal persawahan oleh nenek moyang dari ketiga nagari itu, Nagari Lumindai, Lunto, dan Kubang. Oleh karena daerah itu, atau tepatnya persawahan itu dialiri oleh Batang Lunto, maka dinamai pulalah dengan "Sawah Lunto". Selain itu, mereka juga menamainya dengan "Sawah Aru" karena di sekeliling

areal persawahan itu ditanami dengan pohon Aru, sejenis tanaman bambu. Pohon Aru itu sengaja ditanam dengan maksud untuk menjadi pagar pelindung bagi sawah-sawah itu dari gangguan binatang liar, seperti gajah dan babi. Kapan nama Sawahlunto atau Sawah Aru itu dimunculkan, juga tidak didapatkan fakta sejarahnya.

Sementara orang Belanda menyebut "Sawah Lunto" dengan "*Lunto Kloof*" (kloof=lembah) karena terletak di sebuah lembah yang dikelilingi oleh perbukitan. Kondisi itu direkam dalam sebuah potret yang dibuat oleh Ir.Th.F.A. Delprat sebelum daerah itu dikembangkan menjadi kawasan pusat pertambangan batu bara. Potret itu memperlihatkan hamparan areal persawahan dan sebuah sungai yang mengalir berliku dengan latar belakang perbukitan.

Dalam foto itu tidak terlihat adanya pemukiman penduduk. Berkemungkinan pada masa itu daerah "Sawah Lunto" atau "Sawah Aru" atau *"Lunto Kloof"* itu masih berupa *taratak*. Maksudnya, di daerah itu sudah berpenghuni, tetapi tempat tinggalnya (rumahnya) masih berupa dangau dan mereka belum menetap secara permanen di sana. Mereka akan menginap di sana, jika hal itu diperlukan, seperti untuk menjaga sawah yang hampir panen. Kemudian, pada perkembangan selanjutnya, mereka akan mendirikan rumah yang sederhana yang dapat ditempati oleh keluarganya. Pilihan untuk menetap di sana lebih disebabkan untuk menunjang aktifitas mereka sehari-hari sebagai petani. Selain itu, juga untuk menjaga areal pertanian dari gangguan binatang, seperti gajah dan babi. Akan tetapi, mereka belum boleh mendirikan suku

sendiri dan sepenuhnya masih tetap menjadi anggota sukunya asalnya. Oleh karena itu, sebagaimana galibnya dalam sistem sosial masyarakat Minangkabau, maka mereka tetap terikat kepada nagari asalnya, baik secara budaya, sosial, maupun politik.

Bila daerah itu diteruka atau bila ada "pemukiman" di sana juga tidak ditemukan fakta sejarahnya. Bahkan, de Greve dan Kalshoven yang menyelidiki adanya "emas hitam" atau batu bara di sana pada tahun 1867 menyebutkan bahwa daerah itu belum didiami oleh manusia. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Verbeek pada tahun 1875 ketika meneliti deposit batu bara di daerah itu yang berjumlah lebih dari 200 juta ton.

Akan tetapi, keadaan itu tampaknya mulai mengalami perubahan setelah dilakukan pembebasan lahan tambang batu bara pada tanggal 27 Juli 1886, ketika daerah itu secara resmi diserahterimakan untuk dijadikan areal pertambangan batu bara. Serah terima itu didasarkan atas Akte Notaris yang dikeluarkan oleh E.L. van Rouvery selaku Asisten Residen Tanah Datar. Sebagai wakil dari penduduk setempat dalam penandatanganan akte itu adalah Djaar Sutan Pamuncak yang menjabat sebagai Kepala Laras Silungkang dan sebagai penerimanya adalah Hendrik Yakubos Shuuring yang memegang konsesi pertambangan batu bara dari pemerintah colonial Belanda. Sejak itu, kawasan itu mulai ramai didatangi untuk mempersiapkan segala sesuatunya yang berhubungan dengan penambangan batu bara nanti. Bila "rantiang dipatah, aia disauak" di sana untuk menjadikannya sebagai pusat pertambangan batu bara dan sekaligus sebagai titik

awal berdirinya "kota" Sawahlunto, yang mengubah taratak itu, tidak pula ditemukan fakta sejarahnya.

Diperkirakan Sawah lunto mulai menjadi daerah pemukiman pada tahun 1887, ketika Belanda menanamkan modal sebesar 5,5 juta gulden untuk merealisasikan konsensi tambang batu bara di sana.[24] Informasi lain yang diperoleh menyebutkan bahwa pada tahun 1891 dimulai usaha pertambangan dan dengan produksi perdana mulai pada tahun 1892. Atau 6 (enam) tahun setelah penandatanganan konsensi itu. Batu bara itu diangkut dengan kuda beban ke Muarakalaban melalui jalan setapak dan seterusnya dibawa ke pelabuhan Emma Haven (sekarang: Pelabuhan Teluk Bayur) di Padang dengan menggunakan angkutan kereta api.

Adapun nama Sawahlunto pertama sekali tercantum dalam administrasi Belanda adalah pada tahun 1892. Hal itu mengacu kepada *Regeering Almanak van Nederlandsch-Indie Tahun1892*, yang selalu memuat nama-nama daerah di Hindia Belanda. Hal itu menunjukkan bahwa pada tahun itu Sawahlunto secara resmi masuk dalam peta geo-politik pemerintah Hindia Belanda. Atau, dengan kata lain pada tahun itulah adanya pengakuan tentang keberadaannya secara resmi. Akan tetapi, tentu dapat pula dipahami bahwa pencatatan itu membutuhkan waktu untuk memprosesnya. Jadi sebelumnya telah dilakukan proses pencatatannya. Proses pencatatan itu berkemungkinan besar dilakukan setelah adanya penandatanganan konsensi serah terima kawasan tambang

[24] Lembaga Pengabdian pada Masyarakat ITB, *Op. Cit*.. hal. 19.

itu (1886) yang dijadikan dasar hukum pembukaan pertambangan batu bara oleh Pemerintahan Hindia Belanda. Selain itu, Akte Notaris itu juga dapat berarti bahwa kawasan tambang yang diserahkan itu telah menjadi "milik" pemerintah, sehingga seyogianya pula dimasukkan dalam peta geo-politik Hindia Belanda.

Penelusuran fakta sejarahnya itu dapat juga dikaitkan dengan saat Pemerintahan Hindia Belanda mengeluarkan keputusan tentang batas-batas ibukota *Afdeeling* yang ada di Sumatera Barat pada tanggal 1 Desember 1888. Penentuan ibukota *Afdeeling* itu sudah barang tentu berkaitan erat dengan daerah-daerah yang berada dalam wilayahnya itu. Oleh karena itu, pada tanggal 1 Desember 1888 itu dapat dikatakan bahwa Sawahlunto mulai diakui keberadaannya dalam administrasi pemerintahan oleh pemerintahan Hindia Belanda sebagai bagian dari wilayah *Afdeeling Tanah Datar.* Hal itu seiring dengan persiapan pembangunan prasarana transportasi kereta api tahun 1887 dan pelabuhan Emma Haven (sekarang: Telukbayur) sebagai penunjang proses pengeksporan produksi batu bara dari Sawahlunto.

Pada sisi lain, pada tahun 1888 itu mulai pula ditetapkan sebuah Natijah (Kalender 100 tahun) yang dibuat oleh para ulama tariqat di daerah di sekitar Sijunjung yang termasuk dalam *Afdeeling* Tanah Datar. Natijah itu ditemukan oleh seorang petualang Jerman, Alfred Maass yang mengadakan perjalanan ke daerah

Sijunjung dan Dataran Tinggi Sumatera Barat/ Minangkabau.[25]

Hal itu menunjukkan pula bahwa jaringan ulama tariqat yang berakar kepada hubungan guru-murid telah berjalan dengan baik. Sebagaimana diketahui bahwa pada penghujung abad ke-19 di Kolok telah terdapat sebuah surau yang diasuh oleh seorang ulama "Tuanku Kolok" yang wilayah pengaruhnya mencakup lebih dari daerah kota Sawahlunto sekarang. Kalender itu menjadi acuan bagi para ulama tariqat yang berjauhan daerahnya untuk menetapkan tanggal-tanggal penting, seperti awal Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha. Selain itu, kalender itu dapat pula dijadikan ukuran waktu kapan untuk melakukan kunjungan kepada guru tariqat yang lebih "tua". Hal itu kiranya ada benarnya karena sebagaimana diketahui bahwa pada penghujung abad ke-19 di Kolok telah terdapat sebuah surau yang diasuh oleh seorang ulama "Tuanku Kolok" yang wilayah pengaruhnya mencakup lebih dari daerah kota Sawahlunto sekarang.

Penelusuran fakta sejarah lebih jauh ke belakang untuk mengetahui kapan nenek moyang mulai "manaruko" sawah dan ladang itu sangat mustahil dapat dilakukan. Selain itu juga tidak relevan dengan konsep kota yang dikemukakan oleh para ahli dan untuk lebih jelasnya di bawah ini disampaikan pendapat beberapa ahli tentang kota itu.

[25] Alfred Maass, Durch Zentral-Sumatra I (Berlin und Leipzig: B. Behr's Verslag, 1910, hal. xix)

Menurut Lopez, sebagaimana dikutip oleh de Goede (seorang ahli sosiologi perkotaan), definisi kota pertama sekali ditemukan dalam sistem hieroglif (goresan suci) bangsa Mesir Kuno dengan simbol *Niut.* Simbol itu berupa sebuah gambar "lingkaran" dengan "palang bergaris ganda" di dalamnya. "Lingkaran" itu bermakna sebuah wilayah tertentu dengan batas-batasnya yang jelas, sedangkan "palang bergaris ganda" menunjukkan persimpangan jalan yang menghubungkannya dengan daerah lain di sekitar.[26]

Berdasarkan defenisi yag dikemukakan diatas, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa pada awalnya sebuah kota merupakan suatu wilayah tertentu yang mempunyai fungsi sebagai tempat pertemuan orang. Mereka datang dari berbagai daerah di sekitarnya dengan maksud-maksud yang jelas. Mereka tidak saja melakukan aktivitas ekonomi di sana, tetapi juga aktivitas sosial-budaya, seperti saling berinteraksi dan bertukar informasi.[27]

Pada sisi lain, Gideon Sjoberg, seorang ahli sejarah perkotaan, mengemukakan bahwa ada tiga faktor penting yang menyebabkan munculnya suatu daerah menjadi sebuah kota. *Pertama*, daerah itu memiliki basis ekologis yang menguntungkan. *Kedua*, adanya perkembangan

[26] J.W. Schoorl, Modernisasi: Pengantar Sosiologi Negara-negara Ber-kembang, Penterjemah R.G. Soekadjo, Jakarta: Gramedia, 1984, hlm. 263-264.

[27] Max Weber, " Apakah yang Disebut Kota", Terjemahan Darsiti Soeratman, dalam Sartono Kartodirdjo (ed.), Masyarakat Kuno dan Kelompok-kelompok Sosial, Jakarta: Bhratara, 1977, hlm. 11-39).

teknologi dalam bidang pertanian maupun non-pertanian. *Ketiga*, memiliki organisasi sosial yang kompleks dan maju, khususnya dalam bidang ekonomi dan politik.[28] Berangkat dari perspektif historis ini, kemudian Sjoberg mengajukan sebuah konsep tentang kota pra-industri yang dapat dipandang sebagai masyarakat yang berdiri sendiri. Demikian pula struktur kota itu terlepas dari pengaruh kebudayaan yang menaunginya dan juga terlepas dari pengaruh zamannya. Kota pra-industri sudah menunjukkan pusat masyarakat yang sudah agak kompleks, akan tetapi suasana pedesaannya masih terasakan. Perbedaannya dengan desa adalah bahwa kehidupan kota pra-industri sudah mengalami skala dan diferensiasi kerja dan spesialisasi, sedang kegiatannya yang dominan adalah non-agraris.[29]

Jika ketiga faktor itu terus menerus mengalami kemajuan dan perkembangan, maka fungsi sebuah kota akan semakin kompleks.[30] Kompleksnya masalah ini

---

[28] Gideon Sjoberg, The Pre-industri City: Past and Present, New York: The Free Press, 1966, hlm. 27-31.

[29] *Ibid*., hlm. 54.

[30] Akibatnya adalah akan timbul pula kesulitan untuk memberikan defenisi kota secara komprehensif dan representatif karena setiap pakar akan lebih cenderung mengemukakan defenisi kota menurut disiplin ilmunya masing-masing. Nas menyebutkan ada sembilan definisi kota yang diberikan oleh ahli perkotaan dan kemudian ia merumuskan kota atas aspek-aspek morfologi, kriterium mengenai jumlah, sosial, ekonomi, dan hukum. P.J.M. Nas, *Kota di Dunia Ketiga: Pengantar Sosiologi*, *Bagian Pertama*, Terjemahan Sukanti Suryochondro (Jakarta: Bharatara Karya Aksara, 1979), hlm. 27-38. J.H. de Goede, seorang sosiolog perkotaan, mencoba menarik generalisasi dari berbagai definisi

sesungguhnya merupakan karakter dari sebuah kota yang dinamis.

Berdasarkan batasan pengeratian kota di atas, maka titik-titik yang mendekati untuk mengetahui awal atau cikal bakal kota Sawahlunto lebih tepat jika dikaitkan dengan penambangan batubara. Hal itu sangat logis karena batu bara itulah yang telah merubah areal persawahan dan peladangan yang terletak di lembah itu dan dialiri oleh Batang Lunto menjadi pusat kota Sawahlunto sekarang. Akan tetapi, hal itu tidak pula harus berarti saat dimulai produksi perdananya (1892), karena sudah pasti persiapan-persiapan ke arah itu sudah dilakukan jauh sebelumnya. Misalnya untuk membebaskan tanah pertambangan itu dilakukan pada tahun 1886.

Hal itu, tentu dilakukan pula oleh pemerintah Hindia Belanda dengan merancang berbagai infrastruktur lainnya yang diperlukan untuk penambangan batu bara. Bahkan, pembangunan rel kereta api dan Emma Haven (sekarang: Pelabuhan Telukbayur) dirancang pada tahun 1887. Oleh karena itu, logis pula kiranya "kota" Sawahlunto bersamaan dirancang pada waktu yang bersamaan, karena ketiganya (Telukbayur, rel kereta api, dan penambangan batu bara) tidak dapat dipisahkan. Akan

---

itu. Ia mengajukan ciri-ciri yang harus dimiliki oleh sebuah kota dan yang sekaligus menjadi penentu dalam pertumbuhan dan perkembangannya. *Pertama*, peranan besar yang dipegang oleh sektor sekunder (industri) dan tersier (jasa) dalam bidang kehidupan ekonomi. *Kedua*, jumlah penduduk yang relatif besar. *Ketiga*, heterogenitas susunan penduduknya. *Keempat*, kepadatan penduduk yang relatif besar. J.W. Schoorl, op. cit., hlm. 264.

tetapi, berbeda dengan pembangunan kereta api dan Telukbayur didasarkan kepada Surat Keputusan Gubernur Jendral Hindia Belanda, maka tidak demikian halnya dengan "kota" Sawahlunto. Oleh karena itu, satu-satunya dokumen yang dapat dipegang adalah Staatsblad no. 181 Tahun 1888 itu. Adapun batas-batas "kota" Sawahlunto pertama kali ditetapkan berdasarkan Staatsblad no. 6380 Tahun 1905 yang mengacu kepada Surat Keputusan Direktur Pemerintahan Dalam Negeri Hindia Belanda tertanggal 18 Oktober 1905. Kemudian, setelah Sawahlunto begitu berkembang dan tumbuh sedemikian rupa, maka dikeluarkanlah Staatsblad no. 312 dan 313 tentang pembetukan Gemeente Sawahlunto.

a. Nilai inspiratif
   Inspirasi dari tanggal 1 Desember 1888 adalah bahwa ide merupakan suatu langkah awal dalam mengerjakan sebuah pekerjaan. Ide dapat juga diartikan sebagai membuat sebuah rancangan yang akan dapat dijadikan pedoman untuk menentukan langkah-langkah kerja dalam melakukan sesuatu. Atau dalam bahasa sekarang dapat pula disamakan dengan visi. Demikianlah halnya dengan visi atau rancangan untuk menjadikan Sawahlunto menjadi Kota Wisata Tambang yang Berbudaya, yang akan diwujudkan pada tahun 2020 yang akan datang.

b. Nilai integratif
   Pada tanggal 1 Desember 1888 dapat diartikan bahwa Sawahlunto bukan lagi menjadi "milik" masyarakat Nagari Kubang dan Lunto, tetapi sudah terintegrasi atau

menjadi bagian yang tidak terpidahkan dari wilayah Afdeeling Tanah Datar, karena sudah masuk dalam wilayah administrasinya. Hal itu dibuktikan dengan tercatatnya nama Sawahlunto dalam peta politik-administrasi pemerintahan Hindia Belanda. Oleh karena itu secara sadar pula masyarakat pada waktu merasa menjadi bagian pula dari wilayah pemerintahan yang berada di atasnya.

c. Nilai Aspiratif
   Adapun nilai aspiratif yang dapat dipetik dari tanggal 1 Desember 1888 adalah sebuah kota mengandung pengertian yang komplek. Secara kebetulan pula pada waktu (1888) kawasan itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari wilayah pengaruh pengajian tarikat yang pada waktu itu sudah berjalan dengan baik.

d. Nilai patriotisme dan nasionalisme
   Pada waktu itu belum didatangkan buruh yang akan menggali tambang Sawahlunto. Sebagaimana diketahui bahwa buruh angkatan pertama merupakan "orang yang bersalah", yang dalam perlakuan terhadap mereka menjatuhkan harkat kemanusiaan mereka. Oleh karena itu, pada waktu itu siapa yang akan dijadikan buruh masih dalam kerangka yang ideal, yang mereka tentu akan dipekerjakan sebagaimana layaknya seorang buruh, meskipun mereka berasal dari suku lain, tetapi masih sebangsa, yaitu Indonesia.

BAB II
PERTUMBUHAN WILAYAH DAN PERKEMBANGAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

A. Pengantar

Sebelum menjadi kota, Sawahlunto tidak lebih dari sebuah daerah persawahan dan peladangan, yang secara tradisional berada dalam wilayah adat Nagari Kubang. Sebagaimana lazimnya nagari di Minangkabau, Nagari Kubang juga diperintah oleh para penghulu atau datuak.

Secara administrasi pemerintahan Hindia Belanda, Sawahlunto termasuk bagian dari wilayah *Onderafdeeling* VII Koto dalam *Afdeeling* Tanah Datar dengan ibukotanya Batusangkar. Onderafdeeling VII Koto yang berpusat di Silungkang terdiri dari 6 (enam) kelarasan, yaitu Kelarasan Kotobaru, Silungkang, Sijunjung, Kota VII, Padangsibusuak, dan Lubuaktarok, dengan ibukotanya di Silungkang. Sawahlunto yang berada dalam Kenagarian Kubang termasuk dalam Kelarasan Silungkang. Kondisi itu seiring dengan ditetapkannya batas-batas wilayah ibukota *afdeeling* di Sumatera Barat untuk pertama kalinya oleh pemerintah Hindia Belanda. Batas-batas ibukota itu tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda No. 1 Tanggal 1 Desember 1888. Mengikuti

perkembangan administrasi yang demikian, maka denyut kehidupan di Sawahlunto semakin dirasakan, terutama setelah dimulainya penambangan batu bara pada tahun 1891. Untuk itu di Sawahlunto ditempatkan seorang pejabat pemerintah *Aspirant Controleur*, wakil kontrolir, jabatan yang terendah yang dipegang oleh orang Belanda dalam birokrasi colonial Belanda.

Empat tahun kemudian (1895) Sawahlunto telah ditetapkan sebagai ibukota Kelarasan Koto VII dan Silungkang dinilai tidak strategis lagi oleh Belanda karena secara ekonomis eksploitasi batu bara lebih penting untuk diperhatikan untuk menggantikan Silungkang. Pada tahun itu para buruh semakin banyak didatangkan oleh perusahaan tambang batu bara. Mereka berasal dari Cina, Jawa, Nias, Batak dan sebagainya. Untuk melindungi buruh Cina pada tahun itu pula diangkatlah seorang Kapitan Cina, sebagaimana halnya di kota-kota lain di Hindia Belanda (Indonesia). Selain itu ditetapkan pula seorang Jaksa yang bertugas untuk membantu pekerjaan pemerintah dalam menegakan "hukum" bagi para buruh tambang.

Dari tahun ke tahun kota itu terus menunjukkan perkembangan yang pesat. Mengiringi pergantian nama Kelarasan Koto VII menjadi Kelarasan Sawahlunto (1903), pada tanggal 24 Juli 1905 untuk batas-batas administrasi Sawahlunto ditetapkan untuk pertama kali, sebagaimana dimuat dalam *Staatsblad* No. 396. Sungguhpun pertumbuhan dan perkembangannya relatif pesat dan batas-batas wilayahnya itu sudah ditetapkan, namun status sebagai sebuah "kota" barulah ditunjukkan dengan

mengangkat seorang Burgelijken stand ("walikota") pada tahun 1911. Pada tahun 1914 Sawahlunto dijadikan pula sebagai ibukota *Afdeeling* Tanahdatar yang semula berada di Batusangkar.

Melihat beban administrasi yang semakin padat itu, baik sebagai ibukota Kelarasan Sawahlunto, Onderafdeeling Sawahlunto, dan Afdeeling Tanahdatar, maupun sebagai kota tambang batubara, maka pada tahun 1918 Sawahlunto ditetapkan sebagai *Gemeente* (Kotapraja). Dengan demikian diharapkan Sawahlunto dapat mengurus segala persoalannya secara efektif dan efisien. Untuk itu walikotanya dibantu oleh sebuah Dewan Kota (Gemeenteraad) yang terdiri dari: 5 Eropa, 3 Pribumi dan 1 Cina. Sebagai "Walikota"-nya langsung dijabat oleh Kepala *Afdeeling* Tanahdatar.

Pada tahun 1929 wilayah Kota Sawahlunto diperluas sehingga menjadi 577,7 ha sebagaimana termaktub dalam *Staatsblad* no. 400 tahun 1929. Luas kota Sawahlunto itu tidak berubah sampai tahun 1990. Akan tetapi system pemerintahan yang mengalami perubahan sesuai dengan perubahan kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda Sawahlunto tetap dijadikan sebagai sebuah *Staadsgemeente* karena di sana kegiatan pertambangan yang memerlukan penanganan khusus, baik secara politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

Akan tetapi pada masa pendudukan Jepang, perhatian untuk pertambangan batu bara tidak setinggi pada masa sebelumnya. Hal itu dapat dilihat dari produksi batu bara yang dihasilkan dari Sawahlunto. Sungguhpun

demikian, Jepang menjadikannya sebagai sebuah kota dan menjadi ibukota kabupaten (Ken) Solok dengan ibukota Sawahlunto. Oleh karena itu Bung Tsu Tjo-nya (Bupati: Bung Tsu Tjo) berkedudukan di kota itu.

Setelah kemerdekaan Sawahlunto ditetapkan sebagai sebuah kota. Daerah ini dibagi atas 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Sawahlunto Utara dan Sawahlunto Selatan. Kecamatan Sawahlunto Utara dibagi atas 2 nagari, sedangkan kecamatan Sawahlunto Selatan terdiri dari 3 nagari. Ketika diterapkan Undang-undang No. 5 Tahun 1979, Sawahlunto dibagi atas 20 kelurahan dan pemerintahan nagari dihapuskan. 8 Kelurahan terdapat di Kecamatan Sawahlunto Utara dan 12 kelurahan di Kecamatan Sawahlunto Selatan.

Pembagian wilayah Kota Sawahlunto itu berubah lagi ketika dilakukan pemekarannya pada tahun 1990. Kota Sawahlunto yang luasnya 273.477 km2 itu dibagi atas 4 kecamatan, 27 desa, dan 10 kelurahan. Pembagian wilayah pemerintah terendah tersebut yang terdiri dari desa dan kelurahan disebabkan karena pemekaran kota Sawahlunto juga mengambil beberapa wilayah kabupaten Solok dan Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung, sehingga nama desa tetap dipertahankan, sedangkan nama kelurahan tetap juga digunakan untuk daerah yang semula sudah menjadi wilayahnya. Pembagian wilayah itu juga menjadi "rumit" karena pada tahun 1998 juga diberlakukan Undang-undang otonomi daerah, sehingga nagari kembali dihidupkan di Sumatera Barat. Untuk itu wilayah desa-desa yang berasal dari 2 kabupaten itu dikembalikan menjadi nagari, sehingga menjadi 10 nagari. Jadi, sekarang pemerintahan

Sawahlunto terdiri dari 4 kecamatan, 10 nagari, dan 10 kelurahan.

B. Pembangunan Infrastruktur Kota

Sebagai kota tambang, maka pembangunan infrastruktur kota Sawahlunto tidak dapat dipisahkan dari pembangunan prasarana dan sarana tambang. Karena berbagai bangunan yang didirikan selau dikaitkan dengan tambang, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal itu menunjukkan pula bahwa pertambangan juga amat membutuhkan sarana pendukung lainnya. Ia tidak dapat berdiri sendiri, sehingga memerlukan berbagai perangkat birokrasi di luarnya dan sekaligus memerlukan berbagai fasilitas pendukung lainnya. Oleh karena itu pembangunan infrasruktur di Sawahlunto dapat dibedakan atas dua hal; *pertama*, yang berhubungan langsung dengan pertambangan dan yang tidak berhubungan langsung dengan pertambangan tetapi mempunyai arti penting untuk kota.

Jalur rel kereta api dari Padang ke Sawahlunto pembangunannya dilakukan secara bertahap mulai tahun 1887 dan sampai di Muarakalaban tahun 1892. Jalur Muarakalaban ke Sawahlunto selesai dibangun pada tahun 1894. Pembangunan jalur kereta api itu lebih dahulu dilakukan dari pada penambangan batu bara yang baru mulai pada tahun 1891 dan produksi perdananya dimulai tahun 1892. Oleh karena jalur kereta api belum sampai ke Sawahlunto, maka untuk membawa batu bara ke Muarakalaban dari Sawahlunto dibangun jalan setapak melalui Kubang Sirakuak. Batu bara dibawa dengan

menggunakan tenaga kuda dan manusia. Pada waktu yang bersamaan dibangun pula sebuah pelabuhan di Padang untuk mengekspor batu bara. Pelabuhan itu diberi nama Emmahaven, sebagai hadiah untuk Ratu Kerajaan Belanda. Sekarang nama pelabuhan itu telah ditukar menjadi Teluk Bayur.

Untuk menampung batu bara yang telah dibawa dari Sawahlunto di Telukbayur dibangun sebuah gudang batubara (kolenmagazijn) pada tahun 1894. Sehingga, dapat pula digunakan untuk mensuplai kebutuhan bahan bakar kapal yang singgah di sana. Gudang penumpukan batubara atau Siloyang sama juga dibangun pula di Pulau Weh, Sabang. Pada waktu itu Sabang merupakan pelabuhan yang ramai dikunjungi atau disinggahi kapal, sehingga keperluan batu bara di sana juga lebih banyak.

Daerah pertambangan batu bara yang dibuka pada tahun 1891 itu berada kawasan penambangan Sungai Durian. Untuk itu di sana dibangun lapangan pertambangan untuk menampung batu bara yang digali melalui lobang sumuran (*vertical shaft*). Penggalian dilakukan mulai dari permukaan tanah sampai ke lapisan batu bara galian C yang terdapat pada kedalaman lebih dari 20 meter. Hal itu dilakukan untuk mendapatkan kualitas batu bara yang bagus, sehingga dapat bersaing dengan batu bara dari negara lain. Jumlah produksi perdana itu sebanyak 48.000 ton.

Sementara itu untuk memenuhi kebutuhan listrik, dibangun sentral listrik (*electriciteits centrale*) di Kubang Sirakuak antara tahun 1904-1905. Pembangkit listrik yang berada dipinggir sungai Lunto itu mulanya menggunakan

mesin berkekuatan 1.000 HP. Kemudian ditingkatkan mesinnya hingga berkekuatan 1500 HP, dan dinaikan lagi sampai kekuatan 3000 HP dengan tegangan mencapai 6000 volt dan dikonversi ke tegangan lebih rendah 220 volt dan 125 volt. Listrik ditransfer ke stasiun transformator melalui pipa dan kabel bawah tanah. Transformator dipasang dan ditempatkan dekat daya yang dibutuhkan. Perkembangan pembangkit listrik di Sawahlunto dengan kapasitas itu menjadikan daerah ini memiliki kapasitas listrik terbesar di Hindia Belanda ketika itu.[31] Hal itu sangat dimungkinkan dengan ketersediaan sumber daya mineral batubara yang melimpah dilokasi pembangkit.

Untuk kebutuhan udara dalam proses pembakaran pada ketel uap penggerak turbin uap dibangun menara cerobong udara/asap kedua berbahan beton setinggi 70 Meter yang dibangun *N.V. Beton Maatschappij* tahun 1911 di sebelah Selatan bangunan gedung pembangkit. Menara beton itu menggantikan fungsi menara pertama setinggi 40 Meter.[32] Sekarang menaranya dijadikan menara Masjid Nurul Iman kota Sawahlunto, yang dibangun pada tahun 1952 di bekas fondasi PLTU itu. Sebelumnya lokasi itu juga

[31] Ir. R. J. van Lier, (1917)., Onze Koloniale Mijnbouw Populaire Handboekjes Over Nederl.-Indische Mijnbouwproducten, Onder Redactie Van Dr. J. Dekker: III De Steenkolenindustrie., Haarlem: H. D. Tjeenk Willink & Zoon, dalam Lindayanti, dkk, (2015). *Pertambangan dan Pengangkutan Batubara Ombilin Sawahlunto Pada Masa Kolonial. Laporan Penelitian* Kerjasama Pusat Studi Humaniora (PSH) Universitas Andalas Padang dengan Pemerintah Kota Sawahlunto, hal. 103-108

[32] *Ibid*

digunakan sebagai tempat perakitan senjata pada masa revolusi kemerdekaan.

Kebutuhan listrik kian bertambah seiring perkembangan pertambangan, kota dan berbagai aktivitas warga di Sawahlunto. Pada tahun 1924 dibangun Sentral Listrik Salak dengan tiga generator masing-masing bertenaga 2150-1900 dan 2000 KW, dijalankan oleh turbin uap.[33] Jala-jala hoogspanning dipakai sistim tiga kawat dengan spanning 6000 volt dan periode, keluar dari sentral listrik 2 (dua) pasang dubbelijn ke Sawahlunto. Kedua aliran itu disatukan kembali dalam satu onderstation. Tiap-tiap dubblelijn mempunyai 2 x 3 helai kawat tembaga 50 mm^2. Panjang induk kawat dubblijn dan cabang-cabangnya berjumlah ± 18 Km. Jala-jala laagspanning yang terpakai 220 dan 125 dan 125 volt. Penerangan rumah-rumah 125 volt, penerangan tangsi-tangsi dan jalan-jalan besar 220 volt. Wissel atau draaistroommoteren semua 220 volt.[34]

Sungai Lunto dibuatkan pula kanal-kanal, untuk mengalirkan air bagi pencucian batu bara. Selain itu, kanal itu juga dijadikan "kolam renang" oleh anak-anak dan tempat mencuci bagi ibu-ibu. Akan tetapi sejak tahun 1960-an kanal itu tidak dapat dimanfaatkan lagi oleh masyarakat karena mengalami pendangkalan dan kotor.

Sementara itu di Kampuang Teleng dibangun stasiun dan emplasemen keretaapi. Stasiun Sawahlunto

---

[33] Roesli. *Pemandangan Ringkas Tentang Djentera dan Listrik*. Laporan Kepala Dewan Tambang Ombilin, Sawahlunto 14 Maret 1946. Arsip PT. BA-UPO, hal.10.

[34] *ibid*

hingga tahun 1900 tidak lebih dari sebuah pemberhentian sementara. Bangunan masih relatif kecil dan sederhana. Pada tahun 1902 direncanakan dan dikerjakan renovasi rangka, atap maupun bangunan stasiun. Sarana prasarana dan fasilitas bangunan stasiun Sawahlunto ditingkatkan seiring kemajuan pertambangan dan peningkatan produksi batubara. Setelah mengalami renovasi dan pengembangan Stasiun Sawahlunto menjadi lebih besar dengan bentangan atap yang lebih lebar. Satu jalur bentangan rel kereta api berada dibawah atap bangunan yang ditinggikan. Seiring dengan itu di sana dibangun pula rumah dinas Kepala Perusahaan Kereta Api .

Sementara itu di Air Dingin tahun 1918 dibangun Dapur Umum atau Rumah Ransum (Keuken). Dapur modern itu berteknologi uap (steam generator), yang dilengkapi peralatan dan perlengkapan yang serba besar. Selain bangunan dan ruang memasak, dapur didukung sarana prasarana dan fasilitas sebagai satu kesatuan dapur yaitu; bangunan steam generator dengan menara cerobong udara, gudang bahan mentah, gudang padi/beras, pabrik es, heuler, rumah kepala dapur umum, rumah mantri hewan, pos jaga. Dari sinilah kebutuhan makan, minum pekerja tambang dan pasien Rumah Sakit disediakan.

Pada tahun 1901 dibangun sebuah lapangan sepak bola, yang oleh masyarakat disebut Tanah Lapang. Lapangan itu dibangun dengan mengerahkan tenaga buruh tambang. Pada tahun 1925 terdapat tiga klub sepak bola yang terkenal yaitu; Glück Auf, Hercules, dan Marconi. Selain untuk bermain bola, tanah lapang itu digunakan untuk merayakan hari-hari besar kerajaan Belanda, pesta

rakyat, olah raga, karnaval, pentas musik, acara kesenian tradisional, seperti ronggeng, randai, dan sebagainya. Bahkan, setelah kemerdekaan lapangan itu digunakan pula untuk memobilisasi massa dan kepentingan politik, seperti untuk mempertahankan kemerdekaan, mendukung PRRI, mengganyang Malaysia pada masa konfrontasi dengan Malaysia, pembebasan Irian Barat, kampanye PEMILU dan sebagainya.[35]

Berdekatan dengan tanah lapang, yaitu di sebelah Timur, dibangun sebuah pasar pada awal abad ke-20. Aktivitas pasar awal mulanya dilakukan di lapangan terbuka, kemudian pada tahun 1910-an dibangun sebuah *loods* (los) oleh pemerintah Belanda untuk menampung para pedagang. Sementara itu pedagang-pedagang Cina yang datang pada awal tahun 1890-an sudah ada yang membangun rumah toko, seperti yang dilakukan oleh Pek Sin Kek tahun 1906. Pada tahun 1920 dibangun pula sebuah Toko Koperasi "Ons Belang" untuk memenuhi kebutuhan orang-orang Eropa dan Indo-Eropa yang ada di Sawahlunto. Sampai tahun 1942, ketika Jepang mulai berkuasa di Indonesia, maka peran pedagang Cina yang sebelumnya dominan diambil alih oleh pribumi, karena banyak orang Cina yang pindah ke Padang dan Jakarta. Para pedagang pribumi banyak yang berasal dari Nagari Talawi dan Silungkang. Pada tahun 1980 tercatat sebanyak

[35] Erwiza Erman, *"*Miners, Managers and State: A Socio-political History of The Ombilin Coal-Mines, West Sumatra, 1892-1996", *Dissertation* (Amsterdam: Faculteit der Maatschappij-en Gedragswetenschappen, 1999), hal. 52.

62 orang. Sekarang pasar didominasi oleh orang Minangkabau. Selain itu, ada juga orang Jawa yang menjadi pedagang dan biasanya mereka menjual gado-gado, tahu, dan tempe.

Pusat kota terletak di sekitar pasar, karena baik perkantoran pemerintah dan pertambangan, fasilitas umum lainnya terletak di sini. Pada tahun 1910 dibangun sebuah gedung pertemuan (societeit) yang terletak sekitar 100 Meter sebelah Utara pasar. Gedung itu diberi nama Glück Auf dan di sini para pejabat pemerintah kolonial pertambangan berkumpul untuk minum-minum, berdansa, bernyanyi, dan sebagainya. Tidak lama setelah kemerdekaan gedung itu dijadikan Gedung Pertemuan Buruh. Sekarang gedung itu dimanfaatkan oleh Bank Mandiri sebagai kantornya.

Di depan seberang jalan gedung Glück Auf itu, pada tahun 1918 dibangun pula sebuah hotel dengan nama Ombilin Hotel. Sekarang hotel itu masih berfungsi tetapi berganti nama dengan Wisma Ombilin. Sebelum dimanfaatkan sebagai wisma, gedung itu pernah dijadikan kantor Polisi Militer Kotamadya Sawahlunto pada tahun 1970-an, serta asrama tentara Belanda pada masa Perang Kemerdekaan (1945-1949).

Berdekatan dengan pasar dibangun pula sebuah Bioskop pada tahun 1930-an dan gedung komedi pada 1917. Gedung komedi kemudian ditempati sebagai Pegadaian, karena itu gedung ini dikenal juga oleh masyarakat Sawahlunto. Pada tahun 2000 awal gedung itu dijadikan penyelenggaraan museum, selanjutnya ditempati

pula oleh Bank Rakyat Indonesia. Hingga akhirnya kembali menjadi gedung Pegadaian seperti saat sekarang.

Fasilitas umum lainnya yang dibangun adalah rumah sakit pada akhir abad ke-19. Rumah sakit itu dikembangkan pada tahun 1918 dengan membangun bangsal dan rumah dinas dokter di Aur Mulyo. Selain itu dibangun pula rumah pegawai rumah sakit. Sehingga, di Aur Mulyo terdapat komplek rumah sakit. Rumah sakit Sawahlunto itu pada masa colonial Belanda termasuk yang terbesar di Sumatera Barat. Bahkan, banyak orang dari daeraah lain yang dating berobat ke sini karena dokternya banyak yang bagus, baik yang berasal dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Sekarang rumah dinas dokter itu digunakan untuk rumah dinas Kepala Pengadilan Negeri Kota Sawahlunto.

Bagi pejabat pemerintah kolonial juga dibangunkan rumah dinasnya. Rumah Controleur dibangun di Aur Mulyo dan sekarang dijadikan rumah dinas Kepala Kejaksanaan Negeri Kota Sawahlunto. Rumah Asisten Residen yang dibangun pada tahun 1920-an di Kubang Sirakuak, sekarang dijadikan pula rumah dinas Walikota Sawahlunto. rumah Demang yang juga terletak di Kubang Sirakuak sekarang ditempati oleh Bapak Hanafi. Kantor polisi dibangun pada tahun 1920-an, sekarang dijadikan sebagai kantor Kapolsek Kota Sawahlunto.

Sementara untuk keperluan pertambangan juga banyak dibangun gedung-gedung. Pada tahun 1916 dibangun sebuah gedung yang megah untuk kantor pertambangan batu bara Ombilin. Sampai sekarang gedung itu masih tetap digunakan sebagai kantor pertambangan

PT BA-UPO. Setahun sebelumnya (1915) dibangun rumah bujangan untuk pegawai pertambangan karena banyak orang Belanda yang berkerja di pertambangan belum berkeluarga. Rumah bujangan juga dibangun di Kelurahann Saringan pada tahun 1939. Rumah ini dijadikan oleh Jepang sebagai markas tentaranya ketika berkuasa dulu.

Sementara untuk buruh tambang dibangun barak pada tahun 1904. Barak itu sering disebut oleh masyarakat dengan tangsi dan arena letaknya berdekatan dengan tanah lapang maka dinamakan dengan tangsi tanah lapang. Bangunan itu berlantai tanah dan berdinding bambu. Pada tahun 1910 dibangun tiga tipe barak yang lebih baik. Pertama, berbentuk ruang luas yang diperuntukkan bagi buruh yang belum kawin. Kedua, barak dengan ruangan yang khusus yang dapat dihuni oleh buruh bagi yang sudah kawin. Ketuga, barak untuk buruh yang sudah mempunyai anak. Barak ini dilengkapi dengan dapur umum dan kamar mandi umum yang digunakan secara bersama-sama oleh keluarga buruh. Pada tahun 1914 bangunan barak itu diperbaiki dengan semi permanent. Dindingnya separoh terbuat dari batu dan separoh bagian atasnya terdiri dari papan. Pada awalnya barak itu dibangun di sekitar kota Sawahlunto, tetapi kemudian dibangun pula di dekat kampong Sungai Durian, Surian, Durian, dan Sikalang yang dekat dengan areal pertambangan.[36]

[36]Erwiza, *Ibid*, hal. 52.

Adapun prasarana pendididikan di Sawahlunto dibangun sekolah tambang (1918), kemudian tahun 1910 dibangun pula sekolah Gouvenement klas II di Kabun Jati, dan tahun 1912 di Sapan. Selanjutnya dibangun pula ELS (Europe Lagere School) pada tahun 1926 dan HCS (Hollandsch Cinnesche School) pada tahun yang sama, sedangkan HIS (Hollansch Inlansch School) dibangun pada tahun 1927.

Jalan-jalan untuk menghubungkan Sawahlunto dengan daerah lainnya juga dibangun, karena tidak semuanya dapat dijangkau dengan kereta api. Jalan raya ke Batu Sangkar dibangun pada tahun 1920 melalui Kolok, Talawi, Padanggantiang, Guguakcino dan terus ke Batusangkar. Jalur ini menghubungkan Sawahlunto dengan daerah-daerah di sebelah Utaranya. Kemudian dibangun pula jalur ke Muarakalaban melalui Kubangsirakuak pada tahun 1900 untuk menghubungkan Sawahlunto dengan daerah-daerah Selatannya. Demikian juga pada tahun yang sama jalan raya ke Durian di sebelah Barat. Fasilitas kota lainnya yang dibangun adalah PAM yaitu dengan mengalirkan air batang sumpahan dengan pipa ke Sawahlunto. Hingga sekarang pipa itu masih dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan warga kota akan air.

BAB III
CIKAL BAKAL KOTA SAWAHLUNTO

A. Pemahaman Konseptual Tentang Kota

Sebelum menguraikan berbagai fakta sejarah dn analisis mengenai cikal bakal munculnya kota Sawahlunto, perlu kiranya diungkapkan terlebih dahulu kerangka konseptual yang digunakan untuk menelusurinya. Menurut Lopez, sebagaimana dikutip oleh de Goede (seorang ahli sosiologi perkotaan), definisi kota pertama sekali ditemukan dalam sistem hieroglif (goresan suci) bangsa Mesir Kuno dengan simbol *Niut.* Simbol itu berupa sebuah gambar "lingkaran" dengan "palang bergaris ganda" di dalamnya. "Lingkaran" itu bermakna sebuah wilayah tertentu dengan batas-batasnya yang jelas, sedangkan "palang bergaris ganda" menunjukkan persimpangan jalan yang menghubungkannya dengan daerah lain di sekitar.[37]

Berdasarkan defenisi yag dikemukakan diatas, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa pada awalnya sebuah kota merupakan suatu wilayah tertentu yang mempunyai fungsi sebagai tempat pertemuan orang. Mereka datang dari berbagai daerah di sekitarnya dengan

[37] J.W. Schoorl, *Modernisasi: Pengantar Sosiologi Negara-negara Ber-kembang*, Penterjemah R.G. Ssoekadjo (Jakarta: Gramedia, 1984), hlm. 263-264.

maksud-maksud yang jelas. Mereka tidak saja melakukan aktivitas ekonomi di sana, tetapi juga aktivitas sosial-budaya, seperti saling berinteraksi dan bertukar informasi.[38]

Pada sisi lain, Gideon Sjoberg, seorang ahli sejarah perkotaan, mengemukakan bahwa ada tiga faktor penting yang menyebabkan munculnya suatu daerah menjadi sebuah kota. *Pertama*, daerah itu memiliki basis ekologis yang menguntungkan. *Kedua*, adanya perkembangan teknologi dalam bidang pertanian maupun non-pertanian. *Ketiga*, memiliki organisasi sosial yang kompleks dan maju, khususnya dalam bidang ekonomi dan politik.[39] Berangkat dari perspektif historis ini, kemudian Sjoberg mengajukan sebuah konsep tentang kota pra-industri yang dapat dipandang sebagai masyarakat yang berdiri sendiri. Demikian pula struktur kota itu terlepas dari pengaruh kebudayaan yang menaunginya dan juga terlepas dari pengaruh zamannya. Kota pra-industri sudah menunjukkan pusat masyarakat yang sudah agak kompleks, akan tetapi suasana pedesaannya masih terasakan. Perbedaannya dengan desa adalah bahwa kehidupan kota pra-industri sudah mengalami skala dan diferensiasi kerja dan spesialisasi, sedang kegiatannya yang dominan adalah non-agraris.[40] Jika ketiga faktor itu terus

[38] Max Weber, " Apakah yang Disebut Kota", Terjemahan Darsiti Soeratman, dalam Sartono Kartodirdjo (ed.), *Masyarakat Kuno dan Kelompok-kelmpok Sosial* (Jakarta: Bhratara, 1977), hlm. 11-39.

[39] Gideon Sjoberg, *The Pre-industri City: Past and Present* (New York: The Free Press, 1966), hlm. 27-3.1

[40] *Ibid*., hlm. 54.

menerus mengalami kemajuan dan perkembangan, maka fungsi sebuah kota akan semakin kompleks.[41] Kompleksnya masalah ini sesungguhnya merupakan karakter dari sebuah kota yang dinamis.

P.K.J.M. Nas dalam bukunya yang lain, membagi sejarah perkembangan kota-kota di Indonesia atas empat periodesasi, yaitu *the Early Indonesia Town; the Indische Town; the Colonial Town; dan the Modern Town*.[42] Pendapat Nas ini sebanding dengan yang disampaikan oleh Mc Gee yang membagi jenis kota di Asia Tenggara tiga kelompok, yaitu kota-kota pribumi yang agraris, kota pusat dagang

[41] Akibatnya adalah akan timbul pula kesulitan untuk memberikan defenisi kota secara komprehensif dan representatif karena setiap pakar akan lebih cenderung mengemukakan defenisi kota menurut disiplin ilmunya masing-masing. Nas menyebutkan ada sembilan definisi kota yang diberikan oleh ahli perkotaan dan kemudian ia merumuskan kota atas aspek-aspek morfologi, kriterium mengenai jumlah, sosial, ekonomi, dan hukum. P.J.M. Nas, *Kota di Dunia Ketiga: Pengantar Sosiologi*, *Bagian Pertama*, Terjemahan Sukanti Suryochondro (Jakarta: Bharatara Karya Aksara, 1979), hlm. 27-38. J.H. de Goede, seorang sosiolog perkotaan, mencoba menarik generalisasi dari berbagai definisi itu. Ia mengajukan ciri-ciri yang harus dimiliki oleh sebuah kota dan yang sekaligus menjadi penentu dalam pertumbuhan dan perkembangannya. *Pertama*, peranan besar yang dipegang oleh sektor sekunder (industri) dan tersier (jasa) dalam bidang kehidupan ekonomi. *Kedua*, jumlah penduduk yang relatif besar. *Ketiga*, heterogenitas susunan penduduknya. *Keempat*, kepadatan penduduk yang relatif besar. J.W. Schoorl, op. cit., hlm. 264.

[42] Peter J.M. Nas (eds.), *The Indonesian City* (Dordrecht: Ffforis Publications, 1986), hlm. 5-13.

pribumi, dan kota pusat kekuasaan kolonial.[43] Berdasarkan kategorisasi dan periodesasi yang diberikan oleh kedua sosiolog perkotaan dan sejarawan perkotaan itu menunjukkan bahwa kota-kota di Nusantara (Indonesia) sudah ada jauh sebelum kedatangan Islam, apalagi kedatanagan bangsa Barat, seperti Indrapura dan Barus yang terdapat di pantai Barat Sumatera.

Berbeda dengan pantai Barat, kemunculan dan kehadiran kota di daerah Dataran Tinggi Sumatera Barat relatif baru. Kota-kota di daerah ini, seperti Bukittinggi, Padangpanjang, Batusangkar, Payakumbuh, Solok, dan Lubuk Sikaping muncul lebih disebabkan karena adanya penjajahan Belanda. Artinya, pemerintah Hindia Belanda lah yang membangun kota itu, yang tentu saja lebih bercorak sebagai kota kolonial. Oleh karena itu kemunculan kota-kota itu dapat diperkirakan pada peruh pertama abad ke-19, ketika berhasil menguasai daerah dataran tinggi itu dan memenangkan Perang Paderi (1819-1837) dengan mengalahkan Tuanku Imam Bonjol dan Kaum Paderi. Untuk itu dapat mengeksploitasi daerah itu pemerintah Hindia Belanda membangun berbagai infrastruktur yang diperlukannya di daerah itu, yang kemudian berkembang menjadi kota-kota yang disebutkan di atas.

Sungguhpun demikian, pemerintah kolonial tidaklah meneruka daerah baru untuk membangun kota-

[43] T.G. Mc. Gee, *The Southeast Asian City: A Sosial Geography of the Primate Cities of Southeast Asia* (London: G. Bell and Sons, 1967), hlm. 44-45 dan 62.

kota tersebut, tetatpi dengan mengembangkan pasar-pasar nagari yang telah ada sebelumnya. Pada awalnya dibangun benteng pertahanan berserta infrastrukturnya, lalu dilanjutkan dengan membangun gudang-gudang, tempat pengumpulan berbagai komoditi eksport dari daerah itu. Seiring dengan itu dan tentu yang lebih utama adalah dibangunnya pula sistem pemerintahan kolonialnya.

Berbeda dengan kota-kota dataran tinggi lainnya, Sawahlunto dibangun oleh pemerintah Hindia Belanda karena di buminya ditemukan doposit sumber daya mineral batu bara. Kalau kota-kota lainnya dibangun karena komoditi pertaniannya, maka kota Sawahlunto dibangun karena batu baranya. Hal itu pulalah yang menyebabkannya berbeda: tumbuh dan berkembang sebagai kota tambang satu-satunya di Sumatera Barat. Akan tetapi, pemerintah kolonial memperlakukannya sama, yaitu sebagai kota kolonial. Artinya kota itu lebih berfungsi sebagai pusat eksploitasi komoditi daerah sekitarnya dan sebaliknya juga dijadikan sebagai tempat pemasaran hasil industri Negeri Belanda atau negara Eropa lainnya. Sehingga, wajah kota itu lebih bersifat parasitif, bukan generatif. Singkatnya, apapun yang dibangun oleh Belanda pada prinsipnya itu adalah untuk kepentingan kolonialnya, bukan untuk menyejahterakan warga atapun masyarakat asli sekitaryanya.[44]

[44] Kota kolonial mempunyai tiga ciri: *Pertama*, pemukiman sudah stabil, terdapat garnizun dan pemukiman pedagang, serta tempat penguasa kolonial dalam menyelenggarakan aktivitasnya. *Kedua*, lokasinya dekat jaringan transportasi, seperti laut, sungai atau persilangan jalan. Hal ini ditujukan untuk kemudahan mengangkut

B. Asal Muasal Kota

Kata Sawahlunto berasal dari dua suku kata, yaitu sawah dan lunto. Sawah itu terletak di sebuah lembah yang dialiri sebuah anak sungai yang bernama Batang Lunto, yang sekaligus juga berfungsi untuk mengairi areal persawahan itu. Anak sungai itu berhulu di lembah bukit-bukit Nagari Lumindai di sebelah Barat, lalu mengalir ke Nagari Lunto dan mengairi areal persawahan penduduk di sana. Dari kondisi yang demikianlah muncul nama Batang Lunto, yang sekarang membelah kota "lama" Sawahlunto. Selanjutnya, anak sungai itu mengalir ke arah Timur dan menyatu dengan Batang Ombilin yang berhulu dari Danau Singkarak di sebelah Utara dan kemudian terus ke arah Timur membentuk Batang Kuantan. Selanjutnya, Batang Kuantan itu menjadi Sungai Indragiri yang bermuara di pantai Timur Sumatera bagian Tengah (Selat Malaka atau Selat Sumatera).

Nama "Sawahlunto" itu sudah dikenal sejak daerah itu di-taruko" menjadi areal persawahan oleh nenek moyang masyarakat Nagari Kubang pada masa dahulunya. Akan tetapi, selain mereka menamai daerah itu dengan "Sawah Lunto", mereka juga menamainya dengan "Sawah Aru" karena di sekeliling areal persawahan itu ditanami

---

barang-barang, baik yang akan diekspor maupun impor. *Ketiga*, kota kolonial ditekankan kepada pengembangan wajah pisik kota, kegiatan ekonomi, dan penataan infrastruktur yang meniru model-model Eropa. F.A. Sutjipto Tjiptoatmioyo, " Kota-kota Pantai di sekitar Selat Madura (abad XVII sampai medio Abad XIX)" *Disertasi Doktor* (Yogyakarta: Fakultas Pascasarjana Universitas Gajah Mada, 1983), hlm. 507.

dengan pohon Aru, sejenis tanaman bambu. Pohon Aru itu sengaja ditanam dengan maksud untuk menjadi pagar pelindung bagi sawah-sawah itu dari gangguan binatang liar, seperti gajah dan babi.

Sementara orang Belanda menyebut "Sawahlunto" dengan "*Lunto Kloof*" (kloof=lembah) karena terletak di sebuah lembah yang dikelilingi oleh perbukitan. Kondisi itu direkam dalam sebuah potret yang dibuat oleh Ir.Th.F.A. Delprat sebelum daerah itu dikembangkan menjadi kawasan pusat pertambangan batu bara. Potret itu memperlihatkan hamparan areal persawahan dan sebuah sungai yang mengalir berliku dengan latar belakang perbukitan.

Landschap van Sawahloento voor de ontginning van de mijnen, Padangse Bovenlanden, Sumatra`s Westkust, Sumber Foto: *troppenmuseum.nl* (60003628).

Dalam foto itu tidak terlihat adanya pemukiman penduduk. Berkemungkinan pada masa itu daerah "Sawahlunto" atau "Sawah Aru" atau *"Lunto Kloof"* itu masih berupa *taratak*. Maksudnya, di daerah itu sudah berpenghuni, tetapi tempat tinggalnya (rumahnya) masih berupa dangau dan mereka belum menetap secara permanen di sana. Mereka akan menginap di sana, jika hal itu diperlukan, seperti untuk menjaga sawah yang hampir panen. Kemudian, pada perkembangan selanjutnya, mereka akan mendirikan rumah yang sederhana yang dapat ditempati oleh keluarganya. Pilihan untuk menetap di sana lebih disebabkan untuk menunjang aktifitas mereka sehari-hari sebagai petani. Selain itu, juga untuk menjaga areal pertanian dari gangguan binatang, seperti gajah dan babi. Akan tetapi, mereka belum boleh mendirikan suku sendiri dan sepenuhnya masih tetap menjadi anggota sukunya asalnya. Oleh karena itu, sebagaimana galibnya dalam sistem sosial masyarakat Minangkabau, maka mereka tetap terikat kepada nagari asalnya, baik secara budaya, sosial, maupun politik. Sehingga, mereka akan tetap dapat pulang ke sukunya masing-masing di Nagari Kubang, kapan saja mereka mau.

Bila daerah itu diteruka atau bila ada "pemukiman" di sana juga tidak ditemukan fakta sejarahnya. Bahkan, de Greve dan Kalshoven yang menyelidiki adanya "emas hitam" atau batu bara di sana pada tahun 1867 menyebutkan bahwa daerah itu belum didiami oleh manusia. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Verbeek pada tahun 1875 ketika meneliti deposit batu bara di daerah itu yang berjumlah lebih dari 200 juta ton.

Akan tetapi, keadaan itu tampaknya mulai mengalami perubahan setelah dilakukan pembebasan lahan tambang batu bara pada tanggal 27 Juli 1886, ketika daerah itu secara resmi diserahterimakan untuk dijadikan areal pertambangan batu bara. Serah terima itu didasarkan atas Akte Notaris yang dikeluarkan oleh E.L. van Rouvery selaku Asisten Residen Tanah Datar. Sebagai wakil dari penduduk setempat dalam penandatanganan akte itu adalah Djaar Sutan Pamuncak yang menjabat sebagai Kepala Laras Silungkang dan sebagai penerimanya adalah Hendrik Yakubos Shuuring yang memegang konsesi pertambangan batu bara dari pemerintah colonial Belanda. Sejak itu, kawasan itu mulai ramai didatangi untuk mempersiapkan segala sesuatunya yang berhubungan dengan penambangan batu bara nanti. Bila "rantiang dipatah, aia disauak" di sana untuk menjadikannya sebagai pusat pertambangan batu bara dan sekaligus sebagai titik awal berdirinya "kota" Sawahlunto, yang mengubah taratak itu, tidak pula ditemukan fakta sejarahnya.

Diperkirakan Sawahlunto mulai menjadi daerah pemukiman pada tahun 1887, ketika Belanda menanamkan modal sebesar 5,5 juta gulden untuk merealisasikan konsensi tambang batu bara di sana.[45] Informasi lain yang diperoleh menyebutkan bahwa pada tahun 1891 dimulai usaha pertambangan dan dengann produksi perdana mulai pada tahun 1892. Atau 6 (enam) tahun setelah

[45] Lembaga Pengabdian pada Masyarakat ITB, *Rencana Kota Wisata Tambang Sawahlunto, Buku 1* (Bandung: LPM ITB, 2001), hal. 19.

penandatanganan konsensi itu. Batu bara itu diangkut dengan kuda beban ke Muarakalaban melalui jalan setapak dan seterusnya dibawa ke pelabuhan Emmahaven (sekarang: Pelabuhan Teluk Bayur) di Padang dengan menggunakan angkutan kereta api.

Pada tahun yang sama (1892), nama Sawahlunto juga baru tercantum dalam *Regeering Almanak van Nederlandsch-Indie.* Hal itu menunjukkan bahwa pada tahun itu Sawahlunto secara resmi masuk dalam peta geo-politik pemerintah Hindia Belanda. Atau, dengan kata lain pada tahun itulah adanya pengakuan tentang keberadaannya secara resmi. Akan tetapi, tentu dapat pula dipahami bahwa pencatatan itu membutuhkan waktu untuk memprosesnya. Jadi sebelumnya telah dilakukan proses pencatatannya. Proses pencatatan itu berkemungkinan besar dilakukan setelah adanya penandatanganan konsensi serah terima kawasan tambang itu (1886) yang dijadikan dasar hukum pembukaan pertambangan batu bara oleh Pemerintahan Hindia Belanda. Selain itu, Akte Notaris itu juga dapat berarti bahwa kawasan tambang yang diserahkan itu telah menjadi "milik" pemerintah, sehingga seyogianya pula dimasukkan dalam peta geo-politik Hindia Belanda.

Penelusuran fakta sejarahnya itu dapat juga dikaitkan dengan saat Pemerintahan Hindia Belanda mengeluarkan keputusan tentang batas-batas ibukota *Afdeeling* yang ada di Sumatera Barat pada tanggal 1 Desember 1888. Penentuan ibukota *Afdeeling* itu sudah barang tentu berkaitan erat dengan daerah-daerah yang berada dalam wilayahnya itu. Oleh karena itu, pada

tanggal 1 Desember 1888 itu dapat dikatakan bahwa Sawahlunto mulai diakui keberadaannya dalam administrasi pemerintahan oleh pemerintahan Hindia Belanda sebagai bagian dari wilayah *Afdeeling Tanah Datar.* Hal itu seiring dengan persiapan pembangunan prasarana transportasi kereta api tahun 1887 dan pelabuhan Emmahaven (sekarang: Telukbayur) sebagai penunjang proses pengeksporan produksi batu bara dari Sawahlunto.

Pada sisi lain, secara kebetulan pula pada tahun 1888 itu mulai pula ditetapkan sebuah Natijah (Kalender 100 tahun) yang dibuat oleh para ulama tariqat di daerah di sekitar Sijunjung yang termasuk dalam *Afdeeling* Tanah Datar. Natijah itu ditemukan oleh seorang petualang Jerman, Alfred .... yang sedang mengadakan perjalanan ke daerah Sijunjung dan Dataran Tinggi Sumatera Barat/Minangkabau. Hal itu menunjukkan pula bahwa jaringan ulama tariqat yang berakar kepada hubungan guru-murid telah berjalan dengan baik. Kalender itu menjadi acuan bagi para ulama tariqat yang berjauhan daerahnya untuk menetapkan tanggal-tanggal penting, seperti awal Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha. Selain itu, kalender itu dapat pula dijadikan ukuran waktu kapan untuk melakukan kunjungan kepada guru tariqat yang lebih "tua". Fakta itu didukung pula oleh berdirinya beberapa surau tariqat, seperti di Kolok dan Talawi.

Fakta itu didukung pula dengan adanya masjid-masjid, yang tentu juga berfungsi sebagai lembaga pedidikan tradisioal surau. Pada tabel berikut dapat dilihat masjid/surau yang sudah didirikan pada abad ke-19 yang lalu.

Tabel
Nama-nama Surau atau Masjid Tua
di Kota Sawahlunto

No.	Nama Masjid & Tahun Didirikan		Lokasi
1.	Masjid Taqwa	1834	Kubang Tangah
2.	Masjid Ar-Rahman	1835	Lunto Timur
3.	Masjid Islam	1852	Kubang Sirakuak Utara
4.	Masjid Al-Hidayah	1854	Aia Dingin
5.	Masjid Baitun-Nur	1860	Pasar Kubang
6.	Masjid Syuhada	1876	KubangSirakuak
7.	Masjid Nurul Yakin	1881	Selatan
8.	Masjid Baru	1889	Lunto Barat
			Lunto Barat

Sumber: *Kantor Dinas Agama Kota Sawahlunto dan Direktori Masjid Langgar Mushallla Daerah Tingkat II Kodya Sawahlunto* (Departemen Agama Tingkat II Kodya Sawahlunto) 1997-1998.

Dengan adanya 8 (tujuh) buah masjid atau surau tua itu menunjukkan bahwa kehidupan keagamaan di daerah itu sudah relatif baik. Demikian juga halnya dengan hubungan antara guru-murid dan sesama anggota tariqat yang sudah tentu terimplikasi pula kepada hubungan antar nagari atau daerah itu. Pembuatan Natijah/kalender 100 tahun itu menunjukkan pula adanya kepakatan para ulama tariqat, sehingga jadwal puasa terutama, dapat ditentukan secara serentak oleh para ulama dan kemudian disampaikan kepada murid-murid dan pengikutnya

masing-masing. Maka, tahun 1888, awal ditentukan natijah itu, dapat pula dilihat sebagai masa dimulainya hubungan sosio-keagamaan yang dilakukan secara sistematis oleh para ulama di daerah itu.

Penelusuran fakta sejarah lebih jauh ke belakang untuk mengetahui kapan nenek moyang mulai "manaruko" sawah dan ladang itu sangat mustahil dapat dilakukan. Selain itu juga tidak relevan dengan konsep kota yang telah dikemukakan, yakni adanya kehidupan yang plural, baik dalam artian ekonomis maupun sosiologis. Oleh karena itu titik-titik yang mendekati untuk mengetahui awal atau cikal bakal kota Sawahlunto lebih tepat jika dikaitkan dengan penambangan batubara. Hal itu sangat logis karena batu bara itulah yang telah merubah areal persawahan dan peladangan yang terletak di lembah itu dan dialiri oleh Batang Lunto menjadi pusat kota Sawahlunto sekarang. Akan tetapi, hal itu tidak pula harus berarti saat dimulai produksi perdananya (1892), karena sebelum itu sudah dilakukan persiapan-persiapan ke arah itu.

Berkah batu bara itu juga dinikmati oleh daerah Sumatera Barat. Untuk mengangkut batu bara dari Sawahlunto ke Pelabuhan Teluk Bayur (Emmahaven) di Padang dibangunlah jaringan kereta api yang panjangnya 155,5 km sebagai angkutan alternatif yang terbaik pada waktu itu. Jalur kereta api yang dibangun tidak saja menghubungkan Sawahlunto dengan Emmahaven dan daerah-daerah yang laluinya, seperti Muara Kalaban, Solok, Padangpanjang, Kayu Tanam, Sicincin, Lubuk Alung dan Padang, tetapi juga ke kota-kota lainnya, seperti

Bukittinggi, Payakumbuh, dan Pariaman. Daerah-daerah yang dilalui atau menjadi tujuan dari jalur kereta api dapat terjangkau dan lalu lintas orang dan barang dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Sebelumnya, jasa angkutan yang menjadi andalan untuk menghubungkan daerah-daerah itu hanyalah kereta kuda (bendi) atau kereta kerbau (pedati) atau ada juga yang menggunakan jasa orang dan kuda beban. Sampai berakhirnya penjajahan Belanda dan bahkan sampai awal tahun 1970 transportasi kereta masih menjadi pilihan utama masyarakat Minangkabau (Sumatera Barat).

Keputusan untuk membangun jalur kereta api untuk membawa batu bara dari Sawahlunto ke Pelabuhan Teluk Bayur diputuskan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1878 dan kemudian ditetapkan menjadi undang-undang perkerataapian di Sumatera Barat sebagaimana tercantum dalam Staatsblad van Nederlansch-Indie No. 163 tanggal 6 Juni 1887. Untuk menindaklanjutinya maka dikeluarkanlah Surat Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda tentang Dinas Perkeretaapian Sumatera Barat tertanggal 17 September 1887.

Pembangunan jalur kereta api sepanjang 155,5 km dilakukan secara bertahap: pertama, Emmahaven (Teluk Bayur)–Padang dan Padang–Padangpanjang yang panjangnya 67,5 km diresmikan pada tanggal 30 Juli 1891; kedua, Padangpanjang–Solok yang panjangnya 53 km dan Solok–Muarakalaban yang panjangnya 23 km diresmikan pada tanggal 1 Oktober 1892; ketiga, Muarakalaban–Sawahlunto yang panjangnya 12 km diresmikan 1 Januari

1894. Selain itu dibangun pula 3 jalur kereta api lainnya, yaitu dari Padangpanjang ke Bukittinggi terus ke Payakumbuh dan Halaban; dari Lubukalung ke Pariaman terus ke Sintuk; serta dari Padang terus ke Pulau Aia.

Dimulainya produksi perdana penambangan tambang batu bara pada tahun 1892 berarti sebelumnya telah ada kehidupan di sini. Paling tidak sejumlah tenaga kerja sudah didatangkan ke sini untuk melakukan penggalian batu bara. Hal itu berarti pula bahwa di sini telah ada sektor perekonomian masyarakat yang non-agraris, sungguhpun tidak diketahui berapa jumlah orangnya.

Hal itu diperkuat pula bahwa pada tahun 1887 sudah dicanangkan untuk membangun jalur keret api dari Sawahlunto ke Emmahaven (sekarang: Pelabuhan Telukbayur) di Padang. Jaringan jalan kereta api ini sedianya adalah untuk membawa batu bara dari Sawahlunto ke Padang untuk kemudian di ekspor. Akan tetapi, jaringan kereta api itu baru selesai dibangun pada tahun 1894. Selama tiga tahun batu bara dibawa dengan kuda beban dan pedati dari Sawahlunto ke Maurakalaban, yang terletak sebelah Timur dan berjarak sekitar 5 km dari Sawahlinto. Dari Muarakalaban dibawa dengan kereta api yang jaringan kereta api

.

C. Pembebasan Tanah Tambang Batu Bara Ombilin

Penemuan batu bara di sepanjang Batang Ombilin dan wilayah Sawahlunto sekitarnya menarik minat investor-investor untuk menanamkan modalnya dalam bisnis ini. Pada tahap awal, untuk melakukan

penambangan batu bara Ombilin itu haruslah melewati dua tahap, yaitu pertama, proses pembebasan tanah dari kaum adat setempat dan kedua, konsesi penambangan dari pemerintah kolonial Belanda.

Dalam pelaksanaannya, pembebasan tanah diselesaikan secara hukum adat Minangkabau, sedangkan masalah konsesi penambangan berhubungan oleh pemerintah kolonial Belanda. Kedua proses ini berjalan pada proses awal penambangan batu bara Ombilin. Pemerintah kolonial Belanda dan pimpinan adat mengadakan perjanjian untuk membebaskan tanah di areal tambang. Pembebasan tanah dilakukan secara hukum adat setempat, sedangkan konsesi dilaksanakan oleh pemerintah kolonial Belanda.[46]

Masalah pembebasan tanah yang akan ditambang oleh pemerintah Kolonial Belanda pada prinsipnya berhubungan erat dengan hukum pribumi atau hukum adat setempat. Hukum adat yang dimaksudkan adalah hukum adat Minangkabau. Hukum adat di Minangkabau memiliki konsep tersendiri tentang pola pemilikan tanah, sehingga dalam pembebasan tanah yang mengandung batu bara di Ombilin mengalami proses pembebasan tanah berdasarkan pola-pola hukum adat Minangkabau. Persoalan seperti ini menjadi suatu hal yang lazim,

[46] Lebih jauh lihat misalnya Okira Oki, *Social Change in West Sumatra. Village 1908 – 1945.* Camberra: Thesis pada Australian National University, 1977, hal. 122 – 129. Lihat juga misalnya, Joel S. Kahn, *Constituting the Minangkabau, Peasants, Culture and Modernity in Colonial Indonesia*. London: A University College London, 1988), hal. 217 – 220.

terutama upaya pemerintah untuk mendapatkan tanah yang mengandung kekayaan alam yang potensial.

Satu segi, pemerintah kolonial Belanda menghormati hak-hak atas tanah ulayat. Namun segi lain, jumlah ganti rugi yang tidak sesuai dengan harga yang sesungguhnya membuat makna dari ganti rugi itu memang merugikan masyarakat adat. Ungkapan Balando minta menjadi anekdot yang kuat dalam masyarakat. Belanda minta tanah, ungkapan tentang Belanda minta tanah dari sejengkal menjadi sedepan, sedepa menjadi sehektar, dan kemudian menjajah. Pola seperti ini juga berlaku dalam pembebasan tanah TBO Ombilin, apalagi posisinya sebagai orang kuat dan juga ukuran-ukuran yang digunakan dalam pembebasan tanah tidak sama dengan pola yang ada sekarang ini. Selain itu, kondisi tanah yang umumnya ladang ilalang, dan batas tanah yang tidak tegas, kondisi seperti ini menempatkan pemerintah kolonial Belanda lebih leluasa dalam mencaplot tanah rakyat.

Pada masa-amasa awal penemuan dan penambangan batu bara, masalah harga tanah juga tidak memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Posisi tanah yang mengandung batu bara dan tidak bisa dikelola jadi lahan pertanian dan perkebunan, menempatkan nilai tanah semakin rendah.[47] Sementara itu masyarakat setempat tidak

[47] Bahkan sampai tahun 1960-an, tanah sawah, yang nilainya jauh lebih produktif dapat digadaikan dengan l sampai l lusin kain sarung bugis, yang pada waktu itu merupakan simbol kekayaan dan status sosial yang tinggi. Penghulu misalnya, diwajibkan memakai kain sarung Bugis, sebagai salah satu aksesoris yang dipakainya dalam upacara-upacara adat. Akan merasa terhina kaumnya, jika seorang penghulu tidak memiliki kain Bugis.

memiliki teknologi untuk mengelola batu bara ataupun kegunaan yang lebih bermanfaat, sehingga kandungan batu bara itu yang mereka miliki jadi barang tidak berharga. Orang-orang Belandalah yang mengetahui dan memiliki teknologi kegunaan batu bara, sehingga mereka jauh-jauh kepedalamansumatera ini untuk menambangnya.

Masalah konsesi menyangkut proses perizinan penambangan batu bara dari pemerintah kolonial Belanda. Masalah konsesi penambangan berkaitan dengan hukum kolonial Belanda. Penerapan hukum kolonial dalam proses perijinan penambangan batu bara Ombilin disebabkan Pemerintah kolonial Belanda merupakan pemegang kekuasaan di Minangabau pada waktu itu. Untuk lebih jelas, uraian pada bagian berikut ini akan mencoba membahas masalah pembebasan areal tanah tambang batu bara Ombilin yang berhubungan dengan hukum adat Minangkabau.

Ditinjau secara keseluruhan, dalam proses pembebasan tanah ini berjalan lancar saja. Artinya, melihat kondisi tanah yang selama ini tidak digunakan sama sekali oleh penduduk di sekitar areal penambangan, karena tidak dapat ditanami, ataupun nilai ekonomis yang lainnya, maka penduduk melepaskan tanah itu untuk ditambang. Hukum adat melihatnya dalam konteks memberi ijin usaha terhadap orang luar.[48] Dalam nada yang sama, Rusli Amran

[48] Secara hukum adat, terutama pada Luhak nan Tigo, izin pemanfaatan tanah untuk asing seperti orang Belanda tidak diizinkan. Namun Ombilin ini berada di luar Luhak nan Tigo, sehingga aturan adatnya longgar. Secara hukum adat, bila tanah digarap oleh orang luar, maka haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut yaitu; membayar

menyebutkannya proses pembebasan tanah sebagai berikut;[49]

Para penghulu, sebagai wakil seluruh nagari, menjaga agar dal;am setiap penjualan jangan ada tanah yang jatuh pada orang-orang diluar nagari. Prioritas pertama diberikan kepada anak nagari bersangkutan. Kalau ada transaksi demikian, harus pula mengisi adat, mengadakan jamuan makan, pemberian hadiah pada para penghulu. Barulah penjualan dianggap syah. Pola penjualan ini berlaku untuk orang sekampung, sedangkan untuk orang luar kampung, hal ini tidak berlaku. Dalam hal ini, pola pembebasan tanah oleh Belanda bersifat konsesi atau imbalan terhadap tanah yang diambil hasilnya.

Sebelum melakukan pembahasan tentang pembebasan tanah yang memiliki kandungan batu bara, maka haruslah dilihat pola kepemilikan tanah yang berlaku di Minangkabau. Tanah di Minangkabau adalah milik suatu kaum, yang dikenal dengan nama tanah ulayat.[50] Sebagai tanah kaum, maka tanah merupakan harta pusaka tinggi dalam masyarakat. Pada tanah yang demikian itulah,

---

bea. Jangka waktu pengerjaan tanah terbatas. Tidak boleh memindahkan hak pada orang lain. Pemegang izin wajib mengembalikan pada penghulu yang memberinya izin. Apabila penggarap itu meninggal, maka garapannya menjadi harta gantung sampai waktu tertentu. A. A. Navis, *Alam Terkembang Jadi Guru*. Jakarta: Grafiti, 1996, hal. 152 – 153.

[49] Rusli Amran, *Sumatera Barat Plakat Panjang*. Jakarta: Sinar Harapan, 1985, hal. 262.

[50] A. A. Navis, *Ibid*.

pemerintah kolonial Belanda berusaha untuk mendapatkan tanah untuk dijadikan sebagai areal penambangan batu bara. Batu bara Ombilin terdapat pada areal yang luas dan tersebar diberbagai tempat di sekitar daerah Sawahlunto. Salah satu contoh dari luas tanah yang mengandung batu bara adalah Sungai Durian, Sigalut, Lunto dan Lurah Gadang. Pada daerah ini diperkirakan batu bara terdapat dalam areal sekitar 6000 Ha itu diperkirakan jumlahnya mencapai 2.125 juta ton.[51] Untuk jelas, rincian kandungan batu bara itu, dapat dilihat tabel II

Tabel II
Perkiraan Jumlah Batu Bara Ombilin Sawahlunto
(dalam 1.000 ton)

Daerah Tambang	Lapisan A	Lapisan B	Lapisan C	Total
Sungai Durian	100.000	_	1.800.000	1.900.000
Sigalut	130.000	-		130.000
Lunto	65.000	-	5.000	70.000
Lurah Gadang	5.000	-	10.000	25.000
Jumlah	210.000		1.815.000	2.125.000

Sumber : "Verslag van den Sumatra-staatsspoorweg en van de Ombilinmijnen Over 1915", dalam, *Indische Gids, I.* Amsterdam : JH. de Bussy, 1917, hal. 419.

[51] Luas areal batu bara ini belum termasuk diberbagai tempat lainnya seperti di Tanjung Ampalu, Padang Sibusuk, Sawahlunto dan Hulu Lunto. L. de Bree, *Nederlandsch-Indie in de Twintigste Eeuw in 1900 – 1913*. (Batavia: G. Kolff & Co. 1916) hal. 467.

Berdasarkan tabel yang dikemukakan diatas akan dapat memberikan gambaran tentang batu bara Ombilin. Gambaran yang ada bahkan sudah memperkirakan dalam setiap lapisan. Dalam perhitungan itu, angka bersifat perkiraan saja. Walaupun bersifat perkiraan, namun secara jelas dalam laporan itu dituliskan tiga wilayah yang mengandung batu bara yaitu Durian, Lunto dan Panjang. Ketiga wilayah inilah yang kemudian ditambang oleh pemerintah kolonial Belanda. Tambang yang pertama adalah di Sungai Durian.[52] Pemilihan lokasi ini adalah disebabkan jumlah cadangan batu bara yang tersedia relatif besar.

Dalam penghitungan tentang kandungan batu bara, cara yang dipakai hanyalah bersifat rekaan ataupun perkiraan saja. Sebagai sebuah perkiraan, maka angka yang dikemukakan tidaklah mengandung sebuah jumlah yang pasti. Dapat dengan mudah dipahami, jika terdapat perbedaan dalam setiap laporan tentang jumlah batu bara satu lokasi dengan lokasi lainnya.

Hal ini akan terlihat dari laporan lainnya akan berbeda dengan laporan seperti tabel diatas. Melalui perbandingan seperti ini, akan dapat memberikan suatu gambaran bahwa kandungan batu bara yang dibuat oleh para ahli geolog bersifat perkiraan atau rekaan saja. Sebagai sebuah perkiraan, angka yang dikemukakannya bukan sebuah jumlah yang pasti.

---

[52] *Verslag der Exploitatie van de Staatsspoorweg ter Sumatra`s Westkust en van de Ombilin-Kolenvelden*. Batavia : Landsdrukkerij, 1893, hal . 1 – 10.

Melalui perbandingan antara tabel di atas dengan laporan yang dibuat Verbeek akan terlihat perbedaan kandungan batu bara yang terdapat di Ombilin. Dalam laporan yang ditulis oleh Verbeek, ia memperkirakan jumlah kandungan batu bara yang terdapat di berbagai tempat di Ombilin Sawahlunto sebanyak 197 juta ton. Untuk lebih jelasnya, melalui peta dibawah ini akan memperlihatkan kandungan batu bara di beberapa tempat di Ombilin.

Sumber: Staatspoorweg ter Sumatra's Westkust en van de Ombilin Kolekvelden 1897 bijlage 11.

Peta sebaran batu bara Ombilin batu bara di Parambahan 20 juta Ton, Sigalut 80 juta ton, sedangkan Sungai Durian 93 juta ton dan Lurah Gadang 4 juta ton. Sedangkan untuk deposite batubara di daerah Sugar dan Lunto tidak disajikan. Hal ini bukan berarti diwilayah ini tidak terdapat cadangan batubara.[53] Perkiraan batu bara menjadi lebih dari 200 juta ton tentu dengan memasukan kedua wilayah tersebut. yang tersedia bersifat perkiraan saja. Dari kandungan yang sedemikian banyak itu, pemerintah Kolonial Belanda membebaskan tanah ulayat itu dengan berbagai cara seperti pesta adat.

Tabel XI
Perkiraan Jumlah Deposite Batu Bara Ombilin-Sawahlunto

Daerah Tambang	Jumlah
Parambahan	20.000.000
Sigalut	80.000.000
Sungai Durian	93.000.000
Loerah Gadang	4.000.000
Sugar	?
Total	**197.000.000**

Sumber: Diolah dari R.D.M. Verbeek, Sumatra's Westkust, "Verslag No. 3, Het Ombilin Kolenveld in de Padangsche Bovelanden", dalam, *Jaarboek van het Mijnwezen in Nederlandsch Oost-Indie.* (Amsterdam: C.F. Stemler, 1875), hal. 82.

[53] R. D. M. Verbeek, *op. cit.* , hal . 82.

Dalam menyelesaikan persoalan ganti rugi tanah kaum ini, penduduk diwakili oleh elite tradisionalnya yaitu penghulu. Penghulu ini diangkat oleh pemerintah Belanda. Dalam persoalan tanah di Minangkabau, peranan penghulu amat besar. Keputusan diambil oleh seorang penghulu setelah melakukan musyawarah dengan kaumnya. Berdasarkan hasil musyawarah itu penghulu mengajukan persyaratan yang diminta kepada pihak pemerintah.[54] Hal seperti ini akan terlihat dalam proses penyelesaian ganti rugi tanah tambang batu bara Ombilin Sawahlunto.[55]

Pemerintah Kolonial Belanda sendiri juga amat menyadari keharusan untuk membayar ganti rugi tanah masyarakat itu. Pemeritah berusaha untuk melakukan pembayaran ganti rugi atas tanah yang ulayat. Dalam laporan pemerintah Belanda menyatakan, bahwa masalah pembebasan tanah juga harus diperhitungkan dan dimasukkan kedalam rancangan anggaran penambangan batu bara Ombilin.[56] Hal ini akan trlihat dari beberapa cara pemebasan tanah yang dilakukan pemerintah Kolonial belanda terhadap tanah masyaerakat, baik melalui proses ganti rugi maupun dengan cara lainnya seperti pesta adat.

Ditinjau dari segi hukum adat yang terdapat di Minangkabau, tanah tambang batu bara Ombilin termasuk

---

[54] D. G. Stibee, *op. cit.* , hal. 32 – 42.

[55] Akira Oki, *op. cit.* , hal. 113 – 126.

[56] Okira Oki, *Ibid*. Sebagai catatan, Oki mengutip dari sumber-sember Belanda seperti tulisan Ijzerman, 31 Desember 1886 Np. 8820, dalam, B.H.F. van Heuzen, *Het Ombilin Steenkolenbedrijd door een Bestuursambtenaar Bezien.* (Korn Collection, 1931), hal. 40 – 56.

kedalam katagori tanah pusaka tinggi. Walaupun kondisi tanah yang mengandung batu bara bukanlah tanah yang dijadikan sebagai lahan garapan penduduk, namun dalam tinjauan hukum adat tetap termasuk kedalam harta pusaka tinggi. Wilayah tanah tambang batu bara ini hanya termasuk kedalam katagori hutan lepas.[57] Sebagai harta pusaka tinggi, pembebasan tanah haruslah tetap diselesaikan berdasarkan aturan-aturan hukum adat yang terdapat di Minangkabau.

Pengaturan tentang tanah yang mengandung barang berharga di wilayah pemerintah kolonial Belanda diatur berdasarkan hak-hak atas barang galian yang terdapat dalam tanah. Hak-hak atas barang galian atas tanah dirumuskan dalam sebuah undang-undang, yaitu *Nederlansch Indie Mijnwet,* yang dimuat dalam S. 1899 No. 214. Peraturan pelaksanaan Undang-undang ini dimuat dalam peraturan Pertambangan atau *Mijnordonantie*¸ 1930, No. 38.[58] Undang-undang di atas dibuat setelah dilaksanakannya berbagai proyek penambangan seperti pada batu bara Ombilin.

Pola pemilikan tanah di Minangkabau berbeda dengan sistem pemilikan tanah daerah lainnya seperti

---

[57] Hutan lepas merupakan tanah adat dalam katagori ketiga setelah tanah garapan seperti sawah dan ladang, tanah rambahan yaitu tanah yang sudah ditebangi, namun belum ditanami dan hutan lepas sebagai tanah yang belum di olah sama sekali. Pada umumnya areal tanah tambang terdapat pada katagori ketiga ini yaitu hutan lepas. Akira Oki, *op. cit.* , hal. 115.

[58] Sudikno Mertokusumo, *Perundang-undangan Agraria Indonesia.* Yogyakarta: Liberty, 1987, hal . 76.

Sumatera Timur, Jambi dan Sumatera Selatan. Pada daerah ini, tanah merupakan milik kerajaan, sedangkan rakyat hanya memiliki hak untuk mengelola saja. Dalam pemanfaatan tanah lebih mudah, disebabkan segala persoalan berhubungan degan satu tangan yaitu raja atau sultan.[59]

Sebaliknya, dalam sistem adat Minangkabau semua tanah yang terdapat dalam kesatuan adatnya adalah milik suatu suku atau kaum. Sebuah contoh adalah bukit yang terdapat dalam suatu negeri, maka pada bukit itu biasanya dimiliki oleh beberapa suku, sehingga dalam pembebasannya akan melibatkan banyak suku. Setiap penggunaan, jual-beli dan penggadaian, tergantung dari persetujuan setiap anggota suku yang terdapat dalam kaum itu untuk melakukannya.[60]

Dalam hukum adat Minangkabau, tanah ulayat atau pusaka tinggi pada prinsipnya tidak dibolehkan untuk diperjual-belikan. Harta pusaka tinggi hanya boleh digadaikan. Penggadaian harta pusaka tinggi berlaku pada kondisi-kondisi tertentu saja, terutama dalam kondisi-kondisi yang amat mendesak dalam keluarga. Adat Minangkabau merumuskan tiga kondisi yang dianggap

---

[59] Moehammad Said, *Koelie Kontrak Tempo Doeloe : Riwayat dan penderitaannya* . Medan: Waspada, 1977. Lihat juga Karl J. Pelzer, *Toean Keboen dan Petani, Politik Kolonial dan Perjuangan Agraria di Sumatera Timur 1863 – 1947*. Jakarta : Sinar Harapan, 1985, hal . 90 – 119.

[60] A.A. Navis, *op.cit.* hal . 160 – 165. Lihat juga misalnya Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau.* Jakarta: Gunung Agung, 1984, hal . 212 – 229.

sangat medesak, sehingga menggadaikan harta pusaka adalah perawan tua belum kawin, mayat terbujur diatas rumah dan rumah gadang kebocoran.[61] Persoalannya ialah kondisi masyarakat bukanlah pada keadaan yang terdesak seperti itu, sehingga diperlukan putusan adat untuk masalah pembebasan tanah itu.

Berdasarkan hal itu, tanah-tanah yang mengandung batu bara di Sawahlunto sesungguhnya merupakan tanah milik suku atau kaum yang terdapat di Sawahlunto itu. Suku-suku yang mendapatkan ganti rugi dalam pembebasan tanah tambang adalah suku Panai, Sipanjang, dan Payobada. Penggantian ini bukanlah dibagi kepada penduduk yang memiliki tanah, akan tetapi digunakan untuk upacara adat.

Sebagai tanah suku, maka suku itu mempunyai hak untuk menentukan pengelolaannya. Ditinjuau secara geografis tanah-tanah itu tidaklah dikelola oleh masyarakat karena bukanlah lahan yang subur untuk lahan pertanian, tetapi lebih merupakan perbukitan yang dipenuhi oleh batu-batuan. Perbukitan itu selama ini menjadi lahan yang tidak diolah. Tanpa memiliki pengetahuan tentang batu-batuan khususnya batu bara, maka tidaklah mungkin dapat mengetahui, mengelola dan memanfaatkan batu bara sebagai sumber energi.

[61] A. A. Navis, *Ibid.* , hal . 167 – 168.

Persyaratan untuk menambang batu bara haruslah memiliki dukungan baik teknologi maupun dana.[62] Melihat kondisi proyek penambangan batu bara merupakan suatu proyek besar, sementara masyarakat tidak mempunyai dana dan pengetahuan yang cukup mengenai manfaat batu bara, sehingga pada gilirannya pemerintah Hindia Belanda berkeinginan untuk menambang areal pertanahan yang mengandung batu bara dalam jumlah yang besar itu. Dorongan lainnya adalah perkembangan teknologi di Eropa terutama dengan ditemukannya batu bara sebagai sumber energi baru untuk berbagai kepentingan seperti kapal api, PLTU, kereta api, dan Pabrik semen. Penemuan penting seperti ini membuat pemerintah kolonial Belanda sangat berminat untuk menambang batu bara Ombilin itu.

Persoalan pokok adalah material pembebasan tanah pada saat awal penambangan, apakah pemerintah membayar ganti rugi atas tanah kaum yang mengandung batu bara itu. Joel S. Khan telah membahas secara ringkas masalah pembebasan tanah tambang itu. Dalam pembebasan areal tanah tambang, pemerintah menggunakan kedudukan penghulu untu mempengaruhi kaumnya, sehingga jauh lebih muda untuk membebaskan tanah.[63]

---

[62]Studi kelayakan tentang biaya yang dibutuhkan untuk penambangan dan sarana seperti transportasi, dibutuhkan dana sebanyak 12 juta gulden. Rusli Amran, *op. cit.* , hal. 311.

[63] Pola-pola seperti ini sudah lazim digunakan oleh Belanda dalam menyelesaikan berbagai persoalan dengan masyarakat. Belanda tinggal menunjuk penghulu dalam setiap nagari untuk penyelesaian ganti rugi

Dalam masalah ganti rugi tanah, pemerintah membayar ganti ruginya secara menyeluruh atau satu kampung. Artinya, pemerintah Belanda tidak membayar ganti rugi atas tanah penduduk secara perorangan, akan tetapi ganti rugi diberikan pada suatu kampung secara keseluruhan. Sebagai contoh adalah ganti rugi yang diberikan kepada kampung Kubang. Ganti rugi tidaklah diterima secara perorangan, akan tetapi secara menyeluruh dalam satu kampung.[64]

Uang ganti rugi yang diberikan oleh pemerintah Belanda dinamakan sebagai uang adat. Jumlah ganti rugi yang diterima oleh penduduk Kubang f 1.500,- dengan perincian, f 1.000 sebagai ganti rugi atas tanah yang mengandung batu bara edan f 500 untuk biaya pelaksanaan upacara adat.[65] Jadi uang yang diterima bukanlah dibagikan kepada penduduk, tetapi digunakan untuk pesta adat. Biaya yang dikeluarkan dalam pesta adat itu tidak hanya uang f 500 saja, tetapi juga diambil dari uang ganti rugi untuk tanah, karena pesta adat itu membutuhkan biaya dalam jumlah yang cukup besar.[66]

Beberapa Nageri lain yang juga mendapatkan ganti rugi dari pemerintah koonial Belanda. Sijantang misalnya mendapatkan gati rugi dari pemebasan tanah yang diambil

---

tanah. Bagi penghulu, hal inipun menjadi kehormatan baginya. Joel S. Kahn, *op. cit.* , hal . 240.

[64] Okira Oki, *op. cit.* , hal . 112.

[65] *Ibid.* , hal . 111.

[66] *Ibid.* , hal . 112 – 113.

Kolonial sekitar f 1.950.- Perincian dari ganti rugi itu diantaranya: [67]

1. Untuk 5 penghulu @ f 100 f 500.-
2. Untuk l chatib rajo (keturunan pendiri nagari) f 100.-
   Untuk kepala yang lebih rendah @ f 50.-
   Terdiri dari :

4 manti	f 200.-
5 malin	f 250.-
5 doebalang	f 250.-
2 oerang toeo	f 100.-
1 chatib adat	f 50.-
	f 850.-
Untuk pesta ra'jat	f 500.-
Total	f 1950.-

Dilihat dari angka-angka diatas, gambaran yang muncul adalah penghulu dan chatib rajo merupakan kelompok yang menikmati hasil pembebasan tanah itu. Mereka mendapatkan sekitar f 100.- setiap orang, sedangkan masyarakat secara keseluruhan hanya mendapatkan f 500.- secara bersama. Masyarakat dapat menikmati ganti rugi hanya lewat pesta adat/silih jarih. Kondisi riel yang ada pada waktu itu memang corak ganti rugi memang demikian.

Walaupun sudah ada kesepatakan di tingkat elite nagari, namun tidak semuanya merasakan bahwa mereka mendapatkan ganti rugi yang layak. Bahkan, dinagari kubang sendiri, keterlibatan elite penghulu dalam

[67] Arsip No. 3050/3 tanggal 2 Mei 1931.

pemberontakan 1927 tidak terlepas dari pencaplokan tanah mereka oleh Belanda. Keterlibatan Salim Sutan Malenggang sebagai penghulu Adat Kubang dan Salim Datuk Bandaro Sutan sebagai penghulu Adat Sikalang dalam pemberontakan 1927 disebabkan pemerintah Kolonial Belanda tidak membayarkan ganti rugi atas tanah mereka yang dicaplotnya untuk keperluan tambang batu bara. [68]

Dengan demikian, walaupun pembayaran ganti rugi ada, namun sebagian masyarakat juga ada yang tidak menerimanya. Bentuk uang ganti rugi tidak diterapkan secara menyeluruh oleh pemerintah pada tanah-tanah mengandung batu bara. Dalam proses pembayaran ganti rugi, pemerintah kolonial Belanda membayarnya kepada elite nagari dilakukan secara bertahap berdasarkan setiap pembukaan areal penambangan baru. Uang pembayaran tidak langsung diterima penduduk, akan tetapi melalui penghulu dan digunakan untuk keperluan pesta adat, seperti yang telah disebutkan tadi.

Dalam proses pembebasan tanah, pihak pemerintah menawarkan ganti rugi secara tahunan. Tawaran seperti ini tidak disetujui oleh penduduk. Persoalan pokok sebenarnya adalah pemerintah tidak berkeinginan untuk membayar ganti rugi atas tanah ulayat itu. Perbedaan pandangan antara penduduk dengan pemerintah tentang status tanah, mengakibatkan pemerintah enggan untuk membayar ganti rugi atas tanah itu.satu sisi penduduk

[68]Abdul Muluk Nasition, *Pemberontakan Rakyat Silungkang Sumatera Barat 1926-1927*. Jakarta: Mutiara, 1981.

beranggapan bahwa tanah yang mengandung batu bara itu adalah tanah kaumnya, namun pada sisi lain pemerintah beranggapan bahwa tanah itu hanya diakui sebagi hak guna. Perbedaan inilah yang menjadi persoalan yang mendasar dalam pembebasan tanah tambang batu bara Ombilin.[69]

Masalah ganti rugi atas tanah ulayat dianggap sebagai pemindahan hak teritorial nagari, sehingga dianggap sebagai hak pakai. Berdasarkan pemikiran seperti itu, pemerintah berusaha untuk mengaburkan konsep tanah ulayat dengan tujuan menghindari ganti rugi. Walaupun akhirnya pemerintah tetap membayar ganti rugi atas tanah itu, namun jumlah yang diberikan tidaklah sesuai dengan hasil yang diperoleh dari tanah itu.

Dengan melihat kondisi pertahanan di Minangkabau, agaknya pemerintah tidaklah mengadakan suatu perjanjian dengan masyarakat setempat menyangkut masalah ganti rugi atas tanah kaum itu secara keseluruhan. Dasar pemikiran pemerintah kolonial Belanda adalah bahwa tanah-tanah yang mengandung batu bara bukanlah tanah garapan penduduk, sehingga dianggap sebagai tanah lepas yang dapat digarap siapa saja.

Pemerintah beranggapan bahwa tanah areal tambang adalah tanah bebas atau tanah lepas. Tanah lepas itu dianggap oleh pemerintah sebagai tanah negara. Sebagai tanah negara pemerintah mempunyai hak mengelolanya. Hal ini berlaku jaga untuk tanah tambang batu bara Ombilin. Dengan sengaja pemerintah tidak

[69] *Ibid.* , hal . 115.

memperhatikan hukum adat Minangkabau dengan tujuan tidak membayar ganti rugi atas tanah tambang sebagaimana mestinya.[70] Keengganan pemerintah untuk membayar ganti rugi akan terlihat dari kecilnya ganti rugi yang diberikan kepada penduduk, dibandingkan dengan luas areal dan nilai kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.

Corak pembebasan tanah yang tidak seimbang dilakukan pemerintah kolonial Belanda ini, kemudian secara sepihak diklaim menjadi tanah milik pemerintah kolonial Belanda Dalam perjalan panjang selanjutnya, PT BO –sekarang dikenal dengan T BA UPO- sebagai warisan Kolonial Belanda inilah kemudian menjadi simbol penjajahan Belanda di Sawahlunto, yang pada masa sekarang masih mewariskan persoalan-peroslan yang rumit dengan masyarakat, terutama ketidakjelasan dalam proses ganti rugi tanah.

D. Pembangunan Jalur Kereta Api

Pembukaan lahan pertambangann batu bara di Sawahlunto dapat dibagi atas dua periode: 1868-1878, 1878-1887, dan 1887-1891. Pada periode pertama, pembangunan jalur kereta api dan eksploitasi batu bara ditederkan kepada pihak swasta. Pada periode kedua, peran yang akan diambil oelh pihak swasta itu diambil alih oleh pemerintah.[71] Pihak swasta tidak menyanggupi syarat yang

[70] Joel S. Khan, *op.cit.* , hal . 246.

[71]Erwiza,''Miners, Managers and State: A Socio-political History of The Ombilin Coal-Mines, West Sumatra, 1892-1996", *Dissertation*

dikemukakan oleh pemerintah bahwa penambangan batu bara di Sawahlunto haruslah disejalankan dengan pembangunan jalur kereta api yang akan digunakan untuk membawa batu bara ke luar dari Sawahlunto. Maksudnya pihak swasta harus melaksanakan kedua proyek itu sekaligus. Jika pihak swasta berminat untuk menanamkan investasinya, maka harus pula sekaligus dapat membangun jalur kereta api dari Sawahlunto ke Emmahaven (sekarang: Pelabuhan Telukbayur) di Padang.

Hal itu sangat sulit bagi pihak swasta sebab akan menelan biaya yang sangat besar. Hal jalur itu berbukit dan berlembah sehingga mempunyai tingkat kesulitan sangat tinggi. Beberapa jembatan dan terowongan harus dibangun untuk dapat menembus bukit itu. Konsekwensinya tentu akan menelan biaya yang relative besar pula. Oleh karena itu persyaratan yang diajukan oleh pemerintah itu telah menyurutkan semangat pihak swasta berperan dalam pertambangan batu bara Ombilin.

Sementara pada tahun 1878 pemerintah telah memutuskan untuk memilih pembangunan jalur kereta api sebagai alternatif terbaik untuk membawa batu bara keluar dari Sawahlunto. Oleh karena itu pihak pemrintah mengabilalih pelaksanaan penambangan batu bara itu dan sekaligus akan membangun jalur kereta api dari Sawahlunto ke Emmahaven. Hal itu disebabkan karena pemerintah juga melihat keuntungan yang besar dari penambangan batu bara karena permintaan pasar yang

---

(Amsterdam: Faculteit der Maatschappij-en Gedragswetenschappen, 1999), hal. 15-18.

tinggi dan kualitas batu baranya yang bagus. Pada konteks inilah dapat pula dilihat bahwa antara pembangunan jalur kereta api dan pertambangan batu bara Sawahlunto tidak dapat dipisahkan.

Jalur kereta api yang akan dibangun itu terdiri dari dua alternative. Pertama, melalui Subang Pass (sekarang lebih dikenal dengan Sitinjau Laut) terus ke Solok, Silungkang, Muarakalaban, kemudian ke Sawahlunto. Kedua, melalui Anai Pass (sekarang lebih dikenal dengan Lembah Anai), terus ke Padangpanjang, Danau Singkarak kemudian terus Solok, Silungkang, Muarakalaban, dan Sawahlunto. Dari kedua alternatif itu, maka yang paling sedikit menelan biaya adalah yang melalui Anai Pass, meskipun jaraknya lebih jauh dari pada melalui Subang Pass. Hal itu juga diungkapkan oleh Rusli Amran:

> "Pilihan hubungan kereta api dari Solok ke Padang melalui Padang Panjang diambil pada tahun 1878. Tidak saja Teluk Bayur yang dipilih menjadi pelabuhan, tetapi juga karena membuat jalan kereta api lewat Subang jauh lebih sulit dan sepertiga lebih tinggi dari pada Padang Panjang. Antara lain harus pula membuat paling sedikit 32 terowongan. Jarak via Padang Panjang lebih jauh (145 banding 78 kilometer) namun ongkosnya ditaksir kira-kira 5 ½ juta gulden lebih murah".[72]

[72] Pembuatan jalan kereta api dapat dijadikan sebagai suatu kajian tersendiri. Hal ini disebabkan banyaknya persoalan yang harus dihadapi dalam proses pembuatan jalan kereta api seperti persoalan biaya yang lebih murah membuat jalan kereta api antara ke pantai barat atau pantai timur Sumatera, buruh pembuatan jalan kereta api dikerjakan secara

Berdasarkan kutipan yang dikemukakan di atas terlihat tingkat kesulitan yang harus dihadapi untuk pembuatan jalan kereta api dari Sawahlunto ke Padang. Kesulitan yang dihadapi lebih banyak disebabkan kondisi alamnya. Walaupun jalur Subang Pass dari Solok ke Padang lebih dekat jaraknya, namun jalur ini mempunyai tingkat kesulitan yang lebih berat karena harus menembus bukit yang terjal. Hal itu berbeda dengan jalur Anai Pass, meskipun juga harus melewati bukit dan lembah, tetapi dapat diatasi dengan melalui lereng-lereng bukitnya, sehingga juga menelan biaya yang juga lebih murah.[73]

Sebelumnya de Greve, yang ditugaskan untuk menyelidiki keberadaan batu bara I Sawahlunto, juga telah mencoba untuk menjajaki kemungkinan untuk membawa batu bara keluar Sawahlunto melalui jalur transportasi sungai, yaitu ke pantai Timur Sumatera. Ia menelusuri Batang Ombilin ke hilir. Kemudian berencana untuk melanjutkan perjalanan ke Batang Kuantan yang dapat dilayari oleh kapal dan selanjutnya terus ke Sungai Indragiri yang bermuara di Pantai Timur Sumatera. Akan tetapi, ia meninggal dalam perjalanan sebelum sampai di Batang Kuantan terbawa arus deras Batang Ombilin. Sungguhpun demikian, sebelumnya ia telah mengusulkan alternatif jalur sungai ini. Bahkan, ia juga mengusulkan untuk membangun terminal atau gudang batu bara di beberapa tempat sepanjang sungai-sungai itu, seperti di

---

paksa dan masalah pembebasan tanah areal jalan kereta api. Lebih jauh lihat Rusli Amran, op.cit., hal. 311.

[73] E. Y. K. van Sprenger, *op.cit.*, hal. 242 – 293.

Duriangadang, Lubuakambacang atau Lubuakjambi. Dari tempat-tempat inilah baru dapat diangkut dengan kapal dan dijual ke Singapura.[74]

Gagalnya rencana pengangkutan batu bara melalui Batang Ombilin, mendorong untuk dicari alternatif lain. Alternatif yang ditawarkan adalah melalui Pekanbaru dan kemudian diangkut melalui Sungai Siak.[75] Alternatif ini juga gagal disebabkan jarak antara Sawahlunto dengan Pekan Baru relatif jauh, yaitu sekitar 300 km dan melewati beberapa sungai seperti Batang Sumpur, Kampar Kiri dan Kampar Kanan.[76]

Gagalnya rencana pengangkutan batu bara melalui jalur sungai ini mendorong munculnya rencana baru yaitu pengangkutan melalui jalur darat. Alat yang ditawarkan ialah kerta api. Namun, muncul persoalan dana yang sangat besar yang harus dikeluarkan. Sementara untuk proses penambangan batu bara juga menelan biaya yang relative besar. Akan tetapi, karena jalur Timur yang melewati sungai lebih beresiko, maka diputuskanlah untuk menggunkan jalur Barat dengan menggunakan kereta api.

Sesungguhnya sebelum dibangun jalur kereta api itu, jalur transpotasi yang menghubungkan daerah pantai Barat dengan dataran tinggi atau pedalaman Minangkabau.

---

[74] *Ibid.*, hal. 371– 375.

[75] Di kemudian hari, pada zaman pendudukan Jepang, tentara Jepang membuat jalan dari Sawahlunto ke Pekanbaru. Pembuatan jalan yang menggunakan tenaga Logas, suatu tempat yang banyak buruh paksa meninggal dunia.

[76] Rusli Amran, *op.cit.*, hal. 312 – 313.

Jalan darat menghubungkannya dengan pantai Barat Sumatera, sedangkan jalur sungai menghubungkan pedalaman dengan pantai Timur Sumatera.[77]

Jalan darat yang menembus daerah pedalaman Minangkabau dari pantai Barat lazim juga disebut dengan jalan setapak.[78] Jalan setapak yang sering digunakan terdapat sebanyak empat jalur. Adapun keempat jalur itu adalah: *Pertama*, menelusuri Danau Singkarak terus ke Saning Baka, kemudian melewati Bukit Barisan menembus Limau Manih, lalu terus Koto Tangah menuju Pariaman atau Padang. Jalur *kedua* dikenal juga dengan Jalan Bukit Tujuh, menuju VI Koto, melewati sebelah Timur gunung Singgalang terus ke Kayu Tanam dan Pariaman. Jalur *ketiga* adalah dari Luhak Tanah Datar, Batipuh, Bukit Ambacang, Bukit Timbun Tulang, Kayu Tanam, Sicincin menuju Pariaman. Jalur *keempat* adalah Jalan sapi, yang digunakan oleh penduduk IV Kota melewati tenggara Gunung Singgalang menuju Kayu Tanam dan Pariaman.[79] Jalan darat yang menghubungkan daerah pantai dengan

---

[77] Christine Dobbin, *op. cit.* , hal . 70.

[78] Jalan ini dinamakan jalan setapak disebabkan hanya bisa dilewati oleh manusia dan tidak bisa dilewati oleh kendaraan. *Ibid.*,*h*al . 71.

[79] Rusli Amran, *op.cit*., hal. 304–305. Lihat juga Christine Dobbin, *op.cit.*, hal . 70. Pada umumnya jalur-jalur darat menuju kota Pariaman. Pada abad-abad XIX Pariaman menjadi pusat perdagangan utama di pantai barat bagian Tengah pulau Sumatera. Tentang Pariaman, lihat Tsuyoyoshi Kato, "Rantau Pariaman : Dunia Saudagar Pesisir Minangkabau Abad XIX, dalam, Akira Nagazumi (ed.), *Indonesia dalam Kajian Sarjana Jepang* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1986), hal. 77–115.

Sawahlunto merupakan jalur tradisional. Sebagai jalur tradisional, jalan hanya bisa dilewati dengan berjalan kaki saja dan tidak mungkin dilewati oleh kendaraan tradisional seperti pedati.[80] Pada akhirnya pemerintah memutuskan untuk mengambil jalur Barat ini yang digunakan dengan membangun jalur kereta api.[81] Jalur kereta api itu adalah yang ideal untuk mengangkut batu bara dari Sawahlunto ke pelabuhan Emmahaven di Padang.[82] Dengan menggunakan jalur kereta api, maka akan dapat mengangkut batu bara dalam jumlah yang besar, sehingga akan lebih menguntungkan perusahaan. Segi lain yang diperhitungkan ialah kereta api juga dapat menghematkan biaya, karena daya angkutnya yang banyak.

Sungguhpun demikian pembuatan jaringan kereta api itu juga membutuhkan jumlah dana yang amat besar. Pengeluaran terbesar yang harus dikeluarkan adalah untuk penyediaan kereta api dan pembuatan jalannya.[83] Untuk

---

[80] Pada masa pra kolonial dan kolonial Belanda, pedati merupakan sarana transnportasi tradisional yang menghubungkan Minangkabau dengan dunia luar. Pada masa sistem taman paksa, kopi-kopi diangkut dengan pedati dari pedalaman Minangkabau ke Padang. Lihat, Mestika Zed, "Melayu Kopi Daun: Eksploitasi Kolonial Dalam Sistem Tanam Paksa di Minangkabau, Sumatera Barat", *Thesis S-2*. (Jakarta: Universitas Indonesia, 1983). Khususnya Bab II, mengenai "geografi Minangkabau".

[81] *Ibid.*, hal. 6 – 10.

[82] W.H.Greve, *op.cit.*, hal . 75.

[83] Sejak proses pertama penambangan batu bara Ombilin, dalam setiap laporan mengenai Tambang batu bara Ombilin, selalu diikuti dengan laporan tentang kereta api. Hal ini memperlihatkan kaitan erat antara tambang batu bara dengan sarana transportasi seperti kereta api.

pembuatan jalan kereta api ini membutuhkan dana yang amat besar disebabkan pembuatan jalan kereta api yang harus dibangun dengan tingkat kesulitan yang tinggi. Kesulitan dan kebutuhan biaya yang besar terutama dalam membangun jembatan, terowongan, dan penimbunan tanah-tanah yang berawa-rawa.[84] Jalur kereta api itu harus melewati pinggang-pinggang bukit untuk perlu dibuat terowongan-terowongan yang harus menembus perut bukit dan jembatan-jembatan untuk melewati lembah-lembah yang dalam dan juga sungai-sungai.[85]

Penambangan batu bara Ombilin membutuhkan dana yang besar. Pada tahap awal, pemerintah menawarkan kepada pihak swasta untuk mengelola

---

Dalam berbagai laporan resmi yang dibuat pemerintah seperti *Verslag der Exploitatie van den Staatsspooweg ter Sumatra`s Westkust en van de Ombilin-Kolenvelden*, maka akan terlihat dalam laporan itu selalu menyatukan tentang laporan batu bara Ombilin dengan kereta api.

[84] Melihat medan yang sulit, salah satu bentuk jalan kereta api yang ditawarkan adalah kereta api gantung. Kereta api gantung ini sebagai alternatif menghadapi medan yang sulit. Lebih jauh lihat misalnya D.D.Veth, "De Zwevende Kabelspoorweg en zijn Toepassing bij de Ontginning der Ombilinkolen", dalam, *Tijdschrif voor Nederlands Indie.* No. 3. Bg. I. (Batavia: Groningen, 1881), hal. 827 – 836.

[85] Laporan-laporan yang ditulis oleh J.L. Cluysenaar memperlihatkan masalah pembuatan jalan kereta api. Lebih jauh lihat J.L. Cluysenaar, *Rapport Over de aanleg van een Spoorwegen Verbinding van den Ombilin Kolenvelden op Sumatra met de Ind. Zee.* (Batavia: S-Gravenhage G. Kolff & Co., 1876), hal. 10 – 23. Lihat juga laporan J. L. Cluysenaar yang lain seperti L.C. Cluysenaar, *Ontginning de Ombilin Kolenden en Spoorwegaanleg op Sumatra West Kust. Verslag Indische Genootschp.* (Batavia: S`Gravenhage G. Kolff & Co., 1884), hal. 45 – 50.

tambang sekaligus untuk melengkapi sarana dan prasarana seperti transportasi batu bara. Pada awalnya pihak swasta bersedia untuk menambang, namun mereka pihak swasta meminta supaya biaya sarana transportasi ditanggung oleh pemerintah. Akan tetapi, pihak pemerintah meminta supaya pihak swasta sekaligus harus menyediakan sarana transpotasinya. Oleh karena itu diputuskan oleh pemerintah untuk membangun jalur kereta api itu, sebagaimana disampaikan dalam nota Menteri Jajahan Mr. W. K. Baron van Deden:

> "Tatkala tahun 1885 diputuskan untuk membuat jalan kereta api dari Ombilin di Sawahlunto ke Padang, namun belum ditentukan bahwa tambang batu bara Ombilin akan dimodali secara langsung oleh pemerintah".[86]

Setelah dikaji untung-ruginya secara finansial, maka pada akhirnya diputuskan pilihan untuk pembuatan jalan kereta api adalah jalur Solok-Padang Panjang-Padang. Dasar pemikiran untuk mengambil rute ini sebagai pilihan akhir adalah dengan pertimbangan bahwa tingkat kesulitan yang dihadapi relatif rendah dibandingkan dengan jalur lainnya. Pertimbangan lainnya dalam pengambilan rute melewati Padang Panjang ini adalah walaupun jarak yang ditempuh relatif lebih jauh, namun sebaliknya biaya yang harus dikeluarkan relatif lebih rendah.[87]

---

[86] *Ibid.*, hal . 298.

[87] E. Y. K. van Sprenger, *op.cit.*, hal. 242 – 293.

Berdasarkan surat Menteri Jajahan di atas terlihat bahwa persoalan penggalian tambang dikaitkan dengan berbagai sarana transportasi untuk mengangkut hasil tambang. Penyediaan sarana transportasi sudah menjadi pemikiran awal sejak perencanaan penambangan dilakukan. Persoalan mendasar lainnya adalah masalah penanaman modal oleh swasta untuk penambangan dan sarana transportasi. Pada gilirannya, kereta api merupakan alternatif yang diberikan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk mengangkut hasil tambang batu bara dari Sawahlunto ke pelabuhan Emmahaven di Padang.[88]

Sementara itu, realisasi untuk melaksanakan penambangan batu bara Ombilin diputuskan bahwa penambangan dan segala sarana dan prasarana akan dijalankan oleh pemerintah Hindia Belanda secara langsung.[89] Berdasarkan keputusan itu, maka sejak awal penambangan sampai berakhirnya kekuasaan Belanda pada tahun 1942, batu bara Ombilin merupakan perusahaan yang secara langsung dikelola oleh pemerintah Kolonial Belanda.

Pada tahun tahun 1887 mulai dipersiapkanlah segala sesuatunya untuk membangun jaringan kereta api dari Sawahlunto ke Padang. Persiapan itu mulai dari pengukuran tanah sepanjang jalan yang akan dibangun mulai dari Padang sampai di Sawahlunto. sepanjang Akan tetapi, pembangunannya dimulai dari Padang. Hal itu

[88] *Ibid.*

[89] Lihat Staatsblad van Nederlandsch-Indie No. 2, 1892.

mengingat untuk memudahkan pengangkutan sebagian besar peralatan yang digunakan berasal dari luar negeri.

Pembangunan jalur kereta api dari Padang ke Sawahlunto dimulai tanggal 6 Juli 1887 dan selesai pada tanggal 13 Juli 1895, termasuk ke Bukittinggi dan Payakumbuh, serta ke Pelabuhan Telukbayur (Emmahaven). Sebelum dilakukan pembuatan jalur kereta api itu, terlebih dahulu dilakukan persiapannya. Tahap persiapan itu menghabiskan waktu selama dua tahun. Pada tahap ini dilakukan pengukuran permukaan dan kondisi tanah, topografis daerah yang akan dilewati untuk menentukan jumlah dan jenis jembatan yang akan dibangun.Semua itu dilakukan sematang mungkin mengingat beratnya medan dan tingginya resiko.

Pada bulan September 1887 dimulailah pekerjaan untuk membuat jalan kereta api dari Padang ke Sawahlunto. Pengerjaan pembuatan bantalan jalan kereta api itu dilakukan pertama sekali dari Pulau Aia (Padang) ke Padangpanjang dan selesai pada tanggal 12 Juli 1891. Kemudian dilanjutkan dari Padangpanjang ke Bukittinggi yang dapat diselesaikan pada tanggal 1 Novem,ber 1891. Setelah itu menyusul pembuatan relnya ke Solok yang selesai pada tanggal 1 Juli 1892. Jalur kereta api dari Solok ke Muara Kalaban bersamaan selesainya dengan pembangunan jalur dari padang ke Teluk Bayur, yaitu pada tanggal 1 Oktober 1892. Adapun jalur kereta api dari Muarakalaban ke Sawahlunto selesai dibangun pada tanggal 1 Pebruari 1894.[90]

[90] *Regering Almanak 1905*, hal. 442.

Sejak tahun 1894 itu batu bara sudah dapat langsung dibawa dengan kereta api dari Sawahlunto ke Telukbayur. Sepanjang jalan itu dibangun 5 (lima) tempat pemberhentian pengangkutan batu bara dari Sawahlunto, yaitu:

1. Sawahlunto-Solok yang berjarak 28,3 km,
2. Solok-Batutaba yang berjarak 33,2 km
3. Batutaba-Padangpanjang yang berjarak 17,5 km
4. Padangpanjang-Kayutanam yang berjarak 15,5 km
5. Kayutanam - Pelabuhan Teluk Bayur (Emmahaven) yang berjarak 57 km.[91]

Oleh karena kondisi jalan yang menanjak dan berbelok maka kecepatan kereta api pun harus mengikuti alur jalan tersebut. Rata-rata kecepatan kereta api adalah:

1. Sawahlunto - Solok rata-rata kecepatan 15 km/jam
2. Solok-Batutaba rata-rata kecepatan 20 km/jam
3. Batutaba-Padangpanjang rata-rata kecepatan 10 km/jam
4. Padangpanjang-Kayutanam rata-rata kecepatan 10 km/jam
5. Kayutanam-Pelabuhan Telukbayur rata-rata kecepatan 20 km/jam.[92]

Dengan demikian dibutuhkan waktu selama lebih 10 jam untuk membawa batu bara dari Sawahlunto ke Telukbayur nonstop.

---

[91] Sprenger van Eyk, "De Eerste spoorweg op Sumatra Westkust" dalam *TNI* (Batavia: Groningen, 1887), hal. 293.

[92] *Ibid.*, hal 295.

E. Penambangan Batubara

Sejak awal ditemukannya batu bara Ombilin, pemeritah berkeinginan agar pihak swastalah yang mengerjakannya. Pemerintah hanya berkeinginan untuk mendapatkan berbagai pajak dari hasil tambang itu. Hal ini terbukti, ketika diadakan penawaran pertama pada tahun 1883. dalam penawaran untuk mengerjakan tambang itu, pemerintah telah melakukan tender secara terbuka kepada pihak swasta untuk mengelola tambang batu bara Ombilin. Ternyata tender pertama ini menarik minat pihak swasta, yang secara antusias menanggapi penawaran pemerintah itu.[93] Pihak swasta menghadapi kendala yang sangat berat dalam rangka eksploitasi batu bara Ombilin yaitu besarnya modal yang harus dikeluarkan. Dari hal itu muncul persoalan, siapa yang mampu untuk menanamkan modal pada penambangan batu bara Ombilin.

Pada tahun 1883, pemerintah mengadakan tender terbuka untuk mengerjakan penambangan batu bara Ombilin. Tender yang diajukan oleh pemrintah kepada pihak swasta adalah dalam rangka menambang batu bara seluas 70 hektar di daerah Sungai Durian. Berdasarkan kandungan batu bara yang dimiliki Ombilin, banyak pihak yang tertarik, namun karena biaya yang dibutuhkan terlalu tinggi membuat pihak swasta merasa enggan untuk menanamkan modalnya pada tambang batu bara Ombilin. Keinginan pemerintah dibuktikannya dengan diadakannya

---

[93] *Jaarkoek van het Mijnwezen in Nederlandsch Oost Indie 1983, Sumatra`s Westkust Verslag Np. 1*. (Amsterdam : C.F. Stemler, 1884), hal. 121 – 134.

tender secara terbuka tahun 1883.[94] Penawaran ini tidak ada yang mampu untuk mewujudkannya, karena besarnya modal yang harus dikeluarkan.

Pada tahun 1886, pemerintah kembali menawarkan secara terbuka pada pihak swasta untuk menambang batu bara Ombilin. Melalui surat keputusan tanggal 20 Juli 1886, dengar Nomor 29,[95] pemerintah mengadakan tender terbuka untuk swasta menanamkan modalnya pada tambang batu bara Ombilin. Modal awal yang dibutuhkan untuk melakukan penambangan batu bara Ombilin sekaligus untuk pembuatan jalan kereta api berkisar 17 juta gulden.[96]

Dalam laporan tentang biaya penambangan dan kereta api, Wiltens membuat laporan lebih rinci. Teryata biaya pembuatan jalan kereta api melebih biaya operasional tambang itu sendiri. Adapun biaya penambangan batu bara dan pembuatan jalan kereta api secara keseluruhan adalah 15.000.000.-, yang terdiri dari 5.5 juta gulden untuk sarana dan prasarana penambangan batu bara dan selebihnya untuk biaya sarana transportasi.[97]

---

[94] H.W.A. Wiltens, *Aanleg van Spoorwegen en Kolenmijn Ontginning : Consessie Aanvrag.* (Batavia: G. Kolff & Co, 1889), hal . 3 – 9.

[95]Lihat *Staatsblad van Nederlandsch-Indie* No. 29 tahun 1886.

[96]12 Juta Gulden untuk pembuatan jalan kereta api, sedangkan 5 juta untuk biaya penambangan. Lebih jauh lihat Rusli Amran, *op. cit.*, hal . 311.

[97]H.W.A. Wiltens, *op.cit.*, hal. 16 – 21.

Pemerintah pada pokoknya memberi keringanan dalam pengerjaan proyek tambang. Adapun bentuk keringanan yang diberikan ialah memberikan bunga sebanyak 5 % atas proyek itu.[98] Setelah melihat modal awal yang harus dikeluarkan untuk mengerjakan penambangan dan keharusan penyediaan dana untuk sarana kereta api demikian besarnya, maka pihak swasta merasa tidak sanggup untuk melaksanakan proyek itu.

Ketidaksanggupan pihak swasta bukan hanya karena masalah modal, akan tetapi juga berkaitan dengan masalah harapan keuntungan yang akan didapatkan. Besarnya modal yang harus ditanamkan dalam proyek ini membuat pihak swasta merasa tidak bersedia untuk menanamkan modalnya pada perusahaan tambang batu bara ini. hal ini dapat dipahami, karena penggunaan batu bara sebagai sumber energi pada waktu itu belumlah menjadi kebutuhan yang tinggi, baik kebutuhan dalam negeri maupun untuk dijadikan komoditi ekspor. Walaupun batu bara Ombilin memiliki kualitas yang cukup baik, namun untuk bersaing di pasaran internasional masih kalah bersaing dengan batu bara dari tempat lainnya seperti Cardiff Inggris. Sebagai akibatnya, tidak satupun pihak-pihak swasta yang bersedia membiayai dana itu dan kemudian mengundurkan diri. Pihak swasta akhirnya

[98] Rusli Amran, *op.cit.*, hal. 311.

menyerahkan kepada pemerintah sepenunnya untuk mengerjakan proyek penambangan batu bara Ombilin.[99]

Pemerintah menginginkan, bahwa penanaman modal tidak hanya berkaitan dengan sarana penambangan, tetapi juga dengan sarana transportasi pengangkutan batu bara ke pelabuhan. Sebagai alternatif yang ditawarkan, transportasi yang terbaik untuk mengangkut batu bara haruslah melalui jalan darat yaitu kereta api. Bentuk pilihan seperti ini menjadi amat berat bagi pihak swasta, terutama penyediaan dana dalam jumlah yang besar.

Persoalan pokok bukanlah dana penambangan batu bara itu, akan tetapi dana yang harus dikeluarkan untuk pembuatan jalan kereta api. Hal ini disebabkan pembuatan jalan kereta api yang membutuhkan biaya yang amat besar dibandingkan dengan biaya untuk penambangan itu sendiri. Walaupun demikian, pemerintah tetap membuka kesempatan kepada modal swasta untuk ikut menanamkan modalnya di pertambangan batu bara Ombilin.

Persoalan pembuatan jalan kereta api untuk pengangkutan batu bara Ombilin menjadi topik pembicaraan di tingkat pusat. Melalui penelitian yang telah dilakukan, maka transportasi yang menguntungkan adalah pembuatan jalan kereta api. Bertitik tolak dari kondisi seperti itu, maka dengan sendirinya pembuatan jalan kereta api dilihat sebagai bagian yang tak terpisahkan dari upaya penambangan batu bara Ombilin, sehingga sebelum

---

[99] *Jaarboek van het Mijnwezen in Nederlandsch Oost Indie 1986, Sumatra`s Westkust Verslag Np. 1*. (Amsterdam: C.F. Stemler, 1887), hal. 125 – 130.

penambangan batu bara Ombilin dikerjakan, maka terlebih dahulu haruslah disediakan sarana transportasinya.[100]

Dalam sebuah laporan kepada pemerintah dikatakan bahwa menteri jajahan di Negeri Belanda menanti kabar dari Hindia Belanda mengenai pembuatan jalan kereta api antara Padang-Solok dan Sawahlunto. Pembuatan jalan ini belum ada peraturan yang bersifat defenitif. Akan tetapi ditentukan untuk menjalankannya dengan bantuan seorang insinyur yang berkebangsaan Inggris.

Bantuan dari insinyur Inggris ini disebabkan di Hindia Belanda tidak ada insinyur Belanda yang memiliki pengalaman mengerjakan jalan kereta api yang sesuai dengan kondisi alam yang terdapat di Minangkabau.[101] Kondisi alam yang terberat ialah pembuatan jalan kereta api lembah, lereng bukit, terowongan dan jembatan.[102] Pada akhirnya, jalan kereta api yang menghubungkan Padang dengan Sawahlunto lebih dahulu dioperasionalkan dibandingkan dengan penambangan batu bara itu. Kereta

---

[100] Alam yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah mengakibatkan sarana transportasi menjadi sulit. Salah satu alternatif yang diajukan untuk pengangkutan batu bara antara Sawahlunto dengan Padang adalah kereta api kaebl atau gantung. Lebih jauh lihat misalnya, D. D. Veth, "De Zwevende Kabelspoorweg en zijn Toepassing bij de Ontginning der Ombilienkolen", dalam, *Tijdschrief Voor Nederlands Indie.* (Batavia-Gronigen, No. 3, Bg. I th. 1881), hal . 827 – 836.

[101] P.H. van Diest, op.cit., hal . 4.

[102] Lihat lampiran I, profil tanah yang terdapat dari Padang ke Sawahlunto.

api sudah mulai dibangun pada tahun 1887, sedangkan batu bara baru mulai berproduksi pada tahun 1892.[103]

Berbagai hambatan ditemui dalam pelaksanaannya, terutama masalah dana dan transportasi mengakibatkan proses penambangan terlambat dikerjakan. Barulah pada tahun 1891, surat keputusan penambangan diturunkan, sedangkan produksi baru berjalan tahun 1892.[104]

Pada tahun 1891 pemerintah Hindia Belanda secara langsung menanamkan modalnya pada tambang batu bara Ombilin. Untuk melakukan operasional pertamanya, pemerintah menunjuk Ir. J.A. Hooze melakukan persiapan kebutuhan penggalian batu bara. Penunjukkan Hooze tidak terlepas dari desakan Ir. E.Van der Elst, direktur Jendral Tambang Belanda. E. van der Elst mempunyai keinginan besar menempatkan Hooze ini sebagai direktur pertambangan batu bara.

Penempatan ini dengan pemikiran dasar bahwa Hooze merupakan seorang insinyur pertambangan dan telah mempunyai pengalaman dalam pertambangan di Kalimantan. Dengan kedudukan yang diberikan kepadanya, maka diharapkan proses awal penambangan dapat berjalan lancar sehingga tambang batu bara Ombilin

[103] E.Y.K. Sprenger, "De Eerste Spoorweg op Sumatra`s Westkust", dalam, Tijdschrift voor Nederlands Indie Bg. I & II. (Batavia: Groningen, 1887), hal. 241 – 250. Untuk masyarakat umum, kereta api pertama kali dibuka pada tahun 1 Oktober 1892.

[104] Adeng Sunardi, op. cit. , hal . 4.

mampu memberikan keuntungan kedalam kas negara.[105] Akan tetapi yang diangkat sebagai pimpinan pertama dari tambang batu bara Ombilin adalah Ir. W. Godefroy, seorang geolog lainnya.[106]

Godefroy memimpin tambang batu bara Ombilin dari tahun 1891 sampai tahun 1892. Pada tahun 1892, ia digantikan oleh Ir. J.W. Ijzerman.[107] Ketika di bawah pimpinan Ijzerman inilah proyek penambangan batu bara Ombilin Sawahlunto mulai berproduksi.[108]

Untuk dapat melakukan penambangan batu bara di Ombilin, diperlukan rancangan undang-undang. Rancangan undang-undang tidaklah bisa diperoleh begitu saja, akan tetapi haruslah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat di negeri Belanda. Setelah dewan melakukan persidangannya, maka ditetapkanlah rancangan undang-undang pada tanggal 24 November 1891.[109]

Masalah kekuatan hukum merupakan masalah tersendiri dalam pelaksanan rancangan undang-undang itu. Untuk mendapatkan kekuatan hukum sebagai sebuah undang-undang yang syah, oleh Dewan Penasehat Negara menerbitkan dalam lembaran negara No. 2 tertanggal 4

---

[105]J. W. Ijzerman, "Verslag Betrefende Midden Sumatra`s", dalam, Tijdschrift Aardrijkskunding Genootschap. (Leiden : E. J. Briil, 1892), hal . 20 – 21.

[106] Untuk melihat pimpinan tambang batu bara dari tahun ke tahun, lihat lampiran 7.

[107] Adeng Sunardi, op.cit., hal . 39.

[108] Ibid., hal. 39. Lihat juga, Ijzerman, op.cit., hal . 24.

[109] Staatsblad van Nederlandsch-Indie No. 2 tahun 1892.

Januari 1892. Adapun isi pokok dari undang-undang itu ialah menaikkan anggaran belanja Pemerintah Hindia Belanda untuk tahun anggaran 1892 dalam rangka eksploitasi tambang batu bara Ombilin.[110]

Hal yang perlu diperhatikan dalam masalah konsesi penambangan ialah konsesi yang diberikan berdasarkan paket untuk satu daerah saja. Sebagai contoh adalah, paket pertama berlaku untuk wilayah Sungai Durian, sedangkan paket berikutnya pada wilayah-wilayah yang belum ditambang, baik di Sungai Durian maupun pada tempat lainnya di Sawahlunto. Tidaklah mengherankan, pada tahun-tahun selanjutnya akan terlihat banyaknya konsesi yang diberikan oleh pemerintah dalam penambangan itu. Konsesi-konsesi yang dikeluarkan bukanlah berisi ganti rugi atas tanah kaum, tetapi ialah konsesi yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk melakukan penambangan batu bara.

Sejalan dengan pemberian konsesi yang dilakukan oleh pemerintah, pihak perubahan penambangan juga membutuhkan buruh-buruh untuk melaksanakan berbagai pekerjaan pada proyek itu. Berbagai cara dilakukan untuk mendatangkan buruh supaya mau bekerja di proyek penambangan batu bara. Beberapa pola yang digunakan untuk merekrut buruh-buruh adalah mempekerjakan orang-orang tahanan penjara (di kemudian hari lebih dikenal dengan sebutan orang rantai karena dalam bekerja kakinya dirantai), merekrut buruh secara kontrak dari Singapura (terutama buruh Cina) dan dari Jawa serta

[110] Ibid.

mempekerjakan penduduk sekitarnya sebagai buruh bebas atau harian.

F. Masalah Upah Buruh dan Kondisi Ketergantungan

Cikal bakal dari keresahan dapat dibagi dua yaitu masalah internal dan ekternal. Masalah internal menyangkut berbagai masalah yang dihadapi buruh sehari-hari seperti masalah upah, jaminan sosial, jaminan kesehatan dan masalah kemanusian[111], sedangkan masalah ekternal meliputi pengaruh yang datang dari luar seperti PKI san Sarikat Rakjat. [112]

Jumlah upah yang diterima setiap individu pada tambang batu bara Ombilin sangat tergantung pada tingkatannya. Seorang pegawai Eropa akan mendapatkan fasilitas yang jauh lebih baik dibandingkan dengan seorang buruh prbumi. Posisi yang ditempati pegawai Belanda sebagai direktur tambang dan jabatan strategis lainnya disebabkan kealiannya, sehingga dengan sendirinya merekalah yang menentukan bentuk kebijaksanaan baik menyangkut produksi maupun penentuan tingkat upah buruh tambang. Setiap buruh mendapatkan upah sesuai dengan bidang pekerjaan yang dimasukinya. Sebagai contoh adalah upah buruh tambang di Sungai Durian,

[111] Surat kabar *Soera Tambang*, 5 Mei 1925, hal. 1.

[112] Gejala-gejala dari pengaruh Komunis di kalangan buruh tambang telah diingatkan oleh Sandcik pada tahun 1923. Sandcik menyatakan bahwa Komunis merupakan ancaman masa depan bagi kelancaran tambang batu bara ombilin. R.A. van Sandcik, "Het Laatste Hoodstuk van de Ombilin Questie, dalam *De Indische Gids.* Amsterdam : J.H. de Bussy, 1923, hal. 786-790.

buruh mendapatkan upah yang dapat memenuhi kebutuhan pokoknya. (lihat tabel XII)

Tabel XII
Tingkat Upah Buruh di Sungai Durian dan Parambahan Tahun 1917

Bidang Pekerjaan	Sungai Durian	Parambahan
Buruh Kontrak	30 sen	33 sen
Buruh Bebas	50 sen	40 sen
Penebang Kayu	40 sen	40 sen
Tukang Kayu	50 sen	50 sen
Tukang Logam	f 1	f 1

Sumber: *Verslag van den Staatsspoorweg Sumatra`s Westkust en van de Ombilin Mijnen over 1917.* (Batavia: Landsdrukkerij, 1918), hal. 370.

Dari tabel diatas terlihat bahwa upah yang diterima buruh dalam setiap harinya mampu menghidupi satu keluarga. Buruh kontrak mendapatkan upah sebanyak 30 sen dalam setiap hari. Walaupun lebih rendah dari upah buruh bebas dan tukang kayu, namun buruh kontrak mendapatka fasilitas lainnya seperti makan, tempat tinggal, pakaian kerjadan biaya perawatan. Kondisi upah yang diterima buruh kontrak cukup baik, sehingga banyak dari

kalangan buruh kontrak membawa keluarga ke Sawahlunto.[113]

Pada tambang batu bara Ombilin, pola pembagian keuntungan tidak berlaku, terbukti dari tingkat upah yang diterima oleh buruh tambang batu bara Ombilin. Jika perimbangan peningkatan produksi dan perolehan keuntungan terdapat sebuah hubungan timbul balik, maka keuntungan yang didapatkan perusahaan juga akan didapatkan buruh. Namun, hubungan ini tidak ada, maka sebesar apapun keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan, tetap saja hal itu tidak meningkatkan taraf kehidupan buruh. Dalam prakteknya, pemikiran seperti ini ditemukan di lapangan. Pembuktiannya adalah berbagai aksi yang dilakukan oleh buruh tambang batu bara Ombilin Sawahlunto. Pemberontakan PKI yang melibatkan buruh tambang pada tahun 1927 di Silungkang merupakan bentuk gerakan buruh yang dimotori oleh aliran Komunis ini.[114]

Mengikuti pendapat yang dikemukakan oleh van Sandick tentang gaji buruh tambang, ia mengemukakan yaitu bahkan gaji kuli kontrak begitu rendah sehingga

---

[113] Tahun-tahun 1920-an, jumlah buruh yang membawa keluarganya ke Sawahlunto semakin banyak. Menurut Paiman, ia dan ibunya diajak oleh ayahnya ke Sawahlunto tahun 1920. Dalam rombongannya terdapat 30 kepala keluarga yang membawa anak dan istrinya ke Sawahlunto. Wawancara dengan Paiman.

[114] H.J Benda and R.T. Mcvey, "communist Uprisinghs, 1926-1927 dalam, Chr. L.M. Penders (Ed.), *Indonesia Selected Dokuments on Colonialism and Nationalisme 1830-1942*. Brisbane : University of queensland press, 1977, hal. 284-287.

mereka tidak dapat membiayai isteri mereka. Sepintas lalu terlihat bahwa kuli-kuli yang merupakan perempuan yang telah menikah memperoleh makan tiga kali sehari. Laki-laki menerima gaji 54 % (dari gaji pokoknya). Perhari sebagai gaji permulaan bagi pekerja yang bekerja permukaan tahun dan 65 % dari gaji pokok bagi buruh yang bekerja di tambang bawah tanah. Kemudian buruh yang sudah bekerja selama 13 tahun akan menerima gaji 80 % bagi buruh yang di permukaan tanah dan 90 % dari gaji pokok bagi buruh yang bekerja dibawah tanah.[115] Berdasarkan dari kutipan diatas tampak gambaran kehidupan keseharian buruh tambang batu bara Ombilin dengan menjalani hidup untuk bekerja demi kepentingan perusahaan. Mereka bekerja keras untuk meningkatkan produksi, sebaliknya dari kerja kerasnya mereka tidak mendapatkan imbalan semestinya.[116]

Upah buruh pribumi memiliki tingkatan-tingkatan yang berbeda. Upah buruh bebas lebih tinggi dari buruh kontrak, sedangkan upah buruh kontrak lebih tinggi dari buruh paksa. Perbedaan upah seperti ini jiga merupakan sumber konflik yang tidak dapat dielakkan antar sesama buruh pribumi pada tambang batu bara Ombilin. Konflik antara buruh paksa dengan buruh kontrak biasanya berbentuk perkelahian. Dalam perkelahian itu, ada juga

[115] Setiap buruh tidak menerima upahnya secara penuh karena terjadi pemotongan gaji seperti biaya pengobatan, makanan dan perumahan. R.a. van Sandick, *op.cit*., hal. 779.

[116] Persoalan seperti ini merupakan selalu dijadikan tema sentral dari gerakan komunis. Lihat S. Sahrir, *Sosialisme dan Komunisme*. Djakarta : Djambatan, 1967, hal. 47-60.

buruh yang meninggal. Buruh yang meninggal dalam perkelahian tidak akan diusut, kecuali diberi hukumam berupa hukuman cambuk.[117]

Perkelahian antar sesama buruh pribumi seringkali terjadi pada tambang batu bara Ombilin. Kelompok buruh yang sering berkelahi adalah buruh kontrak dan buruh bebas pada satu pihak dengan buruh paksa pada pihak lainnya. Biasanya perkelahian seperti ini dibiarkan begitu saja oleh pihak tambang. Bahkan pihak tambang cenderung melindungi buruh kontrak dari tekanan-tekanan yang berasal dari buruh paksa. Contoh yang menarik untuk dikemukan adalah perkelahian massal tanggal 12 Oktober 1912.

Peristiwa perkelahian 12 Oktober 1912 cukup menghebohkan tambang batu bara Ombilin. Dalam perkelahian massal itu mengakibatkan terbunuhnya 4 orang buruh paksa dan 8 orang buruh kontrak. Dalam penyelesaian perkelahian ini, pihak tambang hanya memberikan hukuman terhadap buruh paksa yang terlibat dalam perkelahian,[118] sedangkan buruh kontrak mendapat pembebasan dari hukuman. Perbedaan perlakuan dan pilih kasih dari pihak tambang merupakan salah satu sumber

---

[117] *Ibid.*

[118] Hukuman yang lazim berlaku dalam setiap pelanggaran adalah hukuman cambut. Setiap pelanggaran dicambuk 27 kali. Hukuman cambut ini lebih ditujukan pada buruh-buruh paksa. *Verslaq der Exploitatie van den staatsspoorweq ter Sumatra Westkust en van de Ombilin Kolenvelden Over 1912*. Batavia: Lansdrukkerij, 1913, hal. 19-20.

keresahan yang melanda di kalangan buruh tambang batu bara Ombilin Sawahlunto.

Menyangkut upah yang diterima, sesungguhnya terjadi perbedaan upah yang tajam antar sesama buruh pribumi. Buruh paksa merupakan buruh pribumi yang paling sedikit mendapatkan upah, sedangkan buruh bebas menerima upah yang paling tinggi. Beragam faktor yang menyebabkan perbedaan ini seperti buruh kontrak untuk mendatangkannya membutuhkan biaya. Biaya ini dibedakan pada upah yang diterimanya. Buruh bebas tidak mendapatkan makan dan tempat tinggal, sedangkan buruh kontrak dan buruh paksa disediakan makanan dan tempat tinggal.

Tabel XIII
Tingkat Upah Buruh Tambang Batu Bara Ombilin dari tahun 1905 sampai tahun 1930
(Dalam Sen)

Tahun	Buruh Paksa	Buruh Kontrak	Buruh Bebas
1905	18	32	62
1910	20	30	63
1915	22	34	60
1920	21	40	62
1925	17	32	54
1930	25	50	70

Sumber: Diolah dari berbagai sumber seperti *Verslag der Explotatie van den Staatsspoorweg ter Sumatra Westkust en van de Ombilin Kolenvelden dan Jaarboek van het Mijnwezen in Nederlandsch- indie.*

Berdasarkan dari tabel yang dikemukakan diatas terlihat, bahwa buruh bebas mendapatkan hampir dua kali lebih besar dibandingkan buruh kontrak, sedangkan buruh kontrak mendapatkan dua kali lebih banyak dibandingkan dengan buruh paksa. Buruh bebas mendapatkan upah antara 60 sampai 70 sen, buruh kontrak memperoleh upah 30 sampai 50 sen, sedangkan buruh paksa mendapat upah 18 sampai 25 sen. Dengan upah yang diterimanya itulah buruh menghidupi anak dan istrinya dalam sebulan.Berdasarkan tabel di atas, tingkat kenaikan upah yang tertinggi pada buruh kontrak. Buruh paksa naiknya sekitar 7 sen, buruh bebas 12 sen, sedangkan buruh kontrak 18 sen. Kenaikan upah buruh kontrak ini disebabkan buruh ini merupakan tenaga yang diandalkan karena kemampuan dan kepatuhan dalam bekerja.

Pemikiran seperti ini dapat diamati melalui tabel diatas. Sebagai contoh ialah pada tahun 1915, buruh kontrak mendapat upah sebanyak 34 sen. Upah ini naik menjadi 40 sen pada tahun 1920. Namun pada tahun 1925 upah buruh ini turun menjadi 32 sen. Penurunan upah buruh yang tajam ini berkaitan dengan penurunan produksi tambang yang cukup drastis yaitu dari 606.423 ton pada tahun 1924 menjadi 53.328 pada tahun 1925.[119] Persoalan bermula dari pembelian mesin pertambangan yang baru. Mesin ini dibebankan pada biaya produksi,

[119] Lihat tabel produksi tambang batu bara Ombilin IV.

sedangkan mesin itu belum mampu berproduksi sehingga terjadi penurunan produksi batu bara.[120]

Buruh tambang hidup dalam sebuah siklus yang relatif tetap. Setelah habis gajian, mereka menghabiskan upah yang diterimanya dalam kehidupan malam. Setiap habia gajian, maka di Sawahlunto berlangsung pasar malam.[121] Berbagai acara diadakan pada pasar malam itu seperti pertunjukan sandiwara, tonel, wayang, ketoprak dan judi. Banyak pedagang dari penduduk Minangkabau yang menjual barangnya pada pasar malam itu. Buruh menghabiskan untuk berbagai keperluannya atau melalui meja perjudian.[122]

Pola kehidupan pasar malam ini memang merupakan rekayasa yang direncanakan oleh pihak perusahaan. Pemikiran dasarnya adalah setelah buruh menghabiskan upah yang mereka terima di pasar malam, maka untuk biaya hidup selanjutnya buruh meminjam uang kepada pihak perusahaan tambang. Pada akhirnya

---

[120] *Verslaq der Exploitatie van den Staatsspoorweq ter Sumatra's Westkust en de Ombilin mijnen over 1925*. Batavia : Lansdrukkerij, 1926, hal. 20-25.

[121] Pasar malam ini memang berlangsung pada malam hari. Bahkan, pada tempat-tempat tertentu seperti arena oerjudian, bisa berlangsung sampai pagi hari. Wawancara dengan bapak Abdul Muin. Lebih jauh lihat juga R.A. Sandick, *op.cit.*, hal.794.

[122] Pola kehidupan pasar malam ini tidak berbeda dengan yang terdapat di perkebunan-perkebunan di Sumatera Timur. Pihak pertambangan dengan sengaja menyelenggarakan kegiatan ini. Biasanya buruh menghabiskan uangnya dalam satu malam dengan membelanjakan atau pun lewat arena perjudian. Muhammad Said, op. cit., hal. 23-38.

buruh terikat dengan jerat ini dan memperpanjang kontrak kerjanya pada tambang batu bara Ombilin. Perpanjangan kontrak ini berkaitan dengan pinjaman yang diterimanya dari perusahaan tambang.[123]

Mengikuti pola kehidupan buruh seperti ini, maka buruh hanya bisa bertahan untuk hidup dari hari ke hari. Dari upah yang diterimanya, untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari saja buruh telah mengalami kesulitan. Dalam perkembangannya, pola ini melanda hampir seluruh kehidupan buruh pribumi terutama buruh kontrak dan buruh bebas, sedangkan buruh paksa tidak dapat secara bebas keluar-masuk untuk mengikuti berbagai kegiatan pada pasar malam. Untuk membatasi geraknya, buruh paksa lebih banyak disekap pada tembok-tembok penjara tempat tinggal mereka.[124] Walaupun mereka tidak membelanjakan upahnya secara bebas di pasar-pasar malam, namun demikian di dalam tembok penjara perjudian secara subur tetap berkembang diantara sesama penjara paksa. Dapat dikatakan bahwa perjudian merupakan satu-satunya hiburan bagi buruh paksa, sehingga tidaklah mengherankan upah yang diterimanya habis dalam arena perjudian.

---

[123] Pola seperti ini berlaku secara umum di berbagai tambang atau pun perkebunan di Indonesia. *Ibid.*

[124] Pola ini berlaku secara umum pada masa kolonial Belanda di berbagai perusahaan-perusahaan baik milik pemerintah maupun milik swasta. Di Sumatera Timur misalnya, pihak perkebunan juga membuat siklus kehidupan buruh seperti ini yaitu setelah habis gaji, maka dibuatlah pasar malam, yang dapat menghabiskan gaji buruh itu.

Pola kehidupan ini bertujuan untuk mengikat butuh tetap bekerja pada tmabang. Sulit dan besarnya biaya pengerahan buruh-buruh baru, maka dibuat strategi untuk mengikat buruh yang telah ada. Strategi itu adalah membuat keramaian dengan berbagai hiburan, perjudian dan perdagangan yang dapat menghabiskan upah yang diterima buruh. Secara berkala, untuk keperluan hiburan buruh pihak membuat beberapa kebijakan seperti :[125]

1. Gaji diberikan 2 kali dalam satu bulan. Gaji pertama pada awal bulan dan gaji kedua pertengahan bulan.
2. Pada malam gajian itu, dibuat pasar malam.
3. Pihak perusahaan juga mendatangkan hiburan lainnya seperti ronggeng.
4. Di kalangan buruh, juga dibentuk grup-grup sandiwara. Pemain dari seluruh grup sandiwara ini berasal dari kalangan buruh.
5. Pada pasar malam, berbagai perjudian dibolehkan oleh pihak perusahaan.

Pada pasar malam inilah banyak buruh menghabiskan gaji yang didapatkannya. Arena perjudian yang paling banyak menyita buruh, terutama buruh kontrak adalah mengadu ayam. Perjudian yang menggunakan uang itu, juga melibatkan buruh bebas dan buruh paksa.[126] Sudah menjadi hal yang biasa, jika pada

---

[125] "Mijbrand in de Ombilinmijnen, dalam *de Inqenieur*, Januari 1929, hal. 4-5.

[126] *Verslaq Van den Staatsspoorweq Sumatra's Westkust en van de Ombilin mijnen over 1909.* Batavia : Lansdrukkerij, 1910, hal. 15-16.

pasar malam itu buruh kehabisan uangnya di arena pasar malam itu.

Setelah uangnya habis, maka pihak tambang kemudian meminjamkan uang kepada buruh, sehingga mau tidak mau buruh memperpanjang kontraknya bekerja. Cara ini memang efektif untuk mempertahankan buruh-buruh untuk tetap bekerja pada tambang batu bara Ombilin. Setelah upahnya habis dalam pasar malam, buruh meminjam uang untuk hidupnya sehari-hari.[127]

Mengikuti masalah yang dihadapi buruh tambang secara seksama, maka dapat dikatakan bahwa kehidupan buruh telah direkayasa oleh pihak tambang. Pihak tambang berusaha supaya buruh tetap berada dalam gengamannya, disadari atau tidak buruh masuk kedalam perangkap kemiskinan yang telah dibuat secara sistematis oleh pihak perusahaan tambang. Chambers melihat bahwa pola seperti ini merupakan perangkap kemiskinan yang disiapkan secara terencana oleh perusahaan. Hal ini disebabkan oleh ketidakberdayaan buruh melawan pihak majikannya. Buruh tidak memiliki kemampuan melawan majikannya, maka akhirnya buruh terperangkap kedalam kemiskinan, yang telah dipersiapkan secara terencana oleh pihak perusahaan tambang.[128]

Melihat proses kemiskinan yang terjadi pada buruh tambang batu bara Ombilin, maka perangkap kemiskinan

---

[127] G.H. Wally, "De Ombilin Steenkolenmijnen, dalam *De Inqenieur in Nederlandsch-Indie*. Oktober 1919, hal. 7.

[128] Robert Chambers, *Pembangunan Desa : Mulai Dari Belakang*. Jakarta: LP3ES, 1987, hal. 145.

yang berlangsung termasuk kedalam bentuk perangkap kemiskinan yang bertipe ketidakberdayaan. Hal pokok dari perangkap kemiskinan ketidakberdayaan adalah pemerasan oleh kaum yang lebih kuat. Orang yang tidak berdaya, seringkali terbatas atau tidak mempunyai akses terhadap bantuan, atau terhalang untuk menuntut upah yang layak, sehingga menempatkan dirinya sebagai pihak yang dirugikan.[129] Buruh tidak dapat menuntut karena posisinya yang lemah. Hal seperti ini didukung pula oleh faktor terisolirnya buruh dari lingkungan luar, sehingga semakin terbenam dalam perangkap itu.[130]

Kesehatan

Menyangkut masalah kesehatan buruh, pihak tambang tidak membedakan buruh, terutama pada kalangan buruh pribimi. Artinya, secara keseluruhan buruh-buruh pribumi mendapat perhatian kesehatan yang layak dari pihak tambang. Jika dari segi upah, jaminan sosial dan hak azazi manusia buruh paksa dapat ditekan oleh pihak perusahaan tambang, maka dalam hal jaminan kesehatan buruh paksa mendapat perhatian yang semestinya. Hal yang seperti ini dapat dibuktikan dari penyakit yang melanda buruh tambang batu bara Ombilin. Buruh yang menderita penyakit relatif kecil. Penyakit yang

---

[129] *Ibid.*, hal. 147.

[130] Secara geografis, areal pertambangan batu bara Ombilin terletak jauh dipedalaman Sumatera. Setelah proses penggalian tambvang batu bara berjalan, maka areal ini merupakan suatu pemukiman baru yang terisolir dari dunia luar, Rusli Amran, *Sumatera Barat Plakat Panjang.* Jakarta: PT Sinar Harapan, 1981, hal. 313-319.

yang berjangkit secara umum di kalangan buruh tambang batu bara Ombilin ialah bisul dan gatal-gatal.[131]

Faktor kesehatan sesungguhnya tidak menjadi sumber pokok penyebab keresahan buruh. Perhatian yang besar dalam bidang kesehatan dari pihak tambang terhadap buruh, membawa dampak positif terhadap kesehatan buruh. Mereka sangat dijaga kesehatannya, karena tenaganya sangat dibutuhkan untuk menggali batu bara dalam lubang-lubang penggalian. Hal ini akan terlihat kecilnya buruh yang sakit dan mati. Melalui tabel dibawah ini, akan dilihat perkembangan kesehatan buruh tambang batu bara Ombilin.

Tabel XIV
Jumlah Buruh Yang Kena Penyakit
dari tahun 1900 sampai tahun 1925

Jenis Penyakit	Jumlah Penderita					
	1900	1905	1910	1915	1925	1930
Paru-paru	230	210	319	514	439	284
Gatal-gatal	3451	4562	3218	2873	2779	3187
Cacingan	2258	3259	2258	2474	2763	2176
Malaria	232	120	341	153	261	417
Disentri	119	205	163	218	194	384

Sumber: Diolah dari berbagai sumber seperti *Verslag der Ekploitatie van den Staatsspoorweg ter Sumatra`s Westkust en van de Ombilin Kolenvelden, dan Jaarboek van het Mijnwezen in Nederlandsc-Indie, 1900-1925.*

[131] G.H. Wally, *op.cit*., hal. 9.

Penyakit yang cukup kronis diderita buruh adalah penyakit paru-paru. Penyakit ini bukan disebabkan oleh tempat tinggal yang tidak layak, tetapi lebih disebabkan oleh faktor kelembaban udara di lubang-lubang penggalian. Lubang-lubang penambangan, penyakit lainnya pada umumnya merupakan penyakit yang berkembang secara umum menyerang buruh tambang batu bara Ombilin.[132]

Jaminan kesehatan yang cukup baik akan terlihat juga dari angka kematian yang dialami buruh tambang. Dari tahun ke tahun, kematian yang melanda buruh tambang relatif kecil. Angka kematian yang cukup tinggi dialami buruh adalah serangan gas beracun yang terjadi tahun 1896. Serangan gas beracun yang melanda buruh paksa dan mandor yang sedang menggali batu bara mengakibatkan buruh meninggal dunia mencapai 139 orang.[133]

Setelah kecelakaan yang besar menimpa buruh tambang itu, alat pendeteksi gas beracun semakin diperbaiki. Perbaikan teknologi pendeteksi gas beracun membawa hasil baik, sehingga buruh yang meninggal karena gas beracun dapat ditekan. Kematian buruh akibat penyakit-penyakit tertentu saja seperti paru-paru dan

---

[132] Lihat tabel penyakit buruh, pada tabel XIV.

[133] *Verslaq der Exploitatie van den Staatsspoorweq ter Sumatra's Westkust en van de Ombilin Kolenvelden Over 1896*. Batavia : Lansdrukkerij, 1897, hal. 12-13.

kecelakaan kerja.[134] Untuk lebih jelasnya angka kematian buruh tambang batu bara Ombilin akibat dari berbagai penyakit, maka hal itu dapat diamati melalui tabel yang terdapat dibawah ini.

Tabel XV
Jumlah Buruh Yang Mati
Tahun 1900 sampai tahun 1925

Penyebab	Jumlah yang Meningga Dunia					
	1900	1905	1910	1915	1920	1925
Kecelakaan	19	14	13	16	21	6
Sakit	14	16	18	15	13	14

Sumber: Diolah dari berbagai sumber seperti *Verslag der Exploitatie van den Staatsspoorweq ter Sumatra`s Westkust en van de Ombilin Kolenvelden, dan Jaarboek van het Mijnwezen in NederlandsIndie.*

Penyebab utama kematian buruh adalah kecelakaan kerja. Selain itu, buruh yang mati juga disebabkan kena penyakit. Penyakit yang membawa maut di kalangan buruh terutama paru-paru. Pada tahun 1914, buruh yang meninggal akibat penyakit paru-paru 6 orang, dan tahun 1915 naik menjadi 7 orang.[135]

---

[134] Ada juga sebab kematian lain dikalangan buruh seperti akibat perkelahian sesama buruh. Hanya saja jumlah ini relatif kecil dan tidak terjadi setiap tahun.

[135] *Verslaq dr Exploitatie van den Staatsspoorweq ter Sumatra's Westkust en van de Ombilin Kolenvelden Over 1914*. Batavia: Lansdrukkerij, 1915, hal. 10-11.

Penyakit yang merata dirasakan bagi buruh lapangan adalah proses penuaan kulit dan keriput. Namun penyakit ini berkembang dikalangan buruh bukanlah sakit yang langsung terlihat dan terasakan waktu yang cepat, akan tetapi penyakit berjangkit secara lambat. Tipe penyakit ini berkembang secara perlahan-lahan pada tubuh buruh. Penyakit ini disebabkan oleh kondisi bekerja dalam lubang-lubang penggalian. Kondisi bekerja dibawah permukaan tanah, udara yang lembab, kurangnya terkena cahaya matahari dan kerja keras setiap hari mengakibatkan kulit buruh menjadi keriput. Setelah kulit menjadi keriput,maka kemudian diikuti oleh wajah tua dari usia yang sesungguhnya. Penyakit pengkeriputan dan proses penuaan yang cepat ini secara merata melanda buruh tambang batu bara yang bekerja dalam lubang-lubang penggalian batu bara atau pada tambang dalam.[136] Penyakit seperti ini berjalan secara perlahan, sehingga setelah bekerja 10 sampai 15 tahun barulah buruh merasakan penyakit ini.[137] Kondisi bekerja seperti inilah yang dijadikan sebagai persoalan pokok dalam gerakan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh buruh tambang.[138]

---

[136] Wawancara dengan bapak Abdul Muin, Lihat juga R. A. van Sandick, op. cit., hal. 792-793.

[137] Wawancara dengan bapak Abdul Muin, Bapak Paiman dan Bapak Surajin.

[138] Kelompok yang mempersoalkan hal ini bukanlah datangnya dari kalangan buruh tambang sendiri, akan tetapi berasal dari organisasi buruh seperti PKBT. Persoalan seperti ini seringkali dijadikan sebagai tema dari gerakan-gerakan organisasi buruh tambang. Lihat Surat Kabar *Soera Tambang*, 2 Mei 1925, hal. 1.

G. Masalah Hak Azazi Buruh

Kedudukan pegawai-pegawai Belanda sangat menentukan pada tambang batu bara Ombilin. Berbagai kebijakan yang menyangkut masalah buruh langsung ditangai oleh pimpinan tambang. Mereka inilah memutuskan berbagai persoalan, pelanggaran dan ketidakdisiplinan buruh yang berlangsung pada tambang.[139] Dapat dikatakan bahwa para kepala tambang dan pegawai Belanda berlaku sebagai seorang *raja kecil* dengan berbagai simbol yang dimilikinya.

Sebagai seorang raja yang berkuasa, maka setiap perkataan dan perintahnya harus dipatuhi dan dijalankan oleh buruh. Perintah yang dikeluarkan pimpinan itu seperti layaknya perintah seorang raja yang sesungguhnya.[140] Berbeda dengan pegawai Belanda yang mendapatkan berbagai fasilitas yang baik, sebaliknya buruh pribumi yang bekerja di lapangan sebagai tenaga kasar atau penggali batu bara menghadapi berbagai persoalan yang mendasar seperti masalah-masalah kemanusiaan, terutama perlakuan jelek yang diterima buruh. Buruh paksa tinggal dalam komplek penjara. Di dalam penjara, mereka tidur pada barak-barak. Mengikuti tulisan Sandick, ia secara mendetail menceritakan kehidupan buruh tambang yaitu ; buruh paksa bekerja pada malam hari. Dalam bekerja, buruh paksa dijaga. Mereka juga dipekerjakan di tambang bawah tanah, tapi di bawah tanah penjara

---

[139] J. van Beckhoven, op. cit., 25.

[140] "Waspadailah Kaoem Boeroeh Tamabng", Surat Kabar Soera Tambang, 30 April 1926, hal. 1.

terdapat lebih seratus buah jalan keluar. Dan bila satu kali buruh tersebut keluar dari tempat bekerjanya maka mereka akan mudah melarikan diri karena mereka akan bertindak seolah-olah bukan orang hukuman, jadi sebagai pekerja bebas. Ada sejumlah besar kelompok/ perkumpulan yang paling buruk dalam kalangan buruh. Akibatnya, tidak mengherankan kalau sering terjadi percobaan pembunuhan.[141]

Biasanya, percobaan pembunuhan ini dilakukan oleh buruh paksa terhadap mandor. Dari hal itu terlihat gambaran kehidupan buruh tambang batu bara Ombilin. Hal ini menarik sekali dikaji sebab sikap pemerintah Belanda inilah yang memicu protes-protes bahkan sampai pemberontakan dikalangan buruh terhadap pemerintah Belanda.

Kehidupan buruh tambang tertentu seperti buruh paksa menjalani kehidupannya sehari-hari jauh lebih menyedihkan. Mereka bekerja secara paksa pada malam hari tanpa mengenal istirahat dan di bawah pengawasan polisi tambang yang bersenjata.[142] Latar belakang kehidupannya sebagai pembunuh, pemberontak dan perampok, mereka diawasi secara ketat. Walaupun sudah diawasi secara ketat, tetap saja ada buruh yang melarikan diri. (tabel XIXI)

---

[141] R.A. van Sandick, *op. cit.*, hal. 794.

[142] V.J.H. Houben, "Profit versus Ethics Goverment Erterprises in the Late Colonial State", dalam Robert Cribb, *The Late Colonial State in Indonesia : Political and Economic Foundations of the Netherlands Indies 1880-1942*. Leiden : KITLV, 1994, hal. 201.

Tabel XVI
Rata-rata Buruh Yang Melarikan Diri
dari tahun 1910 sampai tahun 1916

Tahun	Melarikan Diri	Tertangkap
1910	9	3
1911	12	2
1912	7	5
1913	15	–
1914	26	1
1915	16	1
1916	26	3

Sumber: *Verslag der Exploitatie van den Staatsspoorweq ter Sumatra`s Westkust en van de Ombilin Kolenvelden, dan Jaarboek van het Mijnwezwn in Nederlandsc- Oost Indie dan Kolial Verslag 1910-1916.*

Buruh yang melarikan diri umumnya adalah buruh paksa. Untuk menghindari terjadinya buruh yang melarikan diri, maka buruh paksa tinggal pada penjara di Sawahlunto. Penjara itu dikelilingi oleh tembok dengan ketinggian tiga meter. Pada areal penjara itu dibuat lubang penggalian batu bara. Lubang terputus dengan lubang-lubang yang bisa menghubungkan kedunia luar. Artinya, lubang bagi buruh paksa ini hanya dapat dimasuki dari penjara dan keluarnya dari penjara. Di penjara Sawahlunto terdapat lima buah lubang penggalian batu bara.

Penjara Sawahlunto mulai dibangun tahun 1923 dan selesai tahun 1925.[143] Dengan berdirinya penjara itu, maka upaya buruh untuk melarikan diri dapat diatasi. Bagi buruh yang melarikan diri, hukumannya adalah dicambuk dengan rotan sebanyak 27 kali. Setelah hukuman itu, buruh yang melarikan diri akan dipenjara lagi dan dijatuhi hukuman sesuai dengan pengaruhnya di kalangan buruh. Hukuman itu dapat berupa hukuman di isolasi, dimasukkan ke sel, ataupun dikeluarkan bekerja dan dikirim kembali ke dalam penjara.[144] Hukuman ini berat dirasakan sehingga setelah tembok penjara selesai dibangun pada tahun 1925, maka buruh paksa yang melarikan diri sudah tidak ada lagi. Buruh dapat dikontrol secara penuh oleh pihak polisi tambang.

Para buruh paksa ini umumnya berasal dari berbagai latar belakang keresahaan seperti pemberontak, maling, perampok dan pembunuh. Berdasarkan kesalahan yang dibuatnya itulah, ia dipenjara kemudian ditarik menjadi tenaga kerja paksa. Dalam laporan perjalanannya, secara lebih rinci Bochkoven menuliskannya; Polisi itu memberitahukan kepada saya bahwa ditempat itu ribuan orang Melayu, Jawa dan Cina. Polisi itu tidak memperlihatkan tanda-tanda kemewahan. Sesuatu yang membuat saya merasa pasti adalah bahwa di Sawahlunto

---

[143] Lihat juga *Verslaq der Exploitatie van den Staatsspoorweq ter Sumatra Westkust en van de Ombilin Kolenvelden Over 1926*. Batavia : Lansdrukkerij, 1927, hal. 9.

[144] *Verslaq der Exploitatie van den Staatsspoorweq ter Sumatra Westkust en van de Ombilin Kolenvelden Over 1919*. Batavia : Lansdrukkerij, 1920, hal. 6.

telah dipekerjakan lebih kurang 1500 orang bajingan (orang rantai). Banyak diantara mereka yang berusaha melarikan diri dikala ada kesempatan. Belum lama berselang, dalam satu minggu terjadi empat kali pembunuhan disebabkan masalah sepele seperti tidak mengembalikan uang yang dipinjam. Namun keadaan tersebut lebih baik, karena ada usaha perbaikan kesejahteraan.[145]

Mereka diberlakukan secara sewenang-wenang dengan kewajiban kerja paksa, tetapi tidak mendapatkan imbalan yang semestinya. Dengan kaki dirantai dan dikawal oleh pasukan bersenjata, mereka diiring untuk menggali batu bara pada lobang-lobang penggalian. Buruh seperti ini biasanya, dinamakan sebagai *urang lubang.* Penamaan ini disebabkan pada waktu-waktu bekerja, mereka lebih banyak menghabiskan waktu di siang hari dalam lubang penggalian batu bara itu.[146]

Sebagai manusia lubang, setiap waktu buruh menghadapi resiko besar. Resiko yang utama adalah serangan secara mendadak yang berasal dari gas beracun dalam lubang-lubang penggalian. Dengan peralatan pendeteksi gas yang sederhana dan tanpa mempunyai alat pengaman seperti masker, keamanan buruh tidak terjamin. Di kala gas-gas beracun muncul secara tiba-tiba, mereka tidak punya pilihan lain kecuali menghadapi kematian melawan gas beracun. Dalam prakteknya, manusia lubang

[145] J. van Beckhoven, *op.cit.*, hal. 21-22.

[146] Wawancara dengan Bapak Soejono. Orang tua dari Soejono ini merupakan buruh paksa yang bekerja pada lubang-lubang penggalian batu bara. Ia sendiri menjadi buruh tambang batu bara Ombilin.

ini banyak yang mati dalam lubang-lubang penggalian batu bara yang mereka gali sendiri.[147]

Walaupun buruh paksa mengalami penderitaan pada waktu bekerja dalam lubang penggalian batu bara yang mereka buat sendiri, namun mereka tidak mempunyai pilihan lain kecuali mengikuti perintah pimpinan tambang saja. Posisi mereka yang lemah sebagai tenaga kerja paksa ditopang tidak adanya organisasi buruh,[148] yang memperjuangkan nasib mereka. Mereka dianggap oleh pemerintah sebagai orang buangan yang suka membuat keributan dan tidak perlu diperhatikan sisi-sisi kemanusiaannya. Tidaklah mengherankan, kehadiran organisasi buruh seperti PKBT tahun 1925 disambut dengan antusias oleh buruh tambang. Tujuan organisasi ini seperti yang terdapat pada Artikel 2 anggaran dasar berbunyi ;

> Perserikatan ini mempersatoekan sekalian kaoem boeroeh tambang di Indonesia, jang mana dengan persatoean itu akan memperhatikan keperloean jang bersangkoetan dengan peri penghidoepan dan

[147] Kematian buruh paksa sebanyak 139 orang tahun 1896, seperti telah disebut pada bagian terdahulu merupakan kematian yang disebabkan oleh serangan gas beracun itu. Mereka tidak dikubur sebagaimana layaknya seorang manusia, akan tetapi mayat dibiarkan begitu saja dalam lubang itu. Hanya pintu masuk ke dalam lubang itu ditutup dan penggalian diberhentikan. Verslaq der Exploitatie van den Staatsspoorweq ter Sumatra Westkust en van de Ombilin Kolenvelden Over 1896. Batavia: Lansdrukkerij, 1897, hal. 8.

[148] Organisasi buruh baru ada setelah terbentuknya PKBT tahun 1925.

> menoentoet naiknja boedi atau deradjatnja kaoem boeroeh tambang.[149]

Dengan tujuan seperti itu, maka kehadiran PKBT ini mendapat sambutan yang baik dari buruh tambang. Dalam konteks ini, masalah utama adalah pemerasan terhadap tenaga buruh. Buruh tidak mendapatkan upah yang layak dari hasil bekerjanya. Hal ini sudah barang tentu sebagai kebijaksanaan yang dijalankan oleh pihak perusahaan tambang batu bara Ombilin. Mereka berusaha untuk menekan upah buruh dengan harapan akan meningkatkan keuntungan bagi perusahaan.[150] Pola ini sudah menjadi hal yang sangat lazim dijalankan oleh perusahaan-perusahaan Belanda sebagaimana yang mereka jalankan pada tambang batu bara Ombilin.

H. Gejolak Politik tahun 1920-an

Keresahan yang melanda buruh tambang batu bara Ombilin kemudian dipertajam lagi oleh kondisi politik yang berkembang di Minangkabau, sehingga bermunculan organisasi sosial politik seperti cendawan di musim hujan.[151] Organisasi yang secara kontinyu menjadikan buruh tambang batu bara Ombilin sebagai garapan untuk dijadikan anggota ialah PKI. Hal ini dapat dipahami, karena ajaran komunis ini lahir sebagai dampak

---

[149] Surat kabar Soeara Tambang, Lihat juga lampiran X.

[150] Lihat tabel upah, pada tabel XIIdan XIII.

[151] Taufik Abdullah, (1971), *op. cit.*, hal. 23-50.

penindasan yang dilakukan pihak pemilik modal terhadap buruh.

Kondisi buruh yang demikian dimanfaatkan dengan baik oleh tokoh-tokoh dari kalangan partai politik untuk menarik buruh tambang menjadi anggota. Dalam propaganda, tokoh-tokoh buruh mencoba untuk menarik perhatian buruh dan kelompok masyarakat lainnya untuk bersama-sama berjuang melawan penindasan yang mereka terima dari pihak tambang. Usaha ini memperlihatkan hasil, dengan banyaknya buruh tambang yang menjadi anggota organisasi ini.[152]

Dalam merekrut anggota, setiap organisasi biasanya mencoba menjadikan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat sebagai garis pokok perjuangannya. Penyimpangan berbagai ajaran Islam dijadikan sebagai thema central dari gerakan pembaharuan Islam.[153] Datuk Maharajo Diradjo, seorang tokoh adat, berupaya untuk melakukan menjadikan nilai-nilai adat sebagai topik yang diperjuangkannya.[154] Datuk Batuah, seorang penghulu adat dan tokoh komunis menjadikan dominasi kekuasaan Belanda sebagai sasaran perjuangannya yang harus dilawan. Dengan menggunakan perbedaan antara buruh dengan majikan, ia berusaha melakukan propaganda melawan kekuasaan Belanda di Minangkabau.[155]

---

[152] Lihat Surat kabar Bulanan *panas*, November 1925.

[153] Hamka, *Ayahku.* Djakarta : Penerbit Widjaya, 1958.

[154] Taufik Abdullah, (1967), *op. cit.* hal. 72-81.

[155] *Ibid.*

Organisasi Buruh

Sejak dibukanya tambang batu bara tahun 1892 sampai tanun 1925, tidak ditemukan gerakan-gerakan buruh yang teroganisir dan terencana. Persoalan yang dihadapi perusahaan tambang dengan buruh hanya bersifat keributan-keributan dalam skala kecil. Keributan-keributan seperti ini sangat mudah diatasi dan tidak berpengaruh terhadap jalannya produksi dan tidak menggangu ketentraman pegawai-pegawai Belanda yang berada di pertambangan.

Keributan yang dilakukan buruh hanya bersifat perkelahian sesama buruh, pelarian ataupun melawan mandor. Persoalan ini biasanya hanya bersifat individual atau melibatkan kelompok-kelompok kecil. Bentuk perlawanan terhadap pihak perusahaan yang terorganisasi dan melibatkan buruh dalam jumlah yang banyak tidak pernah dilakukan buruh tambang batu bara Ombilin. Dengan demikian, persoalan yang ditimbulkan tidaklah terencana, akan tetapi hanya berbentuk letupan-letupan kecil saja.

Perkelahian antar sesama buruh dan buruh yang melarikan diri dengan mudah diatasi oleh perusahaan tambang. Dengan menurunkan 5 sampai 10 orang polisi tambang, maka persoalan ini sudah dapat diatasi. Bagi buruh yang membuat keributan, biasanya pihak pimpinan tambang menghukum mereka dalam bentuk hukuman cambuk sebanyak 27 kali.[156] Hukuman cambuk ini sudah

[156] Hukuman yang lazim yang diterima buruh dalam berbagai kesalahan adalah hukuman cambuk. Walaupun hukuman cambuk ini tidak sampai membunuh, namun kesakitannya memakan waktu berhari-

menjadi pemandangan yang rutin dalam kehidupan sehari-hari buruh tambang.

Sebelun masuk pengaruh organisasi-organisasi dari luar, pada tambang batu bara Ombilin tidak terdapat organisasi buruh. Dapat dikatakan bahwa masa-masa sebelumnya itu, buruh tambang tidak memiliki organisasi yang dapat menyalurkan keluhan-lekuhannya. Setelah berdirinya PKBT di lingkungan buruh tambang batu bara Ombilin pada tahun 1925, barulah buruh memiliki wadah untuk memperjuangkan nasibnya. Kehadiran PKBT ini mempunyai dampak pada gerakan buruh tambang batu bara Ombilin.[157]

Gerakan buruh tambang yang terencana dan terkoordinir baru berjalan setelah masuknya berbagai pengaruh organisasi dan tokoh-tokohnya dari luar kalangan buruh. Beberapa organisasi yang terpenting mengembangkan sayapnya pada tambang batu bara Ombilin adalah Persatoen kaoem Boeroeh Tambang (PKBT), Serikat Rakjat dan Serikat Islam Partai Komunis Indonesia (PKI). Organisasi-organisasi ini mempunyai massa yang kuat pada buruh tambang dan saling berebut pengaruh.[158]

---

hari. Seringkali juga buruh yang kena hukuman cambuk ini harus dirawat di rumah sakit. Bentuk hukuman seperti ini menjadi undang-undang tidak tertulis, dan berlaku terhadap berbagai kesalahan yang dibuat buruh. Surat Kabar *Panas* , No. 2 tahun 1925.

[157] Pemberontakan Silungkang tahun 1927 misalnya, merupakan contoh dari puncak ketidakpuasan buruh tambang terhadap orang Belanda. Lihat Abdul Muluk Nasution, *op. cit.*, hal. 64.

[158] *Ibid.*, hal. 59-64

Organisasi buruh muncul untuk pertama kalinya pada tambang batu bara Ombilin pada tahun 1922. Perserikatan buruh itu bernama Vereeninging Boemipoetra Staatsspoor, Traamwegen, Ombilinmijnen en Landsautomobiel diensten op Sumatra (VBSTOL). VBSTOL ini didirikan pegawai pribumi pada tambang tahun 1922.[159]

Kehadiran organisasi buruh yang menjadikan buruh kasar sebagai sasaran gerakan ditandai dengan berdirinya Perserikatan Kaoem Boeroeh Tambang (PKBT). PKBT ini didirikan oleh tokoh-tokoh buruh pada bulan April 1925. Tokoh buruh yang berperan penting dalam pendirian buruh adalah Nawawi Arief, Kasan Widjojo, Datuak Batuah dan S. M. Salim.[160] Peresmian PKBT ini disyahkan pada tanggal 12 April 1925 melalui *Algemene Vergadering*.[161]

Pembentukan organisasi buruh tidak terlepas dari keinginan tokoh-tokoh politik. Tujuan tokoh-tokoh politik adalah untuk memobilisasi buruh tambang batu bara Ombilin menjadi anggota organisasinya. Pembentukan perserikatan ini merupakan bukti adanya saling ketergantungan antara tokoh-tokoh politik dengan buruh. Untuk menyalurkan aspirasi ideologi dan politiknya, maka

---

[159] Lihat Surat Kabar *Pertimbangan*, No.1/th. V/15 November 1929, hal. 1.

[160] Tentang berdirinya PKBT ini diumumkan dalam surat kabar *Soeara Tambang*, 30 April 10925, hal. 4.

[161] *Ibid.*

berbagai organisasi politik terutama Serikat Rakjat dan PKI membentuk perserikatan di Sawahlunto.

Memahami secara seksama tujuan berdirinya PKBT, sasaran utama ialah memperjuangkan nasib buruh tambang. Pemikiran ini amat tepet sekali, sebab berbagai persoalan buruh selama ini belum ada organisasi yang menanganinya. Keinginan perbaikan nasib buruh memang secara tegas dicantumkan dalan anggaran dasar PKBT. Hal ini terlihat secara jelas dalam anggaran dasar PKBT dalam artikel 2 dikatakan maksud PKBT yaitu :[162]

> Maksoednja perserikatan ini mempersatoekan sekalian kaoem boeroeh tambang Indonesia, jang mana dengan persatoean itoe akan memperlihatkan keperloean jang bersangkoetan dengan peri penghidoepan dan menoentoet naikja boedi atau deradjat kaoem boeroeh tambang.

Dengan memiliki tujuan perserikatan seperti ini, maka menarik minat buruh untuk menjadi anggota PKBT. Sementara itu, persyaratan untuk menjadi anggota perserikata juga tidak terlalu membebankan buruh.[163] Untuk melancarkan roda organisasi, setiap buruh tambang diwajibkan membayar sumbangan sebesar 0,25 sen bagi buruh yang memperoleh gaji dibawah 25 sen per bulan dan 1 sen bagi buruh yang memperoleh gaji diatas 25 sen per

[162] Lihat lampiran X, Statuten PKBT.

[163] Dalam Aggaran dasar, setiap buruh berhak menjadi anggota. Lihat lampiran X.

bulan.[164] Kesadaran buruh untuk membayar sumbangan ini cukup berjalan lancar. Pada tahun 1925, jumlah iyuran dari anggota yang berhasil dikumpulkan itu, f 200.[165] Dari uang yang berhasil dikumpulkan itu, PKBT lebih banyak menggunakannya untuk biaya propaganda organisasi.[166]

Jika kewajiban buruh adalah membayar iyuran anggota kepada PKBT, maka perserikatan itu berkewajiban pula untuk memperjuangkan perbaikan nasib buruh tambang. Keinginan perserikatan untuk meningkatkan taraf hidup dan derajat kehidupan buruh tambang dipertegas PKBT melalui asaha yang diinginkannya. Hal ini secara nyata terlihat pada artikel 3 dari anggaran dasar PKBT yaitu ;[167]

> Boeat mentjapai maksoednja, maka perserikatan ini berichtiar sebagai berikoet:
>
> 1. Mengoempoekal boekti-boekti jang berhoeboeng dengan pekerdjaan diperoesahaan tambang, soepaja dengan djalan sematjam ini bisa diminta dengan adil kepada pemdesar-pembesar (madjikan) semoea perbaikan peratoeran pekerdjaan.

---

[164] "Hak dan kewajiban Seorang Anggota PKBT', dalam surat kabar *Soera Tambang* No. 1 Th I / 5 Mei 1925, hal. 1.

[165] Surat Kabar *Soera Tambang*, 5 Januari 1926, hal. 4.

[166] *Ibid.*

[167] *Ibid.*

2. Memberi pertolongan dengan moral (fikiran) atau oeang pada lid-lidnja, pertolongan mana akan ditentoekan dalam Huishoudelijk Reglement.
3. Mengeloerkan orgaan (soerat kabar) jang memoeat segala karang-karangan, keadaan dalam pekerdjaan jang bergoena bagi lid-lidnja.
4. Mengadakan vergadering.
5. Melakoekan segala ichtiar yang bergoena bagi kemadjoeannya perserikatan.

Tokoh utama pendiri organisasi buruh tambang ialah Nawawi Arief, Datuak Batuah, Idrus dan Haji Bahaudin. Sejak terbentuknya PKBT, ada semacam kekhwatiran di kalangan orang-orang Belanda yang bekerja pada tambang batu bara Ombilin. Kekhawatiran ini terutama kemungkinan tindakan buruh yang sewaktu-waktu bisa melakukan pemberontakan terhadap perusahaan. Kekhwatiran ini beralasan sebab, berbagai aktivitas buruh dan perserikatan memperlihatkan gejala pertentangan dengan pihak perusahaan. Buruh yang selama ini patuh dan takut, sejak berdirinya perserikatan buruh, maka buruh semakin berani melakukan berbagai provokasi ataupun tindakan yang melawan pihak perusahaan seperti mogok bekerja dan melawan mandor.

Gejala menarik lainnya yang terjadi pada tambang batu bara Ombilin adalah semangat yang diperlihatkan buruh menerima kehadiran PKBT. Rasa kekecewaan yang dalam terhadap pihak perusahaan, tampak telah dimanfaatkan dengan baik oleh tokoh-tokoh PKBT. Di kalangan buruh sendiri ada semacam harapan bahwa dengan kehadiran PKBT ini akan dapat mengubah nasib

mereka, sehingga mereka bersedia untuk menjadi anggota PKBT.[168]

Dalam penerimaan anggota buruh tambang dilakukan secara besar-besaran, sehingga tidaklah mengherankan dalam perkembangan selanjutnya, buruh tambang yang menhadi anggoata PKBT semakin lama semakin meningkat jumlahnya. Sebagai contoh adalah pada bulan Januari 1926, Surat Kabar *Soeara Tambang* melaporkan bahwa buruh yang menjadi anggoata PKBT sekitar empat ribu orang, sedangkan Abdul Muluk Nasution memperkirakan jumlah anggota PKBT sekitar tiga ribu orang.[169]

Kehadiran perserikatan buruh pada tambang batu bara Ombilin tidak lagi sekedar memperjuangakan nasib buruh, akan tetapi juga telah mengancam kelanjutan tambang batu bara seperti buruh telah berani mengadakan mogok kerja dan keselamatan orang-orang Belanda di pertambangan. Tokoh-tokoh buruh yang revolusioner menghendaki dilakukannya pemberontakan untuk menumbangkan kekuasaan Belanda di pertambangan.

Tokoh-tokoh Gerakan Buruh

Pada umumnya tokoh-tokoh utama dari PKBT bukankah berasal dari kalangan buruh tambang, tetapi berasal dari luar. Antara keduanya terdapat hubungan timbul balik yang erat sekali. Pada satu sisi tokoh-tokoh politik menjadikan buruh tambang sebagai alat untuk tujuan politiknya yaitu mengumpulkan massa melawan

[168] Surat kabar *Soeara Tambang*, Mei 1926.

[169] Abdul Muluk Nasution, *op.cCit*.

pihak Belanda. Pada sisi yang lain kehadiran tokoh-tokoh politik ini juga sangat diharapkan oleh para buruh tambang batu bara Ombilin untuk memperjuangkan nasibnya.

Pembuktikan dari pemikiran ini dapat dilihat pada tokoh-tokoh utama yang terjun di PKBT. Tokoh-tokoh utama dari organisasi buruh bukanlah berasal dari buruh tambang sendiri, tetapi berasal dari luar ataupun bekerja di luar tambang. Beberapa tokoh utama seperti Nawawi Arief, Datuak Batuah, Idrus, Salim Sutan Malenggang, Haji Mahmud, Haji Bahaudin merupakan tokoh-tokoh terkemuka dari berbagai organisasi politik di Minangkabau.

Tokoh-tokoh ini berasal dari berbagai latar belakang ideologi yang berbeda-beda. Idrus, Nawawi Arief dan Kasan Widjojo merupakan tokoh yang berideologi Nasionalis, Datuak Batuah dan Salim Sutan Malenggang merupakan tokoh PKI, sedangkan Gazali, Haji Mahmud dan Haji Bahaudin merupakan tokoh Serikat Islam.

Sementara itu, tokoh yang berasal dari kalangan buruh tambang sendiri relatif sedikit. Tokoh yang cukup menonjol hanyalah Kasan Widjojo, seorang buruh kontrak yang berasal dari Pati Jawa Tengah. Kasan menduduki jabatan sebagai salah seorang komisaris pada PKBT.

Pada sisi lain, Kasan Widjojo, seorang tokoh buruh yang berasal dari lingkungan buruh, berkomentar bahwa tekanan yang dihadapi buruh harus ada yang mampu mengatasinya. Secara eksplisit Kasan Widjojo menyebutkan tentang diperlukannya sebuah kakuatan penyelamat untuk memperbaiki nasib buruh tambang. Dalam berbagai kesempatan dikatakan, bahwa kekuatan penyelamat yang

dapat memperbaiki kehidupan buruh tambang ialah PKBT, sebagai perserikatan buruh tambang.

Berdasarkan potensi seperti inilah yaitu dari berbagai ideologi seperti Nasionalis, Islam dan Komunis, merupakan pendorong dilakukannya gerakan-gerakan menentang kekuasaan Belanda di Minangkabau. Puncak keresahan buruh adalah keterlubatan buruh dalam pemberontakan PKI pada bulan Januari 1927 di Silungkang. Dalam pemberontakan itu, buruh memiliki peran tersendiri terutama jumlah buruh yang terlibat dalam pemberontakan berdarah itu sampai tertembaknya salah seorang tokoh PKBT yaitu Kasan Widjojo.

I. Keterlibatan Buruh dalam Peristiwa Silungkang

Dalam perkembangannya, keresahan-keresahan yang pada awalnya hanya melanda buruh paksa ini menjalar pula di kalangan buruh kontrak dan buruh bebas. Buruh bebas dan buruh kontrak yang selama ini tidak merasakan tekanan yang sangat berat dibandingkan dengan buruh paksa ikut pula menambah keresahan di kalangan tambang. Suasana kehidupan buruh tambang makin lama semakin panas, karena laporan-laporan yang ditulis dalam surat kabar buruh seperti: [170]

> Beratoes-ratoes banjakja orang hoekoeman jang berpoeloeh tahoen, beriboe djoemlahnja koeli contrak, sekalian mereka itoe sama mendapat hadiah poekoelan, anoegerah tendangan, karena me`loemlah pembatja, bahwa tambang ini kepoenjaan pemerintah.

[170] Surat kabar *Soeara Tambang*, 1926

> Maki-makian soedah ditjoba, kerdja berat telah ditanggoeng berat dan ringan soedah dirasai ta` dapat mengatakan sakit, ta` boleh mengatakan berat kerdja.

Usaha untuk mendramatisir suasana yang menimpa kehidupan buruh terlihat dari persoalan buruh yang ditimpa penyakit. Pihak tambang menyediakan rumah sakit untuk buruh-buruh yang sakit. Melihat perawatan yang kurang memadai, maka ditulislah seoalah-olah pihak tambang meremehkan penderitaan buruh. Kutipan di bawah ini terlihat secara jelas propaganda PKBT yaitu : [171]

> Kalau seorang koeli mendapat sakit lantaran digiling lori, ia lantas dibawah keroemah sakit soepaja diobati dan si sakit itoe beloem sempoerna senang badannja dan toelang beloem koeat bekerdja, tetapi madjikan lantas menjoeroehnja kerdja kepada si sakit tadi. Inilah penanggoengan dan pesakitan kaoem boeroeh Sawah Loento jang mentjari sesoeap nasi, tempo-tempo membawa korban djiwa.

Perkembangan ini tidak terlepas dari propaganda yang dilakukan oleh tokoh-tokoh PKBT. Strategi yang digunakan untuk menyebarkan komunisme di kalangan buruh adalah menarik orang-orang berpengaruh di kalangan buruh untuk menjadi propagandanya. Jadi yang langsung mempropagandakan paham komunis di kalangan buruh adalah rekan-rekan sesama buruh. Dari sini terlihat bahwa yang berperan dalam menyebarkan secara langsung

[171] Surat kabar *Soeara Tambang*, 1926

pengaruh PKBT di kalangan buruh biasanya orang yang memiliki pengaruh antar sesama buruh.

Strategi seperti ini lebih efektif, karena sulitnya pihak luar memasuku kehidupan buruh tambang. Kesulitan seperti ini terutama disebabkan pengawasan yang sangat ketat dilakukan oleh polisi-polisi tambang terhadap tokoh maupun orang yang bukan buruh untuk berinteraksi dengan buruh tambang. Salah seorang tokoh penting dalam propaganda yang berasal dari kalangan buruh adalah Martowijoso, seorang buruh kontrak yang berasal dari Jawa.

Martowijoso merupakan buruh kontrak yang menjadi salah seorang pengurus PKBT. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Martowijoso ini mendapat sorotan khusus dari pihak perusahaan. Kegiatan pokok yang ditugaskan kepada Martowijoso adalah menjadi propaganda di kalangan buruh tambang. Propaganda-propaganda yang disampaikan Martowijoso mencemaskan pihak perusahaan. Untuk menekannya, pihak tambang menuduhnya dengan berbagai kesalahan ataupun bahkan sebagai seorang komunis. Pada akhirnya, pihak perusahaan memecat Martotiwijoso sebagai buruh tambang batu bara Ombilin.

Perlakuan yang sewenang-wenang yang dilakukan oleh pihak perusahaan tambang terhadap Martowijoso mendapat reaksi keras dari pengurus PKBT. Surat kabar *Soeara Tambang*, mencoba membela Martowijoso ini yaitu : [172]

[172] Surat kabar *Soeara Tambang*, 1926

> Martowijoso, jang ditoedoehnja sebagai pengenbang bibit komunisme di kalangan boeroeh kontrak, teroes dioesirnya poela dari Sawah Loento, meskipoen kontraknja beloem habis didjalaninja. Persangkaannja Komunise itoe tergantoeng kepada satoe doea tangan, dan itoelah sebabnja kejakinannja, bila kepalanja soedah dioesir, komunisme akan habis.

Untuk menahan laju gerakan buruh, maka pihak perusahaan memasang perangkap-perangkap. Berbagai bentuk perangkap dibuatnya seperti bagi yang bersalah mendapat hukuman cambuk, tuduhan komunis, pemberontak ataupun pemecatan sebagai buruh tambang tanpa mendapatkan pesangon. Martowijoso merupakan buruh yang kena perangkapdengan tuduhan sebagai komunis.

Buruh yang mendapat hukuman cambuk dan hukuman kurungan dalam sel-sel mencapai ribuan orang. Banyaknya buruh yang mendapat hukuman cambuk dan dipenjarakan pada tahun itu disebabkan mulainya buruh terlibat dalam berbagai aktivitas politik yang dilakukan oleh Sarikat Rakjat dan PKI. Pada tahun 1925, 1926 dan 1927 merupakan tahun-tahun hukuman cambuk yang diterima buruh tertinggi jumlahnya. Untuk jelas buruh yang kena hukuman, dapat dilihat pada tabel yang terdapat dibawah ini.

Tabel XVII
Buruh Tambang Yang Kena Hukuman
Cambuk, Penjara dan Dipecat dari tahun 1925 sampai tahun 1927

Tahun	Cambuk	Penjara	Dipecat
1925	3800	3210	156
1926	6100	3410	540
1927	7300	6100	986

Sumber: Diolah dari *De ingenieur in nederlandsch Indie 1926, 1927 dan 1928.*

Bedasarkan tabel di atas terlihat bahwa antara tahun 1925 sampai tahun 1927 terlihat frekwensi yang tinggi dari saku politik di Saawah Lunto. Buruh-buruh yang dicambuk disebabkan karena melanggar larangan memasuki organisasi politik. Bahkan hukuman yang terjadi tahun 1927, umumnya disebabkan oleh keterlibatan buruh tambang dalam usaha pemberontakan terhadap Belanda.

Hukuman cambuk yang diterima buruh itu beragam jumlah yang diterima buruh. Hukuman cambuk berkisar antara 15 sampai 27 kali cambuk, sedangkan hukuman penjara atau diselkan sekitar 1 minggu sampai 3 bulan. Adakalanya, setelah buruh itu keluar dari penjara, ia lanhsung dipecat. Pemecatan seperti ini terjadi terhadap 30 orang buruh pada tahun 1926. Buruh yang dipecat biasanya buruh-buruh yang mempunyai pengaruh kuat di kalangan buruh lainnya ataupun secara giat menjalankan propaganda di kalangan buruh. Nasib seperti ini dialami

oleh Martowijoso, seorang propaganda PKI di kalangan buruh tambang.

Sebelum Martowijoso dipecat, ia telah berhasil mempengaruhi buruh, sehingga jika dibutuhkan maka ia memiliki kemampuan dan kesempatan untuk memobilisasi buruh. Hal itu dapat dilihat, ketika ia dipecat sebagai buruh, ternyata banyak pula buruh lain yang berhenti bekerja. *Soeara Tambang* menuliskan : [173]

> Di dalam beberapa hari jang laloe riboetlah orang memperbintjangkan di Sawah Loento, atas pengoesiran koeli kontrak jang berpoeloeh poeloeh itoe. Tetapi orang beloem mengetahoei, lebih-lebih kaoem boeroeh tambang, bahwa penjakit crisis itoe moelai tjaoel. Kaoem boeroeh disini (Sawah Loento), beloem djoega sadar akan keboeroekan nasibnya. Manakal kaoem boeroeh tambang Sawah Loento masih berotok dingin, tentoe madjikan akan berleloeasa menendang kaoem boeroehnja, karena penjakit crisis itoe ta` bisa hilang, melainkan bertambah berjalan.

Perlakuan-perlakuan yang keras dari pihak perusahaan terhadap yang diterima buruh disoroti secara tajam oleh PKBT. Kondisi seperti itulah dijadikan sebagai tema dasar perjuangan PKBT untuk merekrut buruh sebagai anggotanya, dengan jalan membela buruh dari perlakuan yang sewenang-wenang itu. PKBT biasanya mempublikasikan tindakan perusahaan, sehingga dengan cara itu akan membuat buruh semakin ridak suka dan

[173] Surat kabar *Soeara Tambang*, 1926

merupakan bibit-bibit untuk melawan pihak perusahaan. Surat kabar *Soeara Tambang* menuliskan suasana keseharian kehidupan buruh tambang batu bara Ombilin yaitu : [174]

> Bila kita lihat dan memperhatikan akan keadan kaoem boeroeh di Sawah Loento, bagaimana berat dan soesahnja pekerdjaan, apa poela tendangan dan makian dari madjikan ataoe sinjo-sinjo sampai kepada mandoor, maka kita lantas mengambil perhatian, bahwa madjikan itoe terlaloe.

Dalam suasana yang mulai panas itu, peristiwa matinya buruh tambang dalam lubang tambang menjadikan sikap anti terhadap Belanda semakin tajam. Kejadian ini dimanfaatkan tokoh-tokoh PKBT untuk menghasut buruh. Melalui surat kabar *Soeara Tambang*, tokoh buruh mengecam pihak perusahaan dengan nada yang keras yaitu : [175]

> Kaoem boeroeh itoe bekerdja masoek lobang kalam, terkadang kadang lobang tempet keloear itoe tertoetoep lantaran arang batoe itoe jatoeh menimpa tempat keloear itoe. Koeli-koeli jang tidak dapat keloear itoe mereka matilah didalam loebang, karena lapar dan panas, tetapi madjikan tidak ambil poesing. Maka orang-orang jang mati itoe tiadalah ditimbang djiwanja oleh madjikan. Sesoenggoehpoen kesoesahan itoe soedah dirasai oleh kaoem boeroeh tambang, teroetama orang-orang Contrackan, tetapi

[174] Surat kabar *Soeara Tambang*, 1926

[175] Surat kabar *Soeara Tambang*, 1926

> mereka masih mengalah dan menerima djoega akan nasib jang lebih dari tjilaka itoe.

Keterlibatan buruh tambang dalam pemberontakan komunis tidak terlepas dari berbagai keresahaan yang dialami buruh selama ini. Keresahaan yang dialami buruh tambang itu dijadikan sebagai tema central dari propaganda komunis, sehingga dengan propaganda itu terdapat suatu kaitan yang erat antara persoalan yang dihadapi buruh dengan perjuangan tokoh-tokoh komunis.

Berbagai kejadian di kalangan buruh dijadikan persoalan untuk mogok. Salah satu contoh adalah masuknya kodok dedalam makanan. Pada bulan April 1926, hampir terjadi pemogokan di kalangan buruh. Persoalan berwal ketika ditemukan seekor kodok dalam makanan siang. Persoalan ini dijadikan isu oleh buruh, sehingga terjadi mogok makan besar-besaran di kalangan buruh. Untuk mengatasi ini, pihak perusahaan terpaksa meminta bantuan se pasukan polisi untuk menantisipasi pemogokan itu. Kemudian pihak perusahaan mengajak berunding tokoh buruh yaitu Salim Sutan Malenggang. Salim Sutan Malenggang ini akhirnya bisa menenangkan suasana, sehingga pemogokan yang lebih besar dapat dihindari. [176]

Hal yang ingin disampaikan adalah bahwa berbagai persoalan di kalangan buruh dapat dijadikan sebagai

[176] Salim sutan Malenggang ini seorang penghulu dari nagari Kubang. Dalam Pemberontakan Silungkang, ia dan kaumnya ikut terlibat.

alasan untuk melakukan pemogokan terhadap perusahaan tambang. Dalam konteks ini, tokoh-tokoh buruh bisa berperan sebagai meditor untuk menenangkan suasana ataupun sebaliknya memanaskan suasana. Dalam konteks seperti inilah tokoh-tokoh buruh beperan sebagai elite yang memperjuangkan nasib buruh tambang batu bara Ombilin.

Pesona propaganda yang disampaikan oleh tokoh-tokoh komunis untuk memperjuangkan nasib buruh, mengakibatkan banyak buruh tambang terpengaruh kuat untuk memasuki organisasi itu. Dalam propaganda-propaganda yang disampaikan tokoh komunis, maka ia menekankan arti penting organisasi buruh dan perjuangan yang dilakukannya. Hal itu terlihat dari propaganda tentang PKBT yang dimuat surat kabar *Soeara Tambang* yaitu : [177]

Rakjat dan kaoem boeroeh perhatikanlah !!!

> Perserikatan rakjat dan kaoem boeroeh seperti PKI, SR, VSTP, SPPI, PKBT, SBT dan lainnja maksoednja tidak lain dari hendak mentjari keselamatan seloeroeh rakjat dan kaoem boeroeh. Tetapi wakil pemerintah dimana-mana kelihatannja semendjak perkoempoelan itoe moelai berdiri tak henti-hentinja menghalang-halangi kemadjoeannja pergerakan jang amat sutji itoe. Ada memboeang pemimpinnja dengan djalan tidak sah seperti saoedara-saoedara Tan Malaka, Semaoen, Datoek Batoeah, Moehamad Misbach, Natar Zainoedin dan lain-lain.

[177] Surat kabar *Soeara Tambang*, Juli 1925.

Tekanan dari propaganda yang dilontarkan adalah kehadiran organisasi adalah dalam rangka memperjuangkan nasib buruh. Inti pokok dari gerakan komunis yaitu membawa nilai-nilai kemerdekaan kaum tertindas dan ini dirasakan oleh buruh sebagai persoalan yang tak mampu mereka atasi selama ini.

Berlangsungnya pemberontakan pada tahun 1927 itu, dilakukan tanpa sebuah perencanaan yang matang. Hal ini dapat dilihat bahwa pemberontakan yang dalam rencananya dimulai dari Padang dan kota tambang batu bara Sawahlunto dan kemudian diikuti oleh kota-kota lainnya, namun pemberontakan sesungguhnya meledak terjadi di Silungkang, membunuh beberapa orang, termasuk seorang pegawai Belanda. Dalam melihat pemberontakan Komunis di Silungkang itu, menurut Tan Malaka, sebagaimana yang dikutip oleh Mrazet menyebutkan, bahwa pemberontakan PKI tahun 1927-1927 yang terjadi di Silungkang itu sesungguhnya merupakan pemberontakan yang tak terencana, sehingga mengalami kegagalan. [178]

Pemberontakan di Silungkang itu sesungguhnya bukanlah murni pemberontakan PKI saja. Pemberontakan yang terjadi pada malam tahun baru itu juga melibatkan organisasi-organisasi lainnya terutama adalah Serikat Rakjat dan PKBT. Keterlibatan Serikat Rakjat dan PKBT dalam pemberontakan di Silungkang merupakan strategi

[178] Schrieke, B., *Indonesian Sociological Studies : Selected Writing of B*. Bandung : The Haque and Bandung, 1955, hal. 95-159.

perjuangan untuk melepaskan diri dari penindasan Belanda. Hal ini terlebih-lebih bagi buruh tambang, orang yang merasakan langsung tekanan dari pihak Belanda, sehingga dengan bergabungnya PKBT dengan Serikat Rakjat dan PKI akam membuat kekuatan semakin kokoh.

Secara organisatoris, antara PKI, Serikat Rakjat dan PKBT tidak memiliki ikatan. PKBT sebagai organisasi buruh tambang pada prinsipnya merupakan sebuah organisasi yang bersifat indenpenden. Hanya saja banyak tokoh komunis yang menyusup kedalam PKBT, sehingga mampu mempengaruhi perserikatan itu untuk melakukan pemberontakan terhadap dominasi kekuasaan Belanda pada tambang batu bara Ombilin. Selain itu, semuanya juga memiliki ikatan sebagai teman seperjuangan terutama dengan Serikat Rakjat, maka instruksi dari pimpinan Derikat Rakjat dalam melakukan pemberontakan menjadi amat penting. Arti pentingnya terletak pada strategi pemberontakan secara total dari seluruh kekuatan yang ada.

Perserikatan yang memiliki pengaruh kuat di Silungkang adalah Serikat Rakjat. Melalui Serikat Rakjat inilah dilakukan mobilisasi penduduk untuk mengadakan pemberontakan. Tokoh Serikat Rakjat yang memainkan peranan penting dalam pemberontakan itu adalah Sulaiman Labai. Tokoh Serikat Rakjat Silungkang lainnya yang terlibat dalam pemberontakan itu adalah Jusuf Rajo Kecil, Talaha Gelar Rajo Sampono dan Toyib Ongah.

Selain Serikat Rakjat, PKI juga memiliki peranan tersendiri dalam peristiwa Silungkang itu. Di samping sebagai anggota PKI, banyak juga tokoh PKI yang

menyusup kedalam tubuh Serikat Rakjat. Dalam konteks ini PKI kadangkala tidak memperlihatkan sosok yang sebenarnya, namun mereka mampu menyusup ke dalam tubuh Serikat Rakjat. Tokoh-tokoh komunis berperan dalam Serikat Rakjat inilah yang turut mengatur pemberontakan itu.

Keterlibatan buruh tambang batu bara Ombilin dalam pemberontakan Silungkang merupakan bagian dari rencana pemberontakan terhadap kekuasaan Belanda secara keseluruhan di Minangkabau. Rencana-rencana pemberontakan itu telah dirancang dalam berbagai pertemuan antara tokoh-tokoh buruh. Dalam rancangan pemberontakan, sasaran utama ialah menyerang Belanda pada kota-kota besar seperti Padang, Bukit Tinggi, Batu Sangkar dan Sawahlunto. Pemberontakan Silungkang ini pada prinsipnya bukanlah murni pemberontakan rakyat Silungkang atau pemberontakan PKI. Pemberontakan itu melibatkan banyak kekuatan dari luar seperti rakyat sekitar nagari Silungkang dan buruh tambang batu bara Ombilin.

Dalam beberapa literatur yang membahas tentang peristiwa pemberontakan di Silungkang disebutkan sebagai pemberontakan Rakyat Silungkang. Buku yang ditulis oleh Abdul Muluk Nasution dan juga tulisan dari Harry J. Benda dan Ruth. T. Mc Vey menuliskan sebagai pemberontakan yang dilakukan oleh komunis.[179] Dalam kenyataan yang sebenarnya, pemberontakan itu bukan saja melibatkan PKI dan Rakjat Silungkang, tetapi melibatkan banyak orang dari berbagai nagari seperti dari Padang

[179] Abdul Mulut Nasution. o*p.cit.* Ruth T. Mcvey, op. cit,

Sibusuk, Muara Kalaban, Kubang dan Sikalang dan buruh tambang batu bara Ombilin.

Contoh yang menarik adalah keterlibatan nagari Kubang dan Sikalang. Nagari Kubang dan Sikalang terlibat langsung dalam peristiwa Silungkang. Kedua nagari itu memiliki alasan yang sama terlibat dalam pemberontakan itu yaitu masalah tanah antara kedua nagari itu dengan perusahaan tambang. Salim Sutan Malenggang sebagai penghulu Adat Kubang dan Salim Datuk Bandaro Sutan sebagai penghulu Adat Sikalang tidak menerima ganti rugi yang diberikan pihak tambang atas tanah kaumnya yang digarap untuk tambang batu bara. Ketidakpuasan itu mereka perlihatkan dengan keikutsertaan dalam pemberontakan Silungkang itu.

Persoalan lainnya adalah pengambilan kayu untuk keperluan tambang, Nagari Padang Sibusuk dan Parambahan tidak mau menerima pembayaran atas kayu-kayu di hutan ke dua nagari. Dari uraian diatas terlihat bahwa keterlibatan berbagai kalangan dalam pemberontakan Silungkang itu memiliki alasan-alasan masing-masing, sebagaimana alasan dari buruh tambang yaitu tekanan yang diterima selama bekerja sebagai buruh tambang.

Andil yang diberikan buruh tambang dalam rencana pemberontakan itu cukup besar. Hal ini terlihat dari keterlibatan tokoh buruh dan buruh tambang dalam pemberontakan itu. Tokoh buruh yang terlibat dalam pemberontakan itu adalah Kasan Widjojo, seorang buruh kontrak dan komisaris dari PKBT. Kasan Widjojo

merupakan pimpinan utama PKBT yang secara langsung memimpin buruh melawan pasukan Belanda.

Kasan Widjojo sebagai tokoh penting PKBT. Pada saat pemberontakan, ia menjabat sebagai ketua PKBT. Sebagai ketua PKBT, dalam rencana merebut kota Sawahlunto, sebagai kota kedua (setelah kota Padang) dari sasaran utama kota-kota yang harus dikuasai.

Rencana pemberontakan adalah pada jam 12 tengah malam. Dalam rencana pemberontakan pada malam tahun baru atau tepatnya tanggal 1 Januari 1927. Barisan inti di Sawahlunto di bawah pimpinan Kasan Widjojo dan Radjo Budjang mendapat dua tugas pokok yaitu : [180]

1. Pertama dibawah pimpinan Kasan Widjojo dan Radjo Budjang, buruh tambang batu bara mendapat tugas untuk menguasai kota Sawahlunto. Tepat pukul 12 tengah malam memulai gerakan yaitu menyerang sociteit, dimana pembesar-pembesar pemerintah dan tambang batu bara Ombilin yang orang Belanda sedang berdansa. Penyerangan serentak juga dilakukan terhadap kantor dan asrama polisi.
2. Kedua adalah bersamaan dengan itu juga, Sersan Pontoh dan kawan-kawan merebut kekuasaan Garnizun Sawahlunto dan penjara; melepaskan tawanan politik dan memenjarakan pembesar-pembesar Belanda.

[180] Abdul Mulut Nasution, *op.cit*. hal. 99.

Perencanaan pemberontakan di atas tidaklah berjalan sesuai dengan terget semula. Gerakan yang juga didukung sebanyak 27 orang anggota garnizun (garnizun pribumi yang menyerang ke pihak pemborantak), dibawah pimpinan Sersan Mayor Pontoh dan Sersan Rumuat dengan mudah dapat dipatahkan. Strategi yang tidak matang, membuat polisi secara cepat menahan laju pemberontakan itu. Di kala berbagai kelompok menuju ke Sawahlunto sebagai sasaran utama kota yang harus direbut, ditengah jalan dicegat 2 km menjelang memasuki kota Sawahlunto.

Salah satu pertempuran yang seru terjadi di Pamuatan. Dalam pertempuran itu, Kasan Widjojo, sebagai salah satu tokoh utama buruh meminpim pemberontakan. Ia terlibat adu senjata secara langsung dengan pasukan Belanda dan kemudian terbunuh dalam sebuah kontak senjata pada malam tahun 1927 di Pamuatan. Dari kalangan buruh tambang batu bara Ombilin, pemberontakan itu menelan banyak korban, baik yang tertangkap maupun yang terbunuh.

Banyak diantara pemimpin pemberontakan yang tewas ditiang gantungan. Mereka yang mendapat hukuman gantung ialah Kamaruddin, Sampono Kayo dan Ibrahim. Anggtota garnizun yang terlibat pemberontakan juga mendapat hukuman yaitu 10 tahun untuk Sersan Potoh, 6 tahun untuk Sersan Rumuat, Sersan Wenas dan Kopral Takuru. Secara umum, hukuman yang diterima

pemberontak itu dilakukan secara kolektif yaitu kepala barisan 8 tahun dan anggota barisan 2 sampai 4 tahun. [181]

Puncak dari kekecewaan buruh tambang batu bara Ombilin adalah keterlibatan mereka dalam pemberontakan Silungkang pada malam tahun baru 1927.[182] Pemberontakan yang tidak matang itu kemudian dengan mudah digagalkan oleh Moserse Belanda. Dari pemberontakan itu, banyak buruh tambang yang mendapat hukuman cambuk. Tokoh-tokoh buruh baik yang bekerja di dalam tambang maupun tidak seperti Martojoso, Kasan Widjojo, Nawawie Arief, Datuak Batuah dan S. M. Salim mendapat hukuman dari pemerintah Kolonial seperti hukuman cambuk, dipenjara dan dibuang ke Digul.[183] Setelah pemberontakan Silungkang berakhir, kehidupan buruh relatif berjalan datar-datar sampai kemudian tambang batu bara ini bertukar tuannya dengan pemerintahan pendudukan Jepang.

Pada masa pendudukan Jepang, tambang batu bara tidak terkelola secara baik. Hal ini disebabkan karena

---

[181] *Ibid*. hal. 118-137.

[182] Sebenarnya, pemberontakan ini bukan murni pemberontakan rakyat Silungkang, sebagaimana ditulis Abdul Muluk Nasution. Pemberontakan ini juga banyak melibatkan kelompok lain seperti buruh tambang batu bara Ombilin. Lebih jauh lihat, Zaiyardam Zubir "Pemberontakan Buruh Tambang Batu Bara Ombilin 1927" dalam, Zaiyardam Zubir, dalam *Radikalisme Kaum Pinggiran : Studi Tentang Issue, Strategi dan Dampak gerakan* Yogyakarta : Insist Press, Desember 2002.

[183] Abdul Muluk Nasution, *op. cit.*

suasana perang yang sedang berlangsung. Bahkan, produksi batu bara tidak berjalan secara lancar sehingga buruh banyak meninggalkan tambang dan mencari jalan lain untuk sekedar dapat makan. Pada masa-masa sulit itu dapat dikatakan tambang batu bara mengalami penurunan produksinya. Jika tahun 1941 misalnya mampu memproduski batu bara sebanyak 537,738 ton dalam setahun, dan dengan 3268 pekeja, maka tahun 1944 batu bara Ombilin hanya mampu berproduksi sebanyak 98.878 ton dengan jumlah pekerja sebanyak 2533 orang. [184] Untuk lebih jelasnya, bandingkan produksi 5 tahun terakhir pada batu pada masa kolonial Belanda dan masa Jepang.

Tabel XVIII
Produksi Batu Bara Ombilin tahun 19401-1945
(dalam ton)

Tahun	Jumlah	
	Karyawan (orang)	Produksi (ton)
1940	3227	577.614
1941	3268	537.738
1942	3465	301.221
1943	2878	228.724
1944	2533	98.878
1945	2443	72.780

Sumber: Firman Jalal dkk, *Sejarah Ringkas Pertumbuhan Kota Sawahlunto sumatera Barat.* 1 juli 1918 sampai 1 Juli 1972. Sawahlunto, 1972, hal. 59.

[184] Firman Jalal dkk, *op.cit*. hal. 59.

Kemerosotan inilah yang diwariskan ketika mengambil alih tambang TBO pada tahun 1945. Kemerosotan itu berjalan terus sampai menjelang tahun 1951 secara perlahan produksi tambang batu bara Ombilin mulai mengalami peningkatan.

Setelah Indonesia merdeka tahun 1945, dunia kehidupan tambang kembali bergairah kembali. Hanya saja, catatan-catatan yang ditinggalkan tentang kehidupan buruh hanyalah catatan buram mengenai ketidakberdayaan dan penderitaan kehidupan mereka sebagai buruh kelas bawah. Gambaran yang muncul kepermukaan adalah kehidupan buruh tambang batu bara Ombilin ternyata tidak berbeda dengan masa-masa zaman kolonial Belanda sebelumnya. Bahkan, justru setelah Indonesia merasa merdeka, kehidupan buruh semakin lebih susah lagi karena tiada jaminan kepastian dari upah yang akan mereka terima. Dapat dipahami, karena setelah Indonesia merdeka, TBO harus membangun kembali segala sesuatu berkenan dengan perusahaan, seperti manajemen perusahaan, struktur dan infrastuktur perusahaan, setelah semuanya ditinggalkan Belanda dan Jepang mengalami kemandekan.

Setelah Jepang kalah, tambang batu bara Ombilin langsung dikuasai oleh orang Indonesia. Berbeda dengan perusahaan lainnya di Indonesia, yang pengambilalihannya melalui proses nasisonalisasi,[185]

[185]Yahya Muhaiman merumuskan nasionalisasi adalah pengalihan hak milik atas harta kekayaan dari orang asing kepada negara Indonesia atau kepada warga negara Indonesia. Yahya A. Muhaimin, Bisnis dan Politik : Kebijaksanaan Ekonomi Indonesia 1950-1980. Jakarta : LP3ES, 1991, hal. 173.

ternyta tambang batu bara Ombilin tidaklah melalui jalan berliku yang demikian itu. Proses nasionalisasi pada TBO tidak berjalan sebagaimana proses nasionalisasi yang dialami oleh perusahaan-perusahaan lain melalui nasisonalisasi, akan tetapi TBO secara langsung dikuasai oleh bangsa Indonesia. Dapat dikatakan bahwa proses nasionalisasi tidak ada di TBO.

Sebagai perbandingan, misalnya proses nasionalisasi pada PT Timah Bangka yang berlangsung tahun 1953-an. Setelah Indonesia merdeka tahun 1945, perusahaan PT Timah Bangka masih dikuasai oleh orang Belanda, sehingga penyerahan kepada orang Indonesia baru berlangsung tahun 1953-an.[186] Walaupun kalangan bawah tidak mengetahui proses Nasisnalisasi, namun jalan yang ditempuh itu demikian rupa, sehingga di PT Timah berubah menjadi milik bangsa Indonesia.

Pada kasus TBO, setelah Indonesia merdeka, perusahan ini langsung dikuasai oleh orang-orang Indonesia. Orang Belanda tidak menjadikan batubara inbi sebagai bidikannya, sebagaimana mereka menjadikan beberapa perusahaan lain sebagai target untuk dikuasai sepeerti BI, Pelni, dan PT Timah. Hal ini ditandai dengan pimpinan TBO langsung dipegang oleh orang Indonesia. Artinya, proses pengalihan dari Belanda ke Indonesia tidak berjalan, karena setelah Jepang meninggalkan Indonesia, TBO langsung diambil alih oleh orang Indonesia. Tercatat

[186] Wawancara dengan Marzuki dan Bahari di Pangkal Pinang, l Juni 2004.

nama-nama pimpinan tambang batu bara Ombilin, orang-orang Indonesia sejak kemerdekaan Indonesia tahun 1945.

Tabel XIX
Nama-nama Pemimpin
Tambang Batu Bara Ombilin Sawahlunto
1945-1967

No	Masa Jabatan	Nama
1.	1891 - 1892	W.Godefroy
2.	1892 - 1896	J.W.Ijzerman
3.	1896 - 1898	Th.F.A.Ruji
4.	1898 - 1901	Th.F.A.Delprat
5.	1901 - 1902	H.F.van Stipriaan Luiscius
6.	1902 - 1905	W.de Jongh
7.	1905 - 1907	H.C.Raven
8.	1907 - 1910	G.P.J.Casperst
9.	1910 - 1911	F.A.Fokker
10.	1911 - 1913	G.P.J.Casperzt
11.	1913 - 1915	J.Koomans
12.	1915 - 1916	J.Van der kloes
13.	1916 - 1919	G.H.M.Vierling
14.	1919 - 1926	T.Van der Kloes
15.	1926 - 1928	Th.C.Van Wijngaarden
16.	1918 - 1929	V.W.Ploem
17.	1929 - 1933	Th.C. Van Wijngaarden
18.	1933 - 1936	W.Holleman
19.	1936 - 1940	G.J. Wally
20.	1940 - 1942	W.J.R.Lanzing
21.	1945 - 1946	Roesli
22.	1946 - 1948	A.Azis st.Maradjo

23.	1948 - 1949	Bahar Soon
24.	1950 - 1956	Syahbuddin SRN
25.	1956 - 1958	Bahar Soon
26.	1958 - 1960	Paul Darami
27.	1960 - 1961	S.A.Syouta
28.	1961 - 1962	Kapten Harun Al Rasyid
29.	1962 - 1967	Mayor Syamri Sonto Sudirdjo
30.	1967 - 1968	Ir.Atmoso Soehoed
31.	1968 - 1970	Kolonel Oteng Hasmeng
32.	1970 - 1976	Ir.Prasadja D.Sugoto
33.	1976 - 1987	Ir.Soehandojo
34.	1987 - 1988	Ir.Basuni maliki
35.	1988 - 1990	Ir.Somad
36.	1990 - 1994	H.Adeng Sunardi MSc
37.	1994 – 2001	Ir. Iwan Setiawan
38.	2001 – 2002	Dr. Ir. Suhatri Arif, M.Sc
39.	2002 – 2007	Ir. Mustav Sjab
40.	2007 – 2008	Ir. Ponco Agus Susanto
41.	2008 – 2012	Ir. Harun Al Rasyid Lubis
42.	2012 – 2014	Moch. Jazuli, BE
43.	2014 - sekarang (2016)	Eko Saputro

Sumber: Diolah dari Adeng Sunardi, *100 Tahun Tambang Batu Bara Ombilin Sumatera Barat 1891-1991*. Sawahlunto, 1991 dan Erwiza Erman, ”Membaranya Batubara:Konflik Kelas dan Etnik, Ombilin-Sawahlunto-Sumatera Barat (1892-1996)”. Jakarta: Desantra, 2005, dan PT. BA-UPO, 2013-2015.

Jelas sekali, dari nama-nama pimpinan di atas terlihat bahwa pimpinan tambang sepenuhnya dikuasai oleh orang Indonesia. Dengan demikian, proses nasionalisasi pada perusahaan taambang TBO sesungguhnya tidak ada. Artinya, setelah Indoesia merdeka, TBO tidak diambil kembali oleh pemerintah Belanda, sehingga kevacuman kepemimpinan itu secara langsung diambil alih oleh orang Indonesia. Kemungkinan hal ini disebabakan karena Belanda kekurangan personil dan tambang batu bara yang terdapat di Sawahlunto bukanlah komoditas bisnis yang sedang menjanjikan dibandingkan dengan bisnis lainnya seperti PT Semen Padang, PT Timah Bangka, Bank Indonesia, Pelni, dan Garuda, yang memang diambil alih oleh pemerintah Belanda. [187]

Tentu saja semua orang berharap, setelah dikuasai oleh bangsa sendiri, kehidupan akan lebih baik lagi. Harapan yang muncul hanya sekedar harapan saja karena harapan itupun tidak berjalan sebagaimana yang diimpikan. Misalnya saja, setelah Tambang dikelola oleh bangsa sendiri, komoditas ini tidaklah berjalan dengan lancar. Artinya, proses produksi sampai pemasaran masih

[187] Perusahaan-perusahaan lainnya yang pernah dikuasai Belanda memang diambil lih melalui proses nasiosnalisasi, sedangkan batu bara ombilin diambil begitu saja. Dalam kasus PT Timah Bangka misalnya, pengambilalihan oleh orang Indonesia terjadi di tahun 1952-1953. Proses pengambilalihan perusahaan ini berjalan dengan damai saja. Bahkan, setelah Indonesia merdeka, hubungan karyawan pribumi dengan karyawan Belanda dan Ambon berjalan harmonis saja. *Wawancara* dengan Bahari, Marzuki dan Sahak di Pangkal Pinang, Juni 2004.

tersendat-sendat, sehingga kelancaran bisnis terganggu. Ketidaklancaran bisnis secara otomotis membuat perusahaan tidak sehat, yangpada gilirannya yang paling menderita adalah buruh. Tidak heran misalnya, buruh bisa tidak mendapatkan upah berbulan-bulan, karena batu bara tidak laku di pasaran.[188] Dalam kondisi yang demikian, pikiran yang muncul di kalangan buruh hanyalah supaya tidak kelaparan saja.[189] Berapapun upah yang dibayarkan, mereka terima begitu saja tanpa ada penolakan ataupun reaksi yang mendalam. Jikapun reaksi muncul, kondisi internal batu barta itulah yang membuat mereka paham bahwa memang secara ekonomis, perusahaan tidaklah berjalan dengan lancar.

Dapat dipahami, setelah ditinggalkan Jepang, pola penambangan masih kacau, sehingga dibutuhkan waktu untuk untuk menata ulangnya kembali. Bahkan, walaupun sudah mulai bekerja, masalah gaji yang diterima juga tidak jelas. Berbulan-bulan mereka tidak mendapatkan gaji yang memadai. Pimpinan yang berkuasa hanya dapat memberikan janji-janji perbaikan hidup bagi buruhnya, tanpa dapat melaksanakannya.

Gambaran yang menarik tentang suasana buruh di Sawahlunto seperti diungkapkan Paiman. Paiman merupakan contoh nyata buruh kontrak yang didatangkan dari Jawa sejak tahun 1920-an. Menurut Paiman, ia dan ibunya diajak oleh ayahnya ke Sawahlunto pada tahun 1920. Dalam rombongannya terdapat 30 kepala keluarga

[188] *Wawancara* dengasn Paiman.

[189] Wawancara dengan Djanan Taib

yang membawa anak dan istrinya ke Sawahlunto. Rombongan Buruh kontrak itu mendapatkan upah sebanyak 30 sen dalam setiap hari. Mereka juga dikasih fasilitas bedeng. [190]

Walaupun lebih rendah dari upah yang diterima oleh buruh bebas dan tukang kayu, namun demikian buruh kontrak memperoleh fasilitas lainnya seperti makan, tempat tinggal, pakaian kerjadan biaya perawatan kesehatan. Kondisi upah yang diterima buruh cukup baik sehingga banyak dari kalangan buruh kontrak membawa keluarga ke Sawalunto.[191] Dengan kondisi yang demikian itu, suasana kerja berjalan dengan baik. Walaupun tidak ada buruh yang kaya atau makmur, namun buruh dalam keseharian tidak mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pokok termasuk perumahannya (Bedeng-bedeng yang disediakan pihak perusahaan). Lebih jauh dikatakan Paiman bahwa ia telah menjalani hidup dalam tiga zaman di tambang batu bara Ombilin. Dari pengalaman yang dihadapinya ternyata kehidupan buruh zaman kolonial Belanda jauh lebih baik dibandingkan zaman sesudahnya. Pada zaman kolonial Belanda, semua kebutuhan pokok seperti makan, kesehatan dan perumahan disediakan dengan baik. Khusus untuk bidang kesehatan, perhatian terhadap buruh sangat baik sekali.[192]

---

[190] Wawancara dengan Paiman

[191] Wawancara dengan Paiman.

[192] Wawancara dengan Paiman, Buruh tiga zaman tambang batu bara Ombilin Sawahlunto. Lebih jauh lihat, Zaiyardam Zubir, Radikalisme . op.cit., hal. 9.

Namun setelah Indonesia merdeka, hidup sebagai buruh tidaklah lebih baik dari sebelumnya.

Perhatian terhadap kesehatan seperti ini tidak terlepas dari faktor bahwa buruh merupakan sektor produksi yang paling utama karena batu bara yang digali umumnya adalah tambang dalam. Selain itu, tenaga kerja yang sulit didapatkan dan biaya mendatangkan buruh sangat mahal. Buruh umumnya didatangkan dari Jawa sehingga perhatian terhadap kesehartan buruh ini menjadi amat penting bagi pihak perusahaan.[193] Pada masa sesudah itu, terutama pada awal-awal kemerdekaan, untuk dapat bertahan hidup saja buruh sudah mengalami tingkat kesulitan hidup yang tinggi. Gaji yang mereka terima hanya sebanyak 3 kg beras, sekedar memenuhi makan mereka saja, agar tidak mati kelaparan.[194]

Dalam tahun 1945-1950-an merupakan masa yang sulit bagi kehidupan buruh. Ketidakjelasan dari pemasaran batu bara merupakan penyebab utama sulitnya bisnis itu, dan kehidupan buruhpun secara langsung ikut terpengaruh. Hal yang meringankan adalah semua orang mengalami hal yang sama, sehingga satu dengan lainnya tidak merasakan perbedaan yang menyolok tau jurang

[193] Rumah sakit Tambang batu bara di Sawahlunto pernah menjadi rumah sakit yang terbaik di Sumatera Barat karena memiliki kelengkapan yang bagus dibandingkan dengan rumah-rumah sakit lainnya.

[194] *Wawancara* dengan Paiman.

perbedaan kaya dengan yang miskin tidak terlalu kentara.[195]

Dilihat dari segi jumlah produktivitas, sesungguhnya TBO masih mampu berproduksi. Hanya saja, jumlah devosit yang ada tidak mampu memberikan gaji buruh yang layak dan karena itu kehidupan buruh tetap saja menjadi tidak sejahtera. Tabel 8 .

Tabel XX
Jumlah Produksi Tambang Batu Bara Ombilinm
(dalam Ton)

Tahun	Jumlah	
	Karyawan (orang)	Produksi (ton)
1945	2443	72.780
1946	2239	50.391
1947	1891	59.728
1948	1657	40.947
1949	1200	24.353
1950	1526	56.386
1951	1565	48.870
1952	1787	676.018
1953	2191	59.815
1954	2076	78.622
1955	2067	84.954
1956	2026	75.318
1957	2199	90.912
1958	2088	59.357

Sumber: Firman Jalal dkk, *Sejarah Ringkas Pertumbuhan Kota Sawahlunto sumatera Barat 1 juli 1918 sampai 1 Juli 1972*. Sawahlunto, 1972, hal. 59.

[195] *Wawancara* dengan Syuir

Tabel diatas memperlihatkan bahwa perbandingan upah buruh dengan jumlah produksi batu bara. Lantas, kalau sudah berproduksi itu, apakah buruh sudah mendapatkan kesejahteraan ataupun imbalan yang memadai dari kerja yang lakukan. Jawabannya adalah belum, karena upah yang mereka terima tetap saja belum dapat meningkatkan standar hidup mereka. Bahkan, dalam keseharian, jikapun ada berbagai lembaga seperti koperasi, maka lembaga itu hanya sekedar menambah beban mereka, karena kesempatan yang diberikan untuk mengutang kepada buruh , hanya memperkecil upah yang mereka terima setiap bulan, karena upah mereka dipotong untuk membayar utang.[196]

Jika tahun 1927, buruh terlibat dalam pemberontakan Silungkang, maka keterlibatan mereka dalam pemberontakan 1965 belum sempat terjadi. Walau demikian, animo buruh menjadi anggota atau simpatisan PKI cukup tinggi, sehingga organisasi ini merupakan salah satu yang diminati buruh tambang. Melalui SBTI SOBSI misalnya, mereka itu berkumpul dan membuat arisan seperti piring. Piring ini mereka pinjamkan untuk

[196] Erwiza Herman, dalam wawancaranya dengan buruh tambang Ombilin menyatakan bahwa pada koperasi buruh dapat mengutang mengambil berbagai keperluan sehari-hari seperti beras, gula, susu, roti, minyak, dan lauk pauk. Hanya saja, barang yang mereka utang bukan untuk keperluan sehari-hari mereka, akan tetapi mereka jual kembali kepada toko-toko yang ada di Sawahlunto. Mereka mengharapkan dapat uangnya dari penjualan barang yang mereka utang pada koperasi tadi. Lebih jauh lihat Erwiza Herman, Miners, *op.cit.*

kawannya yang lagi pesta. Mereka itu militan terhadap teman-temanya se-ide. Walaupun jauh untuk diturut seperti pesta perkawinan. Pada tanggal 1 Mei , sebagai hari buruh, mereka mau pergi acara kelapangan, maka oleh mereka ini dibuatlah daftar, untuk meminjam mobil, harus membuat tanda tangan. Tanda tangan seperti inilah yang banyak dituduhkan kepada mereka sebagai komunis. [197] Akar persoalannya sama saja, karena janji-janji yang disampaikan oleh aktivis organisasi ini masuk kedalam buruh, sehingga mereka memberikan respon.

[197] Wawancara Djanan Taib.

BAB IV
SAWAHLUNTO MASA REVOLUSI SAMPAI ORDE LAMA

A. Sawahlunto Masa Pendudukan Jepang

Setelah menghancurkan pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat, Pearl Harbour pada tanggal 7 Desember 1941, Jepang memenangkan berbagai pertempuran di berbagai tempat di kawasan Asia Tenggara, termasuk di Hindia Belanda. Melalui pertempuran sengit di beberapa wilayah seperti di Tarakan, Menado, Kendari, Banten, Indramayu dan Jakarta, maka secara terpaksa Panglima Pasukan Hindia Belanda, Letnan Jenderal Terpoorten menandatangani penyerahan kekuasan kepada pemerintahan militer Jepang di Kalijati, Bandung. Penandatanganan ini menandai dimulainya kekuasan Jepang di Indonesia. Pendaratan tentara Jepang ke Indonesia tidaklah mengalami kesulitan, bahkan masyarakat menyambutnya dengan gembira. Di rumah-rumah penduduk berkibar Merah Putih didampingi bendera Jepang, Hinomaru.[198]

Sambutan masyarakat yang antusisas itu tentu mempunyai alasan. Jauh sebelum tentara Jepang mendarat di Indonesia, imigrasi Jepang yang ada di kawansan

[198] Marah Joenoes, *Mr. H.ST. Moh. Rasjid Perintis Kemerdekaan, Pejuang Tangguh, Berani dan Jujur* (Penyunting, Soewardi Idris), PT Mutiara Sumber Media, 2003. Hal. 22.

Nusantara, seperti tukang cukur, pegawai perusahaan , pelancong dan lain lain adalah agen-agen rahasia Jepang yang mempropagandakan mengenai kejelekan-kejelekan kolonialis Belanda. Kemudian Jepang juga menyebarkan propaganda bahwa Jepang adalah saudara tua yang akan membebaskan bangsa Asia dari penjajahan kulit putih. Saat Jepang masuk ke Indonesia, pemerintah Jepang sudah menuliskan perundang-perundangan yang poinnya antara lain balatentara Dai Nippon akan memeperjuangkan peningkatan kemakmuran dari seleuruh rakyat Hindia Timur, sebab mereka berasal dari keturunan yang sama. Karena itu pada berbagai tempat di daerah akan ditempatkan pemerintahan militer yang akan menjaga ketertiban umum dan kesenangan bagi penduduk. Slogan kolonial Jepang yang terkenal ketika memasuki Indonesia adalah Gerakan 3A: Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia dan Nippon Pemimpin Asia[199]

Sumatera dan Malaya berada dalam satu komando yaitu Angkatan ke-25 sementara Jawa berada dalam Angkatan ke-16. pemisahan pasukan itu tentu untuk memisahkan kekuatan nasionalis yang ada di Jawa dan Sumatra. Selain itu, hal yang sangat penting, sebagaimana diungkapkan oleh Audrey Kahin, Sumatra dan Malaya sebagai fondasi untuk pertahanan. Wilayah itu di samping

[199] L. D. Jong (terj.), *Pendudukan Jepang di Indonesia*, *Suatu Ungkapan Berdasarkan Dokumentasi Pemerintah Belanda* (Peny.Asriofin Bey). Jakarta: Kesaint Blanc, 1987. hal.6-7. Ahmad Husein dkk, Sejarah Perjuangan Kemerekaan RI di Minangkabau 1945-1950 Jilid I. Jakarta: BPSIM , Cetakan Kedua, 1991. hal 33.35.

strategis juga mempunyai sumber alam yang cukup kaya.[200]

Pada bulan Pebruari 1942 Jepang sudah menurunkan pasukan parasutnya di Palembang untuk mengacaukan instalasi minyak yang dikuasai Belanda di kota tersebut. Jumlah pasukan yang lebih besar mendarat di berbagai tempat di pulau itu. Untuk Sumatra Barat, pasukan Jepang pertama sekali masuk ke kota Padang pada tanggal 17 maret 1942., yang 10 hari kemudian menetapkan Pulau Sumatra di bawah Pasukan ke-25 yang berpusat di Singapura. Pada 1 Mei menetapkan Bukittinggi sebagai Pusat dari pasukan ke-25, yang terpisah dari Malaya.[201]

Masuknya tentara Jepang ke Sawahlunto berjalan tanpa perlawanan yang berarti, sebab masyarakat sudah menganggap bahwa Jepang sebagai saudara kembar dan akan membebaskan mereka dari penjajahan. Sama dengan daerah lain, di Sawahlunto juga dinaikkan bendera merah putih bersama Hinomaru. Kemudian Jepang melarang penaikan bendera merah putih.

Di Sawahlunto, setelah Jepang memasuki kota, tindakan Jepang pertama sekali adalah menguasai kota bersama Perusahaan Negara Tambang Batubara Ombilin. Seterusnya beberapa tempat dikuasai sebagai markas,

---

[200] Audrey Kahin, *Struggle for Independence: West Sumatra in The Indonesian National Revolution 1945-1950*. Thesis for Degere of Doctor of Philosophy , Cornell University, May 1970. p.p45-48.

[201] Audrey Kahin, *Rebellion To Integration.* Amsterdam: Amsterdam University Press, 1999. p.94

seperti gereja, hotel dan beberapa rumah yang ada di sekitar Pasar Oesang. Penguasaan tempat ibadah dan rumah-rumah penduduk itu menimbulkan rasa tidak senang di hati penduduk. Sikap Jepang menimbulkan kesadaran pada penduduk bahwa Jepang bukan sebagai saudara tua yang membebaskan. Karena itu penduduk kota tersebut beberapa kali membuat keonaran dan kemarahan Jepang, seperti memutus air ke markas Jepang, memblokade sayuran dan makanan, dan ada juga penduduk melepaskan lebah ke markas Jepang setelah Jepang menyatakan kalah dari sekutu. [202]

Dalam pemerintahan epang meneruskan model struktur pemerintahan yang sudah ada sebelumnya. Sumatra terdiri dari beberapa residen (*Neishi Kaigun Shu*) dan dikepalai oleh seorang Residen (*Shuchokan*). Setiap *Neishi Kaigun Shu* itu terdiri dari *Bun* (Luhak/Kabupaten) yang dikepalai oleh Bun Cho . Bun terdiri dari beberapa *Gun* (kedemangan), dan berikutnya *desa-ku* (kenegaraian). Sawahlunto dikepalai oleh Bun Cho Sinaga . Beberapa Gun Cho yang pernah menjabat di Sawahlunto Jamalus Yahya, Bagindo A Murad, Maazin St. Syarif dan St. Diateh Dt. Bagindo Radjo. [203]

---

[202] M. Kasim, *wawancara*, Sawahlunto, 6 Mei 2004.

[203] Fatimah Enar, *Sumatra Barat 1945-1949*. Padang: PEMDA Padang, 1978. Hal. 2-3, *Sawahlunto Dalam Angka 1978*, Sawahlunto: Pusat Informasi dan Dokumentasi Perencanaan Kota dan Daerah, 1979. hal. 7

1. Pendidikan

Jepang berniat untuk memajukan pertambangan Sawahlunto dengan mendidik pemuda-pemuda Sawahlunto dalam bidang pertambangan. Karena itu Jepang mendirikan Sekolah *Koo in Ko Senjei* (Sekolah Teknik) [204] Sekolah ini berusaha menyiapkan tenaga-tenaga yang bisa bekerja lebih profesional di pertambangan. Sekolah itu menggunakan bahasa Jepang. Pada sekolah itu para siswa diperkenalkan pada alat-alat teknologi pertambangan yang istilah-istilahnya berbahasa Jepang. Selain itu juga diajarkan pendidikan dasar militer, seperti berbaris, latihan menembak dan lain-lain yang berhubungan dengan kemeliteran.[205]

Jepang menganjurkan keras untuk mengajarkan bahasa dan kebudayaan Jepang dalam pendidikan, dan melarang penggunaan bahasa Inggris maupun Belanda yang sudah biasa dilakukan penduduk. Karena itu sekolah-sekolah Belanda diganti oleh Jepang atau lebih dikenal dengan sekolah Nippon. Pada bulan Oktober 1942 mulai diterapkan bahasa Jepang di setiap sekolah. Tujuan penerapan itu tentu untuk memudahklan memudahkan penyaluran kebudayaan Jepang ke masysrakat serta untuk membantu menyiapkan tenaga administrasi dari penduduk pribumi. Dalam hal itu Jepang merevisi sistem persekolahan Belanda dengan menerapkan Sekolah Nagari dan Sekolah Sambungan. Untuk tingkat dasa dikenal juga

[204] M. Kasim RM, *Wawancara*, Sawahlunto, 6 Mei 2004.

[205] M.Kasim, *Wawancara* . Sawahlunto 6 Mei 2004.

dengan sekolah Nippon Indonesia. Guru-gurunya diambil dari mereka yang sudah mengajar juga di zaman kolonial Belanda. Setiap guru yang mengajar diberi training menulis kataka, sa;lah satu sistem penulisan Jepang. Di samping itu juga diajarkan menyanyi Jepang dan Rajio taiso (latihan fisik mengikuti radio).[206]

Jepang mewajibkan satu jam per minggu untuk kelas 1 di Sekolah Nagari, 2 jam untuk kelas 2, dan/4 jam untuk kelas 3, serta 3 jam untuk sekolah lanjutan. Di samping Jepang mengizinkan penggunaan bahasa Minangkabau dan bahasa Indonesia. Kondisi itu menurut Akira Oki mendorong munculnya nasionalisme di Indoensia.[207]

Pada sekolah-sekolah Jepang , sebagaimana diterapkan di berbagai kegiatan/upacara-upacara resmi, masyarakat disarankan untuk ber-seikerei, membungkukkan badan ke dewa matahari. Masyarakat Islam di Sawahlunto dan ulama Sumatra Barat umunya masa itu menganggap ber seikerei itu sama dengan

---

[206] Akira Oki, "Social Change in The West Sumatran Village 1908-1945". A *Thesis* of Degree of Doctor of Philosophy in Australian National University, Canberra1977 . p. 239

[207] Akira Oki menyatakan bahwa sistem pendidikan jepang agak demokratis dibandingkan sistyem pendidikan Belanda yang sering diskriminatif antara kaum elite dengan rakyat biasa. Akira Oki, *Ibid.* 239-245.

menukar agama orang Minangkabau dengan agama Shinto.[208]

Selain pendidikan Koo in Yoo Seijo yang didirikan oleh Jepang, masyarakat juga mendapatkan pendidikan lain yang dilakukan kadang-kadang dalam lobang. Jepang mendorong kaum perempuan untuk mengikuti sekolah menjahit , gunanya bagi Jepang adalah sebagai tenaga untuk membuat tenda-tenda mobil atau memperbaiki yang pakaian robek, atau menjahit pakaian-pakain mereka.[209]

Ada juga pendidikan yang dikelola organisasi Islam, seperti pendidikan yang dikelola oleh Muhammadyah dan Aisyiah, yang sebenarnya sudah ada sejak masa Belanda. Kaum perempuan juga dididik dalam *hahanokai* dan *seinendan*. *Hahanokai* mendidik kaum perempuan dalam membantu barisan pemuda ke *front* perang atau untuk menyiapkan perbekalan untuk para Gyu Gun. *Seinendan* adalah suatu organisasi sukarela untuk kaum muda yang juga mengembangkan keativitas dan keterampilan perempuan.

2. Sosial-Ekonomi

Zaman Jepang kota terasa serba kekurangan. Bahan-bahan kebutuhan primer, sandang dan pangan susah mendapatkannya. Hasil pertanian dan berbagai kebutuhan pokok umumnya diambil oleh Jepang. Begitu sulitnya barang sehingga penduduk sering mengganti

[208] Lihat tanggapan Hamka, *Kenang-kenangan Hidup III*. Jakarta: Bulan Bintang, Cetakan ke-3 1974. Hal 47-54

[209] M. Kasim, RM, *Wawancara* 6 Mei 2004.

sabun dengan abu, minyak tanah yang biasanya digunakan untuk lampu diganti dengan minyak karet atau kemiri sehingga asapnya hitam. Untuk mendapatkan api sering dengan mengorekkan batu dengan rabuk atau dikenal juga dengan tukik api.[210] Kesulitan itu tentu sejalan dengan kebijakan Jepang yang terlalu keras dan disertai politik bumi hangus, serta susahnya berhubungan dengan daerah luar. Transportasi tidak jalan karena kesulitan bahan bakar. Bensin susah. Jepang sendiri memasak getah karet untuk mendapatkan bensin. Untung saja mobil Jepang agak lebih baik. Mobil-mobil Jepang itu punya kabulator yang baik untuk menyaring minyak kotor. Kesulitan pengangkutan membuat barang-barang tidak lagi lancar, masyarakat tidak bisa berpergian dengan mudah. Di samping itu Jepang juga memperlakukan izin perdagangan antara daerah. Bagi masyarakat Sawahlunto kondisi itu tentu menyulitkan terutama untuk mendapatkan bahan kebutuhan pokok seperti beras. Kereta api, yang sejak zaman Belanda sering dipakai pada zaman Jepang relnya juga banyak yang rusak sehingga juga tidak aman. Menurut Pak M Kasim RM, mantan teknisi dan tentara yang hidup zaman itu, menyatakan, "...masa Jepanglah ndak ada bensin, ...getah bisa dipakai".[211]

Perekonomian penduduk tidak dibangun oleh Jepang. Walaupun masyarakat sudah berusaha mengusahan pertanian dan berbagai usaha secara mandiri, tetapi hasil-hasil ekonomi dan kekayaan penduduk sering

[210] M.Kasim, *wawancara*, 6 Mei 2004. Ahmad Husein, *op.cit*. hal.71

[211] M. Kasim, RM *Wawancara*, 6 Mei 2004.

dirampas oleh Jepang. Kalau mereka butuh air, sayuran dan berbagai kebutuhan lain maka tentara Jepang mencarinya ke masyarakat. Akibat tidak adanya perhatian dan kerakusan Jepang terhadap masalah-masalah ekonomi secara serius, maka masyarakat kota mengalami krisis sosial dan ekonomi. Menurut, M. Kasim RM:

> "pakaian kita di zaman Jepang celana goni, baju tarok, makan ubi busuk, jagung busuk... ..ini *parasaian* (penderitaan—Penulis). Kenapa goni ini dipakai oleh orang Indonesia? Ndak ada lagi kain, ndak, kain ndak ada...Goni itu umpan tumo, ..tumo itu warnanya putih, kayak kutu. Kalau kutu 'kan hitam, kalau tumo tampak saja itu merah perutnya. Tumo itu parasaian rakyat Indonesia.....jadi kalau dipikir sekarang kekejaman Jepang itu benci kita, ndak ingat dia kasihan sedikitpun.
>
> Suatu kali kami dapat barang satu karung goni, saya kira beras, rupanya merica. Saya mengajak orang Koto Anau untuk membukanya, wah rupanya merica. Kita buka goni itu, dan dibuang mericanya. Sebab goni itu berharga, kain ndak ada. Sebenarnya satu goni itu harganya ndak sedikit. Kalau ditukar sama beras banyak itu. Ini merica mahal juga, tapi ndak laku zaman tu"[212]

Selain memakai pakaian goni, sebahagian masyarakat juga memakai baju tarok atau kulit kayu tarok. Kulit kayu ini tebal. Sebelum memakainya harus ditokok-tokok sehingga kulitnya lemas dan dijemur. Kemudian

[212] M. Kasim, *wawancara*, 6 Mei 2004.

baru dijahit hingga berbentuk pakaian. Sebenarnya itu pun sekedar menutupi tubuh agar tidak dingin dan malu. Kesukaran pakaian dan sedikitnya kesempatan untuk mandi mengakibatkan pula perkembangan penyakit kulit seperti kudis, *tukak-pekong* dan gatal-gatal. Penyebaran penyakit itu tidak diimbangi dengan pengadaan obat-obatan.

Makin rumitnya masalah ekonomi disebabkan Jepang tidak memperhatikan elan vital ekonomi. Dengan diperkenalkannya uang Jepang berarti juga menyulitkan alat tukar, sebab uang Jepang itu rendah nilainya dari uang gulden yang berlaku sebelumnya. Uang yen memang banyak beredar tetapi harganya sedikit, jauh lebih murah dibandingkan gulden Belanda. Sawah-sawah yang dulu tergadai pada orang lain dengan 1000 gulden umpamanya, masa Jepang bisa ditebusi dengan 100 yen Jepang. Itu dibolehkan oleh Jepang. Kalau tidak ikut aturan yng dibuat Jepang itu, maka bisa ditembak.

Sumber utama ekonomi kota Sawahlunto memang hanya batubara, tetapi batubara itu sudah dikuasai oleh Jepang. Uangnya tentu tidak mengalir untuk pembangunan kota dan masyarakat. Ekonomi masyarakat hanya bergantung pada tanaman plawija, berupa sayuran-sayuran, tanaman ubi dan jagung. Beras itu amat sulit didapatkan.

Sulitnya ekonomi juga diiringi dengan makin banyaknya masalah sosial, mulai dari pencurian maupun perampasan tanah dan harta benda rumah tangga lainnya. Jepang akan menerapkan hukum mati atau kerja paksa bagi siapa saja yang membangkang. Karena itu bagi orang-

orang hukuman, Jepang melakukan siksaan kepada orang hukuman dengan sangat berat. Penjara yang paling terkenal kekejamannya adalah penjara di Sijunjung Sawahlunto. Kedua penjara itu sejak zaman Belanda dianggap sebagai padang mahsyar bagi tahanan. Imej yang berkembang dalam masyarakat mengenai penjara itu adalah:

> " di sini lebih kejam dari Solok. Di samping itu Sawahlunto juga lebih dekat dengan Sijunjung, dan siapa yang dibawa ke Sijunjung berarti mati. Kalau dibawa ke Padang akan menjadi intenir, kalau di bawa ke Solok berarti masih ada masalah yang harus diselesaikan"[213]

Di penjara juga sering dipelihara selir dan perempuan penghibur. Sebahagian ada yang dipaksa dan sebahagian bekerja sukarela karena memang kesulitan ekonomi. Kehidupan selir tentu menjadi lebih baik dibandingkan dengan wanita penghibur. Seorang selir dibiayai seperti seorang istri dan dihidupi dengan layak. Selain itu, sebagaimana umumnya gejala di berbagai kota, untuk memenuhi nafsu seksualnya orang Jepang mendirikan juga rumah Kuning di Sawahlunto, yaitu tempat prostitusi yang dilakukan secara legal. Penghuni rumah kuning itu tidak hanya warga setempat, akan tetapi juga datang dari berbagai daerah. Perempuan yang terjun dalam prostitusi tentu mempunyai berbagai alasan;

[213] Pengakuan Syamsu Tulus, seorang yang pernah dihukum di penjara Sawahlunto oleh tentara Jepang. Syamsu Tulus, *Wawancara* , Solok 1992.

kesulitan ekonomi dan dipaksa. Selain itu ada juga perempuan yang diperkosa oleh tentara Jepang, [214]

Kurangnya perhatian Jepang terhadap ekonomi penduduk tentu berhubungan dengan besarnya perhatian Jepang pada pembangunan kekuatan perangnya. Hal ini terlihat pada tahun pertama Pemerintahan Militer Jepang di Sumatra terfokus untuk membenahi struktur pemerintahan dengan merekrut orang-orang pribumi yang pintar dan mau bekerjasama dengan Jepang. Perekrutan itu sungguh hati-hati dan ketat.

Pada zaman Jepang Kota Sawahlunto tidak berkembang, bahkan terjadi kemunduran dari segi sosial-ekonomi, masyarakat kota melarat dan penuh dengan penyakit. Produksi Ombilin yang merupakan penopang perekonomian kota, anjlok di atas 50%. Kota begitu kacau dan menakutkan karena Jepang menerapkan sistem jam malam dan bumi hangus.[215] Masyarakat penuh dengan ketakutan dan teror. Jepang menghimbau dan memaksa pemuda-pemuda setiap hari untuk melakukan gotong royong secara bergiliran. Siapa yang tidak mau dipaksa dan disiksa. Sebahagian pemuda dipaksa dan dijebak untuk ikut kerja paksa atau romusha ke loge untuk membangun jalan kereta api Muaro Sijunjung ke Pakan Baru. Kerja paksa itu telah membawa kematian karena

[214] Rumah Kuning/Tempat prostitusi itu juga ada di Sawahlunto. Mereka dilepaskan setelah Jepang kalah tahun 1945.M. Kasim, *wawancara*, 5 Mei 2004. Ruflis, *Wawancara* , Bidar Alam, 1992.

[215] *Sejarah Ringkas…, op.cit*. hal 14. M. Kasim, Wawancara, 6 Mei 2004.

serangan penyakit kelapran dan serangan nyamuk Malaria.[216]

Buruknya pengelolaan kota terlihat dengan bertebarannya sampah di berbagai sisi kota. Tikus-tikus berkeliaran. Nyamuk membiak. Sakit perut juga berkembang di tengah msyarakat lantaran tidak terjaganya higenitas makanan dan gizi masyarakat. Masyarakat memakan makanan apa saja yang bisa menghentikan rasa lapar, bahkan ada yang berebut bangkai ayam yang tergeletak di tengah kota. Kondisi seperti itu memperburuk kondisi kehidupan mereka.

3. Heiho ,Gyu Gun dan Barisan Rakyat Lainnya

Sebagaimana yang sudah diutarakan sebelumnya, kedatangan Jepang ke Indonesia adalah sebagai saudara tua dan pembebas Asia. Karena itu tentara Jepang dan masyarakat Indonesia mesti saling mendukung. Dengan gerakan yang begitu simpati Jepang mendekati para elit-elite lokal, terutama ulama, para petinggi adat dan kaum pergerakan. Di mana-mana mereka memberikan pengertian agar masyarakat menyambut kedatangan Jepang dengan baik. Karena itu, sebelum kedatangan Jepang sudah disarankan agar masyarakat menyambut Jepang dengan yel-yel "*banzai*". Walaupun seruan itu tidak diterima sepenuhnya oleh masyarakat namun kedatangan

[216] Mengenai Romusha secara agak lengkap ditulis oleh Indriani, Romusha Logas: Tenaga Kerja paksa Pemerintahan Jepang Dalam pembangunan Jalan Kereta Api Muaro Sijunjung Pekanbaru 1943-1945. Skripsi Jurusan Sejarah Fakultyas Sastra Unand, 1992.

Jepang ternyata ditunggu secara beramai-ramai. Sebagaimana di daerah lain, di kota Sawahlunto masyarakat tampak menaikkan bendera merah putih dan Hinomaru tanda penyambutan, dan masyarakat tumpah ke jalan-jalan sambil meneriakkan *banzai* setiap bertemu dengan tentara Jepang[217].

Besarnya harapan dengan Jepang tentu berhubungan dengan penderitaan yang berat selama penjajahan Belanda. Namun beberapa hari pendudukan Jepang, di berbagai tempat sikap Jepang sudah mulai terlihat tidak menyenangkan. Barang-barang penduduk seperti sepeda yang lewat dijalan dirampas dan bendera merah putih harus diturunkan. Sikap Jepang itu sebenarnya sudah dibaca oleh sebahagian masyarakat sebelumnya. Jadi, sikap masyarakat lokal di Kota Sawahlunto juga mengikuti alur pemikiran yang berkembang di tingkat Nasional dan Sumatera Barat. Kedatangan Jepang itu ditanggapi oleh masyarakat dengan dua versi. Pertama, masyarakat yang tidak percaya tetapi mereka memanfaatkan kesempatan yang diberikan masyarakat Jepang pada tahap awal untuk membangkitkan nasionalisme dan membangun kekuatan untuk kemerdekaan. Kedua adalah masyarakat yang tidak percaya dan tidak mau bekerjasama karena itu mereka harus melawan dengan berbagai gerakan bawah tanah.

[217] Fatimah Enar, *op.cit*. hal. 3. Fera Sudarma, *Sejarah Perjuangan Rakyat Sawahlunto Perlawanan Terhadap Penjajah dan Menegakkan Revolusi Kemerdekaan 1945-1949*. DHC Angkatan 45 Kotamadya , Nopember 1998. Hal. 19.

Karena itu di tengah masyarakat terjadi tiga kelompok masyarakat, yaitu mereka yang mau berkerjasama tetapi memanfaatkan untuk kepentingan nasionalisme Indonesia, kedua tidak mau bekerjasama dan ketiga tidak mau tahu dengan kemauan Jepang.[218]

Kebijakan Jepang sendiri sejak awal pendudukan tampak sibuk untuk mengobarkan dan mendidik masyarakat untuk perang. Jepang lebih banyak ofensif secara militer. Di awal pemerintahan, Maret sampai dengan Agustus 1942 Jepang berkonsentrasi untuk membenahi administrasi militer, kemudian Agustus 1942 memberikan perhatian pada hal-hal yang sifatnya sejarah dan budaya. Sehingga Jepang mengizinkan pendirian berbagai lembaga yang berhubungan dengan budaya. Setelah itu Jepang memperhatikan masalah aspirasi kaum nasionalis.[219] Untuk menyiapkan Perang Asia Timur Raya Jepang membina para pemuda dalam pendidikan militer atau barisan-barisan yang bisa digunakan untuk perang seperti *Heiho, Gyugun, seinendan, Keibodan, Bagodan (*khusus laki-laki) dan *Hahanokai (*khusus perempuan).

Pada bulan Mei 1943 Pemerintahan Militer Jepang mulai merekrut pemuda-pemuda untuk menjadi Heiho, salah satu barisan bantuan tentara Jepang. Mereka ini dilatih militer secara keras kemudian dikirm ke medan pertempuran untuk memenangkan perang Asia Timur Raya. Mereka ditugaskan bukan saja di Indonesia tetapi juga ke daerah lain di daratan Asia, seperti Marotai,

[218] Fatimah Enar, *Ibid*. Hal. 3-4

[219] Audrey Kahin, *op.cit*. p.65

Burma, Malaya dan Siam[220] Namun tampaknya tidak banyak pemuda yang berminat masuk barisan Heiho. Melihat kecenderungan itu, ada keprihatinan bagi para elite lokal mengenai nasib Heiho. Chatib Soelaiman umpamnya melihat Hei Ho hanya untuk kepentingan Jepang, ia nerpikir bagaimana menggunakan latihan militer itu untuk kepentingan nasionalis. Setelah mendiskusikan masalah itu antara Yano Kenzo, Residen Jepang di Sumatra Barat dan tokoh Sumatra Barat maka disepakatilah untuk membentuk Gyu Gun. Tiga orang tokoh Sumatra Barat dipilih untuk memilih para pemuda yang akan dilatih dalam Gyu Gun itu, yaitu Ahmad Dt Simarajo, Chatib Soelaiman, Haji Mahmud Yunus. Bersama dengan tokoh-tokoh lainnya, seperti Leon Salim, Rasuna Said , Rahmah El Yunusiah, dan lain-lain dipercaya untuk memimpin Gyu Gun Ko En Kai/Gyu Gun Ko En Bu, yaitu lembaga yang bertugas untuk mengorganisasikan calon-calon Gyu Gun. Dalam organisasi itu, Cahtib Soelaiman benar-benar seirus dan mengingnkan bagaimana kader-kader Gyu Gun itu benar menjadi pejuang kemerdekaan nantinya. Maka ia mengumpulkan dan mendiskusikan rencana itu dengan lebih banyak orang yang cukup dikenal dan berpkiran maju mengenai kebangsaan.[221]

---

[220]H.Amura, *Sejarah Revolusi kemerdekaan di Minangkabau*. Jakarta Pustaka Antara, 1979. hal.13. Marah Joenoes, *op.cit*. hal 27. Ahmad Huesin, op.cit. hal. 55-56

[221] Ahmad Husein, Ibid. 57-58. St Moh. Rasjid menyatakan bahwa pembentukan Gyu Gun itu juga didorong oleh ide Gatot Mangkuprdja. Lihat Marah Joenoes, *op.cit*. hal. 28.

Pada bulan oktober 1943 mulailah diadakan penerimaan terhadap para calon Gyu Gun di seluruh Sumatra Barat. Tampaknya Gyu Gun jauh lebih menarik dari pada Heiho, sebab Gyu Gun direncanakan dengan memadukan ide Jepang dan nasionalisme Indonesia, mimpi kemerdekaan dan kebangsaan menambah semangat pemuda untuk latihan. Begitu kuatnya semangat kebangsaan yang dipompakan oleh pendirinya, sehingga tahap pertama para anggota Gyu Gun menolak untuk menerima gaji dari Jepang kecuali sumbangan dari rakyat mereka sendiri. Sebab mereka bersedia memasuki Gyu Gun hanya untuk kepentingan bangsa dan tanah air[222]

Beberapa pemuda Sawahlunto ikut pula dalam Heiho dan Gyu Gun. Sebahagian lagi membentuk barisan-barisan sukarela seperti Seinendan, Hahanokai, Keibodan dan Bagodan. Mereka umumnya berdatangan dari nagari. Mereka yang ikut Gyu Gun adalah orang terpilih, sebab tidak seluruh pemuda yang mendaftar Gyu Gun yang bisa dilatih dan dilantik menjadi Gyu Gun. Mereka yang tidak bisa lagi masuk Gyu Gun itu ikut barisan sukarela yang latihan militernya tidak seberat Gyu Gun. Mereka bersifat barisan pembantu. Di Sawahlunto diperkirakan ada sekitar puluhan orang yang masuk latihan Gyu Gun. Barisan sukarela umumnya ada di tiap-tiap nagari atau sebagai pertahanan nagari. Barisan-barisan sukarela, yang muncul dari bawah kadangkala memang merupakan barisan yang merupakan gerakan partisipatif. Gerakan partisiaptif itu ada juga pada masa revolusi kemerdekaan yang menjadi

[222]Audrey kahin, *op.cit*. Hal.75.Ahmad Husein, *op.cit*. Hal. 63.

tidak terkontrol. Barisan-barisan partisipatif banyak berpengaruh dan mempunyai andil dalam perkembangan sosial politik di dalam kota. Sering juga barisan dan anggota-anggotanya susah untuk diindetifikasi; pada suatu sisi mereka seperti barisan rakyat yang berjuang untuk kemerdekaan tetapi ternyata hanya untuk kepentingan kelompok mereka.

Barisan yang terkenal antara lain, Barisan Muka, BM (Barisan Maut) dan PETA (Pemuda Tambang), nama ini juga terinspirasi dengan Pembela Tanah Air yang ada di Jawa. Antara Barisan Muka dan Barisan Maut seperti sel yang terbelah; Barisan Muka bisa diibaratkan sayap kanannya Republik sedangkan BM sayap kiri. Para anggota barisan muka sering menyatakan bahwa BM itu suka melakukan huru-hara. Barisan Muka dan BM ini di Sawahlunto berada dalam posisi gerakan yang berlawanan. Menurut BM mereka adalah pejuang kemerdekaan, tetapi ternyata beberapa masyarakat yang berjuang dalam kemerdekaan dibunuhnya. BM di Sawahlunto terkenal kejam. Malam hari mereka bergerak, mendatangi rumah-rumah orang kaya, lalu di Sandra. Kekayaannya dirampas. Orang-orang yang ditangkap itu dibawah ke sebuah Jembatan di Ranti, di sana mereka dibunuhi dan dicemplungkan ke sungai.[223]

Saat berkuasanya Jepang, etnis keturunan Tionghoa banyak yang didesak keluar kota. Sebahagian mereka dibunuh oleh tentara Jepang dan kaum republik. Orang-orang Cina disuruh berkumpul, kemudian dibunuhi. Saat

[223] Rahmat, *Wawancara*, Sawahlunto 6 Mei 2004

perang kemerdekaan, orang-orang Indonesia juga banyak memburu Cina, sehingga mereka berlarian ke luar kota Sawahlunto. Trauma itu membuat orang Cina banyak pindah dari Sawahlunto. Pejuang kemerdekaan sering melihat sebahagian keturunan Tionghoa itu berkepala dua, "bersama Belanda Cina itu kebelandaan, bersama orang republik mereka seperti mendukung republik." Tetapi mereka sering membocorkan perjuangan kaum republik. Orang Minang bilang, cina itu "ibarat baling-baling di atas bukit." Artinya mereka akan mendekati arus kekuasaan. Tetapi kenyataannya ini tidak berlaku untuk seluruh keturunan Tionghoa. Bahkan ada keturunan Tionghoa saat revolusi kemerdekaan begitu setia pada perjuangan Republik. Keturunan Tionghoa yang terkenal dan sangat terkesan di hati masyarakat adalah juru rawat Wie Kong Hui. Ia spesial merawat orang luka dan sakit kudisan yang sudah membusuk.[224]

B. Proklamasi dan Mempertahankan Kemerdekaan

1.Siaran Proklamasi

Tanggal 15 Agustus 1945 sudah ada desas desus bahwa Jepang sudah bertekuk lutut atas sekutu. Namun berita itu tidak sampai ke bahagian anggota Gyu Gun yang berkonsesntrasi di markas-markas mereka. Pemimpin teras Sumatra Barat, pada pertengahan Agustus 1945 sudah mulai mengetahui secara tidak langsung. Dalam satu pembicaraan di rumah Wakil Residen Jepang, terungkap

[224] M.Kasim RM, Sejarah Rumah sakit Umum Kota Sawahlunto *(Makalahj)* .(Tidak diterbitkan, 2001)

bahwa Jepang minta berdamai. Sikap Jepang yang melunak seperti itu tentu tidak biasa. [225]

Para pemimpin Indonesia di Jakarta sudah kasak kusuk dan berada dalam pro dan kontra dalam menyambut kekalahan Jepang atas sekutu. Namun atas desakan pemuda, tanggal 17 Agustus 1945 Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia sudah memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Kabar mengenai Proklamasi itu, di Sumatra Barat pertama sekali dapat diterima dari pegawai kantor PTT (Pos Telegraf dan Telepon) di Padang dan Domei Bukittinggi. [226] Radio Berita itu secara hati disiarkan dan diberitahukan ke orang-orang yang mungkin untuk membahasnya. Setelah mencek berita Proklamasi itu, beberapa tokoh pemuda, Jahja Jalil dan kawan berinisiatif mendiskusikan teks itu dengan para pemimpin Sumara Barat seperti Abdullah kamil, St Moh,. Rasjid, dr. Athos Auri. Setelah berdiskusi tanggal 19 Desember di Pasar Gadang. Para pemuda yang dipimpin oleh Asrifin Alip, malam itu juga memasuki Padang Nippo, di sana atas bantuan beberapa karyawannya dicetaklah teks proklamasi tersebut. Proses perbanyakan itu tak terlepas dari jasa murid-murid sekolah Cu-Gakko dan Kogyo-Gakko di Simpang Haru Padang dan percetakan Gazatra di Pasar Batipuh. Ribuan pamlet yang dicetak dan disimpan di

[225] Sikap melunak itu juga dirasakan oleh seorang Letnan II Gyu Gun, A Halim (Aleng) yang diizinkan untuk istirahat dalam waktu lama di kampungnya.

[226] Ahmad Husein, *Ibid*. Hal. 81

rumah dr. Liem Gim Tjiang itulah yang disebarkan ke seluruh daerah dan kota di Sumatra Barat.[227]

Namun Jepang lewat radio Sumatra menyatakan bahwa Jepang masih bertanggungjawab akan keamanan sampai ada penyerahan dengan sekutu. Pemuda Sumatera Barat, seperti Ismail Lengah dan kawan menanggapi, dengan menyatakan bahwa kemerdekaan tanpa merebut pemerintahan dari tangan Jepang tidak ada artinya. Karena itu pemerintahan harus direbut dari tangan Jepang. Rapat itu juga mendesak agar dibuat pernyataan untuk mendesak Jepang mendukung proklamasi Indonesia. Rapat itu menghasilkan Balai Penerangan Pemuda Indonesia (BPPI) dengan ketua Ismail Lengah. BPPI bermarkas di Pasar Gadang. Di sinilah Bendera merah Putih dikibarkan secara resmi.[228]

Pada tanggal 27 Agustus BPPI di Padang kembali mengadakan rapat, yang kemudian menghasilkan penyebaran berita proklamasi secara resmi. Rapat itu juga menyatakan pentingnya segera membenntuk Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID) Sumatra Barat. Untuk menguatkan dukungan rakyat Sumatra barat secara resmi maka disebarkan teks proklamasi itu dengan memberikan tambahan pada awal dan akhir teks itu. Bunyi teks itu:

---

[227] Bagi pemerintahan Jepang Sumatra Barat Proklamasi Indonesia adalah urusan bangsa Indonesia sendiri, bukan urusan bangsa Jepang. Ahamd Husein, *Ibid*. Hal. 82-83. Fatima Enar, *Sumatra Barat 1945-1949*.Pemerintah Daerah Sumatra Barat Padang, 1978. Hal. 19.

[228] Fatimah Enar, Ibid. Hal. 21-23.

"PERMAKLOEMAN
KEMERDEKAAN INDONESIA

Mengikoeti dan mengoeatkan pernjataan kemerdekaan Indonesia oleh Bangsa Indonesia sepert PROKLAMASI pemimpin2 besar kita SOEKARNO – HATTA atas nama Bangsa Indonesia seperti berikoet:

PROKLAMASI

Kami Bangsa Indonesia dengan ini menjatakan
KEMERDEKAAN INDONESESIA
Hal-hal jang mengenai pemindahan kekoeasan dan lain2 diselengarakan dengan tjara saksama dan dalam tempo jang se singkat2nja

Djakarta
Hari 17 boelan 8 tahoen 1945
Atas nama Bangsa Indonesia
Soekarno - Hatta

Maka Kami Bangsa Indonesia di Soematra dengan ini mengakoei Kemerdekaan Indonesia seperti dimaksoed dalam Proklamasi di atas dan mendjoenjoeng keagoengan kedoea pemimpin Indonesia itu.

Boekittinggi hari 29 bl 8 th 1945
Atas nama Bangsa Indonesia
Di Soematra
Mohammad Sjafei"[229]

[229] Fatimah Enar, Ibid. hal. 27

Setelah dibentuk KNID (Komite Nasional Indonesia Daerah) tanggal 31 Agustus yang diketuai oleh Muhammad Syafei (bekas Ketua Seikai Ganshu Hokokai), maka penyebaran berita proklamasi dan semangat kemerdekan ke pelosok-peklosok daerah makin lancar. Di Sawahlunto susunan KNID adalah Darwin (Ketua), Saudin Dt Kabut (Wakil ketua), dan Karim Musa (Bendaharawan). Dengan disebarkan berita proklamsi itu maka rakyat makin tidak ragu-ragu lagi untuk meneruskan semangat kemerdekaan[230].

2. Revolusi, Rumah Sakit dan Pabrik Senjata

Revolusi berjalan cepat dan tak terduga, serta menungganglanggangkan realitas sosial kebangsaan. Walaupun proklamasi sudah diucapkan dan disambut dengan antusias di seluruh daerah namun tugas berat serta berbagai masalah masih membentang luas. Setelah proklamasi kemerdekaan diumumkan bangsa Indonesia dihadapkan pada berbagai masalah yang berakar pada masa sebelumnya; kemiskinan, kekacauan sosial, serta kurangnya sarana-sarana untuk mengisi kemerdekaan. Sejak Jepang kalah dan meninggalkan seluruh Tanah Air, seluruh komponen bangsa sedang berusaha untuk membenahi bekas-bekas perang dan mengisi kefakuman. Suara proklamasi yang digemakan Soekarno-Hatta lebih merupaklan percikan api di tengah kegelapan jalan. Berbagai masalah sosial, ekonomi, sistem kepemimpinan negara dan masalah administrasi pemerintahan menjadi

[230] Ibid. Hal 29-31.

tugas yang harus diselesaikan. Namun saat bangsa Indonesia sedang mengambil nafas demi membangun bangsanya, secara tiba-tiba agresi Belanda secara beruntun pun terjadi.

Pada sisi lain, masalah sosial ekonomi masyarakat juga sedang berat. Penyakit mewabah di tengah masyarakat karena memang kekurangan gizi dan pangan. Kepergian Jepang diisi dengan kontrol sekutu yang di dalamnya ada NICA. Artinya Proklamasi kemerdekaan baru sekedar kunci pembuka dari pembebasan Indonesia. Kenyataannya kondisi bangsa makin pahit dan penuh tantangan, Belanda kembali ingin menjajah Indonesia dengan ditandai oleh Agresi Belanda pertama 1947. Dalam kondisi sulit itu, beberapa orang yang sudah berpengalaman dan berpendidikan di zaman Jepang berinisiatif untuk membantu bangsa yang sedang terpuruk itu.

Peran Rrumah Sakit Sawahluntop itu sangat besar di masa Revolusi kemerdekaan. Mulanmya Rumah Sakit Sawahlunto dibangun oleh Perusahaan Tambang Batubara Ombilin pada tahun 1894. Institusi kesehatan itu mewarisi alat-alat yang moderen pada masaya. Keterkenalan rumah sakit itu tentu tidak terlepas dari kelengkapan alat-alat dan menajemennya. Selain itu, di sana juga bekerja dokter-dokter spesialis yang berpengalaman dari bangsa asing maupun dari bangsa Indonesia. Untuk para dokter dan perawat Rumah Sakit Sawahlunto disediakan rumah khusus yang berlokasi di Gang I Tanah Lapang untuk para

dokter dan Gang III untuk para perawat.[36] Kepintaran dokter-dokter dan juru rawat Rumah Sakit Sawahlunto berkesan di dalam masyarakatnya, sehingga sampai beberapa puluh tahun berikutnya, orang sezamannya selalu mengingat dan menceritakan kesan-kesan mereka dalam berobat ke sana dan terhadap keprofesionalan para dokter dan juru rawatynya. Beberapa dokter yang pernah bekerja di Rumah Sakit Sawahlunto saat awalnya adalah dr. Iskandar Yoesoef[37], dr. Darwis[38], dr. Zen[39], dr. Roesdi Adam[40], dr. Soedirman Msc[41], dr. Viessyn[42], dr. Gyissyn[43], dr. Warner Tobing[44], dr. Reksodiwiryo[45], dr. Syamsoe Anwar[46] dan lain-lain.

---

[36] "Sejarah Rumah Sakit Kota Sawahlunto Dari Tahun 1894 Sampai Pada Tahun 2001". *Makalah*, M Kasim Rm (Tidak Diterbitkan, 2001)

[37] Putra Asli Sawahlunto, Pernah Tinggal Di Gang I Tanah Lapang

[38] Selain Sebagai Dr. Juga Dikenal Seagai Politikus Dalam Perang Kemerdekaan Indonesia.

[39] Dr. Zen Mendapat Tragedi Kecelakaan Di Persimpangan Jalan Kereta Api Di Muaro Sijunjung Dan Meninggal Dan Anaknya Zaini Zen Pernah Menjadi Bupati Di Pesisir Selatan

[40] Asli Bukittinggi

[41] Negeri Asalnya Solok

[42] Ia Adalah Orang Belanda, Bertugas Di Sawahlunto Tahun 1932-Sampai Sebelum Kemerdekaan. Ia Adalah Seorang Alhi Bedah Yang Sangat Ramah.

[43] Seorang Bangsa Belanda, Ia Sementara Saat Dr. Vissyn Pendidikan Dinas Di Belanda Tahun 1938.

[44] Asli Batak, Bapaknya Adalah Seorang Perawat Di Rumah Sakit Sawahlunto

Selain dokter yang ahli dan profesional, Rumah Sakit Sawahlunto juga mempunyai perawat-perawat dan pegawai yang setia. Mereka itu menjadi ingatan bagi masyarakat yang pernah berobat di sana. Perawat-perawatnya bukan saja dari masyarakat Sawahlunto tetapi juga dari berbagai daerah atau suku bangsa di Indonesia, seperti Batak, Jawa dan Kalimantan. Mereka antara lain adalah, Osmar perawat), Abut (apoteker) Syaifuddin (Asisten ronsesn), dan Philips (ahli Ronsen).[47]

Rumah sakit Sawahlunto juga terasa mandiri dan mengusahakan agar melayani pasiennya seprofesional mungkin. Untuk peralatan rumah sakit klas *zaal*, apapun yang dibutuhkan rumah sakit itu, dikerjakan oleh murid-murid keperawatan ditambah dengan pegawainya. Anak-anak Normaal School mambantu mencuci sprai. Selimut, baja, dan berbagai alat lainnya yang dibutuhkan. Mencuci pakaian sudah tidak lagi manual, tetapi dengan menggunakan mesin cuci atau masa itu dikenal dengan

---

[45] Lahir Tanggal 1 Juni 1910. Ia Pernah Menjadi Dokter Di Rumah Sakit Gereformeerde Zending, Magelang Tahun 1939-1942, Kepala Kesehatan Onder Adeling Karimun Tanjung Balai Karimun 1939-1942, Kepala Ksehatan Resimen Iii Divisi Iii Sawahlunto 1046-1950. Ia Seorang Ahli Bedah Yang Terkenal.

[46] Ia Seorang Dokter Yag Berpengetahuan Luas Dan Ahli Kimia. Pada Zaman Perang Kemerdekaan Tahun 1946 Beliau Meninggal Karena Ledakan Zat Kimia Untuk Bom Yang Dipersiapkan Bengkel Senjata Sawahlunto.

[47] M. Kasim Rm, "*Sejarah….*" *Op*. Cit Hal. 6-8.

stoom cleaner (uap pembersih) yang dibawa dari rumah ransum.[48]

Pada perang kemerdekaan Rumah Sakit Sawahlunto berfungsi juga menampung orang-orang sakit yang terkena korban perang. Kemudian atas inisiatif dr. Rekso Diwiryo Wityotoarjo didirikan pula sekolah pendidikan perawat untuk militer di sana. Pertama diterima 25 calon perawat, kemudian ditambah pertolongan pertama korban perang. Selain belajar dengan praktek langsung juga dipelajari beberapa teori keperawatan.[49]

Sawahlunto juga terkenal dengan pabrik senjata, yang pada masa Agresi Belanda pertama menghasilkan senjata-senjata sederhana dan tempat memperbaiki senjata rusak hasil rampasan, kemudian dipergunakan untuk perjuangan bagi daerah sekitarnya. Di Sawahlunto perakitan senjata itu berada pada dua tempat, pertama di pabrik Tambang Batubara Ombilin, yang berfungsi khusus memperbaiki senjata yang rusak. Sedangkan tempat kedua di Central Electrich. Untuk memenuhi kekurangan senjata Divisi IX Banteng, lewat wewenang Letkol Dahlan Djambek, tiga orang teknisi diperintahkan untuk membantu pabrik senjata tersebut. Ketiga mereka yang ditugaskan itu adalah Mohammad Kasim RM, Amir dan Musa. Kemudian Mayor Yasin selaku Komandan Zeni Divisi IX Banteng juga menyumbangkan tenaga ahli granat tangan, yaitu Anwar. Setelah agresi Belanda kedua pabrik

[48] Ibid. 8-9.

[49] Ibid. Hal, 16.

ini dipindahkan ke nagari Kubang. Di samping masih berfungsi sebagai tempat memperbaiki senjata, di sana juga diproduksi beberapa bentuk senjata lainnya seperti stegun, granat tangan, mortir (tomong) dan bermacam peluru.[50]

Saat pertukaran kekuasaan antara sekutu dan Jepang, semua senjata seperti cis, dan detonator dibuang. Menurut keterangan M Kasim RM[51], seorang mantan teknisi dan anggota Gyu Gun, untuk menyiasati itu diadakanlah rapat dengan para pejuang dan Kepala TBO. Rapat itu dihadiri juga oleh Kepala Tentara Keamanan Rakyat, Bachtiar dan Kapten Abdul Jamin. Dalam rapat itu dipikirkan bagaimana mendirikan pabrik senjata. Abdul Jamin menginformasikan bahwa ada sebuah lobang besar tempat penyimpanan bom-bom yang dibawa dari Padang. Di sana disimpan berbagai jenis bom; ada buatan Inggris, Jerman, Amerika dan Jepang sendiri. Panjang bom itu ada yang 4 meter.

Pemuda-pemuda pejuang menginginkan mensiu yang ada pada bom tersebut. Bom-bom tersebut diperkirakan mengandung banyak mensiu, mencukupi untuk membuat pabrik senjata. Sejumlah anggota pemuda mengadakan rapat untuk menyepakati untuk memanfaatkan bahan-bahan bom itu, dan para pemuda

[50] Fera Sudarma & Nopriyasman, *Op. Cit* Hal. 46-48

[51] Lahir Dikubang, Sawahlunto Tanggal 25 Desember 1912. Pendidiknnya Philips Febricate H.K. Handles Mascappy Tecnic Dientt Jakarta. Pernah Pula Bekerja Di Yongs Service Technical Dari Tanggal 1 Pembruari 1936 Sampai Tanggal 15 Desember 1937. Dan Pernah Pula Di Kelesi Meesings Shiep Di Berbagai Pulau Di Hindia Belanda.

akan bekerjasama dengan tentara dan pegawai-pegawai TBO. Kemudian bom-bom itu dijinakkan. Beberapa orang tenaga yang menjinakkan bom itu antara lain Marimin, Yasin Marahudin, M Jasin dan Jamin.[52]

Proses pengambilan mensiu dan pemotongan bom diungkapkan :

> "…dan yang memotong bom itu adalah seorang perwira, amin rajo dan sati, orang surungan Padang Panjang, umurnya sudah agak lanjut juga, tapi jiwanya paling berani, jadi kalau bom yang dipotong ini dia memberi tanda bahwa sudah hampir putus. Tukangnya berteriak dengan keras awas…..lari……., lari semua! Kemana kami lari? Sampai kegudang kantor yang tukang potong bom itu meledak, sejauh itu kami lalri, dapat juga…jadi bubutan yang mati, disebelah bubutan itu dia, nampak sama Pak Anwar. Sudah ada, sudah ada tapi kawan yang tidak mengerti soal mensiu ini, diambil dengan tangan, ndak pakai sendok, kiranya y membuang mensiu di tangan ini payah. Saya bilang sama Pak Anwar, nanti kamu ditangkap sama Belanda, tangan kamu bau mensiu kamu ditembak ini. Dicuci ndak, dibeli sabun cap tangan, tu sama pasir kuning, jahatbom mesiu ini. Itulah caranya kita mempergunakan pabrik senjata di belakang mesjid Sawahlunto ini."[53]

[52] M. Kasim, *Wawancara*, Sawahlunto 5 Mei 2004

[53] M. Kasim Rm, *Wawancara*, Sawahlunto 5 Mei 2004

Pada pertengahan tahun 1940-an ada kerjasama antara Rumah Sakit Sawahlunto dan Bengkel Senjata. Rumah Sakit Sawahlunto saat itu mempunyai seorang ahli kimia yang luas pengetahuannya, namanya dr. Syamsoe Anwar. Ibunya seorang guru Sekolah Dasar di Kebun Jati. Bengkel Senjata bekerjasama dengan dr. Syamsoe dalam pembuatan *cnalquit slag ucis*, sebuah bahan bom. Pada suatu kali terjadi kecelakaan, pada tanggal 9 Juni 1946 jam 10.07 *cnalquit* yang sedang diaduknya meledak degan dahsyat. Ledakan itu selain merubuhkan kaca-kaca dan sebahagian ruangan Rumah Sakit Sawahlunto, peristiwa itu juga membunuh dr. Syamsoe Anwar. Kaca-kaca pecah menancap ditubuhnya.[54]

C. Sawahlunto Pasca PRRI

Setelah pemilu 1955 kondisi perpolitikan di Sumatra Barat ikut memanas, persaingan antar partai politik makin kuat. Soekarno dan Hatta selaku dwi tunggal juga mengalami keretakan, keretakan itu diiringin juga dengan pro dan kontra dalam masyareakat. Keretakan itu berujung dengan mengundurkan dirinya Mohammad Hatta dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Pada tanggal 21 Desember 1956 bahkan terjadi akrobat politik yang sangat mengejutkan banyak orang. Ketua Dewan Banteng Sumara Tengah mengambil alih kekuasaan dari tangan Gubernur Sumatra Barat Roeslan Muljohardjo. Ketegangan politik itu memuncak setelah adanya Reuni Dewan Banteng di Sungai Dareh tanggal 13 Januari 1958. Reuni itu

[54] M. Kasim, *Sejarah……Op.Cit*. Hal.12,

kemudian menggelinding menjadi perlawanan politik terhadap Pemerintahan Pusat, atau mendirikan pemerintahan tandingan. Dalam versi Dewan Banteng tindakan mereka itu dinyatakan sebagai suatu koreksi atas ketidakbenaran pemerintah Pusat. Seterusnya pada tanggal 10 Pebruari 1958, Ahmad Husein selaku Ketua PRRI menyiarkan poin-poin ultimatum terhadap pemerintah Pusat. Salah satu isinya yang sangat penting adalah memberi waktu 24 jam kepada Kabinet Djuanda untuk membubarkan diri dan kemudian membentuk pemerintahan baru di bawah Hatta-Sri Sultan Hamengkubuwono IX[231].

Peristiwa PRRI itu sudah mengakibatkn banyak korban terhadap masyarakat dan Pemerintah Ribuan orang ikut terbantai dalam peristiwa ini. Di semua daerah masyarakat terbagi dalam dua kubu yang berseberangan, orang dalam (pendukung pemerintah pusat) dan orang luar (pendukung PRRI). Akibat dari itu antar dua masyarakat ini saling curiga, menyakiti serta membunuh. Harta-harta mereka banyak yang dicuri. Hal yang sangat penting dalam konteks itu adalah terbukanya kesempatan bermain politik bagi kaum komunis. Pada maa berikutnya terlihat tumbuh dan berkembang.

Menurut Harun Zain, PRRI sudah mengkaibatkan trauma pada masyarakat, terutama Minangkabau. Banyak orang Minangkabau berganti nama setelah PRRI. Kondisi traumatik itu dimanfaatkan oleh Partai Komunis Indonesia

[231] Hasri Chaniago & Chairul Jasmi, *Kaharoedin Dt Rangkayo Basa Gubnernur di Tengah Pergolakan*, Jakarta:SH, 1998. Hal. 237-238.

untuk mengembangkan sayapnya di seluruh daerah Sumatra Barat. Memasuki tahun 1960-an pertentangan antara komunis dan non-komunis menjadi kian terlihat di permukaan. Sumatra Barat menjadi bahagian penting dari strategi Biro khusus PKI. Beberapa petinggi daerah di Kodam 17 Agustus adalah pro komunis. Bahkan Letnan I Untung (kemudina Kolonel), Komandan Pasukan G 30 S PKI, pasca PRRI bertugas di Sumatera Barat.

Pasca PRRI wali nagari-wali nagari dan pegawai penting di pemerintahan banyak yang diganti dengan komunis, sehingga gerakan komunis di Sumatera Barat menjadi lebih lempang.

Kekuatan Komunis di Sumatra Barat cukup signifikan, partai itu lebih dekat dengan PNI, karena sama-sama mendukung ide-ide Soekarno. Pada Pemilu 1955 PKI di Sumatra Barat berada dalam urutan ke-3, yaitu 7 % suara. Atau sebanyak 61.591 dari 1.624.316. suara. Ia berada di bawah Masyumi (49%) sebagai urutan pertama dan Perti (28%) sebagai urutan ke-2. PKI berhasil menempatkan satu kadernya di DPRD dan dua di konstituante. [232]

Pada Pemilu 1955, di Kota Sawahlunto tiga kursi di DPRD-GR diraih oleh Partai Komunis Indonesia, salah seorang di antara mereka duduk sebagai wakil Ketua. Satu orang PKI berhasil pula duduk di Dewan Pemerintahan Daerah (DPD). Pendukung PKI itu muncul dari buruh-buruh tambang TBO. Oraganisasi buruh di sana ada dua. Pertama adalah SOBSI (Serikat Organisasi Buruh

[232] *Ibid*

Indonesia) yang pro PKI dan SOKSI (Serikat Organisasi Karyawan Seluruh Indonesia). Kedua organisasi ini berlawanan secara politik. SOBSI adalah organisasi yang ekslusif untuk kelompoknya, dan menutup diri untuk kelompok-kelompok yang di luar kebijakan politiknya. Bagi SOBSI yang diperjuangkan adalah kelas pekerja, yaitu yang bergabung dalam organsisasi mereka. Sebelum meletusnya G 30 S, SOBSI beberapa kali melakukan gerakan massa dan mogok kerja di Sawahlunto [233].

Tabel 15
Nama-nama dan Komposisi DPRD Sawahlunto
Pemilu 1955

No	Nama	Partai	Jabatan
1.	Maridin	Masyumi	Ketua
2.	Ronoyudo	PKI	Wk.Ketua
3.	Sutan Abdullah	Masyumi	Anggota
4.	Kamisan P.S	Masyumi	Sda
5.	Sutan Harun Abdullah	Masyumi	Sda
6.	Soedono M.W	P.S.I	Sda
7.	Dt. Simarajo	PERTI	Sda
8.	M.Yunus	IPKI	Sda
9.	Sjarifuddin	PKI	Sda
10.	A.Ramli	PKI	Sda

Sumber: *Sejarah Ringkas Pertumbuhan Kotamadya Sawahlunto Sumatra Barat* (1972).

Di luar SOBSI, PKI juga mendirikan Gerwani (Gerakan wanita Indonesia), sebuah organisasi wanita komunis. Organisasi ini membina kader-kader khusus kaum perempuan dan mengadakan propaganda dalam

[233] Rahmat, *wawancara*, Sawahlunto 6 Mei 2004.

bidang politik. Gerwani sebelum tahun 1965 juga sudah mendirikan berbagai sekolah Taman Kanak-kanak, mengadakan kursus-kursus kerajinan dan politik. [234]

Malam saat terjadi G 30 S, kota Sawahlunto juga dirundung ketakutan. Patroli-patroli tentara berkeliaran (jaga malam). Perusahaan masih tetap jalan, tetapi beberapa polisi dan tentara memeriksa setiap karyawan yang pulang kerja. Polisi dan tentara itu bertanya, "apakah yang sudah terjadi di Jakarta? Besoknya beberapa karyawan yang memang aktivis PKI ditangkapi dan kemudian dipenjarakan.

Hari-hari sebelum terjadi G 30 S, masyarakat menyaksikan ada perintah menggali lobang di dekat rumah masing-masing. Satu lobang yang besar ada di depan Rumah Sakit Umum. Menurut keterangan, lobang-lobang itu adalah untuk penguburan masal[235].

Pasca G 30 S pemerintah melarang semua kegiatan yang dulu sering dilakukan oleh kaum komunis, termasuk kegiatan kebudayaan dan kesenian, seperti Barongsai. Juga berbagai kesenian yang dikembangkan oleh etnis Jawa di Sawahlunto seperti Ronggeng dan Ketoprak tidak berkembang setrelah tahun 1965. Bahkan sejak itu kesenian rakyat yang sudah mengakar di masyarakat tidak ditampilkan karena ada rasa ketakutan untuk menampilkannya. Sebab bagi kaum komunis kesenian rakyat menjadi medium yang sangat penting untuk mengumpulkan massa kadernya.

---

[234] Roslaeni Yasir, *Wawancara*. Sawahlunto 6 Mei 2004

[235] Roslaini Yasir, *Wawancara* Sawahlunto, 7 Mei 2004

BAB V
SAWAHLUNTO 1965-1998: MEMBANGUN POLITIK MEMBANGUN WILAYAH

A. Transisi Politik dan Perkembangan Pemerintahan

Sebagaimana perkembangan sosial politik nasional Indonesia, Kota Sawahlunto masa awal Orde Baru, terutama pertengahan tahun 1960-an masih megalami kesulitan dari sisi politik, sosial dan ekonomi. Masyarakat kota masih merasakan rentetan konflik dan kekerasan yang tumbuh sejak pasca proklamasi. Dua peristiwa penting yang berpengaruh adalah meletusnya peristiwa Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) tahun 1958 dan terjadinya peristiwa G 30 S tahun 1965 yang kegalauannya dirasakan juga oleh masyarakat Kota Sawahlunto. Dalam rentang tahun 1950-1960-an energi masyarakat ikut terserap oleh pertentangan dan persaingan sosial-politik, hal itu melibatkan pula masyarakat kota. Situasi mulai mereda baru terasa setelah tahun 1966, di bawah Walikota Ahmad Nurdin SH, ia memulai pembangunan kota sejalan dengan program Repelita I tahun 1969. Kebijakan pembangunan penting yang diambil oleh Ahmad Nurdin adalah pemulihan kondisi sosial politik masyarakat. Perhatian pemerintah dan masyarakat kota pada tahap awal banyak tercurah pada pembersihan terhadap masyarakat yang dianggap telibat dalam

Gerakan 30 September dan pendukungnya. Kelompok politik yang banyak ditangkapi adalah anggota dan pendukung Partai Komunis Indonesia, seperti mereka yang tergabung dalam Barisan Tani Indonesia (BTI), Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani) dan sebahagian buruh tambang yang kegiatannya pada sebelum tahun 1965 terasa agresif. Maka kebijakan yang urgan dalam perubahan politik pada tahun 1960-an adalah digantinya wakil dari Partai Komunis Indonesia (PKI) yang duduk sebagai anggota DPRD-GR Sawahlunto. Kebijakan itu diiringi dengan berbagai pembersihan diberbagai instansi dan organisasi resmi.

Pemerintahan kota sebelum terjadi G 30 S sudah mencoba juga mengadakan reorganisasi pemerintahan untuk memacu pembangunan. Antara tahun 1960-1965, Kepala Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung dan Kotamadya Sawahlunto dijabat oleh satu pimpinan yang pada waktu itu dijabat oleh Soedarsin. Pada bulan Juni 1965 Kotamadya Sawahlunto dipimpin oleh Walikota Ahmad Nurdin, SH. Pergantian ini tentu berhubungan dengan makin meningkatnya konflik dan agitasi dari PKI. Tampaknya ada pemikiran bahwa Sawahlunto dengan masyarakatnya yang multi etnis mesti berada dalam satu konsentrasi pemerintahan.

Setelah tahun 1965, sayap militer, birokrasi dan masyarakat anti-komunis membersihkan berbagai sektor yang dirasakan disusupi oleh komunisme. Tokoh-tokoh politik dan pegawai-pegawai diganti dan sebahagian diberhentikan. Penangkapan terhadap anggota PKI dilakukan di mana-mana. Pada beberapa tempat terjadi

juga bentrok fisik antara mereka yang mendukung komunis-Soekarno dan yang anti-komunis. Khusus di bidang politik pemerintahan membersihkn DPRD-GR dari anggota PKI, termasuk mengganti dan menahan seorang Wakil Ketua DPRD-GR, Ronoyudo. Ia merupakan tokoh politik penting di tubuh PKI dan seorang tokoh keturunan Jawa berpengaruh di Sawahlunto.[236]

Setelah mengadakan reorganisasi politik, terutama di tubuh DPRD-GR tahun 1967, maka mulai muncul tatanan baru politik yang dilindungi oleh militer. Pada tatanan baru itu, sebagaimana terjadi di berbagai tempat di seluruh pemerintahan di Indonesia, secara seragam, Kota Sawahlunto diwakili oleh berbagai wakil dari Organisasi Massa (Ormas). Sebanyak 17 (tujuh belas orang) di antaranya, dari 22 anggota, merupakan elit organisasi kota tersebut. Anggota perwakilan baru itu tentu dipilih tanpa pemilihan yang representatif. Mungkin penunjukan orang-orang itu adalah terkait dengan kedekatannya dengan birokrasi pemerintah yang anti komunis, seterusnya elit-elit politik itu akan menjadi dekat dengan ABRI dan Golongan Karya. Lembaga yang hadir dengan kekuatan politik baru tersebut pada tahun 1968 sudah mengangkat kembali Ahmad Nurdin, SH sebagai Pejabat Walikota Sawahlunto untuk periode berikutnya. Namun, karena reorganisasi politik terus berlangsung, isu-isu komunisme masih menjalar, maka pada tahun 1969 lembaga legislatif Sawahlunto kembali dirombak, anggotanya ditambah

[236] *Sejarah Ringkas pertumbuhan Kota Sawahlunto PEMDA Sawahlunto*, 1972. hal. 17

hingga menjadi 25 orang. Dari jumlah itu lebih separoh diantaranya dihuni oleh tokoh-tokoh Golkar dan ABRI.[237] Anggota lembaga legislatif yang baru ini memilih dan menetapkan Drs. Shaimoery WS, sebagai Walikota Sawahlutno periode tahun 1970-1975. Pengangkatan ini sangat penting, sebab ini merupakan masa berjalan dari Repelita I, yang mulai pada tahun 1969. Posisi Shaimoery akan sangat penting untuk meberikan landasan menuju masa-masa penting dalam periode politik dan pembangunan sosial ekonomi di Kota Sawahlunto.

Untuk menjalankan roda pemerintahan kota, Shaimoery mengaktifkan dinas-dinas/jawatan sebagai pelaksana langsung program-program pemerintah, seperti Dinas Perindustrian, Dinas Perikanan Darat, Direktorat Agraria, Direktorat Koperasi, Kabin Kebudayaan dan lain-lain. Ada sebanyak 32 lembaga penting di tingkat kota sebagaimana yang sudah dimulai oleh Ahmad Noerdin pada masa sebelumnya.[238]

Pada masa awal tahun 1970-an, Walikota Shaimoery WS sungguh sudah memahami ketergantungan Sawahlunto akan pertambangan dan merasakan kemungkinan-kemungkinan perkembangan kota itu ke depan. Shaimoery menyadari bahwa kota kecil yang didirikan kolonial Belanda itu tidak mungkin mengharapkan perkembangannya pada perkebunan, pertanian maupun perdagangan, sebab topografi tanahnya

[237] *Ibid*. hal. 22

[238] *Sejarah Ringkas Pertumbuhan Kota Sawahlunto Sumatra Barat (Kenang-kenangan HUT ke-54 Kotamadya Sawahlunto)*, 1972.

dan geografisnya tidak menguntungkan. Kota itu mungkin bisa dikembangkan dalam bidang pendidikan dan Pariwisata. Fasilitas dan geografis kota Sawahlunto menurut Shamoery tersedia untuk itu. Tentu itu dilihat dari sisi historis dan struktur sosial budaya, serta keindahan alamnya. Untuk mewujudkan cita-cita itu Shaimoery pada masa pemerintahannya sudah meningkatkan pertumbuhan lembaga pendidikan, walaupun secara kwantitatif terlihat lambat dan maju mundur.

Perkembangan kondisi pendidikan sejak tahun 1969 bisa dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 16
PERKEMBANGAN KONDISI PENDIDIKAN SEJAK TAHUN 1969

Tahun	Sekolah					
	STK	SD	SMP	SMA	PT	Jumlah
1969	7	14	5	1	-	27
1970	6	12	4	1	-	23
1971	5	12	5	1	-	23
1972	9	14	5	1	1	33
1973	9	13	6	4	1	33
1974	6	14	6	5	1	32

Pada data tampak adanya perkembangan yang turun naik, artinya adanya kesulitan untuk menjaga kelangsungan sebuah sekolah. Namun secara keseluruhan pada tahun-tahun berikutnya selama Orde Baru pertumbuhan pendidikan terus membaik. Pada tahun 1982

umpamanya sudah ada sebanyak 7 SMA dan tahun 1998 bertambah satu sehingga menjadi sebanyak 8 SMA/U. Perkembangan itu tentu didahului oleh perkembangan STK, SD dan SLTP.

Tabel 17
WALIKOTA SAWAHLUNTO DARI
TAHUN 1965-2004

No	Nama Walikota	Periode
1.	Ahmad Noerdin, SH	1965-1971
2.	Drs. Shaimoery WS	1971-1983
3.	Drs. Nuraflis Salam	1983-1988
4.	Drs. Rahmatsyah	1988-1993
5.	Drs. Subari Sukardi	1993-2003
6.	Ir. H. Amran Nur	2003- 2013
7.	Ali Yusuf, S. Pt	2013-2018

Dengan gayanya sendiri-sendiri, setiap walikota mendapat tanggapan dari masyarakat terhadap masing-masing kebijakannya untuk memajukan kota. Shaimoery WS dianggap oleh sebahagian masyarakat menjabat saat yang tepat, ketika pembangunan mulai begerak naik. Jalan, jembatan sekolah dan berbagai bangunan lainnya diadakan. Kota dibangun dari berbagai sisi. Perubahan yang drastis dari tahun-tahun sebelumnya itu membuat Shaimoery disenangi masyarakat. Sementara Nuraflis Salam diangap masyarakat menjadi pelanjut kebijakan-kebijakan awal Orde Baru. Ia menjabat saat Orde Baru mulai melakukan pembangunan besar-besaran, tetapi

Kotra Sawahlunto tidak mengalami perubahan besar saat ia memimpin. Ia memimpin saat hilangnya kreativitas pemimpin lokal.

Rahmatsyah bagi masyarakat Sawahlunto dianggap sebagai pejuang yang gigih dan merakyat. Rahmatsyah sangat dekat dengan masyarakat, bahkan ia mau turun ke sawah masyarakat untuk memanen padi bersama anggota Dewan perwakilan rakyat dan petani. Rahmatsyah mengusahakan membangunan sarana-sarana yang dianggap penting dan mempunyai prospek yang panjang. Masa kepemimpinannya telah berhasil diaspal jalan dari Muaro Kalaban sampai ke Guguk Cino. Pengerjaan jalan itu dimaksudkannya adalah untuk membuka hubungan Sawahlunto dengan daerah lain seperti Tanah datar. Sayang sekali apa yanmg dirintis oleh Rahmatsyah tidak dilanjutkan oleh pemerintahan berikutnya, yang dipimpin oleh Subari Sukardi.[239]

Prestasi Rahmatsyah yang begitu penting bagi pengembangan Sawahlunto adalah dikembangkannya wilayah kota tahun 1990 (PP no. 44 tahun 1990/ tertuang dalam lembaran negara no. 99 tahun 1990 dan tambahan no.3423). Setelah perluasan itu administrasi kota Sawahlunto menjadi 4 kecamatan sementara sebelumnya adalah dua kecamatan.

Perluasan kota ini tidak terlepas dari kerja Walikota, DPRD dan masyarakat sekitarnya. Secara struktural, walikota berperan besar dalam mewujudkan perluasan kota Sawahlunto ini.

[239] Saarani, *wawancara*. Sawahlunto 6 Mei 2004

Nama Kecamatan, Nagari dan Kelurahan di Kotamadya Sawahlunto sebelum pemekaran sebagai berikut:

Tabel 18
Kecamatan, Nagari dan Kelurahan Sebelum Pemekaran
Tahun 1990

No	Kecamatan	Nama Nagari	Nama Kelurahan
1	Sawahlunto Utara	1. Saringan 2. Durian	1.Kebun Jati 2.LubangTembok 3.Gunung Timbago 4. Lubang Panjang 5.Pasar Baru Durian 6.Kampung Surian 7.Sapan 8.Sungai Durian
2	Sawahlunto Selatan	1. Kubang Sirakuk 2. Kampung Teleng 3.Tanah Lapang	1. Aur Tajungkang 2.Kubang Sirakuk B 3.Kubang A 4.Pondok Kapur 5.Mudik Air 6.Pasar Remaja 7.Kampung Teleng 8.Pondok 9. Suko 10.Sidomulyo 11.Air Dingin 12.Tanah Lapang

Sumber: *Sawahlunto dalam Angka, 1988.*

Tabel 19
Nama Kecamatan, Nagari, dan Kelurahan Setelah 1990.

No	Kecamatan	Nagari	Kelurahan/Desa
1.	Silungkang	1.Silungkang	1.Desa Silungkang Oso 2.Desa Silungkang Duo 3.Desa Silungkang Tigo 4.Desa Muaro Kalaban
2.	Lembah Segar	2.Taratak Boncah	1.Desa Taratak Boncah Kel. Pasar Kel. Kubang Sirakuk Utara Kel.Kubang Sirakuk Selatan Kel. Aur Mulyo Kel. Air Dingin Kel. Tanah Lapang 1. Desa Pasar Kubang 2.Desa Kubang Tangah 3.Desa Kubang Utara
3	Barangin	3.Kubang	Sikabu
4	Talawi	4.Lunto	1.Desa Lunto Barat 2.Desa Lunto Timur Kel.saringan Kel.Lubang Panjang Kel.Durian I Kel.Durian II 1.Desa Kolok Mudik 2.Desa Kolok nan Tuo 3.Desa Santur
		5.Kolok	1.Desa talago Gunung

			1. Desa Lumindai
		6.Talago Gunung	1.Desa Balai Batu Sandaran
		7.Lumindai	1.Desa Talawi Hilir 2.Desa Talawi Mudik
		8.Kajai	3.Desa Bukik Gadang 4.Desa batu Tanjung
		9.Talawi	5.Desa Kumbayau 6. Desa Tumpuk Tangah 7.Desa Datar Mansiang
		10.Sijantang	1.Desa Sijantang Koto 2.Desa Salak 3.Desa Sikalang 4.Desa Rantih

Sumber: *Pemda Sawahlunto/Data UPT 1990*

Pada masa pemerintahan Soebari Soekardi dibangun berbagai fasilitas, termasuk meningkatkan kelas Rumah Sakit Sawahlunto. Sekolah sekolah juga didorong untuk ditingkatkan kualitasnya dan pertanian didorong untuk maju. Cuma selama dua periode pemerintahan Subari Sukardi tidak terjadi perubahan yang signifikan dalam tata ruang kota, sehingga kurangnya peningkatan fungsi bangunan-bangunan yang sudah ada. Bahkan bangunan-bangunan tua terabaikan oleh Walikota Subari Sukardi.

Kurangnya peningkatan itu mungkin juga karena gaya Subari Sukardi yang kurang koordinasi dengan bawahan serta kurangnya pengawasan terhadap kerja

pemerintahan secara keseluruhan. Sesungguhnya, walaupun secara geografis kota Sawahlunto terpencil namun Sawahlunto masih mempunyai potensi, seperti kerajinan rakyat dan bangunan-bangunan sejarah. Kenyataannya seluruh potensi itu terabaikan terus oleh pemerintah.[240]

Perluasan kota Sawahlunto tentu berpengaruh besaar terhadap perubahan komposisi penduduk struktur ekonomi kota, sebagaimana dibicarakan pada bagian lain di belakang. Setidaknya bisa dilihat, masuknya beberapa nagari pinggiran ke administrasi Kota Sawahlunto memberikan alternatif kreativitas yang lebih baik untuk pengembangan kota Sawahlunto. Walaupun sesungguhnya daerah-daerah baru tersebutya juga akan menjadi beban baru dalam pengembangan. Secara lebih luas daerah-daerah pinggiran itu bisa dilihat sebagai berikut.

Pertama daerah Lunto, 13 km dari km dari pusat kota, penduduknya masih satu ninik dengan daerah Kubang (atau ninik yang sebelas). Karena daerah Lunto dianggap daerah yang juga tua, maka secara kultrual mereka kaya dengan cerita-cerita folklor. Secara geografis Lunto berada di pinggiran bukit dan hutan yang msih perawan. Suasananya adalah daearh pertanian atau pedesaan.

Daerah lain adalah Talawi , yang sebelum 1990 masuk ke dalam wilayah Sawahlunto Sijunjung. Daerah ini dulu juga terabaikan, karena jaraknya yang begitu jauh dari pusat pemerintahan.Talawi secara ekonomi tampak kebih

[240] Saarani, *wawancara*, Sawahlunto 6 Mei 2004.

baik, pembangunan daerah itu tampak lebih baik setelah masuk wilayah Kota sawahlunto. Hampir setiap sisi jalan di nagari Talawi berdiri rumah-rumah permanen dan semi permanen. Namun untuk mencapai Talawi harus melewati bukit-bukit pertambangan batu bara yang suasananya jauh dari perkotaan.

Baik nagari yang telah lama bergabung seperti Kubang maupun nagari yang baru seperti Lunto, Kajai, Kolok, Talawi, dan Silungkang, memiliki karakter berbeda. Nagari-nagari ini memiliki latar belakang budaya masing-masing. Sebagai Contoh Lunto, mereka yang merasa paling mewarisi nama Lunto, karena beberapa nama yang diakhiri dengan kata Lunto seperti Sawahlunto, Kabapaten Sawahlunto Sijunjung,Tambang Batu Bara Ombilin Sawahlunto. Pemakaian nama itu menjadikan nama Lunto "mendunia" dan menandakan mereka penting dalam wilayah tersebut, begitu pengakuan seorang penghulu dari Lunto.

Masuknya beberapa nagari baru ke dalam wilayah administrtatif kota Sawahlunto, membawa berbagai perubahan dalam dinamika kota. Kesan kuat yang muncul adalah kota yang selama lebih 1 abad didominasi oleh wajah kota tambang berubah menjadi kota yang berwajah pedesaan. Kehadiran kota tampak sebatas pengurusan administrasi. Perubahan ini tidak diikuti oleh sektor jasa, komunikasi, transportasi, percepatan pendidikan dan lain-lain yang seharusnya menjadi ciri khas sebuah kota.Perubahan-perubahan sektor ekonomi, umpamanya perubahan ke industri ekonomi belum terlihat

percepatannya dan kemunculannya sejak dimulainya perubahan administrasi.

Sebagai daerah pedesaan, sektor utama pencaharian masyarakat adalah pertanian.. Pada beberapa daerah, seperti Lunto, Lumindai, Talawi, sektor pertanian merupakan mata pencaharian utama penduduk. Sektor jasa dan industri kerajinan yang cukup banyak berkembang adalah di nagari Silungkang. Daerah ini sesungguhnya sudah lama mengembangkan sektor industri kerajinan dan jasa Bahkan, sejak zaman kolonial Belanda, sektor industri rumah tangga di Silungkang telah dikenal sampai ke negeri Seberang. [241]

Beberapa pabrik kain sarung, tenun, dan songket sudah menjadi tradisi yang kuat dalam masyarakat Silungkang. Songket Silungkang misalnya, merupakan salah satu komoditi industri yang sudah dikenal. Pekerja songket ini umumnya dari kalangan perempuan. Ada *pameo* di Silungkang bahwa : bagi seorang anak gadis, jangan mengaku sebagai perempuan Silungkang, kalau tidak pandai menyongket.[242] Pada gilirannya, Silungkang yang selama ini terkesan kuat sebagai sebuah nagari yang memiliki karakter tersendiri dengan kewirausahaan dan kekebasannya, kemudian menjadi bagian dari kota Sawahlunto.

---

[241] Akira Oki, "Catatan Mengenai Sejarah Industri Tekstil di Sumatera Barat", dalam Akira Nazagumi, *Indonesia Dalam Kajian Sarjana Jepang*. Jakarta: YOI, 116-130.

[242] Wawancara dengan Rita, seorang pengusaha Songket di Silungkang.

Silungkang telah mewarisi watak sebagai masyarakat yang hidup disektor jasa dan industri rumah tangga, karena keterbatasan lahan untuk sektor pertanian. Namun kebanyakan nagari lainnya merupakan wilayah yang hidup dari sektor pertanian, sehingga lebih statis. Dengan demikian, sebuah pertanyaan mendasar ingin dikemukakan yaitu apakah dengan masuknya berbagai nagari ke kota Sawahlunto, kemudian diikuti dengan perubahan karakter dari masyarakat agraris menjadi masyarakat industri atau setidaknya bergerak di sektor jasa? Jawabannya, walaupun mereka sudah masuk kota, namun wajah yang tampil adalah wajah pedesaan dengan segala karakter yang mengikutinya.

B. Pluralisme Budaya Masyarakat

Karakter unik dari wilayah ini adalah masalah kekerasan. Kekerasan budaya juga menandai wilayah ini. Penghulu Kolok misalnya menyatakan bahwa ia telah 2 kali menandatangani perjanjian dengan Kapolsek bahwa tidak akan ada bacakak banyak antar kampung lagi di nagari Kolok. Dari dua itu tergambar bahwa nagari Kolok bacakak banyak tidak hanya dengan satu kecamatan saja, akan tetapi juga dengan kecamatan lain.

Tindak kekerasan seperti itu menjadi budaya sendiri bagi masyarakat nagari di kota Sawahlunto. Persoalan-persoalan kecil seperti merasa diremehkan oleh kelompok pemuda lain bisa memicu konflik dan perang antar nagari. Kasus bacakak antar kampung antara Lumindai dengan Lunto misalnya berangkat dari persoalan seperti itu. Dalam bacakak banyak itu, penghulu Lunto

menyebutkan bahwa mereka membungkus nasi ke wilayah pertempuran, sehingga persiapan memang dirancang sedemikian rupa untuk menyerang ataupun bertahan dari serbuah musuh. Biasanya wilayah yang disukai adalah wilayah perbatasan.

Dalam setiap bacakak banyak itu, masalah kerugian menjadi jauh lebih besar. Misalnya bacakak banyak antara Muaro Kalaban dengan Padang Sibusuk (masuk kebupaten Sawahlunto Sijunjung), kerugian yang diderita kedua belah pihak banya sekali. Puluhan rumah dibakar dsan puluhan orang masuk rumah sakit.

Anehnya, dalam penanggulangan ini berbagai pihak –baik ditingkat lokal maupun kota baru turun setelah terjadi perkelahian itu. Artinya, kebijakan yang berupaya untuk menanggulangi bacakak banyak tidak diantisipasi sedini mungkin, sehingga kesan kuat yang muncul adalah tidak ada kebijakan terhadap persoalan tindakan kekerasan ini. Tidak dapat dipungkiri bahwa budaya bacakak banyak ini, sebagai mana pengakuan banyak penghulu sudah menjadi bagian dari jiwa masyarakat, dengan alasan wilayah yang keras, sehingga seharusnya berbagai pihak sudah ada program-program khusus untuk menanggulanginya. Setidakanya, pemetaan potensi konflik dengan berbagai penyebab dan wilayah sudah ada maketnya pada kantor-kantor yang berwenang seperti polisi, pemerintahkota, dinas sosial dan sebagainya. Dengan adanya pemetaan ini, maka setiap ada gejala-gejala yang akan terjadi, maka dapat diantisipasi sedini mungkin, tanpa harus menunggu korban terlebih dahulu, sebagaimana telah berlangsung selama ini.

Masyarakat Sawahlunto sejak berdiri akhir abad ke-19 sudah terbiasa dengan masyarakat plural, komposisinya terdiri dari bangsa asing (Eropa dan Timur), berbagai pemeluk agama dan suku. Sepanjang tahun 1974-1978 komposisi pemeluk agama dapat terlihat dalam tabel berikut.

Tabel 20
Pemeluk Agama 1974-1978

No	Tahun	Agama					Jumlah
		Islam	Katolik	Protestan	Hindu Budha	Kong Huchu	
1.	1970	11.723	106	97	4	27	11.957
2.	1971	12.090	204	107	-	25	12426
3.	1972	12.284	122	167	-	25	12598
4.	1973	12.441	122	167	-	25	12755
5.	1974	12585	167	122		25	12899
6.	1975	12689	166	120		25	13000
7.	1976	12813	166	120	1	25	13125
8.	1977	13.082	166	120	1	25	13394
9.	1978	13.203	177	106	-	25(?)	13511

Sumber: *Sawahlunto Dalam Angka*, 1970-1979. /*Pusat Dokumentasi dan Informasi Perencanaan Kota dan Daerah 1979*.

Pada tahun 1980 terjadi perubahan yang cukup berarti dalam komposisi pemeluk agama, yaitu dengan hilangnya komunitas penduduk keturunan Tionghoa. Perubahan komposisi itu sebagai akibat banyaknya mereka pindah ke kota lain setelah menjual rumah-rumah mereka yang ada pada pusat kota . perpindahan itu tentu lebih

banyak berhubungan dengan pertimbangan ekonomi yang dari berbagai sisi terlihat menurun dan kurang prospektif.

Tabel 21
Komposisi Penduduk Menurut Agama tahun 1980

No	Agama	Jumlah
1.	Islam	13.306
2.	Katolik	141
3.	Kristen-Protestan	113
4.	Hindu/Budha	9

Sumber: *Sawahlunto Dalam Angka*, 1980

Berdasarkan tabel terlihat Islam menjadi agama mayoritas di Kota Sawahlunto, agama itu tersebar pada seluruh tempat (desa atau nagari). Sementara penduduk Kristen menyebar antara lain pada Pasar Remaja, Suko Sari, Sido Mulyo, Tanah Lapang, Kebun Jati, Lubang Tembok, Gunung Timbago dan Sungai Durian. Sementara pemeluk agama Hindu/Budha terbatas pada daerah di sekitar Pasar Oesang. Penduduk tersebut tidak mempermasalahkan mengenai asal usul dan agama mereka dalam menjalani kehidupan sosial budaya mereka. Sikap pluralis seperti itu membuktikan sejak zaman kolonial belum ada terjadi kerusuhan sosial yang berbau ras maupun agama. Setiap suku yang terdiri dari berbagai etnis di Nusantara itu sering menampilkan identitas mereka secara terbuka seperti lewat kesenian mereka yang beragam itu saat ada perayaan-perayaan nasional maupun hari-hari besar. Kesenian seperti kuda kepang, ronggeng, barongsai, silat, angklung dan sebagainya itu sesungguhnya berakar dalam masyarakat Sawahlunto.

Dalam berbahasa pun terjadi percampuran, bahkan bahasa Minangkabau, sebagai bahasa penduduk mayoritas di kota ini terpengaruh.Jadi sejak lama sudh terjadi asimilasi kebudayaan. Pada wujud yang ril terlihat jelas dalam bentuk pemakaian bahasa. Dalam berbahasa sering didengar "*kama ke*" (kemana kamu). "Kama" adalah "kemana" dalam bahasa Minangkabau, sedangkan *ke* adalah berasal dari *koe* (kamu dalam bahasa Jawa). Bahasa ini adalah percampuran bahasa Jawa pinggiran dengan bahasa Minangkabau. Selain itu adalah biasa di Sawahlunto sejak dahulu untuk sebutan *mas, akang, abang* atau pun *uda.* Jadi masyarakat Sawahlunto sudah merasakan bagaimana rasa dan *sense* dari pluralisme, yang akhir-akhir ini dikembangkan. Ini tentu modal untuk pembangunan masyarakat berikutnya.

Uniknya keberagaman agama, budaya dan suku di dalam masyarakat lokal Sawahlunto tidak seiring dengan sentuhan globalisasi yang padat teknologi, komunikasi antar wilayah dan ruang. Latar belakang sejarah kapitalisme dan teknologi yang kuat, yang sudah mengubah masyarakat Sawahlunto menjadi masyarakat plural kini justru tidak menyentuh. Simbol-simbol masyarakat plural yang global, seperti komputerisasi, interaksi dengan dunia luar serta majunya sistem pendidikan di tengah masyarakat justru tidak berkembang. Kota Sawahlunto, sebagai kota yang begitu cepat digerakkian oleh kapitalisme ekonomi mdan birokrasiu kolonial pada awal abad ke-20 justru tidak menampakkan percepatan pembangunan. Kota ini justru seperti si tua kurus yang menampakkan tulang-tulang tubuh dan sisa

wajah kejayaannya. Sejarah sosial-budaya mereka justru dikurung oleh tidak adanya kearifan kebijakan

C. Dinamika Ekonomi Penduduk

Baik sumber wawancara maupun sumber tertulis menyebutkan bahwa penduduk asli Kota Sawahlunto adalah masyarakat yang berasal dari nagari-nagari yang ada di sekitarnya seperti, Kubang, Kolok, Muaro Kalaban dan Lunto. Masyarakat asal pada awal abad ke-20 umumnya mempunyai tanah di sekitar kota yang mereka gunakan untuk lahan pertanian. Setelah dibangunnya TBO di akhir abad ke-19 dan dibangunnya berbagai perangkat kota, masyarakat asli mulai sedikit demi sedikit terbatasi. Pembangunan berbagai perangkat kota kian mengurangi akses mereka terhadap tanah-tanah pertanian yang jumlahnya terbatas itu.

Tabel 22
Penduduk Sawahlunto tahun 1969-1975

No	Tahun	Jumlah
1.	1969	11.811
2.	1970	11.957
3.	1971	12.426
4.	1972	12.598
5.	1973	12.755
6.	1974	12.899
7.	1975	13.000
8.	1976	13.125
9.	1977	13.394
10.	1978	13.511

Sumber: *Sawahlunto Dalam Angka* (Pusat Informasi dan Dokumentasi Perencanaan Kota dan Daerah, 1978)

Jumlah penduduk itu tentu jauh sangat sedikit jika dibandingkan penduduk Sawahlunto pada zaman kolonial Belanda, yang penduduknya sampai sekitar 43.576 - jiwa[243]. Pengurangan itu beralasan. Ada peristiwa-peristiwa penting yang mengkaibatkannya. Pengurangan produksi dan kekacauan menajemen TBO pada masa perang kemerdekaan sampai tahun 1970-an mengakibatkan kuranganya tenaga kerja dan minat orang untuk tinggal di Sawahlunto. Selain jadi pegawai pemerintah, tujuan penduduk luar datang ke kota Sawahlunto hanyalah berkaitan dengan administrasi pertambangan. Pada pasca kemerdekaan serentetan ketidakstabilan sosial politik mengaklibatkan implikasi berpindahnya penduduk setempat. Pada tahun 1958, kegaduhan PRRI yang menentang sikap pemerintahan pusat mengakibatkan banyak masyarakat yang lari ke luar kota sehingga mengalami pengurangan penduduk. Kemudian pada periode pertengahan tahun 1960-an masyarakat etnis asing dan pro-komunis/Soekarno banyak yang menghindar ke luar kota dan sebahagian ditangkapi. Orang-orang Cina tampaknya pergi meninggalkan kota itu sehingga juga mengurangi eksistensi perdagangan di kota itu[244].

[243] *Sawahlunto 2020, Agenda mewujudkan Kota Wisata Tambang yang Berbudaya*. Pemerintahan Kota Sawahlunto, 2001.

[244] Kini hampir tidak bias ditemui etnis Cina di kota ini. Mungkin ini bias juga dihubungkan dengan berkurangnya prospek ekonomis dan dinamika kota yang kian menurun.

Walaupun sudah terjadi peningkatan produksi batubara pada tahun 1980-an, namun perpindahan penduduk dari Sawahlunto masih tinggi, ini tidak sebanding dengan arus pertambahan penduduk. Terlihat dalam tahun 1980 masih ada terjadi pengurangan penduduk mendekati 300 jiwa.[245]

Perluasan administrasi Sawahlunto tahun 1990 meningkatkan jumlah penduduk menjadi 53.436 jiwa. Namun jumlah itu berkurang pada tahun 1991 menjadi 52.520 jiwa[246]. Pengurangan itu tentu tidak juga terlepas dari keberadaan PTBA-UPO yang mengadakan pengurangan pegawai dan hal itu diiringi dengan menurunnya stabilitas ekonomi di kota Sawahlunto.

Hubungan perkembangan ekonomi kota dan pertambangan disadari oleh pemerintah, karena itu pemerintah mendorong hubungan yang simbiosis antara PTBA-UPO dengan Pemerintah Kota Sawahlunto. Pertama pemerintah mendorong perusahaan tambang batu bara untuk menyisakan hasil usahanya untuk pembangunan kota berupa pajak, retribusi kota, dan iuran. Kedua, pemerintah mendorong perusahaan mengelola organsiasi sosial, koperasi dan fasilitas lain yang bisa mengembangkan kota tersebut. Ketiga menganjurkan kepada karyawannya untuk tinggal dan membelanjakan uang di Sawahlunto. Tentu dengan demikian akan banyak uang beredar di Sawahlunto, secara tidak langsung akan meningkatkan ekonomi masyarakat kota. Keempat, mendorong kontrak dan subkontrak kepada perusahaan

[245] *Sawahlunto dalam Angka*, 1980.

[246] *Sawahlunto dalam Angka*, 1993.

lokal. Ini juga mendorong tumbuhnya perusahaan-perusahaan lokal dan berbagai kesempatan dengan pelaku ekonomi di tingkat lokal kota itu. Gagasan itu tampaknya beberapa tahun terakhir agak diragukan, karena kurangnya volume eksploitasi batubara, dan mungkin karena bermunculannya penambangan liar.

Perekonomian penduduk merupakan faktor penting (selain faktor keamanan) yang diperhatikan pemerintahan pada masa Orde Baru. Sesuai dengan orientasi pembangunan yang posisitvis, maka angka pertumbuhan diperhatikan. Maka pada masa ini, sebabagaimana yang terlihat dalam tabel pada bahagian lain dari buku ini maka pertumbuhan ekonomi secara statistik tetap selalu membaik. Walaupun sebenarnya, kalau dilihat pada ekonomi ril di sekitar perkotaan Sawahlunto, perkembangan itu tidak mengalami perubahan yang signifikan.

Masuknya beberapa nagari ke kota Sawahlunto cukup memberikan arti bagi "lumbung pertanian kota", sebab daerah baru itu merupakan daerah pinggiran yang cukup mempunyai lahan untuk diolah untuk bertani.

Di beberapa tempat yang terbatas di pinggiran kota, pemerintah mengadakan Bimas/Inmas, dengan meningkatkan intesifikasi pertanian. Tanaman yang ditanam penduduk berupa ubi kayu, ketela rambat, jagung dan kedelai serta sedikit sayuran lainnya. Khusus tanaman ubi kayu diproduksi penduduk sebagai kerupuk. Tetapi pertanian yang terbatas itu tidak cukup mendukung bagi pertumbuhan kota. Kota tetap saja menggantungkan hidupnya pada batu bara, sebagai sumber unggulan dari

Anggaran Pendapatan Daerah. Terbatasnya areal persawahan menjadikan penduduk tergantung pada beras dari luar daerah, terutama Solok yang sejak lama memang terkenal sebagai penghasil beras yang baik di Sumatra Barat. Karena Sawahlunto bukanlah daerah pertanian, maka pemerintah mendorong sektor industri kecil untuk dikembangkan, seperti membuat kerupuk, tahu dan tempe. Khusus kerupuk pemasarannya ke kota Padang, Bukittinggi, Solok Padang Panjang dan daerah lainnya Sebahagian lagi masyarakatnya hidup dengan memburuh, jualan dan pegawai pemerintah.

Untuk melihat kondisi kerajinan rakyat tahun 1976/1977 bisa dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 23

Kerajinan Rakyat 1976-1977

No	Jenis Usaha	Tahun 1976
1.	Es Lilin	22
2.	Mobiler	3
3.	Usaha Lemon	1
4.	Tukang Gigi	1
5.	Kerupuk Ubi	47
6.	Tahu/tempe	8
7.	Batu Bata	1
8.	Amoniak	1

Sumber: *Sawahlunto Dalam Angka 1976/1977*

Masukan dari industri ini terlihat tidak begitu berarti untuk daerah jika dibandingkan dengan total masukan lainnya di Kota sawahlunto. Total masukan dari

industri kecil dalam kisaran tahun 1980 hanya sekitar Rp.127.000,-, sementara masukan untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sawahlunto adalah sebesar 46.419.945.55.[247] Walaupun tidak dicantumkan pertumbuhan angka statistik sepanjang tahun tersebut, setidaknya kondisi statistik itu menunjukkan bahwa industri rumah tangga memang tidak berkembang pada masa awal Orde Baru.

Pertumbuhan industri kecil dan rumah tangga setelah awal tahun 1980-an tampak dirangsang sehingga mengalami perkembangan yang cukup signifikan bagi masyarakat. Menjelang akhir 1980-an lebih dari 500 orang tenaga kerja diserap oleh sektor tersebut, mereka bekerja pada bidang usaha seperti industri pangan, sandang dan tekstil, industri kimia dan bahan bangunan serta industri kerajinan. Lebih jelas dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 24
Jenis Kerajinan dan Industri Rumah Tangga 1988

Jenis Industri	Unit Usaha	Tenaga Kerja
I. Industri Pangan		
1. Macam-macam Es	4	73
2. Kopi, Limun dan minuman	6	16
3. Tahu, Tempe, Taoco dan Toge	33	73
4. Kerupuk dan makanan lainnya		124
II. Industri Sandang/Kulit dan Tekstil	71	
1.Industri barang dari Tekstil	30	44
2.Industri Barang dari Kulit	2	4

[247] *Sawahlunto Dalam Angka* 1980/1981. hal.103

III. Industri Kimia/Bahan Bangunan		
1. Kimia Dasar	2	5
2. Industri bahan bangunan	17	64
IV. Industri Logam/Elektronik		
1.Industri barang dari logam	15	34
2.Reparasi dan lain-lain	10	33
V. Industri Kerajinan/Umum		
1.Pandai Mas	6	12
2.Tukang Gigi	1	1
3.Anyam-anyaman	9	9
4.Salon	3	6
5.Photo Studio	2	2
6.Kerajinan Lain-lain	4	8
Jumlah	251	508

Sumber: *Sawahlunto Dalam Angka 1988*

Tabel itu menunjukkan ada industri yang potensial untuk dikembangankan seperti industri kulit, tekstil dan kerajinan. Namun beberapa tahun berikutnya tidak banyak hasil industri spesifik yang dikenal dari Kota Sawahlunto kecuali kerupuk ubi , dan itu masih kalah bersaing dengan beberapa produk dari daerah lain.Songket dan beberapa kerajinan dari Silungkang adalah masalah lain, sebab ia sudah ada sejak zaman Kolonial Belanda. Lagi pula Silungkang baru tahun 1990 masuk ke wilayah administrasi Kota Sawahlunto.Tetapi, boleh dinyatakan bahwa industri kerajinan sudah berkembang ke seluruh Kecamatan di

Sawahlunhto, setidaknya pada tahun 1994 ada sebanyak 679 rumah tangga yang bergerak dalam usaha industri kerjainan.

BAB VI
SAWAHLUNTO ERA REFORMASI
1998-2004

"Terwujudnya Sawahlunto
menjadi tempat yang lebih baik untuk hidup,
berusaha dan dikunjungi,
menuju Kota Wisata Tambang yang Berbudaya"[248]

A. Otonomi Daerah dan Wisata Kota Tambang Berbudaya

"Kota ini adalah kota Hongkong di waktu malam", demikian seorang anggota masyarakat memberikan informasi. Setelah diperhatikan di saat senja kelap-kelip cahaya lampu dari ketinggian Kubang Sirakuak, lebih kurang setengah Km dari kota Sawahlunto, tampak kota Sawahlunto dengan yang terang benderang. Ini sungguh berbeda ketika siang hari, Sawahlunto hanya memancarkan antiknya keusangan. Kalau berjalan di tengah pasar lama, bangunan-bangunan pasar yang tampak kecil, tua dan meningalkan bekas keapikan, kian mengantarkan imajinasi ke bayangan kota yang tumbuh sejak akhir abad ke-19. Zaman itu Kota

[248] "Visi Misi Pemerintah Kota", *Buletin Informasi Kota Tahun 2004*. hal.3

Sawahlunto menjadi suatu bahagian dari kepentingan politik-ekonomi kolonial Belanda.

Kota Sawahlunto pernah mendapatkan kejayaannya pada tahun 1930-an, dengan penduduk lebih kurang 30.000,- jiwa. Namun kota ini mengalami suatu penurunan yang drastis setelah Indonesia merdeka. Masalah itu terus berlanjut sampai saat ini. Kini kota itu tertinggal dan terasing dari berbagai sisi moderen dan globalisasi. Tantangan tampaknya sudah disadari sejak lama, dan begitu mengemuka saat memuncaknya reformasi tahun 1998. Demi mengantisipasi ancaman kematian kota tua itu , maka pemerintah Kota Sawahlunto pada tahun 2002 merumuskan visinya untuk mengalihkan sumber ekonominya dari usaha tambang ke usaha pariwisata. Rumusan itu secara terus-menerus menjadi perbincangan sampai ke ruang-ruang publik sehingga menjadi visi yang jelas dan dipahami.

Visi tersebut telah dikukuhkan dengan Peraturan Daerah (Perda) Kota Sawahlunto nomor 6 Tahun 2003. Visi ini merupakan usaha untk merealisasikan visi jangka panjang Pemerintahan Kota Sawahlunto, yaitu mewujudkan "Sawahlunto 2020 menjadi Kota Wisata Tambang yang Berbudaya". Visi ini telah berhasil dirumuskan pada tanggal 24 Desember 2002, setelah pembicaraan dan diskusi serius antara Pemerintah Kota, DPRD Sawahlunto, pelaku pariwisata, akademisi, permerhati kota dan tokoh-tokoh masyarakat. Untuk merealisasikannya pemerintah kota juga sudah merumuskan dan menyusun tahap-tahap pengembangan. Ada 5 (lima) tahap waktu pengembangan sampai 2020.

Pada tahap akhir itu antara lain akan tercapai pendapatan yang berarti dari pariwisata. Untuk itu perlu persiapan pembangunan kapasistas institusi pendukung, kerjasama antara daerah, kualitas kota dan pengembangan produk wisata. Pada periode itu pariwisata akan menjadi sumber masukan utama bagi pemerintahan kota.

Orientasi pembangunan wisata ini mempunyai beberapa alasan. Pertama mengantisipasi secepatnya ketertinggalan pembangunan Kota Sawahlunto, yang terus menerus dibayangi oleh kian merosotnya produksi batu bara PT BA-UPO. Alasan pemilihan wisata sebagai *trend* ke depan, tentu didukung oleh alasan lain yang cukup rasional, seperti kakayaaan keindahan alam di berbagai pinggir kota. Kedua, begitu kayanya sisi historis-budaya yang ditinggalkan Pemerintahan kolonial Belanda, seperti adanya bangunan-bangunan tua yang saat ini masih berdiri di tengah kota Sawahlunto. Di beberapa tempat berbagai bangunan sejarah ada di sekitar daerah penambangan seperti kuburan Belanda, bekas bangunan tambang, menara *centraal electriche* (yang menaranya setinggi 70 meter), rumah tangsi, rumah peninggalan pejabat kolonial, rumah ransum dengan alat masa berkapasitas 5000 orang. Berdasarkan data yang dikumpulkan Dinas Pariwisata Kota Sawahlunto ada lebih seratus bangunan tua seperti rumah Fak Sin Kek, gedung PTBA-UPO, kamar bola, stasiun kereta api, dan berbagai bangunan di tengah kota yang dibangun pada masa Kolonial Belanda.

Menurut keterangan tokoh setempat yang hidup sejak zaman kolonial Belanda, struktur banguan kota Sawahlunto saat ini tidak jauh berbeda dengan masa lalu.

Kecuali pada akhir tahun 1970-an pasar itu diperbaharui sedikit, tanpa merombak wajah struktur dasarnya. Pasar yang terletak di pusat kota itu dulu bernama Pasar Usang, kemudian diberi nama dengan Pasar Remaja. Pergantian nama seperti ini, jika kota mau dikembangkan menjadi kota pariwisata, menurut pendapat sebahagian masyarakat hendaknya dikembalikan ke nama aslinya, agar kota itu benar-benar bernuansa kota tua –kota tambang.

Ketiga, Sawahlunto juga kaya dengan keindahan alamnya, apalagi kalau dilihat di waktu senja dari daerah ketinggian seperti Tanjung Sari (di sisi Timur kota). Penduduk kota ini sering menamakannya sebagai "Hongkong di waktu malam". Kerlap-kerlip lampu di puncak-puncak bangunan kota kadang seperti kapal-kapal yang mau merapat ke dermaga. Mengingat potensi historis itu Pemerintah Kota Sawahlunto sudah merumuskan visi kota Sawahlunto ke depan. Perpaduan antara potensi historis dan alam mendorong pemerintah kota untuk memikirkan pengembangan yang lebih serius dan intensif.

Dalam kepemimpinan Amran Nur sudah direncanakan pengembangan objek Pariwisata antara lain, Objek Wisata Lubang Tambang dan Kawasan taman Danau Tambang [249] Pengembangan wisata ini akan dikemas dalam tiga bentuk wisata. Pertama wisata untuk rekreasi, seperti berenang, memancing, jalan-jalan dan lain-lain. Kedua wisata budaya dan sejarah, yaitu untuk menikmati dan mengenali segala potensi budaya dan

[249] Peluang Profil Investasi Kota Sawahlunto BAPPEDA. Pemda Swl, 2003. hal. 41.

sejarah yang tumbuh sejak akhir abad ke-19, seperti areal tambang, rumah-rumah dan gedung-gedung peninggalan kolonial Belanda. Ketiga adalah wisata untuk penelitian, baik penelitian budaya dan sejarah maupun ekologi serta sosial masyarakat yang plural. Berhubungan dengan itu pemerintah kota sudah merencanakan untuk melengkapi sarana-sarana wisata yang diperlukan, seperti hotel, sarana ekonomi, transportasi, berbagai fasilitas rekreasi dan mengembangan budaya daerah termasuk mendorong masyarakat untuk meningkatkan kerajinan rakyat untuk souvenir.

Untuk pembangunan kota lama Pemerintah kota sudah mendata dan meneliti bangunan–bangunan lama serta mengundang investor dari daerah Malaka untuk mengembangkan kota lama. Pemerintah kota juga sudah mengirim timnya ke Malaka untuk mengadakan tudi perbandingan mengenai pengembangan pariwisata sejarah dan budaya. Namun mengenai kemungkinan ini ada beberapa tanggapan dari masyarakat kota tentang visi kota ini. *Pertama,* tanggapan yang begitu optimis dan antusias mengenai kemungkinan pengembangan Sawahlunto sebagai kota wisata budaya. Tanggapan optimis itu melihat kenyataan semakin sepinya kota Sawahlunto. Pembangunan kota menurut pandangan kelompok pertama ini tidak lagi bisa mengandalkan tambang batu bara. Pertambangan batu bara kenyataannya sudah mengalami kerugian, baik bagi perusahaan maupun bagi penduduk. Bukti kerugian itu bisa dilihat masyarakat secara nyata dengan tidak beroperasinya mesin perusahaan seperti lori pengangkut batu bara. Sementara tempat areal

pencurahannya sudah kesepian dari karyawan tambang yang pergi meninggalkan kota karena di PHK sejak beberapa tahun terakhir. Kantor-kantor karyawan di sekitarnya perusahaan sudah ditumbuhi belukar-belukar liar. Mesin-mesin exploitasi ataui alat-alat berat terpaksa "dibesituakan".

Bagi sebahagian penduduk setempat pengembangan pertambangan menjadi kecemasan, yaitu rusaknya ekologi kota. Berdasarkan keterangan masyarakat ada ribuan lubang di bawah kota Sawahlunto yang suatu saat bisa membahayakan penduduk setempat. Sementara sudah ada rumahrumah penduduk yang runtuh akibat galian batu bara yang saat ini menjadi liar. Kenyataan lain menunjukkan, tahun 2003 PTBA telah memutuskan pula untuk tidak menggunakan kereta api untuk mengangkut batu bara, sebab kurangnya produksi.[250] Sementara PJKA sudah memindahkan sebagian besar lokomotif dan gerbong kereta api ke Jawa dan Sumatera Selatan.

Tidak beroperasinya batubara sebagai pengangkut batu bara tentu mempunyai efek juga bagi kota Sawahlunto, baik secara sosial maupun ekonomi. Beberapa kenyataan itu tentu mendorong keyakinan masyarakat untuk menengok ke arah lain untuk menghidupi kota, usaha yang paling diyakini adalah pariwisata budaya dan sejarah.

Sekitar lima tahun terakhir sebahagian besar penduduk Sawahlunto juga dicemaskan oleh banyak penambang sederhana/penambangan rakyat (dalam versi

[250] "Tak Ada lagi Kereta yang kan Lewat". *Mimbar Minang*, 2003.

pemerintah disebut "penambang liar" atau penambang tanpa izin/peti) yang menggaruk batu bara tanpa *skill* yang memadai, serta tanpa mempertimbangkan aspek kesehatan dan teknis. Penambang-penambang itu, terutama sejak bergulirnya sistem otonomi daerah, merasa bahwa mereka mempunyai hak untuk menggarap daerah mereka, termasuk kekayaan tambang batu bara. Multiefek dari gerakan reformasi dan otonomi daerah serta krisis politik dan ekonomi mendorong banyak orang untuk merebut lahan tambang. Hasil tambang itu dijual dengan harga yang murah dan langsung diambil cukong-cukong batu bara.[251] Penambang liar atau penambangan pada umumnya, yang mungkin benar akan membahayakan secara ekologi dan masyarakat kota, bagaimanapun tentu tidak diinginkan oleh masyarakat kota untuk dikembangkan.

Pendapat **kedua,** masyarakat kota yang pesimis dan ragu-ragu mengenai visi kota wisata tambang yang berbudaya. Beberapa tokoh masyarakat bahkan mempertanyakan frase atau ungkapan kota tambang berbudaya. Pada suatu sisi menurut mereka tambang itu adalah suatu ruang pekerjaan yang keras, saat menambang apa saja bisa terjadi. Bahkan dalam zaman kolonial tidak jarang terjadi pembunuhan antar etnis di lokasi tambang. Tambang menurut mereka ini tidak ada hubungannya dengan budaya. Budaya pada sisi lain adalah suatu

[251] Berdasarkan keterangan masyarakat setempat usaha tambang liar ini pernah beberapa kali membawa musibah dengan terbakarnya penambang oleh gas metan.

kenyataan yang berlaku di luar tambang. Kalaupun budaya akan dikembangkan budaya mana. Sebab masyarakat Sawahlunto terdiri dari berbagai budaya, yang tumbuh sejak masa kolononial. Bahkan suatu penegasan yang cukup kuat dinyatakan oleh seorang tokoh masyarakat;"mana mungkin lobang tambang bisa dijadikan objek wisata, dibayar pun orang tidak mau masuk ke sana. Nanti harus dipikirkan bagaimana jaminan keselamatan dan asuransi wisatawan."[252] Ini tentu memang masih menjadi bahan pertimbangan bagi Pemda sawahlunto, format, jenis dan wujud seperti apa yang akan dikembangkan di sawahlunto.

Pertimbangan lain bukan hanya masalah-masalah ekonomis yang dikemukakan tetapi juga multiefek negatif dan posisif yang melekat dalam pariwisata itu sendiri. Wisata budaya, apa pun namanya adalah mengundang orang luar untuk berkunjung dari berbagai daerah dan mungkin belahan dunia. Masyarakat yang datang tentu juga dari latar belakang budaya yang berbeda, tingkah laku berbeda. Kalau wisata budaya itu terealisasai tentu akan mempunyai pengaruh terhadap kondisi sosial, budaya dan ekonomi. Secara budaya masyarakat mempertanyakan, masyarakat tetap mencemaskan pengaruh-pengaruh negatif pariwisata terahadap masyarakat kota nantinya.

Adanya keraguan dan ketidaksamaan visi dalam masyarakat kota maka Pemerintah kota merumuskan dengan hati-hati mengenai wisata tambang yang berbudaya tersebut. Wisata tambang bukan hanya melihat

[252] Rahmatsyah. *Wawancara* , Maret 2004

bekas lubang tambang atau aktivitas pertambangan. Wisata tambang adalah kegiatan wisata menelusuri dan merekonstruksi masa lampau, membangun imajinasi dan menumbuhkan inspirasi masa lampau. Jejak-jejak sejarah pertambangan diharapkan bisa menjadi pelajaran dan kesadaran serta kearifan bagi kehidupan masa kini masyarakat kota berikutnya. Jadi dalam visi itu ada penggabungan antara sejarah pertambangan dan sejarah sosial budaya. Rumusan wisata yang dikembangkan adalah sejarah sosial budaya sebagai medium rekreasi dan kemanusiaan. Tentu dalam konteks itu, akan disajikan antara lain tercakup, proses dan peristiwa di lokasi pertambangan, peristiwa sosial-budaya dan peninggalannya di perkotaan, dan berbagai peristiwa sejarah lainnya yang berarti di tengah masyarakat. Pengembangan itu tentu berdasarkan nilai-nilai budaya lokal. Pada tahap awal sudah ditetapkan tiga hal penting yang akan diproduksi, yaitu abtraksi wisata, jasa wisata dan angkutan wisata[253] Walaupun konsep itu masih kabur dan mungkin tumpang tindih, tetapi arah yang akan ditempuh sudah mulai jelas, yaitu adanya keinginan untuk reproduksi dan memungsikan potensi sejarah-sosial-budaya masyarakat kota sebagai jawaban akan krisis batu bara.

[253] Perumusan ini sebenarnya sudah ada sebelum visi kota ini benar-benar ditetapkan. Lihat *Rencana Kota Wisata Tambang Sawahlunto*. Pemda Sawahlunto Bekerjasama dengan Lembaga Pengabdian pada Masyarakat Institut Teknologi Bandung, Nopembner 2001. hal. 5-7.

Namun sejak kian mengemukanya krisis PTBA-UPO dan semaraknya tambang rakyat, pada akhir masa jabatan Walikota Sawahlunto Drs, Subari Sukardi pada tahun 2002, sudah dirumuskan visi kota tersebut sebagai "kota tambang berbudaya", yang target realisasinya adalah tahun 2020.

Peumusan visi, yang gagasannya sudah dimulai semenjak akhir jabatan Walikota Sawahlunto Drs. Subari Sukardi, tentu mempunyai alasan yang kuat. Selain seratus lebih situs dan bangunan sejarah di Sawahlunto, sesungguhnya Sawahlunto mempunyai potensi sosial-budaya multikultural yang terpendam. Masyarakat kota yang sejak akhir abad ke-19 sudah biasa hidup dengan berbagai corak budaya, menjadikan kota itu unik. Kota itu bisa menjadi model pluralisme sosial-budaya, dan nyaman untuk dikunjungi oleh berbahgai suku dan bangsa lain, karena adanya pengalaman hidup berdampingan antara suku dan ras. Sejak dibukanya areal tambang batu bara, penduduk Kota Sawahlunto dihuni oleh berbagai masyarakat: Minangkabau (dari berabagai *luhak*/distrik), Jawa (umumnya bekas pekerja di TBO), orang Sunda, Batak, Cina bahkan keturunan Belanda dan lain-lain.[254] Walaupun tidak eklusif, sebesar apapun eksistensinya, mereka masih memakaikan budaya asal mereka. Tentu pada berbagai kebudayan itu terdapat asimilasi seperti bahasa yang akan melahir *Minang pijin*(ucapan campuran).

[254] Zaiyardam Zubir, Kehidupan Buruh tambang Batu Bara Ombilin Sawahlunto Sumatera Barat 18911-1927. Tesis. Yogyakarta : UGM, 1996.

Percampuran bahasa itu menunjukkan pembauran masyarakat yang begitu dalam. Pengembangan budaya yang plural ini, sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Amran Nur sebagai walikota, akan menjadi keindahan dan kekuatan budaya yang bisa dijual untuk pariwisata dan sekaligus sebagai alternatif dari pengembangan ekonomi rakyat, setelah habisnya masa-masa kejayaan batu bara.

Selain potensi sejarah dan sosial-budaya, Kota Sawahlunto kaya juga dengan potensi alam yang bisa dipadukan dengan potensi sejarah dan sosial budaya. Potensi alam yang sudah tersedia seperti potensi sungai; Batang Ombilin, Batang Malakutan, Batang Lunto, Batang Sumpahan dan Batang Lasi. Batang Ombilin yang berhulu dari Danau Singkarak di Utara melewati Talawi . Batang Malakutan berhulu dari Solok di sebelah Barat, mengalir melewati Kolok yang kemudian bertemu dengan Batang Ombilin. Batang Lunto berhulu di Lumindai di Sebelah Barat, mengalir membelah Kota Sawahlunto dan bermuara di Batang Ombilin. Batang Sumpahan berhulu di Durian dan bertemu dengan Batang Lunto dan Batang Ombilin. Batang Lasi berhulu dari Sungai Lasi Kabupaten Solok mengalir melewati Silungkang dan perbatasan Kota.[255] Selain sungai di pinggiran kota juga terdapat 23 Gua yang mempunyai ornamen yang beragam. Gua-gua- itu tersebar hampir di seluruh nagari. Diantara gua itu ada yang sangat poptensial untuk dikembangkan.

[255] "Laporan Akhir Inventarisasi Gua untuk Geo Wisata", Pemda Kota Sawahlunto Kantor Pariwisata Seni dan Budaya Kerjasama dengan Bara Muda Creative (BMC) 2003. Hal. 6-7.

Selain gua-gua itu masih ada beberapa gua lain yang masih belum diinvetarisasi oleh Pemerintah Kota Sawahlunto yaitu Ngalau Baraguang (Lunto), Ngalau Nyiak Suntiang(Taratak Bancah), Ngalau Kudo Tadorong (Taratak Bancah), Ngalau Panjang (Guguak Gadang Silungkang Oso), Gua Rimbo Bulek(Tak Bancah/Silungkang Oso), Ngalau Sipoki (Silungkang Oso), Ngalau Macang Hutan (Silungkang Oso), Ngalau Kapalo Dotai (Silungkang Oso), Ngalau Ikua Dotai (Silungkang Oso) dan Ngalau Basurek (Silungkang Oso).[256]

Semua goa itu mempunyai keunikan tersendiri. Selain di dihiasi air terjun, dan ragam hias Karst seperti Stalaktit, bersam gua itu juga melekat beberap cerita rakyat. Potensi gua seperti itu bisa menjadikan sawahkunto sebagai opionir juga dalam pengembangan wisata alam gua, sekaligus pendukungn untuk wisata tambang yang berbudaya.

Potensi budaya dan realitas sosial di Sawahlunto juga kaya. Selain faktor historis kolonial Belanda, foklor atau cerita rakyat juga ada di setiap nagari. Cerita rakyat itu tidak bisa dipisahkan dari proses sosial masyarakat. Dan, secara sosial dari Sawahlunto lahir tokoh-tokoh yang tidak bisa dipisahkan darti perjalan bangsa Indonesia. Tokoh-tokoh itu antara lain M. Yamin, Soedjatmoko, Sofyan Wanandi, Adinegoro, Suwardi Idris dan Prof. Dr, Umar Junus. Realitas sosial-budaya itu bisa menjadi penarik dan dikemas dalam bentuk paket wisata.

[256] Ibid.

Kerajinan rakyat dan makanan adalah potensi lain yang juga bisa dikembangkan di kota Sawahlunto. Kerajinan yang menonjol selama ini yaitu kerajinan songket, ukiran dan anyaman bambu serta usaha kerupuk. Songket Sawahlunto sejak awal abad ke-20 menjadi sangat terkenal sampai sekarang.

Potensi sejarah, sosial budaya dan alam serta kerajinan tentu memerlukan komitmen dan kerja keras untuk berkembang. Tahun 2020 sebagaimana yang ditargetkan oleh Pemda, sesunguhnya penantian yang cukup lama bagi kelangsungan sebuah sebuah kota, sebab kota membutuhkan daya ekonomi setiap saat. Sementara, jika memang usaha batu bara terhenti dalam waktu dekat, tentu sumber ekonomi kota akan lumpuh. Bagaimanapun kota akan dihadapkan dengan iklim sosial-ekonomi yang lebih keras.

Saat Kota Sawahlunto mendisain pembangunan wisata kota tua atau kolonial, ada beberapa kenyataan struktur dan kondisi masyarakat kota yang mesti diperhatikan serius. Diketahui, Pengembangan pariwisata adalah penciptaan ruang publik bagi individu atau kelompok masyarakat untuk menikmati waktunya di luar waktu rutin mereka. Karena itu strukur ruang-ruang kota harus mendukung untuk itu. Pertama bisa diperhatikan struktur fisik, seperti hotel, gedung pertemuan, gedung atau ruang hiburan, kenyaman tata ruang dan sebagainya.

Terlepas dari pro dan kontra mengenai visi kota yang ingin membuat dasar ekonominya pada pariwsata budaya, ternyata potensi dan tantangan hampir sama besarnya. Potensi sudah terbentang dalam ruang-ruang

kota yang tumbuh sejak lama, sementara tantangan mengacu pada faktor fisik, teknis dan sumberdaya manusianya serta masyarakat kota. Semua itu harus dibenahi secara bertahap tetapi cepat.

Berdasarkan catatan Dinas Pariwisata Sumatra Barat, di Kota Sawahlunto hanya ada empat tempat penginapan, semuanya kelas Melati. Hotel yang paling baik adalah Wisma Ombilin dengan standar melati III, sisanya adalah Melati I. Semua penginapan itu menumpuk sekitar kota lama.[257]

Restoran hanya ada satu dalam kota, yaitu Soto Surabaya. Restoran ini tentu tidak sebanding dengan beberapa restoran lain yang ada di kota lain, yang isinya beragam.[258] Kecuali, ada satu rumah makan di Muara Kalaban (15 Km dari kota) yang cukup representatif untuk tourisme. Di sana tersedia dendeng batokok yang sudah menjadi ciri khasnya. Hotel dan restoran memang menjadi masalah tersendiri, pengalaman beberapa rombongan yang berkunjung ke Sawahlunto terlihat bahwa mereka tidak mau menginap di Sawahlunto tetapi di Solok.[259] Ini tentu berhubungan juga dengan fasilitas hotel dan restoran di Sawahlunto.

Di sawahlunto tidak satupun biro wisata yang bisa melayani para tourisme. Biro wisata adalah wadah yang

---

[257] *Buku Data Statistik Pariwisata Propinsi Sumatra Barat* Tahun 2001

[258] *Ibid*.

[259] Alamsyah Halim, "Hotel Berbintang dan Restoran yang layak Didambakan di Sawahlunto.

sangat penting untuk menginformasikan, memandu dan menjual paket-paket wisata. Paket wisata adalah bagi objek wisata sudah menjadi bahagian yang terintegrasi. Selama ini belum satu pun ada program tahunan atau paket wisata yang bisa dikenal dari kota Sawahlunto.

Berkembangnya angkutan travel dalam dua tahun terakhir ini, transportasi ke Kota sawahlunto sudah mulai lebih lancar. Sebelumnya masyarakat hanya menggunakan bus ke/dari kota tersebut. Setidaknya ada dua usaha travel yang cukup representatif buat tourisme. Perkembangan travel itu tentu akan mendukung pengembangan pariwisata kota ke Sawahlunto ke depan. Namunn belum ada transportasi yang disediakan untuk mengantarkan wisatawan ke objek-objek wisata yang ada di pinggiran dan sekitar kota.

Ruang-ruang kota, seperti jalan, gang, got-got, taman kota dan lain-lain tentu harus dibenahi agar kelihatannya indah dan eksotik, sehingga merangsang daya imajinasi berlibur. Pembenahan ruang kota tentu mengarah ke romansa kota Kolonial, agar kota ini menjadi pilihan, baik untuk wisata studi, mengarungi romantika masa lalu atau ingin menikmati dunia lain yang tidak ada dalm kegiatan rutin para wisatawan.

Sebagai kota bernuansa kolonial Sawahlunto terasa kering dari produksi hasil budaya. Walupun di kota lain sering didapat seperti kerajinan songket Silungkang tetapi di kota Sawahlunto tak ada galeri budaya yang representatif. Galeri budaya seperti galeri songket, kerajinan, akan menjadi daya tarik bagi pengunjung yang datang ke kota itu. Karena itu Pemda masih harus

mendorong masyarakat Kota untuk berkreasi di tengah kota.

Di bidang seni budaya, kota Sawahlunto mempunyai potensi pada bidang randai, tari, rebana, Gambus, gamat, rabab, saluang dan salawat dulang.[260] Namun pengembangan seni budaya tersebut masih jauh kalah secara kwantitatif maupun kwalitatif dengan daerah lain. Pagelaran-pagelaran seni tradisional itu tidak teratur dan tidak dikenal oleh masyarakat di luar kota Sawahlunto. Pengembangan seni budaya yang ada itu akan menjadi sangat penting bagi pengembangan pariwisata kota kolonial. Dalam catatan Kantor Pariwisata Seni dan Budaya juga belum terlihat pengembangan seni yang sifatnya berakar pada masyarakat yang plural, seperti pengembangan kuda kepang, ronggeng, barongsai atau seni-budaya kolonial yang pernah hidup di kota itu. Pada hal budaya itu pernah hidup dan menjadi mainan masyarakat. Beberapa kali berdialog dengan masyarakat kota yang hidup sebelum merdeka, kuda lumping, ronggeng dan barongsai pernah menjadi mainan yang mengasikan bagi mereka sehingga sulit untuk dilupakan. Budaya rakyat itu hilang setelah terjadi perubahan-perubahan sosial politik setelah tahun 1960-an.

B. Tambang Rakyat Sebagai Dinamika Kota Tambang Sawahlunto

Dalam usianya mencapai 70 tahun, Safarudin, seorang penduduk asli Sungai Durian Sawahlunto

[260] *Ibid* . Hal.79.

menyatakan bahwa sejak ia pandai berjalan, ia telah melihat dan menginjak batu bara dijalanan di sekitar rumahanya. Namun, karena ia bukan bekerja di TBO, ia tak pernah merasakan "manisnya uang" dari batu yang terdapat di tanah leluhurnya itu. Batu bara yang sangat banyak terkandung di sekitar tempat tinggalnya hanya dapat ia lihat-lihat saja. Banyaknya jumlah kandungan batu bara di sekitar Sawahlunto itu dapat dilihat dari laporan R.D.M. Verbeek, seorang geolog Belanda. Dalam laporannya, ia memperkirakan secara kasar persediaan batu bara yang terdapat di berbagai tempat di Sawahlunto memiliki kandungan batu bara lebih kurang 200 juta ton.[261] Walau batu bara sangat banyak, namun Sarifudin tidak tahu "rasanya uang" dari batu bara itu.

Hingga kemudian, ketika republik ini digonjang ganjing oleh gerakan mahasiswa dan elemen masyarakat lainnya dengan lagu "reformnasi", keadaanpun berubah 180 derajat. Batu bara yang selama lebih satu abad hanya dinikmati oleh sekelompok orang yang bernaung di lingkaran TBO, namun kemudian terjadi perubahan besar yaitu siapapun dan dimanapun orang dapat menggali batu bara di tempat yang mereka sukai. Aturan baku yang berlaku selama ini yaitu penguasa tunggal terhadap batu bara hanya boleh ditambang oleh TBO, kemudian berubah secara drastis. Aturan ini kemudian porak poranda dengan

[261] R.D.M. Verbeek, "Over de Ouderdom der Steenkolen van het Ombilin-Kolenveld in de Padansche Bovenlanden en van de Sedimentaire Vormingen van Sumatra in het Elgemen, dalam, *Jaarboek van het Mijwezen in Nederlandsc Oost Indie***.** Batavia : Landsdrukkerji-Wetervreden, 1875, No. 4 Bg. I , hal. 135-143.

datangnya gelombang reformasi. Masyarakat yang selama ini hanya sebagai penonton dari penambangan batu bara di kampung halaman sendiri ataupun ditanah warisan nenek moyangnya, kemudian secara langsung juga terlibat dalam bisnis tambang ini. Masyarakat setempat menyebut bidang pekerjaan mereka sebagai tambang rakyat.[262] Safarudin yang merupakan salah seorang pelaku usaha tambang rakyat itu, baru dapat merasakan manisnya uang batu bara setelah ia berusia 70 tahun, karena selama ini tidak dapat dilakukannya karena ketatnya dominasi pemerintah dalam menguasai kekayaan alam itu. [263]

---

[262] Penyebutan istilah ini juga beragam, karena ada istilah lainnya seperti tambang liar, penamabang tampa izin dan tambang rakyat. Hal ini sangat tergantung dari sudut pandang yang digunakan misalnya, pihak TBO bukit Asam (nama TBO setelah digabungkan PT BO Bukit Asam Palembang) menyebutkan mereka yang menambang di lahan konsesi mereka sebagai penambang liar. Sementara Rakyat menyebutkan diri mereka sebagai tambang rakyat, sedangkan pemerintah menyebutkannya sebagai penambang tanpa izin (PETI). Salah satu bentuk tambang liar adalah Kasus PT Minang Malindo merupakan contoh yang tepat dalam kasus tambang liar ini. PT Minang Malindo merupakan tambang illegal yang dilegalkan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat, terutama melalui KP yang dibuat oleh Zainal Bakar untuk anak dan koleganya yaitu Afrizal, seorang anggota DPRD Tk. I Sumatera Barat. Hal ini menyangkut permainan dari elite Sumbar yang mencoba bermain dengan batu bara.

[263] **Wawancara** dengan Sarifudin. Kasus di tempat lain justru lebiuh gawat lagi. Di bangka misalnya, orang yamg membawa timah sama beratanya hukumannya dengan orang yang membawa ganja. Namun sejak reformasi, tambang rakyat yang lebih populer dengan tambang Inkonvensional (TI) timah di bangka justru jauh lebih subur berkembangnya. Jumlah TI di Bangka mencapai 12 buah. **Wawancara** dengan Sugono, pegawai Dinas Pertambangan dan Energi Sungai Liat Bangka, 30 Juni 2004.

Jika diurut kebelakang sedikit misalnya, pada pertukaran tahun 1996, usaha tambang PT BA-UPO masih mempunyai prospektif besar. Dalam pertukaran tahun ke 1997, Direktur PT BA-UPO, Ir. Irwan setiawan, masih bisa tersenyum manis dengan mengungkapkan Tambang batu Bara tahun 1996 meraih "sukses" karena produksinya melampaui target. Target produksi tahun 1996 1.024.000 ton sedangkan pada akhir tahun sejumlah 1.102. 904,45 ton. Namun pada kesempatan itu Direktur PT BA-UPO sudah mulai membayangkan pengembangan yang berat, seperti makin jauhnya lokasi tambang terbuka yang juga mendongkrak ongkos produksi.[264]

Jawaban akan tantangan pada akhir tahun 1996, tentu salah satu sisinya dapat dilihat pada tanggal 1 Oktober 1997, Koperasi Karyawan PT BA-UPO membuka apotek Koperasi Karyawan PT BA-UPO. Pembukaan koperasi itu dilatarbelakangi oleh tidak mungkinnya usaha angkutan truk batubara memberikan andil maksimal dalam Sisa Hasil Usaha (SHU).[265] Pembukaan usaha itu pada sisi lain bisa juga sebagai sinyal akan mulai merosotnya produksi batubara di Sawahlunto. Hal itu juga menjadi jawaban ringan dari kecemasan yang pada tahun-tahun berikutnya menjadi masalah berat. Pada hal sebelumnya tambang bara menjadi andalan dalam pembangunan daerah Sawahlunto. PT BA-UPO,

[264] Alamsyah Hlim, " Sukses Pertambangan Ombilin Berdampak pada Kesejahteraan", Harian *Haluan*, Sabtu 4 Januari 1997.

[265] Alamsyah Halim, "Pengurus dan menajer Umum Koperasi TBO Berkiprah", Harian *Haluan* 4 Oktober 1997.

bagaimanapun, sudah memberikan bantuan terhadap pembangunan kota, seperti dengan mendorong peningkatan usaha koperasi, usaha kerajinan dan pembangunan masyarakat.

Pada tahun 1997 produksi tambang batu bara PT BA-UPO kurang dari 100%. Tidak tercapainya target produksi itu besar kemungkinan dengan terjadi krisis moneter di seluruh Indonesia, dan Asia Tenggara umumnya. Walaupun demikian PT BA-UPO tetap menargetkan *Go Public* tahun 1998, di samping beban yang juga dipikulkan oleh pemerintah pusat unuk pengembangan produksi dengan pengembangan lima briket batubara. Namun bayang-bayang krisis dan beban yang berat tetap kelihatan. Untuk itu PT BA-UPO sudah menganjurkan untuk penghematan dan efisiensi secara dini. Selain itu PT BA-UPO juga sudah mengusahakan pembukaan lokasi tambang-tambang baru, seperti tambang terbuka di Sapan Dalam dan mendorong pembukaan tambang dalam di Sigalut pada awal tahun 1998. Pembukaan tambang terbuka di Sapan Dalam itu untuk mengantisipasi tambang terbuka di yang hampir habis di Kandi dan Tanah Hitam.[266]

Apa yang diperkirakan di awal tahun 1998 pun menemui realitasnya, sepanjang tahun 1998 terjadi cobaan dan besarnya tantangan karena bergulirnya reformasi. Produksi tambang tahun ini benar-benar di bawah target, karena itu tahun itu diakui sebagai tahun keprihatinan. Penurunan hasil tambang itu tidak bisa dilepaskan dari

[266] Harian *Haluan*, 2 Januari 1998.

krisis yang mengakibatkan meningkatnya ongkos produksi.[267] Penurunan produksi PT BA-UPO itu bagaimanapun membayangi kesulitan warga kota dan pemerintahan kota sawahlunto.

Bergulirnya reformasi, dan demokrasi pada tahun 1998, serta diiringi dengan otonomi daerah tahun 1999, diterjemahkan oleh masyarakat secara beragam. Salah bentuk wujudnya adalah menuntut hak-hak mereka. Di sawahlunto masyarakat menerjemahkan sebagai pengambilalihan kembali lokasi tambang PT BA-UPO yang sejak zaman kolonial sudah menjadi uaha tambang perusahaan tersebut. Lokasi tambang yang mereka anggap sebagai tanah ulayat mereka itu diekskploitasi sebagai pertambangan liar atau nama lainnya pertambangan rakyat.

Dalam melihat fenomena tambang setelah era reformasi, setidaknya ada tiga katogori dalam penyebutan penambangan yang tidak dikerjakan PT BA-UPO yaitu Tambang Liar, Tambang tanpa izin dan tambang rakyat. Ketiganya memiliki karakter tersendiri. Tambang liar adalah tambang yang dilakukan oleh masyarakat ataupun pengusaha yang menambang diatas tanah konsesi yang telah dimiliki PT BA-UPO. Hal ini menyangkut permainan dari elite Sumbar yang mencoba bermain dengan batu bara. Dampak dari tambang illegal, yang dilegalkan ini tidak

[267] Harian *Haluan*, 2 Januari 1999. Dalam tahun 1998 juga terjadi unjuk rasa ratusan karyawan batu bara yang menuntut reformasi perusahaan. *Singgalang*, 3 Juni 1998.. *Haluan*, 14 Pebruari 1998.

tanggung-tanggung. Salah satu dampak utama adalah hilangnya armada kereta api pengangkut batu bara.

Sejak zaman Belanda sampai zaman Orde Baru, pengelolaan batu bara hanya berada dalam satu tangan yaitu PT BA-UPO, maka sekarang diambil oleh banyak orang. Konsekwensinya adalah kalau kereta api dikuasai oleh PT BA-UPO, maka penambang diluar itu menggunakan armada truk untuk mengangkut batu bara. Akibat yang tidak dapat dihindari adalah kereta api menjadi gulung rel dari Sawahlunto ke Padang.

Tambang tanpa izin sebenarnya eufemisme dari penyebutan tambang liar. Penyebutan ini terutama diarahkan pada penambang-penambang liar, yang berasal dari masyarakat. Masyarakat ini terutama menambang di sekitar kampung-kampung mareka sendiri. Mereka yang selama ini tidak pernah menikmati batu bara, kemudian mengetahui di sekitar kampungnya ada batubara, maka mereka menambangnya.

Tambang rakyat, tambang yang dilakaukan oleh rakyat ataupun kerjasama dengan pemilik modal dari luar. Ada banyak hal yang berlangsung sesungguhnya dalam proses tambang rakyat ini. Lebih dari dari l abad batu bara di Ombilin (jika kita ambil patokan 1891 sebagai awalnya), maka boleh dikatakan masyarakat secara langsung tidak pernah menikmati hasil kekayaannya itu. Dapat dikatakan bahwa selama ini pengusaha, penguasa dan rakyat melakukan penjarahan terhadap kekayaan alam. Hanya saja ketiganya memiliki perbedan yang sangat besar. Pengusaha dan penguasa menjarah kekayaan alam, hutan ataupun tanah rakyat dilindungi oleh UU, yang mareka

buat sendiri. Jadilah penjarahan mareka legal. Motivasi mereka pun berbeda, kalau pengusaha dan penguasa menjarah untuk menumpuk kekayaan, maka rakyat menjarah hanya untuk sekedar bertahan hidup. Hal itulah dilakukan oleh tambang rakyat, yang hanya sekedar untuk bertahan hidup. Apalagi proses penambangan rakyat itu berlangsung sejak krisis moneter melanda republik ini.

Tampaknya secara etimoliolgi peristilahan illegal mining dan legal tak lepas dari perpektif siapa yang memegang kekuasan, kriteria-kriteria hukum, jumlah modal serta kemampuan teknologi. Menurut hemat saya, masyarakat sekitar area pertambangan tak akan pernah menikmati kekayaan alam mereka sendiri selama mereka hanya sebagai penonton. Sama halnya dengan kasus-kasus penebangan hutan, yang benar-benar menikamati hutan adalah mereka yang dapat akses langsung ke hutan dan hanya memiliki modal dan peralatan yang cukup untuk berproduksi dalam jumlah massal, yang dalam hal ini adalah cukong penyandang dana. Hal itu boleh dikatakan bahwa para kompetitor mereka nyaris tak seberapa besarnya jika dibandingkan dengan tambang rakyat versus PT. BO, namun mereka jauh lebih banyak mengeruk hasil tambang itu sendiri.

Berkembangnya pertambangan rakyat ini terjadi sejak masa post Suharto. Baik yang besar seperti munculnya PT. MM, berdirinya koperasi sebagi anak angkat PT BA-UPO, merupakan gejala dari tambang rakyat itu. Banyak sedikit, hal ini telah membangkitkan sektor ekonomi lain seperti upah penambang liar atau apakah penambang rakyat yang meningkat, menjamurnya kedai-

kedai makanan, pemukiman, dan banyaknya dibuka pusat hiburan sebagai hal gejala baru di Sawahlunto. Walaupun begitu, hal ini belum menjadi patokan yang menandakan kebangkitan ekonomi rakyat setempat. Dasar pertimbangannya adalah keadaan pertambangan di Sawahlunto ini sebenarnya sangat rapuh karena mengandung konflik yang terbentuk antara pihak perusahaan PT BA-UPO dengan para kompetitornya semisal PT MM yang sesungguhnya illegal, namun dilegalkan atas perpanjangan tangan penguasa, dan para penambang rakyat yang mengeruk batu bara di lahan PT BA-UPO, PT BA-UPO versus PT. SP, gubernur yang melegalkan perusahan penjarah PT. MM versus penguasa kabupaten atau kotamadya.

Hal yang tidak dapat dielakkan adalah penambangan berjalan diluar aturan main yang disepakati, dan setiap orang dapat mengambil kesempatan di antara sisa-sisa kejayaan doposit batu bara Ombilin. Mereka illegal karena mereka tak menyetor pajak sebagai pemasukan negara. Kalau penambang rakyat menyetor pajak pada negara, itu sangat bagus sekali, karena penguasa-penguasa di republik ini identik dengan koruptor. Seringkali saya katakan kepada penambang rakyat bahwa mereka menambang hanya untuk sekedar bertahan hidup, sementara penguasa dan pengusaha untuk menimbun kekayaan. Di sini letak perbedaan yang paling penting dari pola penambangan rakyat dengan penguasa dan pengusaha.

PT. MM adalah penambang illegal karena dalam menjalankan bisnis ternyata tak melakukan penambangan

bawah tanah, tapi hanya bertindak sebagai kolektor hasil tambang para penambang rakyat. Kerena itu peranan PT BA-UPO semakin kecil dilihat dari hambatan-hambatan bisnis dan opersional yang penuh dengan kolusi dan korupsi. Pengertian tambang illegal tak hanya disandang oleh para penambang rakyat, kelompok yang dioperasikan oleh seorang cukong, tapi kini menjadi terkait dengan persoalan peredaran uang, penguasaan lahan, pengambilan keputusan yang sangat ironis dilakukan secara tertutup dan tidak demokratis bahkan oleh sorang gubernur. Yang tersisa di tambang batu bara Ombilin adalah apa yang dulu menjadi illegal kini menjadi legal pada tingkat pengambilan keputusan, tidak pada tingkat pelaksanaan penambangan yang tak memenuhi standar lingkungan dan keamanan.

Hal cukup unik (jika saja) sekarang PT BA-UPO memang mati langkah. Tahun1998-an, terdapat sinyal kuat kuat perusahaan yang telah berumur lebih l abad ini gulung tikar), biaya produksi yang meningkat dari penambangan bawah tanah, berhentinya transporatsi kereta api yang mengangkut batu bara ke Padang justru banyak disumbang oleh apa yang dinamakan praktek-praktek illegal, elit yang memotong jalur kekusaan dari pusat dan bahkan melangkahi penguasa setempat.

Hal yang cukup unik di tengah berlakukanya perdangangan bebas di luar sana, karena perusahan tambang seperti PT. BA-UPO yang tergantung pada tempat tak bisa berpindah markas dan lahan garapan yang

lain secara cepat. Mungkin ia tak mengikuti dinamika berkelit mempertahankan daya saing. [268]

Meningkatnya aktivitas tambang rakyat merupakan satu jenis masalah sekaligus dinamika penting bagi pemerintahan kota Sawahlunto dan PT BA-UPO. Hal itu tentu berhubungan dengan perubahan tatanan politik dan tekanan moneter. Sebelum ini masyarakat hanya merasakan dan menyaksikan kekayaan alam mereka diambil, tanpa menikmati secara langsung hasilnya, bahkan menderita karena kerusakan ekologi dan polusi kota. Di sebahagian tempat masyarakat mengakui bahwa rumah mereka mengalami keretakan akibat goncangan akibat ledakan penambangan. Selain itu abu-abu PLTU juga sering berserakan di jalanan yang secara langsung merusak kesehatan dan K3 (keindahan, kebersihan dan keindahan)[269]

---

[268] Contoh yang juga terjadi di Sumbar adalah kehendak sebagian masyarakat dan tokoh Sumbar yang ingin mengembalikan PT. SP dari kekuasan modal asing CEMEX, suka atau tidak, dengan adanya *spin off*, agaknya sebuah bentuk perlawanan terhadap akibat-akibat perdagangan transnasional, serupa yang diserukan oleh para penentang perdagangan bebas beserta organisasi WTO dan perjanjian perdagangan dunia lainnya. Perdagangan bebas seperti itu pada dasarnya berusaha menyingkirkan halangan-halangan non-tarif seperti birokrasi yang panjang, persoalan hak buruh; mengalahkan negara-negara yang proteksi mereka menghalangi kebebasan dan biaya perusahaan-perusahaan kerena politik proteksi dan regulasi yang melindungi kekayaaan lokal dan perusahan skala kecil dan komunitas lokal, lingkungan dari kehancuran.

[269] Harian *Singgalang*, Rabu 21 Januari 1998.

Semakin banyaknya pertambangan rakyat/liar tentu bukan hanya masalah Pemda Sawahlunto dengan PT BA-UPO, melainkan juga menjadi masalah seluruh warga kota. Bagi masyarakat penambang liar merupakan jawaban atas berlangsungnya krisis moneter, namun ia akan mengakibatkan kerugian pada PT BA-UPO dan Pemda kota Sawahlunto serta kian merusak lingkungan, sebab usaha itu tidak terkontrol. Usaha itu sendiri juga tidak bisa menjamin keselamatan dan kesehatan masyarakat karena dilakukan dengan peralatan yang begitu sederhana.

Penambangan oleh rakyat memang memberikan solusi ekonomi untuk sementara waktu dan sebahgian orang tetapi sesungguhnya juga mencemaskan banyak orang akan terjadi berbagai kerusakan lingkungan. Penambangan rakyat hanya menggunakan alat, pacul, linggis dan membuat terowongan bawah tanah dengan alat-alat penyanggah sederhana. Sewaktu-waktu bisa datang longsor dan pekerja tersebut tertimbun. Pengalian, apa lagi mencapai 20 meter akan rawan akan runtuhan. Selain itu penambangan liar, walaupun menggarap lahan mereka sendiri tetapi juga menghakibatkan penggundulan hutan, seterusnya mengakibatkan masyarakat setempat kekeringan air, dan lahan-lahan pertanian akan kekeringan.

Usaha penambangan rakyat juga telah mengundang masyarakat luar kota sawahlunto untuk masuk sebagai cukong/toke maupun penadah. Cukong/toke dan penadah bagaimanapun mendapat keuntungan jauh lebih besar dari masyarakat penambang. Biasanya penambang hanya mendapat sekitar Rp.13.000 sampai Rp.15.000,- per ton , sementara cukong dan penadah bisa mendapatkan 4

sampai 8 kali lipat dari jumlah tersebut.[270] Para cukong yang begerak dalam penambangan liar batu bara itu berada di bawah perusahaan besar, mereka menyalurkan ke PT Semen padang. Meneurut keterangan Pemda sawahlunto ada sekitar sembilan perusahaan besar yang mengambil keuntungan dari penambangan rakyat..[271] Jadi keuntungan ekonomis diinginkan masyarakat setempat justru akan banyak dibawa keluar daerah lewat perusahaan-perusahaan besar tersebut, sementara lahan-lahan di daerah sawahlunto bisa saja akan mengalami kebangkrutan pada masa berikutnya, karena kehabisan batubara.

Bagaimanapun persoalan masyarakat kota sawahlunto adalah mencari katub pengaman dalam krisis moneter, kecemburuan karena kurangnya perhatian pemerintah kota dan PT BA-UPO. Dari angka perkiraan ada sekitar 3000 KK yang menambang secara liar, yang tentu setiap KK mempunyai anggota keluarga. Jadi diperkirakan ada sekitar 6000-12000 orang yang menggantungkan hidupnya dengan tambang liar.[272] Kuatnya tuntutan ekonomi , baik primer dan sekunder tidak mungkin begitu saja mnghentikan penambangan liar. Karena itu pantas jika Pemda- PT BA-UPO memikirkan masalah itu dengan serius dan matang. Sebab bila hanya masyarakat dipaksa untuk menghentikan kegiatan penambangan maka akan ada *negative social effect*-nya bagi

[270] Harian *Haluan* 9 Sepetember 1998.

[271] Harian *Singgalang* 14 Agustus 1998.

[272] Harian *Singgalang*, Senen 21 September 1998.

pertumbuhan kota. Jadi masalahnya bukan sekedar menghentikan, tetapi memberikan katub pengaman sosial ekonomi lain untuk kemajuan masyarakat kota.

Semakin maraknya penambangan liar dan kian seriusnya konflik antara penambang liar dengan PT BA-UPO mau tidak mau juga melibatkan pemerintah. Eskalasi konflik itu meningkat saat pihak PTBA mencoba menghentikan penambang liar seperti yang pernbah terjadi di Talawi pada akhir bulan Mei 1998. Masalah itu menjadi sorotan langsung dari DPRD kota Sawahlunto, karena otomatis telah meningkatkan pengangguran tenaga produktif. Ini tentu berhubungan erat denga kelangsungan ekonomi masyarakat..[273]

Pada pertengahan tahun 1998 masalah penambangan rakyat (penambangan tanpa izin/ penambangan liar menjadi masalah kota yang mengemuka di ringkat masyarakat maupun pemerintahan. Masyarakat dan elit pemerintahan mencemaskan kegiatan penambang tersebut, bahkan dengan ungkapan yang tajam mengatakan bahwa penambangan liar mengakibatakn "kota Sawahlunto akan tinggal sejarah". Itu tentu berhubungan dengan kehancuran ekologi dan eksploitasi batu bara yang tidak diatur secara baik. Pemerintah kota sendiri dirugikan secara ekonomi, sebab iuran dan retribusi yang selama ini mengalir ke PAD sudah berkurang. Pemda Sawahlunto sendiri mendapat masukan sekitar 2,5 milyar setahun. Penambangan liar juga akan mengancam sebelas jenis

[273] Harian *Singgalang* 1 April 1998.

masukan ke kas Negara yang selalu dibayarkan PT BA-UPO, yang pada tahun 1997 ada sebesar Rp.16 milyar.[274]

Untuk meredakan gejolak penambang liar sekaligus mencari solusi atas kian banyaknya pengangguran di kota Sawahlunto maka PT BA-UPO merekrut lebih kurang 74 orang pekerja tambang rakyat di Kecamatan Talawi sawahlunto, yang kegiatan penambangan mereka di dihentikan,. Mereka dikontrak selama satu bulan. Gaji mereka Rp.7.500, -per hari, ini tentu jauh di bawah pendapatan harian mereka jika beklerja sendiri.[275]

Pemda Kota Sawahlunto dengan serius telah berusaha menyelesaikan konflik antara PT BA-UPO dengan masyarakat penambang. Walikota Subari Sukardi, tahun 1998 menjanjikan penyelesaian maaslah yang berpihak kepada rakyat., dengan tidak menghalalkan penambangan liar yang merugikan banyak pihak. Karena iotu perlu adanya kerjasama lokasi denmgan KUD-KUD yang ada, dan KUD sebagai pengelola dilapangan akan menghubungkan masyarakat dengan PT BA-UPO. Dengan begitu batu bara tidak akan dilempar murah ke pasaran atau penadah. Untuk penyelesaian itu sesungguhnya Pemda kota Sawahlunto sudah mengusahakan sejak tahun 1997 agar tanah-tanah ulayat yang dikelola oleh PT BA-UPO itu bisa juga memberi manfaat kepada masyarakat, dan jumlah kawasan pertambangan PT BA dikurangi dan diganti dengan sistem sewa. Setelah penambang selasai, diharapkan PT BA-UPO bisa mengadakan reklamasi

[274] Harian *Singgalang*, 14 Agustus 1998.

[275] Harian *Singgalang* 11 April 1998

terhadap lokasi bekas tambang. Sistem demikian diharapkan oleh Pemda bisa menurunkan tensi masyarakat dan harapan masa depan mereka. Selain itu Pemda juga mengharapkan agar PT BA-UPO mau menyumbangkan sebahagian atau 1000 ton pertahun (1 milyar rupiah) dari keuntungan mereka untuk kepentingan pembangunan nagari[276].

Pada tanggal 10 September 1998 terjadi unjuk rasa besar-besaran, 200 orang lebih penambang liar. Unjuk rasa itu muncul karena beredarnya rumor mengenai akan dilarangnya penambangh liar oleh PT BA-UPO di wilayah Sawahlunto. Kabar itu telah membangkitkan kegelisahan dan kemarahan masyarakat penambang liar. Adanya unjuk rasa itu Pemerintah kota Sawahlunto telah mengerahkan satuan pengamanan untuk menjaga kemungkinan di kantor PT BA-UPO. Pada tanggal 10 Sepetember 1998 unjuk rasa itu dapat diredakan dengan dibicarakannya masalah itu secara bersama antara Walikota Sawahlunto, Kapolres Sawahlunto, Dandim 0310 dan Kepala Tambang Ombilin PT BA-UPO Sawahlunto , ninikmamak dan jajaran Muspika Talawi dan wakil pengunjuk rasa.[277]

Dalam kesempatan itu dijelaskan adanya sewa pakai atas tanah ulayat yang dimanfaatkan oleh PT BA-UPO. Tanah ulayat tersebut pada masanya tetap diakui keberadaanya dan dikembalikan ke yang punya ulayat. Selain itu juga disepakai antarala lain, PT BA-UPO masih memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk

[276] Harian *Haluan* 2 September 1998.

[277] Harian *Haluan*, 12 September 1998.

menambang batu bara sambil menunggu terbentuknya KUD/koperasi yanga akan mewadahi kerjasama.

Walaupun sudah adanya pemyelesaian sementara terhadap tambang lir, pihak PT BA-UPO dan pemerintah kota masih merisaukan mengenai tambang liar yang kian hari semakin bermunculan. Apalagi pada pertengahan September tambang liar menimbulkan korban kematian dan tertimbun. Tragedi itu menjadi momen yang agak tepat kembali bagi pemerintah dan PT BA-UPO untuk menghentikan pertambangan liar. Pembicaraan itu kian intensif, tidak saja antara PT BA-UPO dengan pemerintah kota Sawahlunto tetapi juga dengan Pemerintah Sumatra Barat.. PT BA-UPO dan Pemda menggagas kembali untuk mengorganisisr para penambang liar itu dan mengarahkannya ke koperasi. Pola itu sebenanrnya menguntungkan kedua pihak bukan saja penambangliar tetapi juga PT BA-UPO. Jika penambang liar terus dibiarkan dengan menjual hasil eksploitasi mereka dengan murah ke agen, seperti PT Yasiga, terus ke PT Semen Padang, tentu juga akan berakibat ruginya, bahkan hancurnya, PT BA-UPO. Bila PT BA–UPO benar-benar tutup maka ribuan tenaga kerja yang ada di sana akan menganggur dan pendapatan daerahn yang sekitar 3 milyar per tahun akan hilang. Maka merealisasikan KUD adalah pilihan terbaik, sekaligus membebaskan penambang rakayat dari system ijon yang merugikan. [278]

Namun pertengahan minggu ketiga bulan September kota Sawahlunto kembali mencekam Karena

[278] Harian *Singgalang*, 16 September 1998.

adanya usaha pasukan Brimob untuk menghentikan paksa usaha penambangan liar. Masyarakat banyak yang tidak berani keluar rumah, dan jalanan menjadi sepi. Tim terpadu PT BA-UPO turun ke lokasi penambangan untuk menghentikan penambangan liar tersebut. Sementara PT BA-UPO mengemukan akan ancaman bahaya gasa methan CH-4 dan gas CO yang kabarnya bisa membakar kota Sawahlunto. Isu itu membuat sebahagian besar warga, terutama penambang menjadi ketakutan. Isu itu nyaris membuat sebahagian masyarakat kota mengungsi ke kota terdekat seperti Solok. [279]

Menurut keterangan, gas ledak methan serta gas beracun CO itu ada di tambang dalam. Untuk mencegah peledakan gas beracun itu maka harus dijaga jangan sampai bersinggungnya dengan bekas tambang zaman Belanda, sebab persinggungan pertemuan lobang baru dan lama itu akan memuncuilkan gas berbahaya itu. Karena itu perlu untuk menggunakan peralatan teknis yang lengkap untuk melakukan penambangan.[280]

Adanya KUD, seperti yang sudah disepakati pada bulan April yang kemudian disetujui juga oleh Gubernur Sumatra Barat itu dianggap sebagai penyelesaian yang cukup memuaskan Sebab dengan adanya KUD hadir sebagai rekanan maka dengan sendirinya penambangn liar akan hilang. Para penambang tentu akan lebih senang bekerja dengan KUD sebab harga batu bara yang disalurkan lewat KUD juga lebih tinggi dibandingkan

[279] Harian *Singgalang* 21 September 1998.

[280] Harian *Singgalang*, 21 September 1998.

dengan harga yang diberikan oleh agen-agen liar. KUD juga akan memberikan pembinaan secara teknis dan melindung para pekerja dari bahaya yang nmungkin terjadi ketika penambangan. Dalam hal itu tentu KUD juga akan berusaha pekerja dalam peralatan kerja, sebab ada saatnya pekerja harus menggunakan alat-alat yang agak baik, sehingga penggalian bisa dilakukan dengan lebih mudah[281].

Pada Jumat 2 Oktober 1998 pertambangan batu bara secara tradisional mulai ditertibkan oleh Tim Terpadu Pemda, PT BA-UPO, Kodim serta Polres Sawahlunto. Lokasi yang ditertibkan itu adalah lokasi penambangan Rantih, Gunjo, Sawah rasau, Plat tangah, Langkok, Kelok Macan, Sungai Durian dan Waringin. Lokasi itu diblokir. Dalam kesepakatan yang sudah ditandatangani pada tngal 28 September 1998, daerah-daerah tersebut akan dikelola oleh koperasi dan masyarakat penambangnya akan bergabung dengan KUD-KUD yang dibentuk seperti KUD Talawi, Koperasi Sijantal (Sijantang Talawi). Masing koperasi akan ditetapkan wilayah kerjanya.[282]

Pada tanggal 17 Nopember 1998 telah dapat direalisasikan penandatanganan kerjasama KUD Talawi dengan PT BA-UPO. Penandatanganan kerjasama itu tentu diharapkan mampu untuk meningkatkan keuntungan semua pihak. Semulanya harga berkisar Rp.13.000,-

[281] Alamsyah Halim,, "" Peti" akan Hilang Bila KUD Talawi Tampil ke Depan", Harian *Haluan* , 1 Nopember 1998.

[282] Kesepakatan ini sudah disepakati oleh masyarakat penambang. Harian Singgalang, 7 Oktober 1998.

15.000,-/ton maka dengan adanya koperasi itu bisa dibayar Rp. 40.000,-/ ton yang dibayarkan setiap 1000 ton, dengan perkiraan kemampuan penambang 1 ton/orang/hari. Dari harga yang disepakati itu, maka untung diperkirakan untuk KUD 1.188/ton, pem,ilik ulayat Rp.3000,-/ton, ketua kelompok Rp. 7.500,-/ton, transportasi Rp.5000,- upah penambang Rp. 17.500/ton dan jamsostek Rp.512/ton.[283]

Beberapa kali pada bulan berikutnya pihak pemerintah dan PT BA-UPO kembali mendiskusikan masalah kerjasama dengan masyarakat penambang . Walaupun sudah ada penandatanganan kerjasama sama, namun kenyataannya belum memuaskan kedua belah pihak. Bahkan setelah kesepakatan masih ada demonstrasi dari pihak kelompok penambang. Pada bulan nopember 1998 demonsrasi itu sempat menimbulkan bentrokan fisik serta mengakibatkan luka-luka dan pembakaran mobil. Menurut masyarakat penambang kesepakatan yang menetapkan harga Rp. 40.000,-/ton masih maerugikan penambang. Sebab para cukong-cukong batu bara yang selama ini menetapkan harga rendah menyaingi harga PT BA-UPO dengan menaikkan harga belinya antara Rp. 45.000,-sampai 80.000,-/ton.[284] Menurut informasi gelombang demosntrasi itu sudah digerakkan oleh kelompok tertentu, berdasarkan keterangan dari pihak koperasi, mereka agen-agen batubara yang sudah dirugikan oleh usaha kerjasama antara dengan kelompok

[283] Harian Singgalang, 18 Nopember 1998..

[284] Namun harga real di lapngan tidak sepenuhnya begitu. Sebagain dari jumah itu juga dinikmati oleh pimpinan kelompok.

penambang. Isu demosntrasi ni makin besar setelah munculnya isu bahwa sudah terjadi pemukulan pada masyarakat penambang oleh seorang aparat..[285]

Sejak awal memanasnya konflik antara masyarakat penambang dengan pihak PT BA-UPO sebenarnya masyarakat menyadari bahwa konflik itu adalah ibarat beradunya dua gajah sementara pelanduknya mati di tengah. Setidaknya ada dua pihak yang berebut bisnis itu, yaitu pihak PT BA-UPO yang mempunyai hak kuaasa atas 15.000,- hektar areal tambang batu bara Ombilin dan agen-/pengusaha yang diluar PT BA-UPO yang sudah mengecapi pula manisnya batubara sejak 1998.[286] Munculnya "berbagai gajah batu bara" di luar PT BA-UPO diantispasi oleh pihak pemerintah Sumatera Barat dengan mengeluarkan kebijakan untuk melarang kebijakan ekspor terhadap perusahaan-perusahaan yang tidak mendapat hak kuasa atas batu bara Ombilin.

Sampai bulan Desember 1998 sudah ada tiga kerjasama penandatangan dengan pihak koperasi di Kota Sawahlunto, penggalian dan pengangkutan batu bara dengan KUD Talawi, serta pengangkutan batu bara yang siap angkut dengan KUD Pincuran Batu.[287] Setiap penandatanganan dimediasi oleh pihak pemerintah dengan disaksikan elit masyarakat dan masyarakat penambang.

---

[285] Harian *Haluan*, 21 Nopember 1998.

[286] Harian *Singga;lang* 27 September 1998.

[287] Harian *Haluan* 5 Desember 1998. Pada tanggal 3 Desember sudah dilakukan beberapa kontrak dengan KUD seperti Pincuran Batu dan KUK. Harian *Haluan* 3 Desember 1998.

Bagaimanapun juga, kegiatan seperti itu merupakan usaha baru dalam menenangkan masyarakat sekaligus mendistribusikan hasil keuntungan ekonomi dari tambang batubara Ombilin ke masyarakat. Selanjutrnya pihak pemerintah menyatakan akan terus mendorong kerjasama KUD-KUD dengan PT BA-UPO.

Banyak pihak memang melihat kerjasama dengan KUD itu adalah jalan terbaik. KUD selain memberikan perlindungan dan pembinaan teknis bersama PT BA-UPO juga akan mempertimbangkan kesejahteraan para penambang. Hal itu berbeda dengan sistem ijon atau lewat penadah, yang biasanya masyarakat menerima uang terlebih dahulu kemudian masyarakat penambang berhutang dan penadah atau agen bisa sekehendak hati untuk melakukan harga, menaikkan maupun membantingnya dengan rendah.[288]

Dari berbagai sumber kelihatan menajamnya konflik antara PT BA-UPO dengan pertambangan liar berakar pada berbagai permasalahan. Adanya kebutuhan ekonomi masyarakat yang kian beragam, sementara kesempatan dan pembangunan masyarakat berjalan lamban. Lambannya pembangunan bisa kita lihat antara lain masih adanya desa tertinggal tidak beberapa jauh dari pusat kota. Sementara pada sisi lain kota sawahlunto merupakan produser batubara yang hasilnya milyaran rupiah diekspor ke luar daerah tersebut sejak zaman kolonial. PT BA-UPO menggarap batu bara di atas tanah ulayat nagari, sementara kesempatan yang diberikan

[288] Harian *Singgalang*, 30 Desember 1998.

kepada masyarakat relative sedikit. Memang ada bahagian yang diberikan ke masyarakat kota lewat pemerintah, tetapi geliat pembangunan masyarakat dan kota tidak seimbang dengan produksi batubara itu sendiri. Pada lain hal masalah yang muncul adalah kerusakan lingkungan dan menebarnya abu batubara ombilin yang juga meningkatkan penyakit ISPA, atau radang saluran pernafasan. Penyakit ini tetap yang tertinggi kualitasnya setiap tahun di kota sawahlunto. Jadi permasalahan lahan ekonomi menjadi, kecemburuan akan keuntungan yang dibawa oleh orang luar menjadi inti yang selalu mengemuka.

Pada pihak lain, penjualan langsung batu bara dari masyarakat penambang ke PT Semen Padang juga menimbulkan kecemasan bagi karyawan, sebab bisa membangkrutkan PT BA-UPO. Akibatnya yang mereka takutkan adalah terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran di perusahaan batu bara tersebut. Karena itu pada tanggal 14 September 1998 sebanyak 10 orang perwakilan karyawan PT BA-UPO menemui Wali Kota Sawahlunto, Drs. Subari Sukardi. Mereka mendesak agar secepatnya didorong realisasi pendirian KUD-KUD yang akan bekerja sama dengan pihak PT BA-UPO.[289]

Penyelesaian yang terlihat sejak tahun 1998, sesungguhnya sudah mulai memasuki ruang-ruang nafas ekonomi rakyat, namun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah memang sedang menurun sejalan dengan arus pemerintahan pusat yang sentralistis dan sedang

[289] Harian *Singgalang*, 22 September 1998.

dipertanyakn di mana-mana. Masyarakayat juga sedang merasakan arus otonomi, desentralisasi dan eforia kebebasan. Mereka sedang mencari kesempatan untuk memperjuangkan social ekonomi mereka yang selama ini terasa terbungkam oleh arus pemerintahan otoriter yang berhembus dari pusat kekuasaan.

Arus reformasi sosial, ekonomi dan politik yang sedang berkembang bertepatan juga dengan arus pasar yang semakin terbuka, produk luar yang datang secara beragam dan kebutuhan tinggi ekonomi meningkatkan keinginan penguasaan lahan-lahan ekonomi. Kondisi seperti ini, yang sering disebut dengan globalisasi, memasuki wilayah-wilayah kehidupan masyarakat. Rayuan sosial ekonomi berupa kenikmatan barang-barang mewah, kebutuhan akan pendidikan menjadi kekuatan yang menarik masyarakat untuk bertindak secara ekonomis dan cepat. Dalam kondisi seperti itu rasionalitas memang mengemuka dibandingkan dengan kespritualan. Sehingga tindakan-tindakan mengambil lahan-lahan ekonomis batu bara, yang juga secara rasional mereka pikir adalah warisan atau ulayat mereka, dirasionalisakan dan diaktualisasikan. Himbauan-himbauan apapun dari pemerintah- PT BA-UPO memang sulit dipahami masyarakat, karena mereka melihat realitas dan tatanan masa lalu yang sudah mereka patuhi ttidak memberikan keuntungan yang berarti bagi kehidupan merekat.

Konflik PT BA-UPO dan masyarakat penambang tampaknya sejak tahun 1998 terjadi gelombang naik dan turun. Itu menunjukkan adanya perpacuan antara rasionalitas ekonomi dan keinginan untuk berdamai.

Namun gerakan masyarakat penambang bisa muncul sewaktu-waktu, tidak hanya menggarap hak Kuasa Penambang (KP) PT BA-UPO tetapi juga muncul sebagai demonstrasi yang cukup besar. Kondisi itu dalam berbagai sumber bisa dibaca karena adanya pihak kepentingan yang bermain, mungkin elit politik dan ekonomi. Kunjungan anggota MPR-RI pada minggu akhir Desember 1998 mengapungkan permasalahan ini bersama pemerintahan kota Sawahlunto. MPR-RI kepada pemerintahan Sawahlunto mempertanyakan mengenai adanya KP dalam KP pada areal tambang batu bara PT BA-UPO yang dilakukan oleh pengusaha asing dan dilindungi oleh seorang mantan pejabat pusat. Sementara itu beberapa pengusaha diberikan izin untuk mengarap batubara di Sawahlunto sedang masyarakat setempat tidak diizinkan.[290] Membaca permasalahan itu tentu menggiring inferensi ke masalah lain di tingkat elit pemerintahan di Sawahlunto saat itu. Hal-hal yang menjadi pertanyaan yaitu kenapa ada beberapa perusahaan yang bisa leluasa mengangkut batubara dari Sawahlunto.

Pada pihak lain mitra, Semen Padang secara tak langsung juga mendorong pengusaha-penguasaha yang tidak mempunyai KP di sawahlunto untuk mengeksploitasi batu bara di Sawahlunto. Semen Padang menyatakan enggan membeli batu bara ke PT Bukit Asam sebagai induk TBO, sebab perusahaan itu menjual dengan dollar Amerika Serikat. Ini akan merugikan Semen Padang yang

[290] Harian *Haluan*, Sabtu 26 Desember 1998.

dijual ke masyarakat dengan rupiah.[291] Semen Padang merasa beruntung membeli dari pertambanmgan rakyat yang disalurkan oleh cukong-cukong. Di sini tampak adanya gejala pembangkrutan terstruktur terhadap perusahaan-perusahaan daerah, dan tidak adanya aturan kerjasama dan koordinasi atas perusahaan daerah oleh pemerintah.

Perjalanan panjang selama lebih satu abad penguasaan batu bara Ombilin oleh TBO (baik di bawah penguasaan pemerintah kolonial Belanda maupun oleh pemerintah Indonesia) kemudian menjadi sirna. Jika Sejak zaman Belanda sampai zaman Orde Baru, pengelolaan batu bara hanya berada dalam satu tangan, yaitu TBO, maka sekarang diambil oleh banyak pihak, baik penduduk asli maupun pendatang.[292] Setiap orang yang mau terlibat dalam bisnis, dapat saja menanamkan modalnya. Pada gilirannya, bermunculanlah ribuan tambang rakyat di berbagai tempat di sekitar Sawahlunto. Dominasi TBO menjadi hilang, salah satu buktinya adalah selama ini kalau kereta api sebagai pengangkut batu bara dipergunakan oleh TBO, maka penambang rakyat itu menggunakan truk. Puncaknya adalah ketika TBO harus mengalah dan

[291] PT Bukit Asam membeli batu bara ke pertambangan rakyat seharga Rp.27.000,- /ton sedangkan PT Yasiga Sarana Utama, anak PT Semen Padang membeli seharga Rp.60000/ton. Ini jauh lebih untung jika membeli langsung ke PT BA. Harian *Haluan* 27 Juli 1998.

[292] Sebenarnya, penduduk asli Sawahlunto sekitarnya juga kebanyakan hanya menjadi pekerja saja, sedangkan pemilik modal tetap saja dari luar. Beberapa kasus seperti PT Minang Malindo yang terlibat dalam bisnis batu bara ini memperlihatkan bukti nyata dari persoalan itu.

dikalahkan, kemudian ditandai dengan berakhirnya angkutan kereta api,[293] sebagai pengangkut utama batu bara ke Padang. "Tak ada lagi kereta api ke Padang yang akan lewat" membawa batu bara dari Sawahlunto ke Padang, setidaknya itulah bukti nyata dari bangkrutnya perusahaan tambang yang begitu megah dan jayanya sejak zaman kolonial Belanda .[294] Sejak tahun 2002, simbol kejayaan batu bara, sekaligus penjajahan Belanda di Sumatera Barat kemudian berubah menjadi monumen sejarah.[295]

---

[293] Sejak berdirinya TBO, tiga komponen penting yang saling terkait yaitu Tambang Batubara Ombilin, Kereta Api dan pelabuhan Emmahaven (Teluk Bayur). Bahkan, dalam Verslag, kereta api dan tambang batu bara sejalan ditulis seperti *Verslag van den Staatsspoorweg Sumatra`s Westkust en van de Ombilin Mijnen over 1917*.Rusli Amran menamakannya *Tiga Serangkai*, yaitu tambang batu bara Ombilin, kereta api dan pelabuhan Emmahaven. Rusli Amran, *Sumatera Barat Plakat Panjang***.** Jakarta: PT Sinar Harapan, 1981, hal. 303 – 315.

[294] Sejak Juni 2002, kereta api yamg membawa batubara dari Sawahlunto ke pelabuhan Telukbayur Padang berhenti beroperasi secara total. Semua angkutan batubara dialihkan dengan menggunakan truk. Surat kabar *Mimbar Minang*, Juni 2002

[295] Studi yang mendalam tentang batu bara Ombilin ini telah dilakukan oleh Erwiza Herman, melalui disertasinya yang berjudul Erwiza Herman, *Miners, Managesr, and the State : A Socio-poitical History of the Ombilin Coolmines, West Sumatra.* PHD.Diseretation. Amsterdam : University of Amsterdam, 1999.

BAB VII
NUANSA KOTA BUDAYA SAWAHLUNTO

KOTA Sawahlunto bagaikan sebuah "kanvas" yang di dalamnya tergambar masa lalu, masa kini dan juga masa depan, dan semua mulai kelihatan dengan jelas. Tidak banyak kota di Indonesia yang mampu memelihara warisan masa lalunya (*heritage*), dan menghidupkannya kembali dalam semangat kekinian. Bahkan melengkapinya pula dengan berbagai prasarana baru, yang menyebabkan kota ini pantas dikunjungi sebagai salah satu daerah tujuan wisata di Sumatera Barat, yang berdimensi sejarah dan budaya. Masa depan kota Sawahlunto semakin mantap sebagai salah satu kota budaya dan wisata.

Di tengah maraknya semangat membangun mall-mall diberbagai kota di Indonesia, Kota Sawahlunto justru sebaliknya. Bangunan-bangunan tua yang merupakan warisan perusahaan tambang batubara yang dibangun Belanda sejak akhir abad ke 19, direnovasi kembali. Dijadikan museum, dan diupayakan setiap mata rantai sejarah kota ini disambungkan kembali dari waktu ke waktu. Sekarang, ada empat museum di kota tempat kelahiran cendekiawan besar Soedjatmoko ini, yaitu Museum Goendang Ransoem, Museum Situs Lobang

'Mbah Soero' dengan Galeri Tambang Infoboxnya, kemudian Museum Kereta Api dan terakhir Museum Tambang Batubara Ombilin: Pusat Dokumentasi dan Arsip PT BA-UPO. Keempat museum ini dengan sangat nyata memperlihatkan fakta-fakta yang kongrit tentang sejarah kota tersebut. Museum ini seperti menjadi saksi sejarah tentang kota Sawahlunto, terutama sejak akhir Abad ke 18.

Tidak hanya warisan gedung-gedung tua yang dipelihara, tetapi juga budaya multikultur (*cultural heritage*) yang hidup di dalam masyarakat Kota Sawahlunto, juga diapungkan dan dikelola dengan cara yang bijak. Masyarakat Sawahlunto yang berbilang kaum tersebut, juga menjadi salah satu daya pikat kota ini. Hal ini dapat dilihat dari semaraknya kehidupan seni-budaya dari berbagai suku bangsa di kota tersebut. Berbagai komunitas etnis, yang menjadi bagian dari sejarah, kebudayaan dan masyarakat Sawahlunto, tetap tumbuh dan berkembang dengan baik. Semuanya saling bertintegrasi dalam kehidupan budaya yang dinamis. Ada komunitas masyarakat Batak, ada komunitas masyarakat Sunda, ada Jawa, bahkan masyarakat Tionghoa, di samping komunitas masyarakat Minangkabau sebagai kelompok mayoritas. Bahkan mereka juga saling mempengaruhi dan saling berbagi berbagai kearifan budaya yang dimiliki, misalnya tumbuhnya bahasa lokal yang khas Sawahlunto, yang disebut bahasa *tangsi*.

Sebuah mata rantai, bahkan banyak mata rantai sejarah telah tersambung kembali di Kota Sawahlunto. Mata rantai masa lalu dengan mata rantai masa kini, dan juga secara bertahap mata rantai masa depan juga telah

mulai dikerjakan. Di Kota Sawahlunto, kita mungkin akan dapat menyaksikan, bagaimana keterputusan sejarah bangsa yang sedang melanda, dapat dipatrikan kembali. Dan semuanya terjadi di tengah hiruk pikuk "pembangunan" kota-kota di Indonesia yang kurang memberikan tempat pada keberlanjutan sejarah. Kota Sawahlunto seperti memberikan pesan pada kita semua, mata rantai sejarah tidak harus terputus ketika sebuah kota dibangun dan dikembangkan kembali. Seyogianya kemajuan sebuah kota, juga harus memberi ruang pada masa lalu, masa kini dan juga masa datang. Pesan tersebut terlihat dan terbaca dengan cukup kuat ketika kita berkunjung ke Kota Sawahlunto, yang telah mendapatkan nama sebagai kota heritage dengan tatanan terbaik.

"Menghidupkan" kembali kota yang sudah mulai ditinggalkan penduduknya, karena sumber ekonomi utama kota tersebut yakni batubara habis dan tidak layak lagi ditambang dalam skala ekonomis, bukanlah sebuah pekerjaan yang mudah. Bahkan di awal tahun 2000, kota ini sampai dijuluki sebagai kota "hantu", (*ghost city*), karena berbagai kegiatan ekonomi yang hiruk pikuk oleh keberadaan penambangan batubara menjadi sepi, dan kegiatan ekonomi dan sosialpun nyaris lumpuh. Namun terobosan demi terobosan yang dilakukan kota itu, telah menyelamatkan bahkan mengantarkan kota tersebut menjadi salah satu kota dengan percepatan pembangunan yang luar biasa. Berhasil menekan angka kemiskinan dalam jumlah yang cukup besar, dari 17,18 persen pada 2005 menjadi 2,41 persen pada 2009. Keberhasilan ini menempatkan Sawahlunto sebagai kota nomor dua terkecil

jumlah penduduknya miskin di Indonesia setelah Denpasar. Tahun 2005 penduduk miskin tercatat 2.290 kepala keluarga dari total 13.256 kepala keluarga. Sedangkan 2010 hanya tanggal 373 kepala keluarga.

Bukan hanya itu, Kota Sawahlunto juga dikenal sebagai kota yang mendahului banyak kota lain di Sumatera. Kota Sawahluntolah yang pertama membuat *waterboom*, sebuah sarana publik yang mengundang banyak kalangan datang ke kota ini. Kemudian juga ada sarana *road-drace*, yang menjadi tempat pembalap untuk menguji kehandalan dan kelihaian mereka dalam menunggang motor. Juga ada lapangan pacu kuda dengan standar untuk kejuaraan nasional, dan juga ada *dreamland* Sawahlunto, yang merupakan kawasan yang dihijaukan kembali di daerah bekas tambang batubara. Kesemuanya merupakan sarana modern yang saling mengisi dalam menjadikan Kota Sawahlunto sebagai kota wisata yang pantas dan penting untuk dikunjungi. Berbagai fasilitas hiburan ini menjadikan kota Sawahlunto terdepan sebagai kota rekreasi di Sumatera Barat, bahkan di Sumatera.

Banyak julukan yang kemudian melekat dengan kota Sawahlunto, seperti kota *heritage* (sejarah) kota multikultur, kota even (*confrence*) kota kreatif dan kota festival, kota rekreasi. Bahkan juga dikenal sebagai daerah sentra penghasil produk pertanian seperti coklat dan karet. Kesemuanya itu merupakan bagian dari sejarah baru yang muncul paska tambang batubara, sehingga kota yang sebelumnya dikenal sebagai kota arang berubah dengan cepat. Sektor pariwisata yang masa sebelumnya sulit dibayangkan akan berkembang di Sawahlunto, karena

letaknya yang tidak begitu strategis, ternyata mengembangkan dirinya menjadi menjadi destinasi wisata yang penting di Sumatera Barat. Ratusan ribu wisatawan setiap tahun, terutama wisatawan domestik berdatangan ke Kota Sawahlunto.

A. Sawahlunto Paska Tambang Batubara

Di penghujung abad ke 20, issu tentang menipisnya cadangan batubara di kota Sawahlunto semakin menguat. Hal ini menimbulkan keresahan warga termasuk juga Pemerintah Kota. Sebabnya tidak lain, tambang batubara selama satu abad telah menjadi sumber utama kehidupan ekonomi kota Sawahlunto, denyutnya akan segera berhenti. Di penghujung abad ke 20 tersebut, kebetulan yang menjadi walikota adalah Subari Sukardi (1993-2003), seorang pamong yang memiliki visi yang jauh ke depan. Selaku Walikota, Subari Sukardi kemudian melakukan berbagai pengkajian, pertemuan dan pendekatan ke berbagai pihak. Termasuk juga menghimpun berbagai pendapat dari kalangan masyarakat demi mewujudkan pembangunan yang partisipatif. Agenda utamanya adalah mencari solusi untuk kota Sawahlunto paska ditutupnya tambang batubara.

Hasil dari berbagai pengkajian dan diskusi dengan berbagai pihak tersebut, munculnya ide menjadikan kota bekas tambang batubara tersebut menjadi daerah tujuan wisata sejarah dan budaya. Ide ini kemudian dituangkan dalam sebuah visi dan misi Kota Sawahlunto 2020, yakni mewujudkan Kota Sawahlunto **Menjadi Kota Wisata**

Tambang Yang Berbudaya.[296] Visi ini pada prinsipnya ingin memanfaatkan dan mengembangkan seluruh potensi kota, terutama warisan sejarah tambang tersebut menjadi kekuatan pariwisata. Visi misi ini kemudian dituangkan ke dalam Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 02 Tahun 2002.

Subari Sukardi kemudian digantikan Amran Nur (2003-3013). Amran Nur adalah seorang pengusaha dari Jakarta asal Talawi. Amran Nur memiliki latar akademik yang kuat, lulusan Institut Teknologi Bandung, dan seorang yang memiliki pengalaman dalam dunia usaha. Kemampuan dan pengalaman Amran Nur menjadi modal yang cukup untuk melakukan terobosan, karena ia juga punya keberanian, dan inovatif, serta memiliki jaringan yang kuat secara nasional. Amran Nur kemudian mengembangkan kota Sawahlunto, yang pada awal tahun 2000-an tersebut mulai dijuluki dengan "kota hantu". Istilah "kota hantu" ini muncul karena kota ini mulai lengang. Ditambah lagi dengan pertumbuhan penduduk yang minus karena cukup banyak yang meninggalkan kota tersebut, tersebab tak ada lagi sumber pendapatan ekonomi yang memadai di kota tersebut.

Berbagai cara ditempuh oleh Pemerintah Kota selama sepuluh tahun di bawah kepemimpinan Walikota Amran Nur (2003-2013). Mulai dari memajukan pertanian, perkebunan, peternakan yang kesemuanya merupakan gerakan pembangunan yang bersifat inovatif. Pemerintah

[296] Lihat lebih jelas Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 02 tahun 2001.

kota membagikan sekitar 1.2 juta bibit coklat dan sekitar 300 ribu bibit karet, serta juga mendorong inovasi baru dalam peternakan dan jenis tanaman produktif lainnya. Dalam waktu pendek, Kota Sawahlunto menjadi salah satu sentra penghasil coklat di Sumatera Barat, dan perkebunan karet yang umumnya ditanam di bekas lahan pertambangan sudah pula memberikan tambahan pendapatan yang cukup signifikan pada masyarakat. Sedangankan untuk kawasan kota lama Sawahlunto, Amran Nur juga berhasil merubah wajah kota menjadi kota heritage (*heritage city*) yang tertata dengan rapi.

Apa sesungguhnya yang dilakukan Amran Nur, terutama dalam mewujudkan visi Kota Sawahlunto sebagai Kota Wisata yang Berbudaya? Dalam membangun kota Sawahlunto, Amran Nur membaginya menjadi tiga zona pengembangan. Wilayah pertama adalah zona kota lama, kedua zona resort kawasan wisata Kandi, dan ketiga zona pintu gerbang. Ketiga zona ini dibangun secara bersamaan yang terintegrasi satu sama lainnya, sehingga masing-masing zona dapat saling mendukung untuk menjadikan kota Sawahlunto sebagai kota wisata tambang, sesuai dengan visinya yang tercantum dalam Perda No. 2 Tahun 2002.

Zona Kota Lama

Kota lama Sawahlunto merupakan sebuah kawasan cekungan yang dikelilingi tebing-tebing curam, yang luasnya sekitar 130 hektar. Kawasan kota lama ini merupakan kawasan utama penambangan batu bara. Di kawasan ini difungsikan antara lain pusat perkantoran dan

fasilita tambang, lobang tambah, stasiun kereta api, pasar dan pemukiman dari sebagian besar masyarakat yang bekerja di sektor pertambangan. Berbagai fasilitas yang ada di kota lama ini masih tetap berfungsi, kecuali kegiatan penambangan di lobang *Mbah Soero*, namun sejak kegiatan penambangan berhenti, kota ini menjadi kusam dan beberapa fasilitas publik tidak terurus dengan baik. Bangunan-bangunan tua gaya kolonial terlihat kusam. Itulah yang kemudian yang direnovasi dan dikembangkan kembali oleh Pemerintahan Kota Sawahlunto.

Salah satu gedung atau kawasan bersejarah yang direnovasi dan dikembangkan adalah kawasan Goedang Ransoem. Goedang Ransoem didirikan tahun 1918, dan difungsikan sebagai dapur umum. Dapur umum ini merupakan dapur memasak makanan untuk memenuhi kebutuhan makan ribuan pekerja tambang dan rumah sakit. Kawasan sejarah Goedang Ransoem terdiri dari terdiri sejumlah bangunan. Bangunan utama adalah tempat memasak, kemudian ada sejumlah gudang, ada menara asap dan sumber energi (*steam generator*), pelataran yang cukup luas mengelilingi bangunan tersebut. Kawasan Goedang Ransoem ini kemudian disulap menjadi Museum Goedang Ransoem, dan diresmikan pada tahun 2005 oleh Wakil Presiden Yusuf Kalla. Kawasan Goedang Ransoem ini direnovasi utk "dikembalikan" bentuknya seperti semula.

Melalui Museum Goedang Ransoem ini Pemerintah Kota mengumpulkan sisa-sisa artefak atau benda-benda yang berhubungan dengan fungsi awalnya. Ada periuk besar, pemanas air dan benda-benda lain yang

berhubungan dengan alat memasak. Untuk memperkaya khasanah museum, dibuatlah reproduksi foto-foto lama tentang kehidupan di Goedang Ransoem dan Kota Sawahlunto. Juga ada sebuah ruangan multi-media, dan di sana para pengunjung museum dapat menonton film dokumenter tentang kehidupan yang ada di Goedang Ransoem dan Sawahlunto pada masa lalu. Museum Goedang Ransoem dapat dianggap sebagai sebuah mata rantai sejarah Kota Sawahlunto, yang cukup penting yang sebagian besar sejarah peninggalannya masih dilacak kembali.

Bangunan berikutnya yang direnovasi adalah stasiun kereta api, yang dulu berfungsi sebagai stasiun untuk memuat batu bara yang akan diangkut ke Padang. Sejalan dengan tutupnya tambang batubara, stasiun kereta api inipun menjadi tak berfungsi. Stasiun ini kemudian direnovasi dan disulap menjadi Museum Kereta Api Kota Sawahlunto yang diselenggarakan sejak tahun 2005. Di museum ini tersimpan literatur sejarah perkeretaapian di Sawahlunto terutama tentang lokomotif uap yang digunakan pada masa sebelumnya. Di museum ini juga disimpan benda-benda yang berhubungan dengan teknologi kereta api, miniatur lokomotif uap, jam kuno, ketel uap serta diperkaya dengan pemajangan foto-foto lama yang berhubungan dengan kereta apai dan kota Sawahlunto. Di museum ini pengunjung juga bisa menonton film dokumenter tentang sejarah perkeretaapian di Sawahlunto atau Sumatera Barat.

Sehubungan dengan pembuatan museum kereta api ini, salah satu yang paling dramatis adalah pemulangan

kembali lokomotif uap yang merantau ke Ambarawa. Setelah melalui perjalanan yang cukup panjang, akhirnya lokomotif uap yang pernah digunakan pada masa lalu tersebut, akhirnya melengkapi koleksi Museum Kereta Api Sawahlunto. Tidak hanya itu, lokomotif itupun kemudian difungsikan kembali sebagai lokomotif uantu menjalankan kereta api wisata yang menjadi kebanggaan Sawahlunto. *Mak Itam*, itulah nama yang diberikan kepada lokomotif uap tersebut. *Mak Itam* kemudian menjadi salah satu ikon Kota Sawahlunto.

Selain membangun Museum Kereta Api, kota Sawahlunto juga menghidupkan kembali lobang Soegar yang ada di tengah kota lama, yang kemudian lebih populer nama Lobang 'Mbah Soero'. Lobang ini merupakan merupakan lobang awal periode. Pembuatan lobang tambang batu bara ini menyimpan sejarah kelam para buruh tambang yang disebut sebagai *orang rantai*. Orang rantai adalah pekerja yang dibawa Belanda dari Pulau Jawa, dan mereka dipekerjakan dengan paksa sebagai buruh tambang, yang dimandori oleh Mbah Suro. Itu pulalah sebabnya lobang tambang ini dinamakan Lobang Tambang Mbah Suro. Lobang tambang yang sudah puluhan tertutup tersebut, kemudian dibuka kembali oleh Walikota Amran Nur. Sebagian lobang tambah yang lebih dekat ke permukaan dibuka sebagai objek wisata bawah tanah Sawahlunto, dengan sistem pengamanan yang relatif baik. Di depan pintu tambang dibangun sebuah gedung permanen dan dijadikan sebagai Museum Lobang

Tambang[297], yang diisi dengan berbagai artefak dan foto-foto yang menjadi saksi sejarah dari penambangan batu bara di Sawahlunto.

Inisiatif pembuatan museum tidak hanya dilakukan oleh Pemerintah Kota Sawahlunto. Perusahaan Tambang Batubara Ombillin (PTBA UPO) juga menyulap sebuah bangunan tua di tengah kota lama, dan menjadikannya sebagai Museum Tambang Batubara. Lokasinya terletak di ruang publik (taman kota) yang disebut dengan Lapangan Segi Tiga (Lapseg). Lapangan Segi Tiga ini merupakan ruang publik yang paling utama di Sawahlunto. Lapangan ini pada awalnya merupakan pelataran depan kantor utama PTBA UPO, yang kemudian disulap menjadi taman kota yang nyaman. Dari sore sampai malam di taman ini menjadi pusat jajanan kuliner yang dikunjungi masyarakat, baik dari masyarakat kota maupun dari luar kota. Di taman ini dibangun pula sebuah panggung permanen, dan pada hari-hari tertentu digunakan untuk kegiatan pertunjukan kesenian yang terbuka untuk umum. Panggung ini dimaksudkan untuk mengukuhkan Kota Sawahlunto sebagai kota event, yang menjadi salah satu ikon yang terus dikembangkan.

Renovasi gedung tua sebagai bentuk revitalisasi kota tua Sawahlunto, juga dilakukan pada sejumlah bangunan. Salah satunya adalah yang dikembalikan fungsinya menjadi pusat kegiatan masyarakat, yakni Gedung Pusat Kebudayaan. Gedung ini merupakan sebuah aula yang diperuntukan untuk berbagai pertemuan sosial,

[297] Kapan Museum Lobang Tambang Dibuka?

budaya dan kesenian. Pasar kota lama yang disebut dengan Pasar Remaja juga ikut dibenahi. Sejumlah gedung bersejarah juga direnovasi. Di Pasar Remaja ini juga dibangun sebuah pusat rekreasi, yakni Bioskop Empat Dimensi. Sebuah lapangan terbuka hijau di kota lama juga dibangun, yang dinamakan dengan Lapangan Silo. Di Lapangan Silo ini juga sering diadakan kegiatan pertunjukan dan kegiatan lainnya.

Bangunan tua lainnya yang juga ikut direnovasi adalah gedung-gedung tua yang awalnya digunakan sebagai rumah-rumah pejabat Belanda yang bekerja di tambang batubara. Rumah-rumah tua ini kemudian disulap menjadi tempat penginapan yang nyaman. Fasilitas untuk akomodasi juga berkembang dengan baik. Di samping hotel tertua di kota lama, Hotel Ombilin yang terus berbenah, juga telah dibangun oleh Pemerintah Kota Sawahlunto sebuah hotel berbintang, yang pengelolalaanya kemudian dikerjasamakan dengan swasta. Sejumlah homestay juga telah didirikan oleh masyarakat, yang difasilitasi oleh pemerintah, sehingga Kota Sawahlunto sebagai sebuah daerah tujuan wisata siap menampung tamu-tamu dalam jumlah ratusan setiap harinya.

Zona Kawasan Wisata Kandi

Kawasan yang baru dibangun dan dikembangkan adalah kawasan bekas tambang yang terletak di sebelah utara kota lama. Zona ini dinamakan Kawasan Wisata Kandi (Kandih). Kawasan ini sebelumnya merupakan kawasan pertambangan batubara, dengan tekstur tanah yang bervariasi, bahkan ada yang telah menjadi danau

buatan. Kawasan ini kemudian dihijaukan (reboisasi), sehingga telah menyerupai hutan kota. Kawasan dengan luas 400 hektar ini termasuk wilayah Kecamatan Talawi, dan ditetapkan sebagai kawasan wisata dan olahraga.

Kawasan Wisata Kandi sebagian kawasannya telah diperuntukan untuk pembangunan Taman Satwa Kandi, yang selalu ramai dikunjungi pada saat hari-hari libur. Kawasan Taman Wisata Kandi meliputi lahan seluas 5 hektar, dan merupakan taman rekreasi yang cukup unik. Di taman ini selain bisa menyaksikan taman satwa langka (kebun binatang), juga bisa menikmati wisata danau (wisata air) di Danau Kandi, yang letaknya bersebelahan dengan taman satwa. Taman Wisata Kandi diresmikan 1 Desember 2006 Menteri Pariwisata dan Kebudayaan Jero Wacik.

Di kawasan ini pula dibangun fasilitas olahraga, seperti gelanggang pacu kuda dan lapangan pacu motor (road race). Kedua lapangan pacu ini dibangun dengan standar nasional. Gelanggang Pacuan Kuda Kandi yang berada di Kawasan Wisata Kandi berjarak lebih kurang 100 meter dari Taman Satwa Kandi. Gelanggang Pacuan Kuda ini menempati lahan seluas 39,69 hektar dengan track pacuan sepanjang 1.400 m dan memiliki lebar track 20 meter. Gelanggang Pacuan Kuda Kandi, termasuk gelanggang pacuan kuda yang terbesar di Sumatera Barat. Sejak Gelanggang Pacuan Kandi ini dibangun, setiap tahun diadakan pacuan kuda, dan biasanya dilaksanakan pada bulan Desember sebagai bagian dari hari jadi kota yang jatuh tangal 1 Desember. Selain itu telah pula dilaksanakan sejumlah pertandingan pacuan kuda tingkat nasional.

Lapangan pacuan yang juga bertaraf nasional yang telah dibangun di kawasan Wisata Kandi adalah adalah Gelangggang *Road Race*, yang digunakan untuk mereka yang hobi membalap dengan motor. Selain membuat pertandingan (*racing*), gelanggang *road race* ini juga berfungsi sebagai tempat latihan untuk mereka yang hobi balap, terutama untuk anak-anak muda.

Selain berbagai fasilitas tersebut, di kawasan Wisata Kandi ini juga dibangun lapangan untuk camping, yang disebut dengan Camping Ground and Outbond. Di kawasan ini masyarat dapat membuat perkemahan sambil belajar atau menyaksikan berbagai fasilitas rekreaksi yang ada di Kawasan Wisata Kandi. Rencana besar sudah dimulai pembangunannya adalah membangun suatu kawasan yang namanya *Sawahlunto Dream Land*.

Wisata alam dan budaya yang berbasiskan pedesaan juga telah ada di Sawahlunto. Pemerintah kota Sawahlunto mengembangkan Desa Rantih menjadi Desa Wisata, yang jaraknya tidak terlalu jauh dari Kawasan Wisata Kandi. Dipilihnya Desa Rantih sebagai Desa Wisata yang berbasiskan masyarakat tersebut, karena alamnya yang begitu indah. Dikelilingi oleh bukit-bukit hijau, dan persawahan penduduk. Ada Air Terjun bertingkat dan sungai yang mengalir sepanjang desa tersebut. Kehidupan budaya yang masih tetap berkembang di Desa Rantih, juga menjadi potensi wisata yang cukup menarik, seperti musik tradisional, silat dan budaya kuliner. Selain mendorong masyarakat membuat homestay untuk para wisatawan, Pemerintah Kota Sawahlunto juga membangun sebuah kawasan untuk kamping sambil menikmati wisata alam

Desa Rantih.

Zona Pintu Gerbang

Kawasan pengembangan zona wisata terdepan kota Sawahluntu adalah sekitar daerah Muaro Kelaban, yang diposisikan sebagai Pintu Gerbang. Daerah ini terletak di sebelah Selatan Kota Lama, dan posisinya cukup strategis karena terletak di jalur Lintas Sumatera. Selain untuk pintu masuk ke Kota Sawahlunto, zona Pintu Gerbang ini dikembangkan antara lain untuk pusat rekreasi, wisata kuliner, sovenir shop dan lain sebagainya.

Salah satu proyek pembangunan yang cukup fenomenal di kawasan Pintu Gerbang ini adalah pembuatan *water boom. Water boom* adalah sebuah kawasan rekreasi air, yang pertama kali ada di Sumatera Barat. Rekreasi air ini diresmikan pada tanggal 1 Desember 2006. Sejak diresmikan *water boom* ini menjadi salah satu tujuan rekreasi utama, karena dikunjungi dari berbagai daerah di Sumatera Barat, bahkan oleh masyarakat dari provinsi tetangga. Kawasan rekreasi *water boom* ini sepertinya tak pernah sepi, sehingga dikembangkanlah dengan membangun *water boom* tahap kedua, yang jauh lebih nyaman dengan fasilitas yang lebih komplit.

Bersamaan dengan itu, bertambah pula fasilitas untuk wisata kuliner, yang melengkapi sejumlah tempat makan yang ada sebelumnya. Salah satu gagasan yang cukup penting yang telah dibuat di kawasan ini adalah pembangunan rumah tenun dan perkampungan tenun songket. Tenun songket adalah salah satu industri kerajinan yang terkenal sejak lama dari Sawahlunto, yang

disebut dengan tenun songket Silungkang. Di wilayah Pintu Gerbang inilah dibangun rumah tenun dan perkampungan tenun sebagai etalase dari industri kerajinan tenun di Sawahlunto. Rumah tenun dan perkampungan tenun, melengkapi gerai-gerai penjualan berbagai kerajinan tenun seperti songket dan sulaman, sarung, yang tumbuh cukup cepat di kawasan Pintu Gerbang ini, sejalan dengan perkembangan produksi dan pasar yang melonjak dengan cepat.

B. Sawahlunto Kota Kreatif

Setelah mendapatkan predikat sebagai kota warisan budaya (*cultural heritage*), kota Sawahlunto juga mendapat julukan baru, **kota kreatif.** Nama baru ini muncul setelah Kementrian Pariwisata & Ekonomi Kreatif (Kemparekraf) pada tahun 2013 mengusulkan Kota Sawahlunto ke UNESCO (***United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization***)untuk menjadi salau satu kota yang disebut dengan kota kreatif.

Sebelumnya, Kota Sawahlunto juga telah mengusulkan diri ke UNESCO sebagai kota warisan budaya dunia, meskipun belum mendapat pengakuan Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan dari lembaga Perserikatan Bangs Bangsa tersebut**.** Untuk mendapatkan status sebagai kota warisan budayaan dunia, bukanlah hal mudah, karena seleksinya yang begitu ketat. Namun keberanian Kota Sawahlunto membingkai dirinya dengan istilah kota warisan budaya dunia, sekurang-kurangnya telah menunjukan sebuah visi pembangunan yang berwawasan sejarah dan budaya. Sebuah wawasan

yang tidak begitu populer dalam konteks pembangunan di Indonesia dewasa ini.

Usulan sebagai kandidat Kota Kreatif ke Unesco, inisiatifnya datang dari Menteri Pariwsata & Ekonomi Kreatif (Menparekraf), yang mengusulkannya langsung ke Unesco. Dengan pengusulan ini, maka Kota Sawahlunto akan menjadi bagian dari *creatif city network.* Artinya Sawahlunto akan memiliki sebuah jaringan yang luasdengan kota-kota lain di dunia yang usulannya telah masuk ke Unesco.

Program *The Creative City Network* diluncurkan Unesco pada Oktober 2004, merupakan sebuah jaringan kota kreatif yang bekerjasama menuju misi keragaman budaya dan pembangunan berkelanjutan. Kota yang terpilih akan masuk dalam jaringan kegiatan UNESCO. Ada empat kategori Kota Kreatif yang telah disusun, yakni Kota Literatur, Kota Film, Kota Musik, Kota Kerajinan dan Kesenian Rakyat, Kota Desain, Kota Media Seni, dan Kota Gastronomi (Kuliner).

Apakah sesungguhnya yang dimaksudkan dengan Kota Kreatif? Secara konseptual, yang dimaksudkan dengan Kota Kreatif bagi Unesco, adalah kota yang telah menyelenggarakan konsep pembangunan urban planning, yang memberi ruang bagi pengembangan potensi kreativitas masyarakatnya secara baik dan berkelanjutan. Istilah Kota Kreatif (*The Creative City*), pada awalnya dipopulerkan oleh Charles Landry dari Inggris akhir tahun 1980-an. Kota Kreatif menurut Landry, adalah kota yang menciptakan lingkungan yang mendukung orang untuk memikirkan, merencanakan dan bertindak dengan

menggunakan imajinasi kreatif, dan mengubah masalah kota menjadi kesempatan bagi orang untuk berkembang.

Apakah Kota Sawahlunto memenuhi kreteria konseptual tersebut sebagai Kota Kreatif? Jawaban pertanyaan ini tentu saja bisa beragam. Namun fakta yang ditunjukan Sawahlunto dalam rentang waktu 10 tahun terakhir, dapat memberikan jawaban tersendiri. Ditutupnya tambang batubara di Sawahlunto tahun 2000, yang merupakan sumber ekonomi utama masyarakat, ternyata tidak membuat Kota Sawahlunto lumpuh. Di awal tahun 2000-an, kota ini memang mengalami pertumbuhan yang memprihatin. Bahkan boleh dikatakan minus, termasuk terjadinya eksodus penduduk ke luar kota yang jumlahnya sekitar sepuluh ribu orang. Bahkan kota ini sendiri nyaris menjadi "kota hantu", akibat lumpuhnya roda utama kehidupan ekonomi masyarakat, yang bersumber pada tambang batubara.

Namun dalam lima tahun terakhir, Kota Sawahlunto menggeliat dengan begitu cepat. Sektor ekonomi rakyat, seperti pertanian, peternakan, industri kerajinan, dan berbagai kegiatan budaya dan pariwisata dipacu sebagai lokomotif ekonomi yang menjanjikan. Perubahan basis ekonomi ini ternyata mencapai hasil yang mengembirakan. Berdasarkan data statistik nasional, Kota Sawahlunto berhasil mengurangi jumlah penduduk miskinnya secara signifikan. Jika tidak dapat dikatakan spektakuler, tapi cukup mengejutkan. Data tahun 2012 yang dikeluarkan Badan Statistik Nasional, menegaskan bahwa Kota Sawahlunto adalah kota yang jumlah penduduk miskinnya nomor dua terkecil di Indonesia.

Nomor satu diraih Kota Denpasar. Jumlah penduduk miskin yang tersisa pada tahun 2013 hanya sekitar 2,17 persen.

Kita memang belum mendapatkan informasi, kategori Kota Kreatif apa yang telah diusulan Menparekraf untuk Kota Sawahlunto ke Unesco. Namun jika dilihat dari apa yang telah dicapai Sawahlunto dalam dekade terakhir, mungkin ada beberapa kategori yang bisa mendukung Kota Sawahlunto menjadi, atau sekurang-kurangnya dianggap sebagai Kota Kreatif, yang hanya terdiri dari dua kreteria penilaian, yakni; pertama adalah berbasis design, dan kedua adalah berbasis seni budaya dan kerajinan (*arts & crafts*).

Perkembangan dan kemajuan Kota Sawahlunto dalam bidang seni budaya dan kerajinan dianggap cukup signifikan. Ada beberapa alasan yang dapat dikemukakan. Pertama, untuk kategori kerajinan, Kota Sawahlunto telah memacu pertumbuhan tenun songket, yang jumlahnya meningkat menjadi hampir 700 orang dengan jumlah songket yang dihasilkan 118.770 helai. Nilai produksinya 30,9 milyar lebih. Tahun 2007, jumlah pengrajin hanya 312 orang, namun tingkat produksi masih rendah. Hanya menghasilkan 22.536 helai, dengan nilai produksi sekitar 3.1 milyar. Jadi nilai kreatifitas yang dikembangkan Kota Sawahlunto, bukan saja meningkatkan jumlah pengrajin, tetapi juga meningkatkan produktifitas dan pendapatan dengan loncatan yang cukup besar.

Kreatifitas di bidang industri kerajinan songket, juga dilengkapi dengan berbagai kegiatan seni budaya lainnya. Dalam upaya mengembangkan Kota Sawahlunto

sebagai kota tujuan wisata, juga dibangun sarana untuk berbagai kegiatan seni budaya, seperti lapangan pacuan kuda, festival seni rakyat (folk festival), yang dibingkai dengan Sawahlunto Multikultural Festival, sehingga aktivitas dan kreatifitas berbagai komunitas seni yang berbasiskan multi-etnik berkembang dengan sangat baik di kota ini. Sejak lima tahun lalu, juga digelar even makan *bajamba*, yang merupakan sebuah ruang perayaan bersama warga kota merayakan hari jadi kotanya. Juga ada festival musik mancanegara yang dibungkus dengan tema Sawahlunto Internatioanl Music Festival (SIMFes). Bahkan sejak tahun lalu juga ada bioskop empat dimensi yang pertama di Sumatra.

Kota Sawahlunto kelihatannya ingin terus memacu dan memperkenalkan diri sebagai kota kreatif. Di penghujung bulan Oktober 2012 Pemerintah Kota Sawahlunto menggelar sebuah kegiatan yang cukup mengundang perhatian publik, yakni membuat acara pameran dan pertunjukan dengan mengusung tema Sawahlunto Kreatif. Dalam kegiatan Sawahlunto Kreatif yang diadakan di Gedung Teater Jakarta, Taman Ismail Marzuki, ditampilkan kekayaan budaya Sawahlunto, terutama hasil industri kerajinan tenun songket, pameran foto tentang berbagai kegiatan yang telah dilakukan, serta membuat sebuah pertunjukan seni. Pertunjukan seni yang disiapkan seniman pertunjukan kaliber dunia ini, merangkai sejarah panjang kota Sawahlunto dengan produk kreatifnya, dalam bentuk seni pertunjukan tari dengan menggunakan pendekatan multi-media.

Sukses membuat acara Sawahlunto Kreatif, yang dilaksanakan dengan dukungan banyak pihak ini, Pemda Kota Sawahlunto kemudian menggelar pameran tenun songket di Museum Tekstil Jakarta, yang disebut dengan Sawahlunto Kreatif 2. Pameran yang berlangsung pada bulan April 2013 tersebut, merupakan sebuah upaya untuk mengembalikan kejayaan songket Silungkang menjadi salah satu industri kreatif yang berdampak pada peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat. Pameran dalam bentuk restorasi dan melestarikan tradisi industri budaya tenun songket ini, memperlihatkan bahwa produk budaya yang ada di Kota Sawahlunto bernilai tinggi baik secara estetis maupun ekonomis.

C. Sawahlunto Kota Festival

Selain dijuluki kota heritage dan kota kreatif, kota Sawahlunto juga terkenal dengan Kota Festival, atau kota even. Berbagai festival telah digelar di kota Sawahlunto. Salah festival yang telah dilaksanakan sejak awal tahun 2000-an adalah Sawahlunto Multikultural Festival[298]. Festival yang dilaksanakan sekitar hari jadi kota yang jatuh tanggal 1 Desember tersebut, merupakan festival untuk merayakan realitas masyarakat dan budaya yang tumbuh dan berkembang di Kota Sawahlunto yang bersifat multi-etnik dan multi-kultur.

[298]Sawahlunto Multikultural Festival dilaksanakan sejak awal tahun 2000-an, dan merupakan salah satu bentuk komitmen Pemerintah Kota Sawahlunto terhadap realitas kebudayaan masyarakat setempat yang multi-etnik.

Sebagai kota tambang batubara, sejak akhir abad ke 19 berbagai suku bangsa telah datang dan bermukim di kota ini. Selain bangsa Eropah dan dari Asia seperti suku bangsa Tionghoa, juga berdatangan dari berbagai pelosok Nusantara. Ada yang datang dengan sukarela tetapi juga ada yang dibawa sebagai pekerja paksa dari Jawa, yang dekenal dengan *orang rantai*. Suku bangsa yang menjadi penduduk kota Sawahlunto dewasa ini mayoritas tetap suku bangsa Minangkabau, suku bangsa Jawa, Sunda, Batak, dan sejumlah keluarga Tionghoa yang tetap bertahan di kota Sawahlunto. Dari kenyataan masyarakat yang multi-etnik inilah Sawahlunto Multikultural Festival dikembangkan, dimana setiap suku bangsa memiliki ruang artikulasi artistik dan estetik dari kehidupan seni dan budaya yang mereka anut.

Semangat budaya multi-kultural ini juga terekpresi dalam acara tahunan perayaan hari jadi kota, yang disebut dengan *makan bajamba*[299]. Makan bajamba yang secara harfiah berarti makan bersama-sama di ruangan dan waktu yang bersamaan. *Makan bajamba* yang merupakan tradisi budaya dalam masyarakat Minangkabau, dikemas sedemikian rupa oleh Pemerintah Kota Sawahlunto di bawah kepemimpinan Walikota Amran Nur, dengan mengajak masyarakat etnik lain untuk ikut bersama-sama *makan bajamba*.

Makan bajamba ini adalah merupakan sebuah rangkaian kegiatan prosesi, yang dimulai dari persiapan

[299] Makan bajamba pertama kali dilaksanakan pada peringatan hari jadi kota yang ke 122 tahun 2006.

masing-masing kelompok di nagari-nagari dan kelompok komunitas membuat *jamba* (paket makanan). Jamba itu kemudian dibawa dengan menjujungnya di kepala oleh perempuan yang dilengkapi dengan pakaian adat ke lokasi acara. Lokasi yang digunakan adalah pusat kota Sawahlunto, taman dan jalan utama. Kegiatan utama dimulai setelah acara Rapat Paripurna anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sawahlunto, sebagai kegiatan formal dari Peringatan Hari Jadi Kota. Didahului dengan penyampaian pidato resmi kemudian menjelang makan bersama, akan dihantar oleh persembahan adat Minangkabau dalam bentuk pepatah-petitih. Di luar acara resmi, makan bajamba ini juga dimeriahkan oleh musik-musik tradisional masing-masing etnik, sehingga terkesan meriah dalam semangat kebersamaan.

Pada hari jadi Kota Sawahlunto ini, berbagai aktivitas seni budaya oleh berbagai komunitas masyarakat, baik yang ada di Sawahlunto maupun yang dari luar. Dari kota Sawahlunto biasanya akan ditampilkan peragaan ritual *hoyak tabuik* yang diiringi dengan gendang tassa yang bergemuruh, yang dipersembahkan oleh komunitas masayarakt Padang Pariaman. Begitu juga komunitas etnik lainnya. Mereka menampilkan identitas budaya yang mereka miliki. Salah satu kegiatan budaya yang sering dihadirkan adalah aktraksi *Tarian Naga* dan *Baronsai*, yang khusus didatangkan dari Perkumpulan Himpunan Bersatu Teguh (HTT) dari Padang. Sepanjang hari jadi ini, tepatnya setiap tanggal 1 Desember kota Sawahlunto bagaikan sebuah panggung yang di atasnya tampil beragam aktor dan kelompok budaya yang sangat berwarna-warni.

Sebuah gambaran kehidupan budaya yang multikultur, dan satu sama lainnya saling berinteraksi secara kultural.

Semangat budaya multi-kultur juga dituangkan dalam sebuah festival wayang yang disebut dengan Festival Wayang Nusantara[300]. Festival Wayang Nusantara ini digelar sebagai bentuk perayaan dan penguatan budaya daerah di Sawahlunto, yang dihuni cukup banyak suku bangsa dari Jawa. Kelompok wayang yang ditampilkan berasal dari daerah-daerah kantong-kantong budaya masyarakat Jawa di Sumatera Barat dan Sumatera, bahkan dari pulau Jawa sendiri sebagai tempat asal wayang itu berkembang di Nusantara. Selain festival wayang, di kota Sawahunto juga sudah sejak lama sering diadakan festival seni berbasiskan budaya Minangkabau, seperti Festival Randai, sebuah festival yang memperagakan kesenian Minangkabau dalam bentuk teater rakyat.

Bentuk permainan anak nagari yang juga dilaksanakan sebagai even tahunan adalah pacu kuda. Pacu kuda merupakan kegiatan yang relatif baru di kota Sawahlunto, bersamaan dengan dibangunnya lapangan pacu dengan standart nasional di Kawasan Wisata Kandi. Pacuan kuda, merupakan bentuk permainan yang pernah digemari oleh masyarakat Minang, terutama pacuan kuda tradisional tanpa pelana. Kegiata pacuan kuda ini biasanya

[300] Festival Wayang Nusantara pertama kali dilaksanakan tahun 2013, bertempat di Lapangan Silo Kota Sawahlunto, dan merupakan festival tahunan yang masih berlanjut sampai kini. Untuk tahun 2016, Festival Wayang Nusantara dilaksanakan 3-5 November bertempat di Lapangan Segi Tiga Kota Sawahunto. Festival dikuratori oleh seorang tokoh pedalangan yang menjadi dosen di ISI Padangpanjang, Sri Yanto.

dilaksanakan dalam perayaan hari jadi Kota Sawahlunto. Even lain dalam bentuk aktraksi yang dilombakan adalah kegiatan balap motor (racing). Untuk kegiatan racing ini, Kota Sawahlunto membangun sebuah kawasan arena balap motor yang cukup standar di kawasan Wisata Kandi.

Even lain yang juga cukup fenomenal adalah festival musik etnik bertaraf internasional, yang diberi nama Sawahlunto International Music Festival[301] (SIMFes). Festival musik ini digagas oleh mantan Walikota Sawahlunto Almarhum Amran Nur, dan mulai dilaksanakan pada awal bulan Desember 2010, bersamaan dengan peringatan hari jadi kota Sawahlunto yang ke 122. Festival pertama tahun 2010 cukup sukses, karena berhasil mendatangkan sejumlah musisi luar negeri, nasional dan dari Sumatera Barat sendiri.

Sebagai festival tahunan SIMFes telah dilaksanakan sebanyak tujuh kali, dan terakhir dilaksanakan 7-8 Oktober 2016. Setiap tahun untuk festival diundang musisi dari berbagai benua dan etnik, termasuk dari dalam negeri. Musisi yang telah tampil antara lain dari Mexico, Hawaii, Afrika, Uzbekistan, Mongolia, Jepang, Korea, Malaysia, Singapura, Jerman, Belgia, Ingris dan sejumlah musisi nasional dan Sumatera Barat. Festival ini tisak saja berhasil memperkenalkan Kota Sawahlunto sebagai kota wisata dan festival ke mancanegara serta Indonesia, juga telah

[301] Kurator Sawahlunto International Music Festival (SIMFes) sejak pertama sampai tahun ini adalah Edy Utama dengan DR. Hiltrud Cordes dari Jerman.

mendorong dan menginspirasi seniman-seniman musik yang ada di Kota Sawahlunto.

BAB VIII
SAWAHLUNTO:
KOTA TAMBANG MENJADI KOTA WISATA TAMBANG BERBUDAYA

A. Pengantar

Pariwisata berarti perpelancongan (turisme) atau melakukan perjalanan wisata.[302] Istilah pariwisata konon pertama kali di gunakan oleh Presiden Soekarno dalam suatu percakapan sebagai padanan dari istilah asing *tourism*. Segala kegiatan dalam masyarakat yang berhubungan wisatawan inilah yang disebut dengan pariwisata.[303] Sementara itu Undang-Undang Kepariwisataan Republik Indonesia menyebutkan kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.[304] Komponen-

[302] Poerwadarminta. W.J.S.. (2007). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. hal. 843 dan lihat juga hal. 1367.

[303] Soekadijo. R.G.. (2000). Anatomi Pariwisata (Memahami Pariwisata Sebagai "Systemic Linkage"). Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. hal. 1-2.

[304] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan

komponen pariwisata yang terdiri dari; *objek* dan *daya tarik wisata*, *akomodasi*, *angkutan wisata*, *sarana- prasarana* dan sumber daya manusia.

Lebih dari satu abad lalu daerah Sawahlunto identik dengan Kota Industri Tambang Batubara. Wajar saja citra itu melekat, bukankah pertambangan batubara di daerah ini sudah berlangsung sejak penghujung abad 19, tepatnya secara resmi di bulan Oktober 1892 oleh Pemerintah Hindia Belanda.[305] Namun dalam lima belas tahun terakhir, Sawahlunto gegap gempita sebagai destinasi wisata dengan *tagline Kota Wisata Tambang Berbudaya*. Apa yang terjadi sesungguhnya dan bagaimana perjalanan Sawahlunto dari *Kota Industri Tambang Batubara* sampai *Kota Wisata Tambang Berbudaya* ?

[305] Aktivitas pertambangan sesungguhnya sudah dimulai dalam tahun 1891 di daerah Sungai Durian yang dipimpin Dr. J.W. Ijzerman seorang ahli transportasi yang kemudian merangkap sebagai kepala pertambangan batubara Ombilin-Sawahlunto. Ia ahli transportasi yang berpengaruh dalam pembangunan jaringan transportasi terutama dalam pembangunan jalur kereta api di Hindia Belanda. Usaha penambangan pertama kali dilakukan di kawasan Sungai Durian itu sesungguhnya dilakukan sebelum diambil keputusan secara resmi. Lihat misalnya Erwiza Erman, (2005). Membaranya Batubara: Konflik Kelas dan Etnik, Ombilin-Sawahlunto Sumatera Barat (1892-1996). Jakarta: Desantra, hal. 39. Mengenai perjalanan dan kiprah Ijzerman dalam pembangunan jalur kereta api di Sumatera Barat. Lihat misalnya Rudolf Mrázek. (2006). Engineers of Happy Land: Perkembangan Teknologi Di Sebuah Koloni. (Terjemahan: Hermojo, Pengantar: Bre Redana, Edisi: 1). Yayasan Obor Indonesia: Jakarta, hal. 3-8.

B. Jejak Kepariwisataan Sawahlunto

Aktivitas kepariwisataan di Sumatera Barat sebenarnya sudah berlangsung sejak lama. Kegiatan pelancongan itu dapat diketahui dari berbagai catatan perjalanan orang-orang Eropa (Belanda) dan orang Asia seperti Jepang ke daerah Minangkabau. Perjalanan itu diantaranya juga meliputi Sawahlunto. Jejak pariwisata itu juga dapat dilacak melalui media cetak yang memuat iklan pada koran dan buku telephone yang dipasang oleh pelaku usaha perjalanan wisata ketika itu. Mereka menawarkan paket perjalanan dari Padang ke Sawahlunto dengan menggunakan transportasi kereta api. Bahkan perjalanan itu juga berupa rekaman visual statis (foto) dan visual bergerak (film/video).

Perjalanan wisata dari Padang-Sawahlunto dengan menaiki kereta api, tentu menjadi paket yang menarik. Bagi pelancong dari luar yang menempuh jalur laut. *Pertama* tentu mereka akan berlabuh dulu di dermaga pelabuhan Emmahaven (Teluk Bayur) Padang. Dari Padang perjalanan diteruskan ke Sawahlunto dengan melintasi daerah-daerah yang dibentangi jalur rel kereta api. Dari Padang kereta api berjalan pada jalur rel yang umum ditemui. Tapi begitu memasuki stasiun Kayu Tanam kereta api berjalan pada jalur rel gigi hingga memasuki stasiun Padangpanjang. Jalur rel gigi kembali akan ditempuh pada jalur Padang Panjang-Batu Taba.

Sayang perjalanan wisata ke Sawahlunto ketika itu perlu diketahui dan mendapat persetujuan terlebih dahulu oleh pejabat pertambangan batubara Ombilin. Maklum

daerah ini merupakan daerah yang nyaris dikuasai perusahaan tambang batubara.

Akhir tahun 1960-an sampai 1970-an dunia pertambangan batubara betul-betul terpuruk. Bahkan, santer terdengar isu bahwa perusahaan batubara Ombilin maupun Tanjung Enim akan ditutup.[306] Wacana penutupaan tambang batubara bukan kali itu saja. Tapi sudah terjadi berulang-ulang sejak masa Pemerintahan Hindia Belanda di tahun 1930-an saat resesi dunia, zaman *malaise* dan pada awal-wal kemerdekaan Republik Indonesia misalnya.

Pasang surut dan dinamika usaha pertambang batubara nyata mempengaruhi berbagai aspek kehidupan kota dan masyarakat Sawahlunto. Diantara dampak itu terlihat misal pada sosial-ekonomi, sosial budaya hingga pertumbuhan dan perkembangan Kota Sawahlunto. Karenanya menggantungkan kehidupan Sawahlunto pada aspek pertambangan batubara semata artinya mempertaruhkan kehidupan warga dan kota Sawahlunto. Pemikiran kearah itu sudah tampak sejak awal Sawahlunto menjadi daerah otonom setingkat Kotamadya ketika berpisah dengan Kabupaten Sawahlunto Sijunjung pada tahun 1965. Gagasan itu kembali mengemuka pada masa Walikota Drs. H. Shaimoery, W.S (periode tahun 1971-1983). Pengembangan pertanian, perkebunan dan perdagangan tentu menjadi tantangan dengan topografi dan bentang alam Sawahlunto. Gagasan lainnya yang

[306] Syukur, Paceklik Sudah Berlalu. Liputan Utama Bulletin Bukit Asam, Edisi Maret 1999, hal. 9

mungkin juga bisa dikembangkan adalah dalam bidang pendidikan dan pariwisata. Fasilitas dan geografis Kota Sawahlunto tersedia untuk itu. Sisi historis dan struktur sosial budaya, serta bentang alam Sawahlunto yang khas merupakan modal dasar.[307]

Sayang gagasan dan pemikiran Sawahlunto sebagai daerah pariwisata dan pendidikan itu belum dapat diwujudkan. Hal ini tentu dapat dipahami dari beberapa aspek. *Pertama,* regulasi Sawahlunto untuk beralih ke pengembangan sektor pariwisata dan pendidikan itu belum benar-benar menguatkan. *Kedua,* Sistem pemerintahan orde baru yang sentralistik membuat daerah-daerah tidak memiliki inisiatif dan inovasi yang luas untuk mengembangkan potensinya. Daerah-daerah lebih banyak menunggu instruksi dan arahan dari pemerintah pusat. *Ketiga,* yang tidak kalah pentingnya adalah meredupnya kembali gagasan pengembangan Sawahlunto sebagai daerah pariwisata khususnya. Memasuki era 1980-an perubahan manajemen tambang Ombilin menjadi bagian PT. Bukit Asam yang disertai alih teknologi membuat kondisi pertambangan batubara Ombilin kembali membaik hingga memasuki tahun 1990-an.

[307] Andi Asoka, dkk, (2005). Sawahlunto Dulu, Kini dan Esok: Menyongsong Kota Wisata Tambang yang Berbudaya. Pemerintah Kota Sawahlunto bekerjasama dengan Pusat Studi Humaniora (PSH) Universitas Andalas Padang. Yogyakarta: Insist Press, 2005, hlm. 145-147

C. Kota Tambang sampai Kota Wisata Tambang Berbudaya

Keberadaan Sawahlunto tidak bisa dipisahkan dengan tambang batubara Ombilin yang berdampak luas bagi kota dan warga Sawahlunto.[308] Implikasi gerakan reformasi 1998 baik secara politik, ekonomi sosial dan budaya belum berlalu. Sawahlunto dihadapkan pula pada persoalan lain. Produktifitas pertambangan batu bara mempengaruhi berbagai aspek keberlangsungan kehidupan kota dan warga Sawahlunto sedang dalam situasi mengkhawatirkan. Kebijakan di bidang pemerintahan Era Reformasi memberikan harapan baru. Keluarnya Undang-Undang Nomor: 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Desentralistik pemerintahan membuka peluang daerah menata kehidupan daerahnya tanpa melulu menunggu Pemerintah Pusat. Otonomi Daerah peluang pula bagi Sawahlunto untuk menata daerah dengan potensinya. Selama berpuluh bahkan melampaui masa satu abad pertambangan batu bara memainkan perannya terutama dalam bidang perekonomian.

Meskipun demikian, hingga saat ini Sawahlunto tetap dikenal sebagai kota tambang. Pertumbuhan dan perkembangan Sawahlunto dari waktu ke waktu dipengaruhi dinamika usaha pertambangan batubara. Masyarakat dan Pemerintah daerah Kota Sawahlunto tidak ingin terlena oleh cadangan batubara yang tersisa. Kalaupun cadangan itu ada, merupakan cadangan

[308] Surat Kabar, Harian Umum Haluan, 2 Januari 1998.

batubara bawah tanah (*underground*). Untuk menambangnya membutuhkan investasi dengan teknologi yang memadai. Semuanya berimplikasi pada pembiayaan. Untuk itu Sawahlunto perlu mencari sumber kehidupan selain batubara. Melalui pertemuan, diskusi dan musyawarah. S*takeholders* Sawahlunto akhirnya berhasil membuat rumusan untuk menjadikan Sawahlunto 2020 sebagai *Kota Wisata Tambang yang Berbudaya*.[309] Rumusan Sawahlunto baru itu kemudian ditegaskan melalui Peraturan Daerah No. 02 Tahun 2001 tentang visi dan misi Kota Sawahlunto. Sebagai visinya ***Sawahlunto Tahun 2020 menjadi Kota Wisata Tambang Yang Berbudaya*** dan misinya meliputi;[310]

a) Memelihara dan mengembangkan nilai-nilai dasar agama dan adat di tengah masyarakat;
b) Meningkatkan fasilitas dan pelayanan umum;
c) Mengembangkan objek wisata tambang, dan
d) Mengembangkan seluruh potensi kota yang dapat mendorong berkembangnya pariwisata.

Abstraksi rumusan visi dan misi kota Sawahlunto yang telah dikukuhan itu belumlah serta merta mengubah keadaan kota dan masyarakat Sawahlunto. Ancaman

[309] Tjuk Kuswartoyo, (2001). Sawahlunto 2020: Agenda Mewujudkan Kota Wisata Tambang yang Berbudaya, Agenda 2002-2020, Program 2002-2006. Bandung: Pemerintah Kota Sawahlunto bekerjasama dengan Lembaga Pengabdian Masyarakat – Institut Teknologi Bandung (LPM-ITB), hal. iii.

[310] Dikutip dari Sawahlunto Dalam Angka , Sawahlunto In Figure, 2013., BPS dan BAPPEDA Kota Sawahlunto, hlm. vii-viii.

sebagai *'kota mati'* masih menyelimuti. Diperlukan upaya nyata untuk mendekati apa yang menjadi cita-cita Sawahlunto. Langkah-langkah strategis dan sistematis disusun dengan serangkaian pengkajian untuk menyusun agenda dalam rangka mewujudkan visi dan misi itu. Pada tahun 2002 Pemerintah Kota Sawahlunto bekerjasama dengan Lembaga Pengabdian Masyarakat Institut Teknologi Bandung untuk melakukan serangkaian pengkajian yang dirumuskan dalam sebuah dokumen yang diterbitkan dengan judul *Sawahlunto Sawahlunto 2020: Agenda Mewujudkan Kota Wisata Tambang yang Berbudaya, Agenda 2002-2020, Program 2002-2006*. Tidak hanya itu sebuah *grand desain* Kota Wisata Tambang diilustrasikan melalui rancangan gambar tiga dimensi. Penataan ruang dan bangunan kota, pemanfaatan aset dan lahan bekas pertambangan, pembangunan dan pengembangan objek serta sarana pariwisata terangkum kedalam sebuah *Ikhtisar Tahap Pembangunan Kota Wisata Tambang Sawahlunto*.[311] Bagaimana usaha Sawahlunto mewujudkan agenda-agenda yang telah disusun itu beserta inovasi-inovasi dan pengembangannya dalam tahun-tahun selanjutnya ?

D. Menjadi Kota Wisata Tambang Berbudaya

Dukungan lintas sektoral bagi pembangunan pariwisata dan kebudayaan tidak terlepas dari situasi,

[311] Tjuk Kuswartoyo, (2001). Sawahlunto 2020... *Ibid*. hal. 24-26. Untuk lebih jelasnya mengenai agenda-agenda beserta langkah-langkah atau tahapan-tahapan untuk mewujudkan Sawahlunto sebagai Kota Wisata Tambang itu lihat *lampiran Ikhtisar Tahap Pembangunan Kota Wisata Tambang Sawahlunto*.

perubahan dan dinamika yang terjadi di lokalitas Sawahlunto, Sumatrera Barat. Pada tingkat nasional, regional maupun internasional yang satu sama lain saling berpengaruh dan terpengaruh. Pembangunan dan pengembangan pariwisata merupakan bidang yang multi sektoral. Untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan usaha pariwisata yang cukup beragam itu, baik yang kebutuhan langsung maupun tidak langsung, melibatkan hampir semua sektor pembangunan. Keberhasilan pembangunan dan pengembangan pariwisata banyak tergantung dari dukungan berbagai sektor.[312]

[312] Pengembangan kebudayaan dan pariwisata bersama Diknas; Pemda/Ornop, Penelitian dan pengembangan pengetahuan lintas disiplin yang terkaiit dengan kebudayaan dan pariwisata (LIPI, PTN/PTS); Pemberdayaan masyarakat (bersama dengan Depdagri dan Pemda); Pemantapan dan peningkatan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat (Dephan, POLRI); Pengendalian tenaga kerja asing kebudayaan dan pariwisata (Depnaker); Peningkatan muu produk dan pelayanan pariwisata (Dep. Kehakiman dan HAM, Dedagri, Depkes, Kessos, Depkeu); Peningkatan sarana dan prasarana perhubungan (Dephub, Depkimpraswil); Pembinaan otonomi dibidang kepariwisataan (Depdagri); Pemantapan pendidikan bidang kepariwisataan (bersama Depdagri, Kopertis); Pengendalian struktur industri pariwisata (BKPM, Depkeu); Pemanfaatan Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Taman Nasional Laut dalam rangka pengembangangan wisata-eko (Dept. Kehutanan); Penyesuaian tarif airport-tax ticket masuk Taman Nasional, biaya tambat/masuk kapal pesiar, fiskal keluar dan lain-lain (Dephub dan Dephut); Pengembangan sistim dan jaringan informasi kebudayaan dan pariwisata (MPI, Deplu, dan lain-lain); Pengembangan satistik kebudayaan dan pariwisata (BPS, Asosiasi Industri, Pemda, dll). *Buku Pegangan Pengantar dan Penyuluh Kepariwisataan Indonesia*., Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, Jakarta, 2008.,

Dengan mengidentifikasi berbagai kegiatan lintas sektoral, diharapkan pihak-pihak terkait dapat membantu dan mendukung sasaran pembangunan sektor kebudayaan dan pariwisata, baik tingkat nasional maupun daerah.[313] Kontras dalam perjalanan pembangunan dan pengembangan kepariwisataan dan kebudayaan kota Sawahlunto. Unsur lain membutuhkan dan mendorong bagian yang lain. Sebuah obyek wisata tidaklah dapat berdiri sendiri. Tanpa komponen lainnya. Pengembangan Resort Kandi misalnya, akan mendorong pembukaan dan pembangunan akses jalan, pedesterian, saluran air yang menjadi domain Dinas Pekerjaan Umum. Penataan taman dan lingkungan menjadi peran Badan Lingkungan Hidup, Penghijauan kawasan oleh Dinas Kehutanan dan Pertanian, atraksi, wahana, pengelolaan oleh Dinas Pariwisata Kota Sawahlunto juga peran swasta dan elemen masyarakat. Seterusnya soal kebutuhan wisatawan, makan, minum, belanja lebih kepada masyarakat penerima dampak dan efek positif pembangunan dan pengembangan objek wisata. Uraian pada bagian-bagian pembahasan sebelumnya menunjukkan saling keterkaitan pembangunan lintas sektoral dalam keberhasilan pembagunan kepariwisataan dan kebudayaan kota Sawahlunto. Pembangunan pariwisata di kota Sawahlunto secara efektif baru berjalan sejak tahun 2002, sejalan dengan disusunnya Rencana Induk Pengembangan Pariwisata (RIPP) Kota Sawahlunto pada akhir tahun 2001.

[313]Buku Pegangan Penatar dan Penyuluh Kepariwisataan Indonesia., Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, Jakarta, 2008. Hlm. 28-30.

Kota Sawahlunto dengan luas daerah 273,45 Km2, merupakan daerah yang sedang mengalami transisi perekonomian. Sebelum tahun 2000, Kota Sawahlunto merupakan sebuah kota di Sumatera Barat dengan roda perekonomian masyarakat bergantung dari sektor batubara yang sudah berlangsung lebih dari satu abad lamanya. Setelah batubara sebagai sumberdaya alam yang tidak dapat diperbarui tersebut kian menipis dan tidak lagi memberikan harapan sepenuhnya seperti masalalu, menyebabkan penduduk kehilangan sumber pendapatan utama. Kota Sawahlunto pun terancam menjadi 'kota mati', sedangkan kehidupan kota dengan segala pendukungnya mesti terus berlanjut.[314]

Berdasarkan kondisi tersebut pemerintah kota bersama stakeholder kota telah merancang strategi lain yaitu dengan menjadikan Kota Sawahlunto sebagai kota wisata dengan menonjolkan dua potensi wisata yang menjadi kekuatannya, wisata tambang dan wisata heritage. Memanfaatkan berbagai obyek bekas tambang serta warisan budaya yang memiliki nilai historis sehingga menjadikan Sawahlunto berbeda dengan daerah lain.[315]

Pembangunan industri pariwisata kota Sawahlunto merupakan wujud dari keinginan untuk mencapai visi kota " menjadi kota wisata tambang yang berbudaya tahun 2020" , karena itu semua sektor pembangunan lain diarahkan guna menunjang percepatan pembangunan pariwisata. Inovasi dan kretivitas menjadi faktor utama

[314] RPJPD Kota Sawahlunto 2005-2025, hal. 158

[315] *ibid*, hal. 158

keberhasilan sektor ini disamping potensi alam yang tersedia, karena konsep "heritage tourisme' menjadi unggulan dan pembeda kota Sawahlunta dengan daeah tujuan wisata lain.[316]

Produk dan Kawasan Wisata sebagai faktor yang dikembangkan sesuai Ikhtisar Tahap Pembangunan Kota Wisata Tambang Sawahlunto meliputi; obyek wisata, atraksi wisata, akomodasi wisata, transportasi wisata, penyelenggaraan kegiatan wisata, kawasan resort wisata. Merupakan agenda-agenda yang menunggu di implementasikan. Pembangunan wacana, rumusan dan konsep hingga studi berkelanjutan terus berjalan hingga periode awal tahun 2002-2003. Pergantian kepemimpinan dari Walikota Drs. Subari Sukardi justeru terjadi dalam periode awal tersebut. Ir. Amran Nur seorang perantau, putra daerah dari Talawi yang berlatar belakang pengusaha di Jakarta kemudian terpilih sebagai Walikota Sawahlunto periode 2003-2008 melalui pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sawahlunto.

Kurun 12 tahun terakhir, angka kunjungan pariwisata Sawahlunto terus menunjukkan peningkatan secara signifikan. Bagaimana Sawahlunto melakukan hal tersebut baik dengan agenda-agendanya maupun inovasi dalam perjalanannya menuju visi misi tersebut ?

[316] RPJPD Kota Sawahlunto 2005-2025, hal. 277-278

Tabel 1
Angka Kunjungan Wisata Kota Sawahlunto
Tahun 2004-215

Tahun	Jumlah
2015	810.346
2014	760.423
2013	750.385
2012	746.171
2011	735.020
2010	645.020
2009	595.711
2008	488.392
2007	425.640
2006	377.220
2005	37.188
2004	14.425

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Sawahlunto, 2015

Lima tahun terakhir angka kunjungan wisata Sawahlunto tampak terus meningkat. Kunjungan wisata ke objek wisata berbasis sejarah, Kota Lama Museum/Cagar Budaya seperti Infobox Galeri Tambang Batubara dan Lubang Tambah Mbah Soero, Museum Goedang Ransoem dan Museum Kereta Api cenderung mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Museum Goedang ransoem misalnya mengalami peningkatan dari 13.725 pada tahun 2015 menjadi 20.943 pada tahun 2016 atau meningkat 53%, Infobox-Geleri Tambang batubara dan Museum Situs Lubang Tambang Mbah Soero juga

mengalami peningkatan dari 10.764 pada tahun 2015 menjadi 12.938 pada tahun 2016 atau meningkat 20 %. Demikian pula dengan Museum Kereta Api dari 5.657 tahun 2015 mejadi 6.557 pada tahun 2016 atau meningkat 16 %.

Tabel 2
Jumlah Pengunjung Objek Wisata
Kota Sawahlunto Tahun 2011-2015

Destinasi Wisata	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
Water Boom	150.609	149.954	144.121	118.339	109.320
Taman Satwa Kandi	179.751	191.571	168.061	132.636	160.838
Museum Goedang Ransoem	8.014	9.359	14.102	13.725	20.943
Infobox-Geleri Tambang Batubara dan Museum Situs LTMS	3.831	6.810	10.298	10.764	12.938
Museum Kereta Api	2.292	3.793	5.003	5.657	6.557
Desa Wisata Rantih	927	1.789	3.628	5358	6.583
4 Dimensi	-	-	19.799	10.267	5.971
Puncak Cemara	-	-	-	-	45.611
Taman Buah	-	-	-	-	-
MICE	389.596	382.895	385.373	463.497	441.585
Jumlah	**735.020**	**746.171**	**750.385**	**760.243**	**810.346**

Sumber:
Dinas pariwisata dan Kebudayaan Kota Sawahlunto, 2016

Dua tahun setelah visi dan misi baru Sawahlunto dicetuskan, pada tahun 2003, dalam pemilihan Walikota Sawahlunto melalui DPRD Ir. Amran Nur terpilih mengemban amanah sebagai Walikota Sawahlunto untuk

periode 2003-2008. Agenda-agenda periode awal (2002-2004) yang meliputi berbagai instalasi tambang disepakati sebagai obyek wisata, atraksi wisata disiapkan dan diuji coba, fasilitas yang ada telah direhabilitasi dan direnovasi, pemanfaatan kereta api di jajaki, rencana paket ekskursi siap. Langkah-langkah strategis sumber daya manusia dilingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto dirancang untuk mewujudkan tahapan-tahapan agenda tersebut. Kerjasama dengan berbagai pihak baik lokal hingga luar negeri digagas pula, misalnya dengan Belanda (bantuan Manajemen, tentang pengembangan Pariwisata) dan dengan Malaka berkaitan pengembangan pariwisata dan pengelolaan warisan budaya.

Melihat potensi dan kesungguhan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Sawahlunto dalam mewujudkan visinya, Pemerintah Melaka membuka diri bekerjasama yang intensif dengan Sawahlunto. Pada tahun 2004 ditandatangani *Memorandum of Understanding* (MoU) "*Friendship City: Memorandum of Understanding Between Melaka City Council Historic City and Municipal City of Sawahlunto, West Sumatra Province*" kerjasama antara pemerintah kota Sawahlunto dan Melaka. Memorandum sebagai kota bersahabat ini telah dirintis semenjak akhir tahun 2003 dan baru ditandatangani di Melaka pada 8 Oktober 2004.[317]

[317] Herwandi, Sawahlunto Dan Malaka: Kerjasama Kota "Kembar" Dalam Bidang Pengelolaan Sumberdaya Budaya. *Makalah* Seminar Internasional "50 tahun Merdeka: Hubungan Indonesia Malaysia", di University Malaya, Kualalumpur, 17-21 Juli 2007, hal. 13-14. Lihat *Friendship City: Memorandum of Understanding Between Melaka City*

Kerjasama ini cukup luas meliputi pertukaran informasi, promosi bersama, lawatan awam dalam bidang perdagangan, ekonomi, pariwisata dan budaya. Meskipun MoU ditandatangani pada bulan Oktober 2004 namun kerjasama dengan Kerajaan Melaka sudah berjalan lebih awal dari masa tersebut. Keberhasilan ini menempatkan Sawahlunto sebagai satu-satunya kota di Indonesia yang dijadikan sebagai "kota bersahabat" ataupun sebagai "kota kembar" dan Sawahlunto sebagai friendship city.[318]

Sebelum melakukan kerjasama dengan pemerintah Malaka, pemerintah kota Sawahlunto telah melakukan beberapa kerjasama baik di dalam negeri maupun luar negri, termasuk beberapa lembaga di Malaysia. Di dalam negri telah dilakukan be-berapa kerjasama dengan ITB-Bandung, Univ. Bung Hatta-Padang, Universitas Andalas-Padang, PT BA-UPO, PT. KAI untuk mempercepat laju pembangunan di Kota Sawahlunto. Dengan ITB-Bandung telah dihasilkan sebuah *blue print* strategi pengembangan kota Sawahlunto terutama dalam bidang pembangunan dunia kepariwisataan. Kerjasama dengan PT. BA-UPO bersama Universitas Bung Hatta untuk membuat Master Plan Resort Wisata Danau Kandi. Guna meningkatkan pemahaman dan manfaat dari warisan sejarah pertambangan di Sawahlunto, pemerintah daerah telah melakukan berbagai kerjasama dengan beberapa stakes holder. Pada tahun 2004 telah dilakukan juga sebuah

---

Council Historic City and Municipal City of Sawahlunto, West Sumatra Province" yang ditanda tangani di Melaka 8 Oktober 2004.

[318] *Ibid*.

penelitian yang dilakukan atas kerja sama antara Pemerintah Daerah Sawahlunto dengan *Programma Uitzending Managers* (PUM)-Belanda, ICOMOS-Belanda, dan Universitas Katolik St. Thomas Medan: dari PUM diwakili oleh Peter van Dun, dari ICOMOS oleh Jean-Paul Corten, dan dari Universitas Katolik Medan oleh Indra Tjakradharma. Penelitian ini pada intinya untuk mengupayakan revitalisasi kawasan historitis pusat Kota Lama Sawahlunto. Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto.[319]

Periode pengembangan fase 1 Produk dan Kawasan Wisata tahun 2004-2006 dapat dilihat sebagai paruh awal dari masa kepemimpinan Ir. Amran Nur sebagai Walikota. Agenda-agenda yang tersusun dengan inovasinya menjadi dorongan untuk perwujudan. Serangkian penelitian sebagai upaya menghimpun informasi potensi pariwisata, budaya dan alam dalam tahun 2002-2003. Memberikan gambaran agenda-agenda, langkah-langkah dan apa yang harus dilakukan serta dari mana harus memulai agar visi dan misi Sawahlunto pasca tambang dapat diwujudkan. Sebagai sebuah kota tambang yang berproses lebih dari satu abad. Sawahlunto sesungguhnya memiliki potensi terpendam yang belum dimanfaatkan secara maksimal diluar pertambangan. Warisan budaya fisik (*tangible*) dan non fisik (*intangible*). Karena itu pada tahun 2002 Pemerintah Kota Sawahlunto bekerjasama dengan Badan Warisan Sumatera Barat (BWSB) melakukan *Inventarisasi Bangunan Tua Bersejarah Kota Sawahlunto* dan *Usulan Ranperda*. Sebanyak 52 bangunan berhasil dicatat dan

[319] *Ibid*. 15.

didokumentasikan yang diantaranya berlanggam kolonial Belanda, Minangkabau, Pecinan, eklektik, modern, pra modern dan perpaduan pra modern dengan tradisional.[320]

Sebagai kota tambang yang terus mengalami dinamika, hingga tahun 2004 Sawahlunto belum memiliki hai jadi yang 'permanen', meskipun demikian Hari Jadi Kota Sawahlunto sudah pernah diperingati pertama kali pada tahun 1972, ketika Walikota Drs. Shaimoery W.S dan tahun 1990 masa Walikota Drs. Rahmadsyah yang didasarkan pada tanggal 1 Juli 1918 berdasarkan Staatblad no. 312 dan 313 tahun 1918. Diantara tahun-tahun itu peringatan Hari Jadi Sawahlunto tidak dilaksanakan. Mungkin salahsatu penyebabnya karena belum dikeluarkannya Peraturan Daerah yang menetapkan hari jadi Kota Sawahlunto. Berdasarkan hal itu pada hari Rabu 28 Oktober 2004 dilaksanakan kegiatan dalam rangka mencari hari jadi Kota Sawahlunto yang diselenggarakan di Gedung Ombilin Mining Training Center (OMTC) itu menghasilkan rumusan dan rekomendasi hari jadi kota Sawahlunto pada tanggal 1 Desember 1888.[321] Rumusan dan rekomendasi hari jadi Kota Sawahlunto 1 Desember 1888 itu kemudian dikukuhkan melalui Peraturan Daerah

[320] Diolah dari Laporan Akhir, (2002). *Inventarisasi Bangunan Tua Bersejarah Kota Sawahlunto* dan *Usulan Ranperda*. Kerjasama Pemda Kota Sawahlunto dengan Badan Warisan Sumatera Barat.

[321] Rumusan dan Rekomendasi Hari Jadi Kota Sawahlunto, Hasil Seminar Mencari Hari Jadi Kota Sawahlunto, di Gedung Pertemuan OMTC, Sawahlunto 28 Mei 2004, Penyelenggara Pemerintah Kota Sawahlunto c.q. Kantor Pariwisata, Seni dan Budaya Kota Sawahlunto dan Pusat Studi Humaniora Universitas Andalas Padang.

Kota Sawahlunto Nomor: 9 tahun 2004 tentang Penetapan Hari Jadi Kota Sawahlunto. Peringatan hari jadi kota Sawahlunto yang di dasarkan pada tanggal 1 Desember 1888, kemudian untuk pertama kalinya di peringati tahun 2005. Tahun-tahun berikutnya peringatan hari jadi kota Sawahlunto diselenggarakan setiap tahun dalam berbagai rangkaian kegiatan.

Mengingat potensi bangunan cagar budaya itu sebagai warisan budaya yang perlu dilestarikan dan dilindungi. Pada tahun 2005 dirancang Peraturan Daerah Kota Sawahlunto tentang Benda Cagar Budaya bekerjasama dengan Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala (BP3) di Batusangkar. Rancangan peraturan daerah itu dirangkai pula dengan kegiatan lanjutan pendataan, penilaian dan pembobotan bangunan yang memiliki nilai sejarah. Berdasarkan penilaian dan pembobotan tersebut, maka diperoleh sebanyak 64 bangunan bersejarah yang layak sebagai Benda Cagar Budaya (BCB) yang perlu dilindungi dan dilestarikan.[322]

Topografi Sawahlunto yang berbukit dan bergelombang, menyimpan pula potensi wisata alam berupa goa dan ngalau. Banyak potensi wisata di kota Sawahlunto yang belum tergali, diantaranya potensi wisata minat khusus, namun secara bertahap Kantor Pariwisata, Seni dan Budaya kota Sawahlunto telah mengawali kegiatannya dengan melakukan inventarisasi dan penyusunan profil Gua-gua alam yang ada di kota

[322] Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2005, hal. 589

Sawahlunto. Diantara potensi objek alam itu, Gua Janjian menjadi sebuah model, karena berdasarkan inventarisasi yang dilakukan, objek wisata Gua Janjian mempunyai banyak ornamen yang sangat menarik dan layak untuk dikembangkan sebagai objek wisata minat khusus.[323] Laporan inventarisasi itu mencatat dan mendokumentasikan gua dan ngalau di kota Sawahlunto sebagai berikut:

Tabel 3

Gua dan Ngalau di kota Sawahlunto

No	Nama Gua/Ngalau	Lokasi
1.	Goa Mata Air	Kubang Utara Sikabu
2.	Goa Selamat/Janjian	Guguak Balang/Kajai
3.	Goa Batu Kudo	Balai Batu Sandaran
4.	Goa Sadinikan	Balai Batu sandaran
5.	Ngalau Bunian	Kubang Tangah
6.	Ngalau Botiah-Botiah	Silungklang Oso
7.	Ngalau Aia Tabuluih	Tak Boncah/Silungkang Oso
8.	Ngalau Bulakan	Tak Boncah/Silungkang Oso
9.	Ngalau Gadang	Tak Boncah/Silungkang Oso
10.	Ngalau Baruak Duo	Tak Boncah/Silungkang Oso
11.	Gua Lubuak Ampek	Tak Boncah/Silungkang Oso
12.	Gua Laron	Kolok

Sumber: Diolah dari Laporan Inventarisasi Gua untuk Geo Wisata. Kerjasama Kantor Pariwisata, Seni dan Budaya kota Sawahlunto dengan Bara Muda Creative (BMC) kota Sawahlunto, 2003.

[323] Laporan, (2003). *Inventarisasi Gua untuk Geo Wisata*. Kerjasama Kantor Pariwisata, Seni dan Budaya kota Sawahlunto dengan Bara Muda Creative (BMC) kota Sawahlunto, hal. i.

Foto 1:
Keindahan stalaktit dan stalaknit di salah satu goa di Sawahlunto

Potensi wisata alam di kota Sawahlunto lainnya cukup bervariasi. Panorama Kelok 16 misalnya, merupakan satu diantara lokasi strategis untuk memandang dan menikmati suasana kota Sawahlunto dari ketinggian. Berada di sebelah selatan kota Sawahlunto, kelok 16 berhadapan dengan Panorama Cemara di sebelah Utara. Kelok 16 dikenal juga dengan *Koepel* sesungguhnya sejak masa Pemerintahan Hindia Belanda sudah menjadi salah satu tempat rekreasi sekaligus untuk pemantauan situasi kota. Alam Kajai di Desa Balai Batusandaran tidak kalah menarik, dengan alam perbukitannya yang berpadu dengan *agro wisata* perkebunan dan pengolahan minyak serai (atsiri), nilam, jarak dan lainnya.begitu pula panorama Kayu Gadang di kecamatan Barangin. Panorama ini membentangkan pemandangan alam Sawahlunto arah

Utara. Dari sini dapat dilayangkan pandangan untuk melihat areal penambangan batubara.

Tantangan utama pembangunan pariwisata Kota Sawahlunto adalah menciptakan obyek wisata dengan daya saing tinggi dan terintegrasi, memiliki kekhasan yang sulit ditiru daerah lain, karena itu kreativitas dan inovasi terus menerus menjadi kata kunci. Permasalahan utama adalah ketersediaan sumberdaya aparatur dalam merancang konsep wisata yang mampu menarik investasi dalam mengexploitasi keindahan alam, kekayaan budaya dan nilai historis yang dimilikinya. Keterbatasan sarana transportasi umum yang menghubungkan simpul obyek wisata, fasilitas akomodasi menjadi permasalahan bagi pengunjung.[324]

Serangkaian data dari laporan pengkajian memberikan gambaran potensi dan peluang Sawahlunto dalam mewujudkan visi dan misinya sebagai Kota Wisata Tambang Berbudaya. Tidak ingin melewatkan lima tahun pertama Sawahlunto menuju perubahan. Pada tahun 2004 direncanakan revitalisasi komplek Dapur Umum untuk penyelenggaraan museum sebagai obyek kunjungan wisata sejarah dan pendidikan. Sesuai Rumusan International Council of Museum (ICOM) "Permuseuman adalah segala hal dan kegiatan yang menyangkut penyelenggaraan dan pengelolaan museum, meliputi status, bangunan, koleksi, ketenagaan dan peralatan serta kegiatan guna pembinaan dan pengembangan museum. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 19 Tahun 1995 Tentang

[324] RPJPD Kota Sawahlunto 2005-2025, hal. 260

Pemeliharaan dan Pemanfaatan Benda Cagar Budaya Di Museum Museum adalah lembaga, tempat penyimpanan, perawatan, pengamanan, dan pemanfaatan benda-benda bukti materiil hasil budaya manusia serta alam dan lingkungannya guna menunjang upaya perlindungan dan pelestarian kekayaan budaya bangsa. Permuseuman terus mengalami perkembangan dengan dinamikannya. Defenisi dan aktualitas museum bergeser menjadi lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi, dan mengomunikasikannya kepada masyarakat.[325]

Bekas dapur umum yang telah mengalami alih fungsi sejak tahun 1960-an mulai dari dapur umum, sekolah SMP Ombilin dan hunian pegawai hingga hunian masyarakat itu, akhirnya rencana revitalisai fisik bangunan dapat diwujudkan pada Mei tahun 2005. Pelaksanaan program revitalisasi bekas aset dan prosesi tambang sejak zaman kolonial Belanda itu terkait erat dengan visi dan misi kota Sawahlunto. Sawahlunto mewarisi peninggalan sejarah yang unik, tidak hanya dari segi fisik, tetapi juga warisan sosial budayanya yang beraneka ragam. Puluhan bangunan fisik saat itu, keadaannya kurang terawat dan mengalami kerusakan. Karena itu aset sejarah yang berharga bagi pengembangan pariwisata kota Sawahlunto diselamatkan. Beberapa kawasan sangat mempengaruhi karakter dan identitas kota belum tereksplorasi dengan maksimal untuk kepentingan perkembangan ekonomi masyarakat kota. Dalam upaya mewujudkan "Visi dan misi

[325] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 66 Tahun 2015 Tentang Museum

Sawahlunto sebagai kota pariwisata tambang berbudaya 2020", maka peningkatan sarana dan prasarana dasar perkotaan melalui pemulihan aset-aset kota tambang merupakan salah satu tindakan yang perlu dilakukan.[326]

Foto 2
Dapur memasak dengan teknologi uap di Sawahlunto tahun 1918

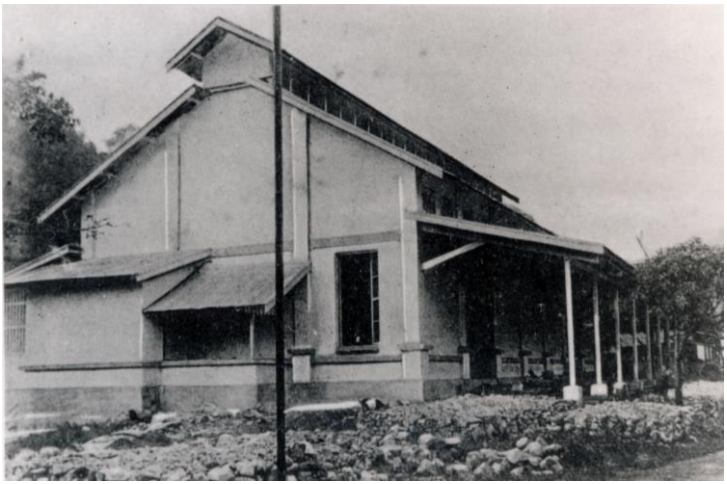

Sumber Foto:
Kromoblanda, 1921, ANRI Jakarta. Dok. Pusat Studi Humaniora (PSH) UNAND, 2016

[326] Dari Dapur Umum Sampai Museum Goedang Ransoem 1918-2005. Laporan Penelitian Kerjasama Pemerintah Kota Sawahlunto dengan Pusat Studi Humaniora Universitas Andalas Padang, 2007, hal. 49.

Foto 3
Pembangunan rumah ketel uap untuk dapur memasak di Sawahlunto tahun 1918

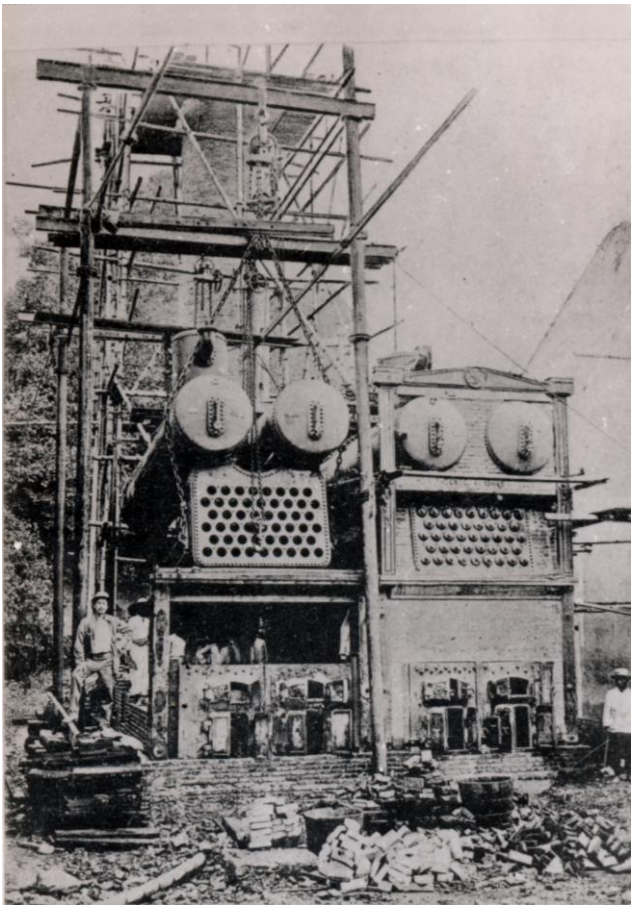

Sumber Foto:
Kromoblanda, 1921, ANRI Jakarta. Dok. Pusat Studi Humaniora (PSH) UNAND, 2016

Komplek Dapur Umum yang didirikan tahun 1918,[327] berada persis dipinggir Sungai Batang Lunto di Kelurahan Air Dingin Kecamatan Lembah Segar terdiri dari bangunan utama (dapur umum), Warehouse (gudang) persediaan bahan mentah, gudang padi dan beras, steam generator (tungku uap panas) dengan menara cerobong udara/asap, pabrik es balok, heuler (penggilingan padi), rumah kepala ransum, pos jaga, pemotongan hewan dan rumah hunian kepala rumah potong hewan. Bangunan komplek bekas bekas Dapur Umum itu sebelum direvitalisasi sebagai hunian masyarakat. Beberapa peralatan seperti penggorengan, periuk ketel berpindah dan tersimpan pada masyarakat. Sebuah kemajuan teknologi memasak skala besar hadir di Sawahlunto sejak akhir abad 19.[328]

Dalam waktu bersamaan, aktivitas persiapan penyelenggaraan Museum Kereta Api dengan memanfaatkan aset bangunan Stasiun Kereta Api Kota Sawahlunto. Untuk itu dilakukan pembenahan bangunan Stasiun Kereta Api yang berlangsung sejak 10 Nopember. Sementara itu rehab dan mobilisasi gerbong kereta api dari Padang ke Sawahlunto dilakukan atas kerjasama dengan PT. KAI Sumatera Barat dengan Pemerintah Kota

[327] Erwiza Erman, (2005). Membaranya Batubara: Konflik Kelas dan Etnik, Ombilin-Sawahlunto Sumatera Barat (1892-1996). Jakarta: Desantra, hal. 48.

[328] Dari Dapur Umum Sampai Museum Goedang Ransoem 1918-2005. Laporan Penelitian Kerjasama Pemerintah Kota Sawahlunto dengan Pusat Studi Humaniora Universitas Andalas Padang, 2007, hal. 49.

Sawahlunto berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 556/04/SPK-Par-Swl/2005 tanggal 14 November 2005.[329]

Pembukaan dan peresmian Museum Goedang Ransoem dan Museum Kereta Api diagendakan tanggal 17 Desember 2005 terjadwal ke dalam rangkaian Musyawarah Besar (Mubes) Gerakan Ekonomi dan Budaya (GEBU) Minang yang berlangsung dari tanggal 16 sampai dengan 18 Desember 2005 Aula Balai Diklat Tambang Bawah Tanah Sungai Durian Sawahlunto. Setelah pembukaan GEBU Minang [330], oleh Wakil Presiden Republik Indonesia M. Jusuf Kalla. Pada tanggal 17 Desember 2005, pukul 10.00 Wib Wakil residen Republik Indonesia M. Jusuf Kalla melakukan penandatanganan prasasti peresmian Museum Goedang Ransoem dan Museum Kereta Api bertempat di Museum Goedang Ransoem. Wakil Presiden M. Jusuf Kalla dan Gubernur Sumatera Barat Gamawan Fauzi beserta rombongan memasuki ruang pameran menyaksikan benda-benda koleksi tinggalan Dapur Umum dan Benda Koleksi Kereta Api yang sebagian disajikan di Museum Goedang Ransoem dalam rangka peresmian tersebut. Momentum itu dihadiri dan ikut menyaksikan pemerintah propinsi, stakeholder, tokoh dan elemen masyarakat, pelajar dan undangan serta media cetak dan elektronik.

---

[329] Lihat juga Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2005, hal. 590

[330] Balai Diklat Tambang Bawah Tanah Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia sebelumnya merupakan Ombilin Mining Training Centre (OMTC).

Sekitar 3.000 manusia memadati kawasan museum dan jalan menuju Museum Goedang Ransoem.[331]

Foto 4
Eks. Bangunan Dapur Umum setelah
konservasi/revitalisasi
dan difungsikan sebagai Museum Khusus Dapur Umum
pada tahun 2005

Sumber Foto:
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Sawahlunto.

[331] Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2005, hal. 590

Foto 5
Komplek Museum Goedang Ransoem (Eks. Dapur Umum)
Dengan Latar Perbukitan dan Pemukiman

Sumber Foto: Video Capture, KPBP Sawahlunto, 2015.

Penyelenggaraan dua museum di penghujung tahun 2005 itu disusul dengan pembangunan obyek dan wahana wisata lainnya di tahun-tahun berikutnya. Tahun 2006 direncanakan dan dibangun wahana wisata air modern berbasis wisata keluarga. Wisata air *waterboom* dibangun di areal kolam pemandian Air Dingin di Muara Kalaban. Kolam pemandian itu merupakan kolam pemandian yang sudah ada sejak era kolonial Belanda. *Het zwembassin in Moeara Klaban is wonderschoon gelegen en heeft voor ons Westerlingen een bijzondere bekoring*.[332] Kolam renang yang

[332] Nieuwe Tilburgsche Courant, Donderdag 13 Januari 1927, hal.

mengagumkan terletak di Muara Kalaban dan memiliki daya tari khusus bagi kita orang Barat. Demikian koran *Nieuwe Tilburgsche Courant*, menuliskan kesan orang Belanda (Eropa) di Sawahlunto terhadap kolam renang yang terletak di Muara Kalaban.

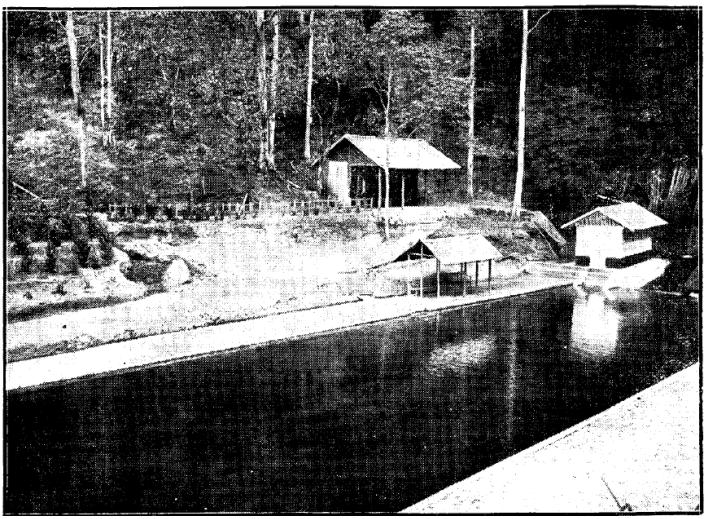

Sumber Foto: *Nieuwe Tilburgsche Courant*, Donderdag 13 Januari 1927

Pada tahun 2001 kolam renang itu ditata dengan nama Kolam Renang Air Dingin. Tahun 2006 kolam renang ini dijadikan obyek wisata air dengan nama *waterboom* Kota Sawahlunto yang dilengkapi wahana seluncuran. Untuk kenyamanan dan kepuasan pengunjung tersedia pula pujasera (food court), gazebo, taman dan outbond (flying fox, v-brige, spider web).[333] Kehadiran wahana wisata air

[333] Sawahlunto Kota Wisata Tambang Yang Berbudaya. *Booklet*, hal. 42-43.

(waterboom) di Kota Sawahlunto merupakan sebuah terobosan dan inovasi tidak hanya bagi Sawahlunto sendiri pada masa ini. Sawahlunto dapat dikatkan menjadi pioner. Sebagai daya tarik baru di Sumatera Barat dan melihat apresiasi pengunjung yang datang dari berbagai daerah Sumatera Barat, bahkan dari luar Provinsi Sumatera Barat seperti dari Riau dan Jambi. Maka pada tahun 2007 dirancang pembangunan waterboom tahap II dengan memperluas lahan dan dan pembuatan kolam beserta seluncurannya. Pembangunan waterboom tahap II dilaksanakan dalam dua tahun anggaran 2007 dan 2008. Pekerjaan pembangunan fisik dimulai sejak Desember 2007 hingga pertengahan tahun 2008 direncana sudah selesai dan siap beroperasi.[334]

Waterboom Sawahlunto terus berbenah diri dengan menambah kolam maupun seluncuran yang meliuk-liuk dari atas bukit. Bouncer atau sebuah Game Zone yang khusus diperuntukkan buat anak-anak juga bisa ditemui di Waterboom Sawahlunto[335] Sehingga pada hari-hari liburan obyek wisata air di Muara Kalaban dikunjungi wisatawan dari berbagai daerah. Letak yang strategis, persis berada dijalur Jalan Negera Lintas Sumatera memudahkan untuk dijangkau. Pada musim liburan panjang lokasi ini dipadati pengunjung dari berbagai penjuru, tidak ayal lagi jalur ini terkadang menjadi macet.

---

[334] Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kota Sawahlunto (LKPJ) Tahun 2007, hal. 861.

[335] http://www.wisatakandi.com/2010/02/waterboom-sawahlunto.html. Diakses 30 Agustus 2016, pukul 13:41:45

Kehadiran waterboom Sawahlunto menjadi inspirasi pelaku usaha pariwisata di Sumatera Barat. Pada tahun-tahun berikutnya wahana wisata serupa bermunculan dibeberapa tempat di Sumatera Barat sebagai kompetitor waterboom Sawahlunto. Untuk pengembangan lebih maksimal dan untuk memberikan pelayanan lebih baik terhadap pengunjung; maka Objek Wisata Waterboom Sawahlunto yang selama ini dikelola oleh Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto. Sejak tahun 2009 pengelolaan waterboom Sawahlunto dilakukan pihak Swasta yaitu PT. WWS (Wahana Wisata Sawahlunto).[336]

Foto:

Kolam dan seluncuran waterboom Sawahlunto tahap II

Sumber Foto: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Sawahlunto

[336] *Ibid*.

Bagi para pengunjung yang tidak ingin berendam dalam air kolam dan berseluncur, sekedar ingin bersantai sambil menunggu keluarga/kerabatnya bisa browsing di dunia maya atau bermain game online dalam areal waterboom Sawahlunto dapat memanfaatkan fasilitas internet gratis dengan adanya area Hot Spot (WIFI). Ataupun jika sedang tidak ingin melakukan aktifitas apapun bisa beristirahat dengan suasana alam yang asri dengan bersantai di gazebo-gazebo yang tersebar di sekitar bukit. Fasilitas lainnya yang ada di Waterboom Sawahlunto antara lain: slide/seluncuran yang dibedakan antara seluncuran untuk anak-anak dan untuk pengunjung dewasa, flying fox, pujasera, klinik, dan lainnya.[337]

Rancangan pengembangan dan pembangunan obyek wisata lainnya di Utara Sawahlunto juga diwujudkan. Pada kawasan bekas penambangan batubara secara terbuka di Tanah Hitam dalam kawasan Kandi secara bertahap dikembangkan sebagaimana yang tergambar pada *master plan* pengembangan Kawasan Kandi yang memiliki lahan hampir 400 hektar. Lahan seluas itu dirancang menjadi Resort Kandi dengan berbagai sarana prasarana dan fasilitas pendukungnya seperti; akomodasi, perkantoran, gelanggang pacuan kuda, taman satwa kandi, peternakan lembu betina subur, outbound dan camping ground, stadion olahraga, pengembangan taman safari, rehabilitasi

[337] *Ibid.*

narkoba, arena road race, motor cross, perumahan, home industri, hutan penyangga dan kawasan untuk olahraga.[338]

Pengembangan dan penataan danau di kawasan Kandi direalisasikan dalam tahun itu juga. Danau Tandikek sebagai salah satu danau yang terbentuk akibat penambangan terbuka menjadi salah satu potensi yang dipacu penataan lingkungan membuat kanal, dermaga, plaza, gazebo, pedestrian. Beragam wahana wisata air mulai dari *rubber boat banana boat*, kayak, ski air dan sejumlah fasilitas permainan dihadir untuk menjadikan Danau Kandi sebagai destinasi wisata. Dalam menarik daya tarik obyek pengunjung disediakan wahana dan fasilitas permainan seperti rubber boat, sepeda air, kayak single, kayak double, alat selam, ATV, Mini Trail.[339]

Taman Satwa dihadirkan pula menyatu dengan wahana wisata air Danau Tandikek. Sebuah inovasi dalam mengemas daya tarik wisata kembali ditunjukkan Sawahlunto masa itu dengan memadukan antara obyek wisata alam, wahana wisata air, Taman Satwa. Lingkungan Taman Satwa dan Danau Tandikek yang sebelumnya ditata pula dengan dengan membuat taman dan penanaman pohon penghijauan agar menjadi asri dan nyaman bagi wisatawan.

[338] Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kota Sawahlunto (LKPJ) Tahun 2007, hal. 819-820.

[339] Ibid, hal. 822-825.

Keberadaan Lubang Soegar[340] dengan nilai sejarah dan potensi serta untuk menunjukkan kekhasan pariwisata Sawahlunto. Serangkaian kegiatan survey dan studi sejarah maupun studi teknis arkeologis bangunan kolonial kota Sawahlunto yang dilaksanakan atas kerjasama Pemerintah Kota Sawahlunto dengan Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Sumbar-Riau di Batusangkar pada bulan Juni 2007. Pemerintah Sawahlunto melanjutkan kerjasama dengan berbagai pihak terkait dalam upaya membuka lubang Soegar untuk dilakukan konservasi dan revitalisasi. Sehingga Lubang Soegar dapat ditata senyaman mungkin sebagai obyek kunjungan wisata. Melalui sebagian bantuan dana pusat Lubang Soegar dibuka untuk konservasi/revitalisasi. Dalam bulan April tahun 2008 Lubang Soegar diresmikan sebagai Obyek Wisata Lubang 'Mbah Soero'. Obyek wisata baru ini tentu memperkukuh Sawahlunto Kota Wisata Tambang. Obyek wisata tambang itu dinamai dengan Obyek Wisata Tambang Lubang 'Mbah Soero' juga dilengkapi sebuah Gedung Infobox sebagai Galeri Tambang Batubara Sawahlunto.

Obyek wisata yang populer dengan obyek wisata situs Lubang 'Mbah Soero' itu memanfaatkan potensi bekas Lubang Soegar yang berlokasi di pusat kota Sawahlunto. Kehadiran obyek wisata Lubang 'Mbah Soero' itu semakin

[340] Berdasarkan peta arsip pertambangan PT. BA-UPO, nama lubang ini ditulis Mond Mind (M.M) Soegar. Namun adakalanya juga masyarakat menyebutnya dengan Lubang Air Dingin, barangkali letaknya berdekatan daerah Air Dingin. Namun dalam dunia kepariwisataan Sawahlunto, apalagi setelah tahun 2008 nama lubang ini lebih populer dengan nama Lubang 'Mbah Soero'

mempertegas langkah Sawahlunto sebagai Kota Wisata Tambang. Mengelola dan memanfaatkan warisan pertambangan baik warisan budaya benda (fisik) maupun non-benda semaksimalnya dalam berbagai inovasi-inovasi yang mempertunjukkan kekhususan karakteristik. Sehingga membedakan pariwisata Sawahlunto dengan pariwisata lainnya di berbagai tempat.

Dalam tahun 2008 itu, tidak hanya obyek wisata Lubang 'Mbah Soero' dipersembahkan sebagai obyek kunjungan wisata. Bersamaan itu sebuah obyek wisata pendidikan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi yang dinamai IPTEK Center Kota Sawahlunto turut pula diresmikan dan dibuka untuk umum. Iptek Center itu dihadirkan dalam komplek Museum Goedang Ransoem. Miniatur berbagai alat peraga dan wahana ilmupengetahuan disajikan disini. Prisnsip-prinsip, proses, hukum kimia, fisika, matematika, listrik dari bentuk sederhana hingga teknologi tinggi dapat diamati dan dipraktekkan di Iptek Center Kota Sawahlunto.

Iptek Center Kota Sawahlunto dibangun dengan memanfaatkan salah satu ruang bangunan bekas komplek Dapur Umum (Goedang Ransoem). Pemanfaatan bekas bangunan Gudang Padi dan Beras itu setelah dilakukan pemugaran. Kehadiran Iptek Center Kota Sawahlunto merupakan Iptek Center ke lima di Indonesia atau pertama di Sumbar.[341] Keberadaan Iptek Center Kota Sawahlunto dilingkungan Museum Goedang Ransoem merupakan

[341] Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2008, hal. 875-876.

terobosan dan inovasi bentuk lainnya. Tidak berlebihan bila dikatakan memadukan dan mendekatkan kebudayaan dan peradaban masa lalu manusia (museum) dengan masa kini dan masa depan manusia (Iptek Center).

E. Pariwisata Tekan Angka Kemiskinan di Sawahlunto

Kajian tentang peranan pariwisata untuk menanggulangi kemiskinan merupakan kecenderungan global setidak-tidaknya sejak akhir 1990-an, bersamaan dengan tumbuhnya semangat MDGs. Kecenderungan ini kian meningkat pasca-peluncuran program MDGs. Sarjana dan aktivitis pembangunan di Amerika dan Eropa menjadikan program MDGs sebagai landasan untuk ramai-ramai mendirikan NGO di bidang pariwisata.[342]

Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisaman) ke Indonesia berkorelasi kuat terhadap angka penduduk miskin. Untuk terus mengurangi angka kemiskinan diperlukan usaha-usaha untuk meningkatkan angka kunjungan wisata. Kedatangan wisatawan mancanegara maupun domestik memberikan kontribusi pada perekonomian dan pembukaan lapangan pekerjaan. Hal ini merupakan kondisi penting untuk meretas jalan mengentaskan kemiskinan.[343]

Pada tahun 2000-an angka kemiskinan di Kota Sawahlunto mencapai 10%. Kini, tahun 2011 menurut data

[342] I Nyoman Darma Putra dan I Gde Pitana, (2010). Pariwisata Pro-Rakyat: Meretas Jalan Mengentaskan Kemiskinan di Indonesia. Jakarta: Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia, hal.9.

[343] *Ibid*, hal.25.

BPS angka tersebut menjadi 2,4% saja. Dalam skala nasional, Kota Sawahlunto menduduki urutan kedua, setelah Kota Denpasar, sebagai kota yang memiliki angka kemiskinan terendah. Terkait hal itu, Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) atau yang sekarang bernama Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan didaulat sebagai salah satu program yang membantu pemerintah Kota Sawahlunto mengurangi angka kemiskinan.[344]

Pada tahun 2013 Wali Kota Sawahlunto, Amran Nur mengatakan angka kemiskinan dapat ditekan hingga semenimal mungkin, hingga satu persen. Pernyataan itu disampaikan dalam prosesi makan Bajamba di Ulang tahun kota Sawahlunto ke 123 pada Kamis 1 Desember 2011. Salah satu caranya, yakni dengan menggiatkan pariwisata, karena pariwisata merupakan salah satu jalan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Banyak pihak yang akan mendapatkan keuntungan dari pariwisata, tidak hanya masyarakat luas, masyarakat sawahlunto juga akan menikmati dampak positif dari pariwisata, kata Amran. Tidak hanya pariwisata, sektor lainnya juga di galakan, seperti halnya pertanian yang telah menunjukan hasil positif seperti beberapa desa di Kota Sawahlunto, seperti

[344] Wawako Sawahlunto: Angka Kemiskinan Tinggal 2,4% Sawahlunto, 14 Oktober 2011. http://www.p2kp.org/wartaprint.asp?mid=4108&catid=1&&14/10/201. Diakses Rabu, 14 September 2015, Pukul 10:21.48 WIB.

halnya desa Balai Batu Sandaran (BBS) yang berhasil dalam menekan angka kemiskinan dengan pertanian.[345]

Berbicara mengenai pariwisata di kota Sawahlunto, tentu tidak dapat dilepaskan dari peranan kepemimpinan Ali Yusuf S.Pt dan Ismet, S.H sebagai pasangan Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto. Pada kurun waktu 2013-2014 pasangan ini terus menggenjot pariwisata yang ada di Sawahlunto, bukan hanya dalam bidang pariwisata saja mereka juga mengembangkan ekonomi kreatif yang nantinya atau tentu saja akan meningkatkan perekonomian dari masyarakat Sawahlunto.

Berbagai destinasi untuk pariwisata di Sawahunto ditawarkan pada masa pemerintahan Ali Yusuf, S.Pt dan Ismer, S.H, tentu saja wisata tambang dan wisata sejarah menjadi bagian utama dalam pariwisata Sawahlunto. Selain pilihan dua wisata utama tersebut, pemerintah Sawahlunto juga membuka destinasi wisata yang tidak kalah menariknya untuk individu, keluarga maupun kelompok. Destinasi tersebut adalah waterboom, wisata alam, wisata religi.

Kinerja pemerintah Sawhlunto untuk menggiatkan pariwisata dan ekonomi kreatif kota Sawahlunto tersebut tidak sia-sia belaka. Pada tahun 2013 Walikota Sawahlunto Ali Yusuf, S.Pt menerima penghargaan dalam bidang pariwisata yang diberikan oleh Tourism Tour pada tahun

---

[345] Syafril Adriansyah. *Wako: 2013 Angka Kemiskinan di Sawahlunto Tinggal Satu Persen*. Kamis, 1 Desember 2011 21:55 WIB. http://sumbar.antaranews.com/berita/133193/wako--2013-angka-kemiskinan-di-sawahlunto-tinggal-satu-persen.html. Diakses Rabu, 14 September 2015, Pukul 10:15.59 Wib.

2013.[346] Penghargaan ini memperlihatkan bahwasannya perjuangan pemerintah Kota Sawahlunto dalam memperkenalkan potensi pariwisata yang ada di daerah mereka tidak merupakan sesuatu yang sia-sia belaka. Pemerintah Sawahlunto jeli mellihat prospek pengembangan pariwisata yang ada pada daerah mereka, terutama bagaimana pemerintah Sawahlunto menyajikan atau mengembangkan pariwisata yang berdasarkan kepada latar belakang sejarah daerah Sawahlunto itu sendiri. Bagaimana kemudian pemerintah Sawahlunto "meramu" dan "memoles" bangunan-bangunan, kawasan-kawasan bekas tambang dan alam Sawahlunto menjadi sebuah kesatuan daya tarik pariwisata di daerah ini. Bukan hanya itu saja, penghargaan tersebut juga memperlihatkan bagaimana peranan pemerintah dan masyarakat Kota Sawahlunto dalam mempromosikan potensi wisata mereka bukan saja di dalam negeri, akan tetapi sampai ke luar negeri sehingga menarik minat bukan saja para wisatawan domestik saja untuk datang, namun juga wisatawan asing tertarik untuk mendatangi daerah ini.

346

Tourism Award yang diterima Walikota Ali Yusuft, S.Pt untuk Kota Sawahlunto sebagai *The Most Improved* dari Travel Club Tahun 2013

Keinginan pemerintah Sawahlunto dalam mempromosikan dan mengembangkan potensi pariwisata Kota Sawahlunto tidak berhenti sampai di sini saja. Penghargaan demi penghargaan dalam bidang pariwisata dan kebudayaan kembali diraih oleh kota yang memiliki sejarah sebagai kota tambang ini. Hal ini dibuktikan dengan ditetapkannya Sawahlunto sebagai Kawasan Cagar Budaya Tingkat Nasional dipenghujung tahun 2014. penghargaan yang diperoleh oleh Sawahlunto ini menjadi pengantar bagi kota arang tersebut untuk masuk dalam *tentative list* UNESCO pada tahun 2015 untuk dijadikan sebagai daerah warisan budaya dunia.

Persiapan demi persipan kemudian dilakukan oleh pemerintah Sawahlunto untuk mewujudkan mimpi kota ini. Dimulai tahun 2015 hingga pertengahan tahun 2016 untuk melengkapai data menuju kota warisan cagar budaya dunia, pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan beserta kementerian terkait lainnyamemfasilitasi dan memprioritaskan untuk memberikan sebuah pendampingan dalam rangka mempersiapkan, membahas dokumen pengajuan ke lembaga internasional UNESCO. Bukan hanya sebatas pelengkapan dokumen saja, pemerintah juga mengakomodasikan para pakar ahli untuk melaksanakan serangkaian pengkajian nantinya terkait dengan dokumen dan data-data yang telah dipersiapkan oleh pemerintah Kota Sawahlunto. *Sawahlunto Coal Mining Industrial Heritage* menjadi tema untuk mempersiapkan diri menuju warisan budaya ineternasional UNESCO.

Berbagai progaram dilaksanakan oleh pemrintah Kota

Sawahlunto, khususnya dinas Pariwisata untuk pelaksanaan pengembangan dan pemasaran pariwisata Kota Sawahlunto. Langkah-langkah tersebut antara lain:

a. Melaksanakan kegiatan promosi pariwisat baik di dalam maupun di luar negeri. Promosi ini sendiri dilaksanakan melalui media cetak, pembuatan souvenir, media elektronik, kegiatan fasilitasi dan lain sebagainya.
b. Kegiatan mengikuti event/ bazar/ pameran/ maupun promosi industri pariwisata. Kegiatan tersebut antara lain Pameran dan demo Tenun Silungkang, Bazaar Produk Kreatif Sawahlunto, Pameran Foto Sawahlunto, Pertunjukan Kesenian Tradisi Sawahlunto dan Workshop serta diskusi dengan tema Tenun Silungkang.
c. Pelaksanaan kegiatan *Tour De Singkarak*. Melalui kegiatan ini pemerintah Kota Sawahlunto khususnya Dinas Pariwisata mencoba untuk memperkenalkan Kota Sawahlunto sebagai salah satu kota destinasi wisata terutama dalam pariwisata sejarah kota tua dan museum. Melalui kegiatan ini diharapakan jumlah pengunjung yang akan datang ke Sawahlunto nantinya akan terus mengalami peningkatan sehingga perekonomian masyarakat dengan sendirinya juga akan terangkat.

Pemerintah kota Sawahlunto juga mengadakan program destinasi pariwisata. Kegiatan ini mencakup pembangunan sarana dan prasarana wisata kota Sawahlunto, kegiatan perencanaan pengembangan objek wisata kota Sawahlunto.

Tahun 2014 pemerintah Kota Sawahlunto menambah agenda kerja terkait dengan promosi pariwisata, Dinas Pariwisata mengadakan kegiatan yang bertema Sport Tourism. Kegiatan atau event yang dilaksanakan berstandar nasional dan berbentuk suatu pertandingan olah raga yang diadakan pada kawasan-kawasan pariwisata Sawahlunto. Contoh kegiatan ini adalah pertandingan sepakbola yang diadakan di lapangan Silo Saringan Kota Sawahlunto, Mountain Bike Adventure, Sawahlunto Trail Adventure Community, dan Lomba Burung Berkicau.

Kegiatan Sport Tourism ini menjadi salah satu langkah pemerintah kota Sawahlunto untuk memperkenalkan dan mengembangkan potensi pariwisata yang ada di Sawahlunto. Melalui atlet, pecinta olah raga, pecinta burung berkicau, pelaku official yang datang ke Sawahlunto diharapkan mereka dapat membantu untuk memperkenalkan dan meningkatkan pengunjung pariwisata ke kota Sawahlunto.

F. Wisata Kota Tua, Kota Warisan

Sebuah pertanyaan yang patut diajukan adalah apa yang menjadi dasar pengelolaan Cagar Budaya di Kota Sawahlunto ? dan Cagar Budaya apa saja yang terdapat dan dikelola di Kota Sawahlunto ? pertanyaan ini penting diajukan ketika banyak daerah, khususnya di Sumatera Barat sunyi dari wacana-wacana masa lalu Sawahlunto justeru berada diwilayah sepi itu, namun kenyataannya mendapat apresiasi dan dukungan dari berbagai pihak.

Tertanggal tanggal 29 September 2016, Kantor Delegasi Tetap Republik Indonesia untuk UNESCO bertempat di Paris mengirimkan Surat No: 176/KWHRIU/IX/2016 ke Pemerintah Indonesia di Jakarta melalui Kementerian Pendidikan dan kebudayaan yang menginformasikan bahwa Delegasi Tetap Republik Indonesia untuk UNESCO di Paris telah meneruskan draft berkas nominasi *Warisan Budaya Tambang Batubara Ombilin Sawahlunto* ke UNESCO lembaga internasional yang menangani warisan-warisan diberbagai belahan dunia untuk dinobatkan sebagai Warisan Budaya Dunia.

Usaha pelestarian warisan budaya di kota Sawahlunto menuju wacana Warisan Budaya Dunia bukan tanpa alasan. Sebelum melangkah menuju warisan budaya dunia Sawahlunto telah mencapai warisan nasional melalui Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 29 Desember 2014 Nomor: 345/M/2014 Tentang *Penetapan Satuan Ruang Geografis Kota Lama Tambang Batubara Sawahlunto Sebagai Kawasan Cagar Budaya Peringkat Nasional*. Pencapaian penting ini membuka peluang Sawahlunto sebagaimana dalam UU No. 11 Tentang Cagar Budaya pada Bab VI Register Nasional Cagar Budaya Bagian Kelima Pemeringkatan Pasal 46 yang berbunyi: *"Cagar Budaya peringkat nasional yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya Nasional dapat diusulkan oleh Pemerintah menjadi warisan budaya dunia."*

Anugerah Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman di Museum Nasional yang digelar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun 2014. Sawahlunto memperoleh dua

pengharagaan dalam anugerah *Sebagai Kota Pelestari Cagar Budaya & Peduli Museum di tahun 2014* ini untuk kategori, *pertama***,** Pemerintah Kota Pelestari Cagar Budaya,[347] dan *kedua*, Pemerintah Kota/Kabupaten Peduli Museum.[348] Tahun-tahun sebelumnya Sawahlunto dinobatkan pula Sebagai Kota Pusaka (2013-2015). Sawahlunto bersama (Banda Aceh, Palembang, Bogor, Semarang, Yogyakarta, Denpasar, Karangasem, Baubau, Banjarmasin) berada dalam kelompok A yang dinilai sebagai kota yang *memiliki pemahaman pusaka yang baik;* kota yang *memiliki beragam program pelestarian pusaka*; dan kota yang berupaya dalam pendataan aset-aset pusakanya.[349]

Setidaknya Cagar Budaya yang dilestarikan di kota Sawahlunto sudah mencapai angka lebih kurang 1000 benda koleksi dan bangunan, situs dan fitur Cagar Budaya. Cagar Budaya berupa benda koleksi diantaranya dilestarikan, disajikan dan dikomunikasikan kepada khalayak melalui museum-museum di kota Sawahlunto

[347] Penghargaan itu diterima diterima langsung Walikota Sawahlunto Ali Yusuf, S. Pt beberapa daerah Kota Semarang, Kota Surakarta, D.I Yogyakarta, Kota Surabaya dan Kota Sawahlunto.

[348] Kota Sawahlunto menyisihkan tiga kota/kabupaten lainnya yang masuk nominasi yaitu Pekalongan, Surabaya dan Kabupaten Sintang Kalimantan Barat.

[349] Lihat misalnya Sawahlunto Mengepakan Sayap: 2 Tahun Pengabdian Walikota-Wakil Walikota Sawahlunto 25 Juni 2013- 25 Juni 2015, Periode 2013-2018. Pemerintah Kota Sawahlunto, 2015, hal. 174 dan Sawahlunto Mengepakan Sayap: 3 Tahun Pengabdian Walikota-Wakil Walikota Sawahlunto 25 Juni 2013- 25 Juni 2016, Periode 2013-2018. Pemerintah Kota Sawahlunto, 2016, hal. 167

diantaranya Museum Goedang, Museum Kereta Api dan Museum Situs Lubang Tambang Mbah Soero-Galeri Tambang Infobox serta Museum Tambang Batubara Ombilin: Pusat Dokumentasi dan Arsip PT BA-UPO). Ratusan dokumentasi foto bernilai sejarah peting juga menjadi khazanah tentang kemasalaluan kota Sawahlunto, dan itu dapat pula dijumpai di museum-museum tersebut. Sedangkan Cagar Budaya berupa bangunan kalau hendak disebutkan secara khusus hingga tahun 2015 sudah terdaftar sebanyak 74 Bangunan Cagar Budaya dari lebih 100 bangunan warisan budaya dari era kolonial Belanda dengan arsitektur lokal dan *Indish*. Bagaimana Sawahlunto mencapai itu semua ?

Wilayah nusantara sebagian besar dimasa lalu pernah menjadi koloni Belanda. Begitupun Sawahlunto. Kita semua tahu, Sawahlunto lahir, tumbuh dan berkembang dari sebuah aktivitas pertambangan dari masa Hindia Belanda. Jejak dan warisan pertambangan di daerah ini begitu kental, terutama dalam bentuk bangunan-bangunan fisik. Pada masa Walikota Drs. H. Shaimoery, W.S (Periode Tahun 1971-1983) pemikiran bagaimana Kota Sawahlunto pasca tambang juga muncul. Kemudian tahun 1990-an identifikasi terhadap Cagar Budaya Sawahlunto pun dilakukan Balai Pelestarian Sejarah dan Purbakala Batusangkar. Barulah pada tahun 2002 Pemerintah Kota Sawahlunto bekerjasama dengan Badan Warisan Sumatera Barat (BWSB) untuk melakukan inventarisasi dan pengkajian terhadap bangunan peninggalan kolonial Belanda di Sawahlunto. Laporan Badan Warisan Sumatera Barat itu, setidaknya terdapat 52 buah bangunan sebagai

potensi Cagar Budaya Kota Sawahlunto.[350] Tahun 2005 kerjasama antara Pemerintah Kota Sawahlunto dengan Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala (BP3) Batusangkar kembali dilakukan untuk mengidentifikasi dan menginventarisasi sekaligus melakukan kajian untuk mengklasifikasi bangunan-bangunan tersebut. Usaha itu kembali mencatatkan lebih 100 bangunan yang berpotensi sebagai Cagar Budaya Kota Sawahlunto. Setelah melalui pengkajian, 68 buah bangunan ditetapkan sebagai sebagai Cagar Budaya Kota Sawahlunto[351].

Pencapaian-pencapaian berupa apresiasi, anugerah dan penghargaan baik lokal, tingkat nasional bahkan menuju internasional sebagai Warisan Budaya Dunia bukanlah tujuan akhir. Proses pengelolaan warisan budaya sesungguhnya adalah membangun kesadaran bersama dari setiap elemen akan pentingnya menjaga warisan budaya material manusia dari masa lalu di Sawahlunto. Warisan budaya dapat menjadi sebuah media dialog manusia hari ini dengan masa lalu untuk mengkomunikasikan apa dan

---

[350] Lihat *Inventarisasi Bangunan Tua Bersejarah Kota Sawahlunto dan Usulan RANPERDA*, Buku-2., Kerjasama Pemda Kota Sawahlunto dengan Badan Warisan SUmatera Barat, 2002.

[351] Surat Keputusan Walikota No. 9 Tahun 2006 Tentang Penetapan Bangunan, Gedung, Komplek Bangunan, Situs dan Fitur. Surat keputusan itu kemudian direvisi menjadi Surat Keputusan Walikota No. 109 tahun 2007 Tentang Penetapan Kawasan Bersejarah, Bangunan, Gedung, Komplek Bangunan, Situs dan Fitur sebagai Benda Cagar Budaya. Berselang tidak lama waktu, dalam tahun 2007 itu juga diterbitkan pula Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2007 Tentang penetapan bangunan, gedung, komplek bangunan, situs dan fitur sebagai Benda Cagar Budaya.

bagaimana kehidupan manusia ke masa depan dengan berperadaban yang lebih baik dan maju.

Aspeknya administratif dan teknis pengelolaan dan pemanfaatan cagar budaya (heritage) di kota Sawahlunto memerlukan langkah-langkah strategis dengan koordinasi dan komunikasi yang intensif dengan lembaga dan pihak terkait. Kerjasama-kerjasama dibangun misalnya dengan Balai Pelestarian Cagar Budaya(BPCB) Wilayah Kerja Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau di Batusangkar. Lebih tinggi dengan pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta melalui Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman (PCBM) dan Internalisasi Diplomasi Budaya (INDB). Begitu pula dengan Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Propvinsi di Padang. Keterlibatan pihak akademisi, peneliti dan praktisi serta lembaga-lembaga pelestarian seperti dengan Pusat Studi Humaniora-Universitas Andalas, Pusat Kajian Arsitektur Universitas Bung Hatta, Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI), Badan Pelestarian Pusaka Indonesia (BPPI) dengan para pakarnya. Telah memberikan dorongan dan kontribusi yang tidak dapat diabaikan. Oleh karenanya selalu berkoordinasi, menjaga komunikasi serta kerjasama dibidang terkait menjadi kunci pencapaian ini.

Langkah strategis dalam tahun 2013-2015 misalnya; membangun dan meningkatkan komunikasi, serta koordinasi dengan berbagai elemen baik secara hosrzontal maupun vertikal secara kelembagaan, dengan Perguruan Tinggi dan akademisi serta komunitasdan masyarakat. Sawahlunto kemudian secara aktif menyikapi amanat

peraturan perundang-undangan sebagaimana point (3) pasal 31, Bagian Kedua, Bab VI, UU No. 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya. Tim Ahli Cagar Budaya Kota Sawahlunto kemudian disertifikasi Bidang Sertifikasi Pusat Pengembangan SDM Kebudayaan Badan Pengembangan SDM Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia pada April 2015. Peran aktif komunitas-komunitas didorong, karena komunitas memiliki potensi mempengaruhi sikap masyarakat disekitarnya. Karena itu komunitas adalah kekuatan dalam pembangunan kota Sawahlunto. Yaitu dengan membangun sinergitas yang kuat antara pemerintah dan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat.

Dukungan sosial Sawahlunto terhadap berbagai peninggalan, warisan, heritage, cagar budaya Sawahlunto itu terlihat dari hadirnya beragam perkumpulan dengan berbagai nama. Baik yang disebut sebagai komunitas, forum, persatuan dan lain sebagainya itu. Merupakan wujud dari tumbuhnya kesadaran dan partisipasi terhadap potensi peninggalan bersejarah, warisan, heritage, cagar budaya Sawahlunto. beberapa komunitas di kota Sawahlunto misalnya; Komunitas Arang, Komunitas Kuali, Komunitas Photography, Komunitas Kota Hijau Sawahlunto, Komunitas Heritage, Komunitas Onthel, Komunitas Bina Satria, Komunitas Harapan Jaya, Komunitas Sapu Jagad, Komunitas Tunggal Sekapal, Forum Lingkar Pena, Komunitas Guide, Komunitas Sejarah Sawahlunto, Persatuan Pedagang Kaki Lima Sawahlunto, Persatuan Ojek Sawahlunto, PORBBI Sawahlunto,

Komunitas Kalimasohodo, English Club Sawahlunto.[352]

Dalam membangun kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat terhadap peninggalan bersejarah dan Cagar Budaya Kota Sawahlunto. Pemerintah mengakomodir melalui Program dan Kegiatan *Fasilitasi dan Pembinaan Komunitas Pelestarian Warisan Budaya*. Dengan program dan kegiatan ini dilakukan dialog, workshop dan lokakarya. Pada Maret dan Juni tahun 2015 misalnya dihadirkan narasumber dan motivator penggiat komunitas nasional. Tahun 2016 program-program kegiatan dalam bentuk fasilitasi komunitas terus berlanjut hingga bentuk-bentuk fasilitasi kegiatan komunitas.

Seminar, workshop dan lokakarya diikuti atau bahkan diselenggarakan di Sawahlunto dalam rangka menggali dan mengembangkan potensi peninggalan bersejarahl kota Sawahlunto. Juni 2015 Kota Sawahlunto dipilih dan ditetapkan sebagai tempat penyelenggaraan *Pameran Perjalanan Warisan Budaya Dunia* disertai *Workshop* bagi daerah kota/kabupaten di Indonesia yang masuk Tentative List Word Heritage-UNESCO. Momentum seperti menjadi ruang dialog untuk saling berbagai dan berkoordinasi antar daerah. Hal ini sekaligus promosi secara langsung berbagai potensi pencapaian-pencapaian Sawahlunto dalam bidang *heritage,* pariwisata dan kebudayaan Kota Sawahlunto. Demikian pula dalam forum IMT-T 2015 *International Symposium on Livable Old-Town Tourism* di Songkhla Thailand. Kota Sawahlunto

[352] Data Komunitas Pada Kantor Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman Kota Sawahlunto tahun 2015.

berkesempatan bersama Palembang dan Medan mengikuti sebagai bentuk kerjasama Indonesia, Malaysia dan Thailand dengan melibatkan Pemerintah Daerah, Institusi Pendidikan, Sektor Bisnis, Parktisi dan Pakar.

Dalam hal pengelolaan warisan budaya berkaitan sumber daya manusia kota Sawahlunto mendapat perhatian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman, Balai Konservasi Borobudur dan Pusat Pengembangan Sumber Daya Kebudayaan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan, dengan memberikan kesempatan kota Sawahlunto untuk meningkatkan kompetensi dengan mengikuti berbagai bentuk pendidikan pelatihan dan bimbingan baik teknis maupun administrasi dan manajemen, hingga pendokumentasian cagar budaya secara berkesimbungan sejak tahun 2013. Dukungan itu bahkan dalam bentuk bantuan peralatan menunjang pengelolaan dan pengolahan data cagar budaya berupa; labtop, kamera digital, GPS digital, My book di tahun 2013.

Kota Sawahlunto merupakan kota yang bersejarah sejak lahirnya. Pertumbuhan dan perkembangannya hingga sekarang penuh dinamika. Keterkaitan dengan sumber daya alam batubara sangatlah erat dari masalalu. Itu pula yang membentuk karakter Kota Sawahlunto hingga bermetamorfosa dari Kota Industri Tambang Batubara ke Kota Industri Pariwisata.

Berbagai wacana global dan nasional pengembangan kebudayaan. Bagaimanapun juga pengembangan dan pengelolaan dari dalam sangat

menentukan masa depan kebudayaan lokal Sawahlunto. Terlebih ketika identitas kebangsaan yang terus merosot, masyarakat lebih percaya dengan identitas dan jati diri lain diluar akar dan nilai budayanya. Padahal yang datang dan kepunyaan orang lain itu belum tentu lebih baik dari potensi budaya lokal. Kemandirian untuk bersaing dengan akar budaya lokal perlu ditumbuhkan dengan menggali sejarah, nilai budaya dan pengelolaan baik tinggalan fisik dan non fisik agar tergali lebih jauh untuk penguatan jati diri ditengah arus globalisasi, keterbukaan informasi komunikasi yang menembus batas ruang dan waktu.

BAB VII
EPILOG
DARI BATANG LUNTO KE HILIR : MENUJU KOTA WISATA 2020

"Sering masa depan dari sebuah fiksi,
namun fiksi yang baik berangkat dari sejarah
sejarah akan memberikan identitas dan keyakinan
keyakinan adalah awal sebuah peradaban"

Beragam pendapat mengenai asal nama "Sawahlunto". Ada yang mengatakan "Sawahlunto" itu berasal dari kata "sawah" urang Lunto, sebuah nagari di sebalah Barat kota. Kata itu juga berasal dari sawah yang diairi Batang Lunto yang ternyata memang menjadi saksi sejarah sejak negeri ini belum ada penghuninya. Pada sisi lain, nama itu berasal dari "sawah" urang Kubang di tepi Batang Lunto. Nagari Kubang dan Lunto memang berdekatan dengan kota itu. Apapun asal katanya, tampaknya kedua masyarakat ini berasal dari ninik yang sama, yaitu ninik yang sebelas. Lima orang tinggal di Lunto dan orang berangkat ke Kubang. Kemudian masyarakat kedua nagari itu, sebelumnya menjadikan areal pasar kota Sawahlunto itu sekarang itu sebagai tempat pertanian mereka.

Satu versi cerita mengenai Sawahlunto tentu menarik juga untuk dikemukakan. Sawahlunto sebelum dieksploitasi oleh kolonial Belanda pernah dikuasai oleh seorang Tuanku Rawang, ia menguasai tanah-tanah yang berawa-rawa di sekitar Pasar Oesang. Ia sendiri orang Kubang, atau asli di tempat pasar itu tumbuh. Ia orang paling kaya di nagari Kubang. Sebelum Belanda masuk dan berkuasa di Sawahlunto, kiranya masyarakat sudah menjadikan tanah-tanah Tuanku Rawang itu sebagai tempat transaksi jual beli. Pasar itu dikuasai oleh inyiak dagang. Inyiak dagang adalah penguasa pasar dalam hal mulai memungut pajak, upeti dan keamanan.

Fungsi pasar itu hanya menampung sedikit komoditi hasil pertanian yang berasal dari daerah-daerah sekitarnya. Barang-barang seperti beras dan pakaian selalu tidak cukup dari hasil pertanian Sawahlunto, karena itu orang-orang Solok sering datang ke Sawahlunto untuk berjualan. Sebelum kereta api benar-benar berfungsi untuk angkutan masyarakat di Sawahlunto, masyarakat sering berpergian ke berbagai tempat di sekitarnya dengan jalan kaki, dan sebahagian ada juga yang menggunakan kuda beban untuk mengangkut barang dagangan.

Kota Sawahlunto dibelah oleh dua sungai yang arus airnya tidaklah deras, yaitu Batang Lunto yang mengalir dari arah Barat Daya ke Timur dan Batang Sumpahan yang mengalir dari arah Barat Laut ke Timur. Dua sungai ini bergantung pada curah hujan. Batang Lunto yang mengalir ke arah Timur, mempunyai peran sangat penting dalam sejarah Sawahlunto. Ketika Belanda belum mengeksploitasi batu bara di kota tersebut, air Batang

Lunto digunakan oleh penduduk sekitarnya untuk mengairi sawah-sawah mereka. Kemudian dari sungai itu juga penduduk mengambil air untuk rumah-rumah mereka dengan mengalirkan dengan pipa-pipa. Bagi de Greve, yang menemukan batu bara di sana, formasi batu bara di kawasan Sungai Durian untuk pertama kali ditambang sekitar Batang Lunto hingga menjadi eksploitasi besar-besaran. Sungai Lunto juga menjadi sumber daya lain, dipinggir sungai itu di Kubang Siarakuak didirikannya pembangkit listrik tenaga uap yang mensuplai kebutuhan energi listrik pertambangan, kota dan warganya.

Batang Lunto yang berhulu di Lumindai tidaklah berair deras, namun kolonial Belanda telah membuatkannya dam-dam hingga airnya tergenang untuk kebutuhan pembangkit tenaga listrik tenaga uap yang dibangun sejak awal abad 20 itu. Pembangunan pembangkit listrik itu tentu punya kaitan besar dengan batu bara, yang secara tidak langsung terkait pula degan dinamika pembangunan transportasi kereta api di berbagai tempat di Sumatra Barat. Di pinggir Batang Lunto itulah dibangun bangunan *Central Electrich*, yang menaranya setinggi 70 m. Menara itu diberi jenjang, antara jenjangnya berjarak 30 cm. Pembangunan menara setinggi itu tampaknya tidak hanya sekedar untuk cerobong tekanan udara pembakaran pada ketel uap. Tapi sekaligus untuk mengantisipasi agar kepulan asap tidak membahayakan masyarakat dan lingkungan. Puncaknya berdiameter 3 m. Menara itu terdiri delapan kisi dan mempunyai anti petir. Tiap kisi ada 3 anti petir (semuanya 24 anti petir). Anti petir itu terdiri dari tembaga yang memanjang dari puncak ke

dasar bangunan, terus ke batang air.[353] Aktivitas berbagai komponen yang membutuhkan tenaga listrik bergantung pada air Batang Lunto yang mengalir ke hilir itu. Bila air Lunto tak mengalir lagi, ketel uap tidak akan mampu menghasilkan uap untuk menggerakkan generator listrik. Jadi Central Electrich yang berada di pinggiran Batang Lunto adalah jantung dari kota Kolonial tersebut.[354]

Diatas tapak bangunan Central Electrich, sejak tahun 1952 hingga sekarang berdiri bangunan Mesjid Nurul Islam kota Sawahlunto. Sementara bekas menara saluran udara dan asap sental listrik dimanfaatkan sebagai menara mesjid. Bangunan menara yang berdiri kokoh dengan kontruksi beton itu sudah berumur lebih dari satu abad.

Bangunan tinggalan kolonial Belanda itu yang cukup tua di Sumatra Barat. Jejak konstruksi bangunan memperlihatkan sebuah perencanaan pembangunan yang terencana untuk pemanfaatan jangka lama. Batang Lunto dengan airnya telah menorehkan sejarahnya dalam hal kontribusinya memanaskan air pada ketel-ketel uap sentral listrik yang membutuhkan tenaga uap untuk menggerakkan generator listrik. Tidak tanggung-tanggung mesinnya berhasil ditingkatkan hingga 3.000 HP, dan mencapai daya 6.000 volt.

Setelah mesin ini selesai dikerjakan Belanda, maka masyarakat tidak boleh bepergian ke sekitar hutan-hutan di

[353] Struktur besi anti petir itu sudah dirusak oleh tukang-tuikang yang mengerjakan Mesjid Nurul Islam tahun 1952.

[354] M. Kasim, *Wawancara* , Sawahlunto 12 Mei 2004.

sekitar Kubang Sirakuak, Tanjung Sari dan sekitarnya yang dialiri oleh jalur-jalur listrik. Sebab kadang-kadang tegangannya begitu tinggi dan berbahaya bagi penduduk. Agar kelangsungan mesin itu berjalan lancar maka Belanda sealalu menjaga *Water Krach*-nya atau *kitchen* (dapur) tempat generator listrik diputar oleh air. *Kitchen* itu berupa tangki yang ditempatkan dalam lobang. Guna tangki itu untuk memanaskan air agar bisa memproduksi uap. Karena itu, air Batang Lunto dijaga agar tetap stabil. Listrik dialirkan dengan dua Jalur; ke *ommvarmer* dan lewat Tanjung Sari ke Tanah Lapang.

Sejak aktivitas penambanga dimulai, dalam waktu relatif singkat. Hingga rahun 1920-an wajah daerah Sawahlunto yang semula hutan, sawah dan ladang penduduk sekitar sudah didominasi infrastruktur, sarana parasaran dan fasilitas utama maupun pendukung pertambangan, kota dan warga Sawahlunto.

Batang Lunto yang mengalir ke hilir ibarat sebuah medium yang mengangkut "roh Sawahlunto" ke tempat lain, untuk tidak mengatakan habis manis sepah dibuang. Setidaknya, Sawahlunto sebagai kawasan kota besejarah, bagaimana orang masih bisa menjelajah, paling tidak beberapa hal yang masih disimpan di sebahagian memori masyarakat kota. Mereka yang pernah hidup tahun 1950-an bercerita mengenai bagaimana indah dan enaknya naik kereta api dari Sawahlunto ke Solok dan Padang, bahkan kalau mereka mau sampai ke Bukittinggi, Payakumbuh dan Limbanang, jauh di bahagian Utara Sumatera Barat.

Walaupun kota secara fisik tidak terlalu berubah, namun warga kota cukup gembira dengan fasilitas yang

ada. Selain uang banyak beredar karena banyaknya pekerja yang bermukim di Sawahlunto, kota juga terasa sejuk. Waktu itu kota Sawahlunto tidak terasa gersang walaupun pertambangan aktif. Warga kota dengan nyaman berjalan di tengah kesejukan. Kota penuh dengan pohon asam yang tumbuh berderetan sepanjang jalan Pasar Oesang. Anak-anak pergi ke pasar dengan bersuka ria sambil memetik asam-asam itu bila haus.

Sampai tahun 1950-an sarana prasarana dan fasilitas peninggalan kolonial Belanda relatif terjaga dan terawat dengan baik, seperti lapangan sepak bola di sisi Timur Pasar Oesang Lapangan ini menjadi satu-satunya lapangan terbuka, sekaligus tempat bermain para remaja. Bila hari besar nasional datang lapangan itu menjadi tempat upacara. Rumah Bola (sociëteit) yang terletak di tengah kota, dulunya adalah tempat menghabiskan rasa kebosanan dan tempat bersenang-senang bagi orang-orang Eropa di Sawahlunto. Setelah Indonesia merdeka gedung itu sudah berubah menjadi Gedung Pertemuan Masyarakat (GPM). Gedung ini menjadi tempat bagi masarakat mulai dari anak-anaj hingga dewasa juga menunjukkan bakatnya. Gedung itu selanjutnya ditempati Bank Mandiri hingga pertengahan tahun 2006. Mengingat sejarah sosial gedung itu, sejak tahun 2006 Pemerintah Kota Sawahlunto mengkonservasi bangunan tersebut. Hingga akhirnya tahun 2007 GPM di jadikan Gedung Pusat Kebudayaan (GPK) kota Sawahlunto.

Hampir seluruh bangunan yang ada di Pasar Oesang (Pasar Remaja) merupakan bangunan peninggalan kolonial Belanda, yang dibangun sejak awal sampai

pertengahan abad ke-20. Segregasi kota itu masih mengikuti pola zaman kolonial Belanda. Bangunan-bangunan itu dan komposisinya, dari dekade ke dekade tidak jauh berbeda. Meaki terdapat perubahan dan hadirnya bangunan baru, tapi tidak begitu mencolok atau mempengaruhi secara signifikan segresi dan ruang kota Kolonial. Kesaksian para warga Sawahlunto menyatakan, hingga memasuki tahun 1980, pasar kota Sawahlunto belum jauh berubah dari zaman kolonial. Struktur bangunan pasar masih seperti dulu, bangunan kolonial Belanda. Barulah masa-masa berikutnya hadir bangunan pasar bertingkat dengan atap gonjong dan terkahir mengadopsi arsitektur bangunan sekitar kawasan pasar yang bergaya *indish*.

Tidak terjadinya perubahan segresi ruang kota secara ekstrim tentu berhubungan dengan fungsi kota yang hanya sebagai kota tambang. Dimasa lalu pasar melayani kebutuhan-kebutuhan buruh dan perkerja. Orang-orang luar yang datang ke Sawahlunto seperti hanya singgah, setelah itu pergi. Orang-orang asli berada di nagari-nagari asli yang berada di seluruh sisi kota. Karena itu pengurangan penduduk Sawahlunto setelah kemerdekaan adalah suatu yang wajar. Penurunan prospek produksi sekaligus menurunkan kwantitas penduduk.

Di sisi lain, sebelum pemekaran wilayah tahun 1990, Kota Sawahlunto lebih sukar dikembangkan dalam penambahan bangunan karena arealnya berada dalam tempat yang kecil menyerupai 'kuali'. Dulu, orang sering menyebutnya sebagai 'kota kuali', sebuah tempat yang berada dalam sebuah lembah. Bangunan-bangunan yang

agak baru mendesak ke lereng-lereng perbukitan sekeliling lembah itu. Maka selain bangunan lama yang berada di sekitar pasar, maka keunikan rumah di Sawahlunto adalah jalannya mendaki dan menurun.

Walaupun kota itu terlalu kecil, tetapi bagi banyak warga, dan orang yang pernah menghabiskan waktunya di Sawahlunto, penuh dengan kenangan. Seorang putra Sawahlunto akan mengenang Batang Lunto sebagai tempat pemandian sampai tahun 1950-an. Bagi anak-anak Sawahlunto Batang Lunto akan menjadi bahagian sosialisasi keberanian sebelum mereka besar.

Tetapi perubahan Batang Lunto sebagai "roh" dari gerak Sawahlunto tentu mengecewakan sebahagian orang yang pernah menikamati masa lalu mereka di sana. Sebagai kota yang dulu pernah dihuni banyak pekerja asing dan migran pribumi/lokal, kota kapitalis yang pernah dinilai dengan dolar itu sangat menyenangkan. Namun semua itu sudah berlalu. Batang Lunto mulai kering, pembangkit listrik sudah tidak berfungsi dan kini di atasnya berdiri Mesjid Nurul Islam. Kereta api pun sudah berhenti beroperasi setelah kemunduran perusahaan tambang PT BA-UPO tidak lagi menambang secara besar-besaran. Kini tak ada lagi kereta api pengangkut batu bara yang akan lewat.

Tahun 1970-an, di bawah Walikota Shaimoery WS, seiring dengan perubahan politik dan pembangunan nasional, Sawahlunto berusaha dibangun kembali setelah masa krisis yang panjang. Kegiatan kegiatan ekonomi digerakkan dengan memberikan berbagai fasilitas, seperti kredit, mendorong berdirinya koperasi serta mengadakan

penerbitan-penerbitan untuk menjalin komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.

Selama Orde Baru, seiring dengan ideologi dan pembangunan yang berkembang, Sawahlunto sudah berusaha membangun. Pada awal Orde Baru sarana dan prasarana seperti; jembatan, sekolah, kantor-kantor, perbaikan pasar, lingkungan, kesehatan dan sebagainya sudah diprioritaskan. Pada awal Orde Baru, juga pada masa selanjutnya, tampaknya partisipasi masyarakat memegang peran yang sangat penting. Bahkan secara material tingkat partisipasi masyarakat beriringan dengan dana pembangunan yang diberikan pemerintah. Ini menunjukkan bahwa masyarakat walaupun berada dalam komposisi yang pluralis, potensi masyarakatnya bisa disatupadukan untuk kemajuan.

Sejak dimulainya genderang reformasi tahun 1998, yang dimulai dengan krisis ekonomi di tingkat regional Asia Tenggara, maka masyarakat di seluruh Sawahlunto juga merasakannya. Kepahitan ekonomi untuk biaya kesehatan, pendidikan, bahkan terasa sulitnya memenuhi bahan makanan pokok. Sementara di sisi lain, seiring dengan gelombang arus globalisasi dan dimulainya keterbukaan di segala bidang, masyarakat merasakan kebutuhan yang kian banyak. Rayuan kebutuhan sekunder bahkan tertier yang menyerbu ke kampung-kampung, cukup mendorong masyarakat untuk berpikir emosional dan praktis. Secara arif tentu dapat dipahami, walaupun tidak benar, bahwa demonstrasi, anarkisme dan penggalian batu bara oleh rakyat, berada dalam permasalahan yang diuraikan di atas. Bagaimanapun tantangan pembangunan

ke depan adalah meningkatkan kesejahteraan dan kedamaian di seluruh Kota Sawahlunto. Bagaimanapun, kota Sawahlunto yang historis ini memang memahami filsafah dan kenangan yang mengendap di Batang Lunto itu sendiri, airnya tenang, sejuk dan pasti mengalir ke hilir, mengantar warga Lunto ke kemajuan.

Peralihan tatanan regional dan posisi batu bara dalam perekonomian tentu juga membawa konsekuensi terhadap pandangan masyarakat dan paradigma pembangun. Sejak tahun 2001 kota Sawahlunto berkomitmen membangun kota dalam visi dan misi baru mewujudkan *Sawahlunto* sebagai *Kota Wisata Tambang Berbudaya*. Perubahan visi dan misi sudah semestinya diiringi dengan pola pemikiran, sikap dan tindakan. Sebab setiap perubahan, walaupun tidak harus berlangsung cepat tetapi mesti mempunyai kejelasan dan keyakinan, seperti Batang Lunto yang mengalir ke hilir. Kesadaran, komitmen dan militansi untuk mewujudkan visi yang sudah ditetapkan harus dengan menggerakkan seluruh sektor pembangunan secara holistik atau menyeluruh. Karena itu, kepemimpinan kota harus mempunyai satu kesatuan pandangan, setiap lembaga mesti mempunyai gerak yang seirama dan searus. Apapun lembaga, baik ekonomi, politik, sosial, budaya, tata ruang dan lain-lainnya harus menopang visi kota. Tugas *top leader* (walikota) tentu menggerakan seluruh elemen, bak lokomotif kereta api, ia yang bertugas menggerakkan rangkaian gerbong ke suatu tempat. Bila lokomotif atau diantara gerbongnya keluar dari lintasan rel, dapat dipastikan perjalanan terganggu.

Sejak visi dan misi baru kota itu, sudah 15 tahun pula lamanya waktu dilalui. Karakter daerah dengan kehidupan sosial dalam nafas udara pertambangan selama lebih dari satu abad, terus da sedang dalam proses menjadi kota wisata yang sesungguhnya sebagaimana potensi dan cita-cita yang konstruksi. Pemikiran-pemikiran dari pemimpin dimasa lalu, kemudian diformulasikan dan dihimpun sebagai konsep-konsep pembangunan kota wisata dimasa Walikota Drs. Subari Sukardi dan dibaca, diterjemahkan lebih lanjut serta dikembangkan dengan inovasi-inovasinya hingga diwujudkan selama dua periode kepemimpinan Walikota Ir. Amran Nur.

Ikhtisar program-program dan kegiatan-kegitan yang tersusun dalam rumusan-rumusan, agenda-agenda masa Walikota Amran Nur satu persatu diwujudkan. Memulai dari sebuah yang tidak begitu populer dengan aksi konservasi bekas bangunan Dapur Umum (Keuken) dan Stasiun Kereta Api yang kemudian dijadikan tempat penyelenggaraan permuseuman. Sebuah letupan dari energi warisan (heritage) cukup membangun. Penghujung tahun 2005, tepat tanggal 17 Desember dua museum sekaligus di resmikan dan dibuka untuk umum oleh Wakil Presiden RI M. Jusuf Kalla.

Tahun-tahun berikutnya berbagai daya tarik obyek dan wahana wisata, atraksi dan event dilangsungkan. Mengembangkan wisata yang lain dari daerah lain menjadi spirit yang menjadikan Sawahlunto role model dalam beberapa pengembangan wisata. Daya tarik obyek wisata modern, tentulah dari satu tempat ke tempat lain bisa diadopsi bahkan berkompetisi dalam banyak sisi baik

modal, ukuran, jumlah, pengelolaan dan kombinasi-kombinasi serta inovasi-inovasi dalam sebuah pembangunan dan pengembangan.

Wisata tambang, citra itu tentu masih milik Sawahlunto. Daya tarik dan wahana modern dapat ditiru dan diadopsi dengan mudah dan cepat. Bagaimana dengan sejarah, warisan dan landskap kota kolonial dengan geografis dan topografi yang unik disebuah lembah yang relatif sempit, dibelah oleh dua sungai yang akhirnya menyatu pula dilembah itu. Bukankah sejarah kota Sawahlunto telah berproses sejak hampir satu setengah abad, dimulai dari penemuan yang meyakinkan de Greve akan kandungan 200 juta ton batu bara yang tersebar di daerah Sawahlunto.

Kekayaan yang pada akhirnya menipis, dan akan habis. Sumber daya tak terbarukan itu, meski sempat mencemaskan Sawahlunto menjadi 'kota mati' pasca tambang. Kekayaan lain Sawahlunto nyaris belum tergali selama Sawahlunto bertumpu pada ekonomi pertambangan batu bara. Alam Sawahlunto yang indah, masyarakat multi etnik-kultur, kota kolonial sebagai warisan tambang dengan segala aspek didalamnya. Inilah kekayaan yang bila digali tidak akan habis-habisnya dan juteru semakin bernilai.

Kesadaran itu pula sepertinya dari waktu ke waktu yang tumbuh dan dibangun di kota Sawahlunto. pengelolaan warisan semakin tampak dengan apresiasi pemerintah dari daerah hingga pusat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Arsip-Arsip

Algemen Verslag Van het Onderwijs in Nederlansch-oostindie over 1923 en 1924. Batavia : Landsdrukkerij weltervreden, 1926

Jaaboek Van Mijnwezen In Nederlandsch Oast Indie, sumatra Westkust. No. 43 Th. 1913 / 1914.

Jaaboek Van Mijnwezen In Nederlandsch Oast Indie, sumatra Westkust. No. 43 Th. 1913 / 1914.

Jarboek Van het Mijnwezen in Nederlandsch oost- Indie, Sumatra's- Westkust. Amsterdam : C.F. Stemler, 1875-1927.

Jaarboek van het Mijnwezen in Nederlandsch Oost Indie 1986, Sumatra`s Westkust Verslag Np. 1. (Amsterdam: C.F. Stemler, 1887)

Jaarboek van Mijzwezen 1900-1945, Verslag der Exploitatie van den Staatsspoorweg ter Sumatra's Westkust en van de Ombilin-Kolenvelden, Kolonial Verslag, Indische Gids dan Indische Mercuur

"Mijbrand in de Ombilinmijnen, dalam *de Inqenieur,* Januari 1929

Ontginning de Ombilin Kolenden en Spoorwegaanleg op Sumatra West Kust. Verslag Indische Genootschp. (Batavia: S`Gravenhage G. Kolff & Co., 1884

Rapport Over de aanleg van een Spoorwegen Verbinding van den Ombilin Kolenvelden op Sumatra met de Ind. Zee. (Batavia: S-Gravenhage G. Kolff & Co., 1876)

Rapport eener Inspectiereis naar de Ombilin-Kolenmijnen in , 1904

Rapport Eener Inspectiereis naar de Ombilin – Kolenvelden in 1934. (Batavia: Landsdrukerij, 1935)

Roesli. *Pemandangan Ringkas Tentang Djentera dan Listrik*. Laporan Kepala Dewan Tambang Ombilin, Sawahlunto 14 Maret 1946. Arsip PT. BA-UPO.

Staatsblad van Nederlandsce-indie. No. 2. (Batavia: Landsdrukkerij, 1892.)

Staatsblad van Nederlandsce-indie. No. 214. (Batavia: Landsdrukkerij, 1899)

Staatsblad van Nederlandsce-indie. No. 61. (Batavia: Landsdrukkerij, 1901)

Verslag der Exploitatie van den Staatsspoorweg ter Sumatra`s Westkust en van de Ombilin – Kolenvelden, 1904. (Batavia: Landsdrukkerij, 1905)

Verslag der Exploitatie van den Staatsspoorweg ter Sumatra`s Westkust en van de Ombilin Kolenvelden over 1895. (Batavia: Landsdrukkerij, 1896)

Verslag der Exploitatie van den Staatsspoorweg ter Sumatra`s Westkust en van de Ombilin

Kolenvelden over 1895. (Batavia: Landsdrukkerij, 1896)

Verslaq der Exploitatie van den Staatsspoorweq ter Sumatra's Westkust en van de Ombilin Kolenvelden Over 1896. (Batavia: Lansdrukkerij, 1897)

Verslag der Exploitatie van den Staatsspoorweg ter Sumatra`s Westkust en van de Ombilin – Kolenvelden over 1899. (Batavia: Landsdrukkerij, 1900)

Verslag der Exploitatir van den Staatsspoorweg ter Sumatra's Westkust en van de Ombilin-kolenvelden over 1897. (Batavia: Landsrukerij, 1898-1927)

Verslag der Exploitatie van den Staatsspoorweg ter Sumatra`s Westkust en van de Ombilin Kolenvelden over 1893. (Batavia: Landsdrukkerij, 1904),

Verslag der Exploitatie van den Staatsspoorweg ter Sumatra`s Westkust en van de Ombilin – Kolenvelden over 1907. (Batavia: Landsdrukkerij, 1908)

Verslag Van den Staatsspoorweq Sumatra's Westkust en van de Ombilin mijnen over 1909. (Batavia: Lansdrukkerij, 1910)

Verslag der Exploitatie van den staatsspoorweq ter Sumatra Westkust en van de Ombilin Kolenvelden Over 1912. (Batavia: Lansdrukkerij, 1913)

Verslag der Exploitatie van den Staatsspoorweq ter Sumatra's Westkust en van de Ombilin Kolenvelden Over 1914. (Batavia: Lansdrukkerij, 1915)

Verslag der Exploitatie van den Staatsspoorweq ter Sumatra Westkust en van de Ombilin Kolenvelden Over 1919. (Batavia: Lansdrukkerij, 1920)

Verslag der Exploitatie van den Staatsspoorweq ter Sumatra's Westkust en de Ombilin mijnen over 1925. (Batavia: Lansdrukkerij, 1926)

Verslaq der Exploitatie van den Staatsspoorweq ter Sumatra Westkust en van de Ombilin Kolenvelden Over 1926. (Batavia: Lansdrukkerij, 1927)

B. Majalah dan Surat Kabar

Majalah *De Ingenieur*

Majalah *Prisma*

Majalah *Tempo*

Majalah *Forum*

Surat Kabar *Haluan*

Surat Kabar *Kompas*

Surat Kabar *Mimbar Minang*

Surat Kabar *Panas*

Surat Kabar *Pertimbangan*

Surat Kabar *Republika*

Surat Kabar *Soeara Tambang*

Surat Kabar *Singgalang*

Surat Kabar *Waspada*

C. Artikel

Beckhoven, J. van, Een Reisje van Padang Naar de Ombilien-Kolenvelden. (Den Haag: Martinus Nijhoff, 1906).

H.J Benda and R.T. Mcvey, "Communist Uprisinghs, 1926-1927 dalam, Chr. L.M. Penders (Ed.), *Indonesia Selected Dokuments on Colonialism and Nationalisme 1830-1942.* (Brisbane: University of queensland press, 1977)

Besseling, O.F., Iets over de "verboden Graden" bij Huweelijken in de Padangsche Bovenlanden, dalam, Tijdschrift Binnenlandsch Bestuur. **(**Batavia: G. Kolff & Co., 1904)

Damste, "Als Jong Controleur in Sijunjung", dalam , Haagsc Maandblad, Maret 1928.

De Eerte Oktober 1892 in Emmahaven en te Padang, dalam, Tijdschrift Binnenlandsch Bestuur. (Batavia: S-Gravevhage G. Kolff & Co., 1893).

De Exploitatie van de Ombilien-steenkolenvelden, dalam, De Indische Gids I. (Amsterdam: J.H. de Bussy, 1884).

De Eeploitatie der Ombilinkolen, dalam, De Indische Gids-29, II. (Amsterdam: J.H. de Bussy, 1907).

Diest, P.H. Nota Over den Stand der Concessieaanvregetot Ontginnig van Kolen uit het Ombilinveld en Aanleg Van een Spoorweg van daar naaar Padang. Den Haag, September 1872.

Easton, N.W. Mijnbrand in de Ombilimijnen, dalam, De Mijneingenieur, Bandung, No. 1, Januari 1929

Exploitatie en Afvoer ven Ombilinkolen, dalam, De Indische Gilds I. (Amsterdam: J. H. de Bussy, 1906).

G.h. Nypels, Dwangerbeiders of contrackoelies als wekvolk in de Ombilinmijnen, dalam. De Indische Gids. (Amsterdam: J.H. de Bussy, 1925).

Graff S. De en Stibe D.G., Encyclopaedie van Nederlandsch-Indie. (Leiden: S-Gravenhage Martius Nijhoff, 1918).

Greve, van W.H. Het Ombilin Kolenveld in Padangsche Bovenlanden en het Transport systeem ter Sumatra Westkust. (Leiden: Martinus Nijhoff, 1871).

Het Ombilin-kolenveld in de Padangsche Bovenlanden en het Transportstelsel op Sumatra's Westkust. (Batavia Landsdrukkerij, 1907).

Ijzerman, J. W. "Verslag Betrefende Midden Sumatra`s", dalam, Tijdschrift Aardrijkskunding Genootschap. (Leiden : E. J. Briil, 1892

Hoving, P. ,De " Rentabiliteit van Ombilin-mijnen", dalam, De Ingeniur, 12 Maret ,1928

Kelling, M. A. J., " Het Stenkolenvragstuk voor Nederlansch –Indie", dalam, Koloniale Studien, III, 1918.

Kesteren, C.E. van, " Emigratie van Koeli's te Penang en Emigratie van daar naar Sumatra Enz ", dalam, De Indische Gids, 1889.

Lever, H., " De Houtvoorziening der Ombilinmijnen te Sawah Lunto", dalam, Tectona, 14, 1921.

Lier, R.J. van, De Ombilin-mijnen, dalam, De Ingenierur, No. 51, 1927.

Mollema, J.C., De Ontwikkeling van het eiland Billliton en van de Billito Matschapij. (Amsterdam: S'Gravenhage Martinus Niijhoff, 1922.

Nypels, G.H. "Dwangerbeiders of Contractkoelies als Werkvolk in de Ombilinjnen", dalam. De Indische Gids. (Amsterdam: J.H. de Bussy, 1925)

Onghokham, "Analisa Kekuatan Politik Indonesia", dalam Prisma. (Jakarta: LP3ES, 1985).

Sandick, R.A., van, "Het Leatste Hoodstuk van de Ombilien-questie", dalam, De Indische Gids. (Amsterdam: J.H. Bussy, 1892).

Sandick, R.A. van "het Laatste Hoofstuk Van de Ombilin Questie", dalam De Indische Gids. (Amsterdam: J.H. de Bussy, 1923)

Sprenger, E.Y.K. "De Eerste Spoorweg op Sumatra`s Westkust", dalam, Tijdschrift voor Nederlands Indie Bg. I & II. (Batavia: Groningen, 1887

Veth, D.D "De Zwevende Kabelspoorweg en zijn Toepassing bij de Ontginning der Ombilinkolen", dalam, Tijdschrif voor Nederlands Indie. No. 3. Bg. I. (Batavia: Groningen, 1881).

Wally, G.H. "De Ombilin Steenkolenmijnen, dalam *De Inqenieur in Nederlandsch-Indie.* Oktober 1919.

Wally, G.J., De Oembilin Steenkolenmijnen, dalam, De Ingenieur in Nederlandsch-Indie. Nomor 10, Oktober, 1939.

Weber, Max. " Apakah yang Disebut Kota", Terjemahan Darsiti Soeratman, dalam Sartono Kartodirdjo (ed.), *Masyarakat Kuno dan Kelompok-Kelompok Sosial* (Jakarta: Bhratara, 1977)

Taufik Abdullah, "Disekitar Pencarian dan Pencarian Sejarah Lisan", dalam Lembaran Sejarah Lisan Nomor 2 Oktober 1982.

Verbeek, R.D.M. "Over de Ouderdom der Steenkolen van het Ombilin-Kolenveld in de Padansche Bovenlanden en van de Sedimentaire Vormingen van Sumatra in het Elgemen, dalam, *Jaarboek van het Mijwezen in Nederlandsc Oost Indie*. Batavia:

Landsdrukkerji- Wetervreden, 1875, No. 4 Bg. I , hal. 135-143.

Van Lier, R. J. Ir., Onze Koloniale Mijnbouw Populaire Handboekjes Over Nederl.-Indische Mijnbouwproducten, Onder Redactie Van Dr. J. Dekker: III De Steenkolenindustrie., (Haarlem: H. D. Tjeenk Willink & Zoon, 1917).

D. Buku-buku

Abdul Muluk Nasition, Pemberontakan Rakyat Silungkang Sumatera Barat 1926-1927. (Jakarta: Mutiara, 1981).

A.A Navis, Alam Terkembang Jadi Guru. (Jakarta: PT Grafiti press,1986)

, (ed.) Dialektika Minangkabau. (Padang: PT Singgalang Press, 1988)

Adeng Sunardi, 100 tahun Tambang Baru Bara Ombilin. Sawah Lunto: (Tanpa Penerbit, 1991).

Ala AB. (ed), Kemiskinan dan Strategi Memerangi Kemiskinan. (Yogyakarta: Liberty, 1996).

Alfian (ed), Kemiskinan Struktural. (Jakarta: YISS, 1986)

_____, Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992).

_____, dan Nazaruddin Syamsuddin (ed), Masa Depan Kehidupan Politik Indonesia. (Jakarta: Rajawali dan AIPI, 1988).

Amran Rusli, *Sumatera Barat Plakat Panjang*. (Jakarta: PT Sinar Harapan, 1981).

Amir Syarifuddin, Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau. (Jakarta : Gunung Agung, 1984)

Ankersmit, F.A., Refleksi Tentang Sejarah: Pendapat-pendapat Modern Tentang Filsafat Sejarah. (Jakarta: Gramedia, 1985).

Anthony M. Drum, Introduction of The Body Polities Prenticee. (Hall, Jew Jersew, 1989).

Arbi Sanit, Pergolakan Melakukan Kekuasaan: Gerakan Mahasiswa Antara Aksi Moral dan Politik. (Yogyakarta: INSST Press Bekerjasama dengan Pustaka Pelajar, 1999).

Arif. S, UUPA dan Hukum Agraria dan HuKum Tanah dan Beberapa Masalah Hutan Agraria, Hukum Tanah. (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1960).

H.J Benda and R.T. Mcvey, "communist Uprisinghs, 1926-1927 dalam, Chr. L.M. Penders (Ed.), *Indonesia Selected Dokuments on Colonialism and Nationalisme 1830-1942*. (Brisbane: University of queensland press, 1977).

Berkhofer, Jr., Robert F., A Behaviopral Approach to Historical Analysis. New York : The free Press, 1971.

Boeke, J.H., Pra Kapitalisme di Asia. (Jakarta: PT Sinar Harapan, 1983).

Booth, Anne (eds), Sejarah Ekonomi Indonesia. (Jakarta: LP3ES, 1988).

BPS, Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan di Indonesia 1976-1990. (Jakarta : BPS, 1992).

Bell, David, V.J., Resistence and Revolution. (Boston: Hontoun Miflin Company, 1973).

Breman J., Penguasaan Tanah dan Tenaga Kerja. (Jakarta: LP3ES, 1986).

_____, Menjinakkan Sang Kuli : Politik Kolonial pada Awal Abad ke-20. (Jakarta: Grafiti,1997).

Bree, L. de Nederlandsch-Indie in de Twintigste Eeuw in 1900 – 1913. (Batavia: G. Kolff & Co. 1916).

Brinton, Crene, Anatomi Revolusi. (Jakarta: Bharatara, 1984).

Burke, Peter, History and social Theory. (Cambridge: Polity Press, 1992).

Chambers, R. Pembangunan Desa: Dimulai Dari Belakang. (Jakarta: LPES, 1987).

Dahl, Robert A., Analisa Politik Modern. (Jakarta: Dewaruci Press, 1980).

Deliar Noer, Mohammad Hatta, Biografi Politik. (Jakarta: LP3ES, 1990).

Debray, R., Strategy for Revolution. (New York: Monthly Review Press, 1969).

Departemen Transmigrasi, dan Leknas LIPI, Resume Beberapa Hasil Penelitian Transmigrasi di Indonesia 1970-1978. (Jakarta: LIPI, 1979).

Dobbin, Christine, Kebangkitan Islam Dalam Ekonomi Petani yang Sedang Berubah, Sumatera Tengah 1784-1847. (Jakarta: INIS, 1992).

Erwiza, "Miners, Managers and the State: A Socio-Political History of the Ombilin Coal-Mines, West Sumatra 1892-1996". Phd. Disertation. University Amsterdam 1999.

Feith, Herbert, Pemilu 1955 di Indonesia. Jakarta : Kepustakaan Populer Gramedia, 1999.

Franz von Benda-Beckman, Keebet von Benda Beckman and Hands Marks (eds), Coping with Insecurity, An "Underall" Perspective on Social Security in the Third World. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2000).

Foster. George M., Traditional Societies and Technological Change. (New York: Harper & Row Publishers. 197)3.

Geertz. C., Involusi Pertanian: Proses Perubahan Ekologi di Indonesia di Indonesia. (Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1976).

Geertz. C., Dinamika Sosial Sebuah Kota di Jawa. (Jakarta: Graffiti Press, 1985).

Gilbert, Felix (eds), Historical Studies Today. New York W.W. Norton, 1972.

Gotschalk. L., Mengerti Sejarah. (Jakarta: UI., 1975).

Greve, van. W.H. Het Ombilin Kolenveld in padangsche Bovenlanden en het Transport Systeem ter Sumatra Weskust. (Den haag: Martinus Nijhoff, 1871).

Guinness, Patrick, Harmony and Hierarchy in a Javanese Kampung. (Singapore: Univ. Press Pte Ltd. 1986).

Gurr, Robert,Why Men Rebel. (Princeton: Princeton University Press, 1971).

Hamka, *Ayahku.* (Djakarta: Penerbit Widjaya, 1958).

Houben, V.J.H. "Profit versus Ethics Goverment Erterprises in the Late Colonial State", dalam Robert Cribb, *The Late Colonial State in Indonesia : Political and Economic Foundations of the Netherlands Indies 1880-1942*. (Leiden : KITLV, 1994).

Hungtinton, Samuel. P dan Nelson, Joan. Partisipasi Politik di Negara Berkembang. (Jakarta: Rineka Cipta, 1986).

Kahim, George Mc. Turnan Nationalisme dan Revolution in Indonesia. Itacha New York : Cornell Univerisity Press, 1952.

Kahn, Joel S. Constituting the Minangkabau, Peasants, Culture and Modernity in Colonial Indonesia. (London: A University College London, 1988).

Koentjaraningrat, Metode Penelitian Sosial. (Jakarta: PT Gramedia, 1981).

Kuntowidjojo., Metodologi Sejarah. (Yogyakarta: Tiara Wacana. 1993).

_____., Radikalisme Petani. Bentang Press Intervisi Utama, `1993.

_____., Dinamika Sejarah Ummat Islam di Indonesia. (Yogyakarta: Shalahuddin Press, 1985).

Legg, Keith R, Tuan, Hamba dan Politisi. (Jakarta: Sinar Harapan, 1983).

_____., Perilaku Kekerasan Kolektif : Kondisi dan Pemicu. Yogyakarta: Pusat Penelitian Pembangunan Pedesaan dan Kawasan UGM Yogyakarta, 1997.

Mansour Fakih, Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi. (Yogyakarta: Insist, 2001).

McGee, T.G. *The Southeast Asian City: A Sosial Geography of the Primate Cities of Southeast Asia* (London: G. Bell and Sons, 1967.

Moleong L., Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosda, 1993).

Muhamad Said, Koelie Kontrak Tempo Doeloe: Diantara Derita dan Kemarahannya. Medan, Waspada, 1977).

Nas, P.J.M. (eds.), *The Indonesian City* (Dordrecht: Ffforis Publications, 1986).

Okira Oki, Social Change in West Sumatra. Village 1908 – 1945. (Camberra: Thesis pada Australian National University, 1977).

Olsen, Martin E The Proces of Social Organization. (New Delhi: Oxford University Press, 1977).

P.M. Laksono (eds), Potret Perjalanan Pengorganisasian Masyarakat., Yayasan Kehati, 2002.

Karl J. Pelzer, Toean Keboen dan Petani, Politik Kolonial dan Perjuangan Agraria di Sumatera Timur 1863 – 1947. (Jakarta: Sinar Harapan, 1985).

R.Yando Zakaria, Abieh Tandeh: Masyarakat Desa Dibawah Rezim Orde Baru. (Jakarta: LSAM, 2000).

Radchlife, A.R. Brown, Structure and Fungtion in Primitif Society. (New York: The Free Press, 1952).

Rusli Amran, Kota Padang Riwayatmu Dulu. (Jakarta: PT Sinar Harapan, 1987).

, Sumatera Barat Hingga Plakat Panjang. (Jakarta: PT Sinar Harapan, 1981).

Sartono Kartodirodjo, Elite Dalam Perspektif Sejarah. (Jakarta: LP3ES, 1983).

_____, Pendekatan Ilmu-ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah. (Jakarta: PT Gramedia, 1992).

_____, Pemberontakan Petani di Banten 1888. (Jakarta: Pustaka Jaya, 1984).

Sartono Kartodirdjo, Ratu Adil. (Jakarta: Sinar Harapan, 1987).

Sahrir, S. *Sosialisme dan Komunisme*. (Djakarta: Djambatan, 1967).

Schrieke, Indonesian Sociologis Studies. (Bandung: W. van Hoeve, LTD, 1955).

Schoorl, J.W. *Modernisasi: Pengantar Sosiologi Negara-negara Berkembang*, Penterjemah R.G. Ssoekadjo (Jakarta: Gramedia, 1984).

Scott. James. Moral Ekonomi Petani: Pergolakan dan Subsistensi di Asia Tenggara. (Jakarta: LP3ES, 1985).

_____, Perlawanan Kaum Tani. (Jakarta: LP3ES, 1995).

_____, Senjatanya Orang-orang Yang Kalah. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2000).

Singh, Rejendra Social Movements: Old and New. (New Delhi: Sage Publications).

Sjahrir (ed.). Pembangunan Berdimensi Kerakyatan. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1988).

Sjoberg, Gideon The Pre-industri City: Past and Present (New York: The Free Press, 1966).

S.Soetomo, Kekalahan Manusia Petani: Dimensi Manusia Dalam Pembangunan Pertanian. (Yogyakarta: Kanisius, 1997).

Sudikno Mertokusumo, Perundang-undangan Agraria Indonesia. (Yogyakarta: Liberty, 1987).

Taufik Abdullah, Islam dan Masyarakat. (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987).

, Agama, Etos Kerja, dan Perkembangan Ekonomi. (Jakarta: LP3ES, 1982).

Thee Kian Wie, Pemerataan, Kemiskinan, Ketimpangan. (Jakarta: Sinar Harapan, 198).

T. Ibrahim Alfian, Perang di Jalan Allah. (Jakarta: Sinar Harapan, 1987).

Tsuyoyoshi Kato, "Rantau Pariaman: Dunia Saudagar Pesisir Minangkabau Abad XIX, dalam, Akira Nagazumi (ed.), *Indonesia dalam Kajian Sarjana Jepang.* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1986).

Wahab Wafi, Ali Abdul Ibnu Khaldun: Riwayat dan Karyanya. (Jakarta: Grafiti Press, 1985).

Wiltens, H.W.A. Aanleg van Spoorwegen en Kolenmijn Ontginning: Consessie Aanvrag. (Batavia: G. Kolff & Co, 1889).

Weber, Max, Etika Protestan dan Spirit Kapitalisme. (Jakarta: Pustaka Pramathea, 1999).

Whertheim, W.F Gelombang Pasang Emansipasi. (Jakarta: ISAI).

Yahya A. Muhaimin, Bisnis dan Politik: Kebijaksanaan Ekonomi Indonesia 1950-1980. (Jakarta: LP3ES, 1991).

Zaiyardam Zubir, dalam Radikalisme Kaum Pinggiran: Studi Tentang Issue, Strategi dan Dampak Gerakan. (Yogyakarta: Insist Press, Desember 2002).

Manuskrip

Mestika Zed, "Melayu Kopi Daun: Eksploitasi Kolonial Dalam Sistem Tanam Paksa di Minangkabau, Sumatera Barat", Thesis S-2. (Jakarta: Universitas Indonesia, 1983).

Sutjipto Tjiptoatmioyo, " Kota-kota Pantai di sekitar Selat Madura (abad XVII sampai medio Abad XIX)" *Disertasi Doktor* (Yogyakarta: Fakultas Pascasarjana Universitas Gajah Mada, 1983).

GLOSARIUM

Afdeeling	:	Pemerintahan setingkat kabupaten pada masa kolonial Belanda. Sawahlunto pada masa awalnya termasuk dalam Afdeeling dari Tanah datar, kemudian menjadi ibu kota Afdeeling tanah Datar, menggantikan Batusangkar.
Alam Minangkabau	:	Merupakan sebutan untuk wilayah geografis Minangkabau. Secara tradisional, wiayah Minangkabau terbagi dua yaitu luhak dan rautau. Luhak merupakan wilayah inti, yang terdiri atas tiga luhak yaitu Luhak Tanah Datar, luihak Agam dan Luhak limo puluh koto. Wilayah rantau dibagi rantau daret dan rantau pesisir.
Batang	:	Nama lain dari sungai. Sungai Ombilin, sebagai wilayah yang dipenuhi Batubara misalnya disebut dengan Batang Ombilin. Sungai-sungai lain diantaranya batang Lunto dan batang Sampahan.
Bodi-Caniago	:	Nama salah satu suku yang terdapat didaerah

Minangkabau. Nama ini juga ungkapan dalam sistem pergantian elite yang orak demokrasi.

Buruh Bebas : Corak Buruh yang bekerja dengan sistem kontrak bebas dengan PT BO. Pada zaman kolonial Belanda, kelompok yang menjadi buruh bebas pada tambang batu bara yang berasal dari penduduk sekitar areal pertambangan seperti penduduk Talawi, Padang Sibusuk, Muaro Kalaban dan Padang Ganting. Sistem kontrak buruh bebas ini berdasarkan mingguan atau bulanan.

Buruh kontrak : sistem rekrutmen buruh yang berdasarkan di zaman kolonial Belanda. Sistem kontrak biasanya selama dua sampai tiga tahun. Nanmun, pihak perusahaan membuat jebakan lewat peminjamanuang, sehingga mereka bisa bekerja seumur hidup dan sampai anak turunannya. Pada awal pembukaan tambang buruh tambang ialah orang Cina. Dalam perkembangannya, buruh kontrak banyak yangf diambil dari pulau Jawa.

Buruh paksa : Masyarakat Minangkabau menyebut

		mereka dengan orang rantai, karena kaki mereka dirantai waktu bekerja. Buruh yang diambil dari penjara-penjara di Jawa, Bali, dan Sulawesi. Mereka ini merupakan narapidana yang dipaksa bekerja.
Cadiak Pandai	:	Salah satu kelompok elite yang terdapat dalam masyarakat di nagari Minangkabau. Cikal bakal elite ini lahir berdasarkan kemampuan intelektual di setiap nagari. Elite ini juga terbentuk berdasarkan pengalaman merantau, semakin lama dan semakin jauh rantaunya, maka semakin diakui keintelektualannya. Pengakuan terhadap kelompok ini tidak ada secara formal, akan tetapi masyarakat mengakuinya begitu saja.
Dimaa Air Disauk, disinan Rantiang dipatah	:	Pembukaan sebuah daerah hutan atau rimba untuk dijadikan taratak ataupun pemukiman baru oleh masyarakat.
Ekonomi kerakyatan	:	Sistem rekonomi yang berdasarkan pada penguatan ekonomi rakyat, (bukan kapital, yang berdasarkan penguatan modal). Sistem ekonomi ini menempatkan masyarakat

sebagai subjek dan sasaran utama dengan tujuan untuk meningkatakan taraf hidup masyarakat secara keseluruhan. Walikota Sawahlunto Amran Nur, menjadikan konsep ekonomi kerakyatan ini sebagai langkah ekonomi yang dijalankannya.

Gemeente : Nama lain dari kota. Sawahlunto menjadi Gemeente tahun 1918.

Gemeenteraad : Dewan kota, semacam DPRD sekarang ini, tetapi anggotanaya diangkat oleh pemerintah Kolonial Belanda.

Harato Pusako : harta yang didapatkan secara warisan yang diterima secara turun temurun dalam suatu kaum. Harta warisan ini biasanya tidak bisa diperjual-belikan. Secara hukum adat Minangkabau, harta warisan ini hanya boleh digadaikan.

Kaba : Cerita rakyat Minangkabau seperti Kaba Sabai nan Aluih dan kaba Cindua Mato.

Kitabullah : Istilah lain untuk menyebut Al qur'an, yang dijadikan sebagai sandi atau dasar dari adat Minangkabau. Dalam ungkapan populer disebut;

Adat basandi syara', syara' basandi Kitabullah.

Konsesi : Konsesi adalah proses untuk mendapat kan perizinan penambangan batu bara dari pemerintah kolonial Belanda. Masalah konsesi penambangan berkaitan dengan hukum kolonial Belanda. Penerapan hukum kolonial dalam proses perijinan penambangan batu bara Ombilin disebabkan Pemerintah kolonial Belanda merupakan pemegang kekuasaan di Minangabau pada waktu itu.

Koto : Cikal bakal lahirnya sebuah nagari. Biasanya pemukiman yang terletak dipingiran, sebelum terbentuknya nagari. Dalam ungkapan lain, koto juga nama salah satu suku di Minangkabau.

Koto-Piliang : Corak politik yang bersifat sistem feodal. Dalam corak ini, seorang penghulu yang diangkat haruslah "Karambia tumbuah di mato". Artinya, penghulu yang akan menggantikan haruslah kemenakan kandung dari penghulu yang

digantikan.

Mamak	:	Mamak merupakan kepala rumah tangga dalam masyaraakat Minangkabau. Jadi, sistem matriliniel yang dianut menempatkan saudara laki-klaki ibu aatau mamak itu semagai kelapa rumah tangga, bukan sanga bapak.
Manciguak Lunto, Onggoh Kubang, Mantiak Silungkang, Sijengkek Kolok	:	Ungkapan tentang mentalitas masyarakat beberapa nagari seperti Orang kubang yang bersifat cepat mengiyakan suatu pikiran, tapi susah merealisasikan. Mantiak Silungkang lebih bersifat ekonomis dan moderat, sedangkan Sijengkek Kolok bersifat banyak tingkah.
Matrilineal	:	Garis keturunan yang ditarik dari suku ibu. Sistem kekeluargaan yang mengikuti garis keturunan ibu. Pola ini menganut corak Mamak –ibu - anak.
Merantau	:	Tradisi untuk meninggalkan kampung halaman bagi setiap lakai-laki remaja dan dewasa Minangkabau. Tujuan pokok adalah untuk mencari penghidupan di tempat lain. Faktor utama menrantau adalah ekonomi, kemudian diikuti

		oleh pendidikan, pengalaman dan mencari kerja.
Nagari	:	Unit kesatuan wilayah, sosial dan politik dalam masyarakat pedesaan minangkabau. Di kota sawahlunto, terdapat beberapa nagari yaitu Silungkang, Kubang, Talawi, Sijntang, Kolok dan Kajai. Uniqnya, sistem perkotaan di Indonesia tidak mengenal nagari, akan tetapi lurah. Namun, untuk sawahlunto masih menggunakan corak tradisional ini.
Penghulu	:	Salah satu corak elite Elite tradisional di nagari. Elite ini diangkat yang berdasarkan keturunan. Penghulu merupakan seorang kepala adat dalam sukunya.
Penghulu Puncak	:	Penghulu yang tertinggi dalam suatu nagari. Penghulu pucuak ini terdapat dalam sistem Koto Piliang. Penghulu puncak diambil dari suku Piliang.
Pesisir	:	Wilayah pantai barat Sumatera bagian tengah. Pesisir ini merupakan salagh satu rantau tradisional bagi masyarakat daret.
Pusako Randah	:	Harta dari berasal dari hasil pencaharian seorang. Harta warisan

ini didapatkannya atas dasar usahanya sendiri, tanpa bantuan dari harta pusako tinggi.

Siliah Jariah : Tanah yanhg diberikan pada seseorang atau sekelompok orang untuk menggararapnya berdasarkan aturan adat. Aturan adat inin biasanya membayar pesta adat, dan ganti rugi pada elite penghulu.

Rumah Gadang : Rumah tradisional masyarakat Minangkabau dengan gonjong biasanya ganjil seperti 5, 7, 9 dan 11. Rumah ini biasanya didiami oleh satu keluarga besar dalam suatu kaum.

Tambang Rakyat : Tambang rakyat, tambang yang dilakaukan oleh rakyat ataupun kerjasama dengan pemilik modal dari luar. Ada banyak hal yang berlangsung sesungguhnya dalam proses tambang rakyat ini. Lebih dari dari l abad batu bara di Ombilin (jika kita ambil patokan 1891 sebagai awalnya), maka boleh dikatakan masyarakat secara langsung tidak pernah menikmati hasil kekayaannya itu. Dapat dikatakan bahwa selama ini pengusaha, penguasa dan rakyat melakukan

penjarahan terhadap kekayaan alam. Hanya saja ketiganya memiliki perbedan yang sangat besar. Pengusaha dan penguasa menjarah kekayaan alam, hutan ataupun tanah rakyat dilindungi oleh UU, yang mareka buat sendiri. Jadilah penjarahan mareka legal. Motivasi mereka pun berbeda, kalau pengusaha dan penguasa menjarah untuk menumpuk kekayaan, maka rakyat menjarah hanya untuk sekedar bertahan hidup. Hal itulah dilakukan oleh tambang rakyat, yang hanya sekedar untuk bertahan hidup. Apalagi proses penambangan rakyat itu berlangsung sejak krisis moneter melanda republik ini.

Tambang liar : Penambangan batubara dilakukan oleh masyarakat ataupun pengusaha yang menambang diatas tanah konsesi yang telah dimiliki TBO. Hal ini menyangkut permainan dari elite Sumbar yang mencoba bermain dengan batu bara. Dampak dari tambang illegal, yang dilegalkan ini tidak tanggung-tanggung. Salah satu dampak utama adalah hilangnya armada kereta api pengangkut batu

bara.

Tambang Tanpa Izin (PETI)	:	Tambang tanpa izin sebenarnya eufemisme dari penyebutan tambang liar. Penyebutan ini terutama diarahkan pada penambang-penambang liar, yang berasal dari masyarakat. Masyarakat ini terutama menambang di sekitar kampung-kampung mareka sendiri. Mereka yang selama ini tidak pernah menikmati batu bara, kemudian mengetahui di sekitar kampungnya ada batubara, maka mereka menambangnya.
Tanah Ulayat	:	Tanah suatu kaum yang terdapat disetiap nagari. Pada PT BO maupun PT BA-UPO, permasalahan tanah ulayat ini belum tuntas sistem penggantiannya.
Ulama	:	Elite dalam masyarakat yang berdasarkan kemampuan dan penguasaan dalam bidang agama Islam.

LAMPIRAN:

Gambar
Pelaksanaan Tour De Singkarak

Sumber: Dokumentasi Pribadi Edy Utama

Gambar
Acara Barongsai

Sumber: Dokumentasi Pribadi Edy Utama

Gambar
Acara Pesta Rakyat di Sawahlunto

Sumber: Dokumentasi Pribadi Edy Utama

Gambar
Masjid Silungkang Sawahlunto

Sumber : Koleksi Tropenmuseum.nl

Gambar
Penampilan Acara Kesenian Kuda Lumping

Sumber: Dokumentasi Pribadi Edy Utama

Gambar
Perkampungan Cina di Sawahlunto

Sumber : Koleksi Tropenmuseum.nl

Gambar
Kawan Pertambangan Batubara Sawahlunto

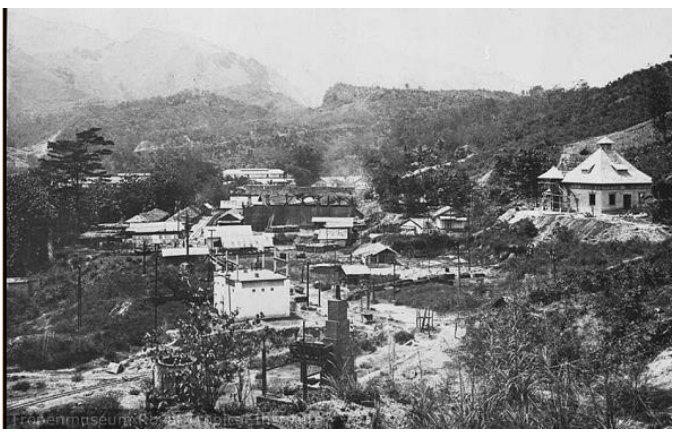

Sumber : Koleksi Tropenmuseum.nl